RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA 2023 -2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LANGSA
2022

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2023 – 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Daerah, bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
21. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
23. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
24. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429);
25. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 719).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut RPD Kota Langsa adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Langsa yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dan program Daerah untuk 4 (empat) tahun, terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA

Pasal 2

(1) RPD Kota Langsa merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-2024, RPD Provinsi Aceh 2023-2026, dan RPJP Kota Langsa 2007 - 2027.
(2) RPD Kota Langsa memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

(1) Sistematika RPD Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX PENUTUP

(2) Sistematika RPD Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

RPD Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:
a. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
b. pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota.

Pasal 5

Kepala Bappeda Kota Langsa sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPD Kota Langsa yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini, merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan Daerah sesuai dengan kebijakan umum dan program prioritas pembangunan Daerah setiap tahunnya.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kota Langsa.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebijakan perencanaan pembangunan Kota Langsa; dan
   b. pelaksanaan rencana pembangunan Kota Langsa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) RPD Kota Langsa dalam pelaksanaannya bila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Dokumen

(2) Dokumen perencanaan pembangunan Kota Langsa yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih berlaku sampai dengan tahun 2022.

(3) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka RPJM Kota Langsa Tahun 2017-2022 tetap menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2022.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun Kota Langsa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Langsa sebagai pelaksanaan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Langsa hasil Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2024 atau hasil Pemilihan Walikota/Wakil Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 11 April 2022 M
10 Ramadhan 1443 H

t.t. WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 11 April 2022 M
10 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 981

DAFTAR SINGKATAN

ADHB	:	Atas Dasar Harga Berlaku
AHH	:	Angka Harapan Hidup
ADHK	:	Atas Dasar Harga Konstan
AIDS	:	Acquired Immuno Deficiency Syndrome
AKAP	:	Angkutan Antar Kota Antar Provinsi
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKBa	:	Angka Kematian Balita
AKDP	:	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi
AKI	:	Angka Kematian Ibu
AKN	:	Angka Kematian Neonatal
AKHB	:	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
AMH	:	Angka Melek Huruf
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APE	:	Anugerah Parahita Ekapraya
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
API	:	Anugerah Pesona Indonesia
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
APtS	:	Angka Putus Sekolah
AL	:	Angka Kelulusan
AM	:	Angka Melanjutkan
ASFR	:	Angka Kelahiran Menurut Umur
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun
Ba	:	Bustanul Athfal
Balita	:	Bayi Lima Tahun
BAPPEDA	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBLR	:	Berat Badan Lahir Rendah
BKB	:	Bina Keluarga Balita
BKL	:	Bina Keluarga Lansia
BKPSDM	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BKR	:	Bina Keluarga Remaja
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPJS	:	Badan Pengelola Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan

BPKD	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRA	:	*Badan Reintegrasi Aceh*
BTA	:	Bakteri Tahan Asam
BTS	:	*Base Transceiver Station*
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CBD	:	*Central Business District*
Covid	:	*Corona Viruses Desease*
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DBD	:	Demam Berdarah Dengue
DBH	:	Dana Bagi Hasil
Diklat	:	Pendidikan dan Pelatihan
DID	:	Dana Insentif Daerah
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
EUA	:	Emergency Use Authorization
EPPD	:	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
EPPGBM	:	Elektronik – Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat
FAO	:	Food and Agriculture Organization
FKUB	:	Forum Kerukunan Umat Beragama
GAM	:	Gerakan Aceh Merdeka
GBHN	:	Garis – Garis Besar Haluan Negara
GK	:	Garis kemiskinan
Ha	:	Hektar
HB	:	Harga Berlaku
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGU	:	Hak Guna Usaha
HIV	:	*Human Immunodeficiency Virus*
HK	:	Harga Konstan
HLS	:	Harapan Lama Sekolah
HM	:	Hak Milik
HP	:	Hak Pakai
HP	:	*Handphone*
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
IB	:	Indeks Bayar

IDG	:	Indeks Pemberdayaan Gender
IDM	:	Indeks Desa Membangun
IDSD	:	Indeks daya saing daerah
IGR	:	Indeks Gini Ratio
IKD	:	Indikator Kinerja Daerah
IKM	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM	:	Industri Kecil Menengah
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IPG	:	Indeks Pembangunan Gender
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IT	:	Indeks Terima
K3	:	Ketertiban, Ketentraman, Keindahan
KB	:	Keluarga Berencana
KBKR	:	Kelompok Bimbingan Konseling Remaja
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEHATI	:	Keanekaragaman Hayati
KEK	:	Kekurangan Energi Kronik
Kemenristek	:	Kementrian Riset Dan Teknologi
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KM	:	Kilometer
KM^2	:	Kilometer Persegi
Kopalmas	:	Koperasi Palma Aceh Sejahtera
KOTAKU	:	Kota Tanpa Kumuh
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KTP el	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
LKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LKS	:	Lembaga Kesejahteraan Sosial
LK3	:	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
LLAJ	:	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LPP	:	Laju Pertumbuhan Penduduk
LPPD	:	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
M	:	Meter
3M	:	Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak
MA	:	Madrasah Aliyah
MAA	:	Majelis Adat Aceh
MI	:	Madrasah Ibtidayah
MKJP	:	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MM	:	Milimeter
MOU	:	Memorandum of understanding
MPD	:	Majelis Pendidikan Daerah

MPU	:	Majelis Permusyawaratan Ulama
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
Musrenbang	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Napol	:	Narapidana Politik
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NTP	:	Nilai Tukar Petani
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PARPOL	:	Partai Politik
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PD	:	Perangkat Daerah
PDRB	:	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
PERDA	:	Peraturan Daerah
PERKADA	:	Peraturan Kepala Daerah
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PHA	:	Program Pemenuhan Hak Anak
PILKADA	:	Pemilihan Kepala Wakil Kepala Daerah
PKK	:	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKLB	:	Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
PKT	:	Pusat Krisis Terpadu
PKSN	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
POLINDES	:	Poliklinik Desa
PON	:	Pekan Olahraga Nasional
POSYANDU	:	Pos Pelayanan Terpadu
PPAS	:	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPKBD	:	Pembantu Pembina KB Desa
PPKS	:	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
PPT	:	Pusat Pelayanan Terpadu
PPH	:	Pola Pangan Harapan
PSBB	:	Pembatasan Sosial Bersekala Besar
PSKS	:	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
PSM	:	Pekerja Sosial Masyarakat
PSU	:	Prasarana, Sarana dan Utilitas umum
PT	:	Perseroan Terbatas
PTP	:	Perseroan Terbatas Perkebunan
PUS	:	Pasangan Usia Subur

Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Puspaga	:	Pusat Pembelajaran Keluarga
Pustu	:	Puskesmas Pembantu
RA	:	*Raudhatul Athfal*
RAPBD	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renstra	:	Rencana Strategi
Renstra-PD	:	Rencana Strategis Perangkat Daerah
Renja	:	Rencana Kerja
Renja PD	:	Rencana Kerja Perangkat Daerah
RGG	:	Rumoh Gizi Gampong
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPD	:	Rencana Pembangunan Daerah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPPLH	:	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RLH	:	Rumah Layak Huni
RLS	:	Rata-rata Lama Sekolah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPLH	:	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RT	:	Rukun Tetangga
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SAKIP	:	*Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
SARA	:	*Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan*
SARS	:	*Severe Acute Respiratory Syndrome*
SD	:	Sekolah Dasar
SDA	:	Sumber Daya Air
SDGs	:	Sustainable Development Goals
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Setwan	:	Sekretariat Dewan
SILPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIPD	:	Sistem Imformasi Pemerintah Daerah
SIPN	:	Sistem Imformasi Persampahan Nasional
SIKM	:	Sentra Industri Kecil Menengah
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah

SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	:	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SPAM	:	Sistem Penyedia Air Minum
SPIP	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SSGI	:	Studi Status Gizi Indonesia
3 T	:	Tracing, Testing, Tretment
Tagana	:	Taruna Siaga Bencana
Tapol	:	*Tahanan Politik*
TAPK	:	Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
TBA	:	*To Be Announced*
TBC	:	*Tuberkolosis*
TFR	:	*Total Fertility Rate*
TK	:	Taman Kanak-kanak
TKSK	:	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPS	:	Tempat Pembuangan Sampah
TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TPT	:	Tingkat Pendidikan Terakhir
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPU	:	Tempat Pemakaman Umum
TTD	:	Tablet Tambah Darah
UCI	:	*Universal Child Immunization*
UKBM	:	Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UNDP	:	United Nations Development Programme
UPPKS	:	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
UPTD PPA	:	Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
UUPA	:	Undang-Undang Pemerintahan Aceh
WHO	:	*World Health Organization*
WKSKBM	:	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat
WMK	:	Wilayah Manajemen Kebakaran
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
	:	

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR SINGKATAN ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GRAFIK ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN ..... **I – 1**
1.1. Latar Belakang ..... I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I – 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I – 6
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I – 8
1.5. Sistematika Penulisan ..... I – 9
BAB II GAMBARAN UMUM ..... **II – 1**
2.1. Kondisi Umum Daerah ..... II – 1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II – 15
2.3. Aspek Layanan Umum ..... II – 38
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II – 120
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... **III – 1**
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ..... III – 1
3.2. Kebijakan Keuangan Masa Lalu ..... III – 27
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ..... **IV – 1**
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... IV – 2
4.2. Isu Strategis ..... IV – 17
BAB V TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... **V – 1**
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM ..... **VI – 1**
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... **VII – 1**
7.1. Kerangka Pendanaan ..... VII – 2
7.2. Program Perangkat Daerah ..... VII – 18
7.2. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal ..... VII – 45
BAB VIII KINERJA PEYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... **VIII – 1**
8.1. Indikator Kinerja Utama ..... VIII – 1
8.2. Indikator Kinerja Daerah ..... VIII – 5
BAB IX PENUTUP ..... **IX – 1**
9.1. Kaidah Pelaksanaan ..... IX – 1
9.2. Pedoman Transisi ..... IX – 2

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Banyaknya Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas dan Jumlah Gampong di Kota Langsa ..... II – 2

Tabel 2.2 Kejadian Bencana Tahun 2017-2021 Kota Langsa ..... II - 9

Tabel 2.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Langsa Menurut Kecamatan Tahun 2021 ..... II – 10

Tabel 2.4 Nilai (Juta Rupiah) dan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Langsa ..... II – 16

Tabel 2.5 Nilai (Juta Rupiah) dan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Berlaku Kota Langsa ..... II – 18

Tabel 2.6 Perkembangan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kota Langsa ..... II – 19

Tabel 2.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 24

Tabel 2.8 Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Tahun 2017-2021 Kota Langsa ..... II – 34

Tabel 2.9 Perkembangan Penduduk Kota Langsa Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Tahun 2017-2021 ... II – 35

Tabel 2.10 Perkembangan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Langsa Tahun 2018-2021 ..... II – 37

Tabel 2.11 Jumlah Pesantren/Dayah, Ustadz dan Santri Tahun 2018-2021 Kota Langsa ..... II – 39

Tabel 2.12 Penegakan Qanun Syariat Islam di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 40

Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Langsa Tahun 2017-2021..... II – 45

Tabel 2.14 Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan SD/SMP/SMA di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 47

Tabel 2.15 Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan SD/SMP/SMA Di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 48

Tabel 2.16 Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan SD-SMP dan SMP-SMA Di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 49

Tabel 2.17 Fasilitas Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 50

Tabel 2.18 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Tahun 2019-2021 Kota Langsa..... II – 51

Tabel 2.19 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Bayi Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 52

Tabel 2.20 Jumlah Balita Stunting Tahun 2018-2021 Kota Langsa ..... II – 52

Tabel 2.21 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 57

Tabel 2.22 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Serta Rumah Sakit Di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 57

Tabel 2.23 Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 58

Tabel 2.24 Cakupan Komplikasi Kebidanan Dan Pertolongan Persalinan Di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 59

Tabel 2.25 Cakupan Universal Child Imunization (UCI) Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 60

Tabel 2.26 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA dan Penderita Penyakit DBD Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 60

Tabel 2.27 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kota LangsaTahun 2017-2021..... II – 62

Tabel 2.28 Jalan Dalam Kondisi Baik dan Jalan yang Memiliki Trotoar/ Saluran Pembuangan Air dan Sepadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Liar Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 63

Tabel 2.29 Perkembangan Panjang Sepadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kota Langsa Tahun 2017-2021..... II – 64

Tabel 2.30 Perkembangan Drainase di Kota Langsa Tahun 2019-2021 ... II – 64

Tabel 2.31 Perkembangan Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Rawan Longsor Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 65

Tabel 2.32 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Langsa Tahun 2021 ..... II – 66

Tabel 2.33 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2018-2021 Kota Langsa ..... II - 66

Tabel 2.34 Perkembangan Areal Kawasan Kumuh Kota Langsa Tahun 2018-2021 ..... II – 67

Tabel 2.35 Perkembangan Tempat Ibadah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 67

Tabel 2.36 Ketaatan Terhadap RTRW, Wilayah Produktif, Wilyah Industri, Wilayah Kebanjiran, Wilayah Kekeringan dan Wilayah Perkotaan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 68

Tabel 2.37 Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Langsa Tahun 2018-2021 ..... II – 68

Tabel 2.38 Perkembangan Rumah Layak Huni Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 69

Tabel 2.39 Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 70

Tabel 2.40 Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Ketentraman, Keindahan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 71

Tabel 2.41 Penegakan Qanun Syariat Islam di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 71

Tabel 2.42 Pertikaian dan Unjuk Rasa Tahun 2019-2021 Kota Langsa .... II – 72

Tabel 2.43 Tingkat Partisipasi Politik Tahun 2017 dan 2019 Kota Langsa II - 73

Tabel 2.44 PMKS yang Dibiayai Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 73

Tabel 2.45 Jumlah PSKS di Kota Langsa Tahun 2019-2021 ..... II - 74

Tabel 2.46 Informasi Ketenagakerjaan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ... II – 75

Tabel 2.47 Perkembangan Penduduk Kota Langsa Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Tahun 2017-2021 ... II – 75

Tabel 2.48 Perkembangan Partisipasi Perempuan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 78

Tabel 2.49 Rasio KDRT Tahun 2017-2021 Kota Langsa..... II – 79

Tabel 2.50 Perkembangan Pangan Kota Langsa Tahun 2018-2021 ..... II – 80

Tabel 2.51 Perkembangan Urusan Pertanahan Kota Langsa Tahun 2017-2020 ..... II – 80

Tabel 2.52 Kegiatan Pelayanan Sertifikat Hak atas Tanah Di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 81

Tabel 2.53 Jumlah Aset Tanah Bersertifikat dan Belum Bersertifikat Pemerintah Kota Langsa Tahun 2021..... II - 81

Tabel 2.54 Persentase Penanganan Sampah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 82
Tabel 2.55 Alat Angkut, TPS dan TPA Sampah Kota Langsa Tahun 2021 II – 83
Tabel 2.56 Persentase Kepemilikan KTP di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 84
Tabel 2.57 Rasio Bayi Berakta Kelahiran dan Pasangan Berakta Nikah di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 84
Tabel 2.58 Perkembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 85
Tabel 2.59 Persentase PKK Aktif di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 87
Tabel 2.60 Persentase Posyandu Aktif di Kota Langsa Tahun 2017-2021 II – 87
Tabel 2.61 Perkembangan Keluarga Berencana Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 88
Tabel 2.62 Perkembangan Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 88
Tabel 2.63 Perkembangan Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2017-2021 ..... II – 89
Tabel 2.64 Perkembangan Jumlah Uji KIR dan Lama Pengujian Tahun 2017-2021 ..... II – 90
Tabel 2.65 Perkembangan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 91
Tabel 2.66 Arus Barang Impor dan Ekspor melalui Pelabuhan Kuala Langsa Tahun 2019-2021 Kota Langsa ..... II – 91
Tabel 2.67 Banyaknya Kunjungan Kapal Pelabuhan Kuala Langsa Tahun 2019-2021 Kota Langsa ..... II – 91
Tabel 2.68 Lalu Lintas Barang di Pelabuhan Kuala Langsa Tahun 2019-2021 Kota Langsa ..... II - 92
Tabel 2.69 Perkembangan Jumlah Base Transcerver Station (BTS) Kota Langsa Tahun 2019-2021 ..... II – 93
Tabel 2.70 Perkembangan Layanan Telekomunikasi di Kota Langsa Tahun 2021 ..... II – 93
Tabel 2.71 Perkembangan Indikator Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 94
Tabel 2.72 Perkembangan Investasi Penanaman Modal Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 95

Tabel 2.73 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kota Langsa Tahun 2018-2021 ..... II – 96

Tabel 2.74 Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Langsa Tahun 2018-2021 ..... II – 96

Tabel 2.75 Jumlah Pelatih, Atlet, Prestasi dan Gedung Olahraga Tahun 2021 Kota Langsa ..... II – 97

Tabel 2.76 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Langsa Tahun 2019-2021 ..... II – 98

Tabel 2.77 Perkembangan Cagar Budaya Kota LangsaKota Langsa Tahun 2019-2021 ..... II – 98

Tabel 2.78 Perkembangan Indikator Perpustakaan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 100

Tabel 2.79 Objek Wisata Kota Langsa Tahun 2021 ..... II - 102

Tabel 2.80 Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 102

Tabel 2.81 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Tanaman Padi dan Palawija Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 103

Tabel 2.82 Kelompok Wanita Tani Tahun 2021 Kota Langsa ..... II – 104

Tabel 2.83 Produksi Perkebunan Tahun 2017-2021 Kota Langsa ..... II – 105

Tabel 2.84 Perkembangan Energi Listrik Tahun 2017-2021 Kota Langsa. II – 105

Tabel 2.85 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2017-2021 Kota Langsa ..... II - 107

Tabel 2.86 Jumlah Industri Tradisonal yang Terdaftar Di Dinas Perindustrian Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 108

Tabel 2.87 Jumlah industri Tradisonal yang Terdaftar Menurut Jenisnya di Kota Langsa Tahun 2021 ..... II – 109

Tabel 2.88 Perkembangan Kelautan dan Perikanan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 110

Tabel 2.89 Perkembangan Perencanaan Pembangunan Kota Langsa Tahun 2018-2022 ..... II – 112

Tabel 2.90 Perkembangan Keuangan Kota Langsa Tahun 2018-2022 ..... II – 113

Tabel 2.91 Perkembangan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 115

Tabel 2.92 Pelaksanaan Program Penelitian Dan Pengembangan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 116

Tabel 2.93 Produk Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 117

Tabel 2.94 Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 118

Tabel 2.95 Perkembangan Pelaksanaan Kesekretariatan Dewan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 119

Tabel 2.96 Jumlah Sidang/Rapat DPRD Kota Langsa Menurut Jenisnya Tahun 2017-2021 ..... II – 119

Tabel 2.97 Rician Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Barang Selama 1 (Satu) Bulan Kota Langsa Tahun 2017-2021 (Rupiah) ..... II – 122

Tabel 2.98 Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Langsa Tahun 2021 ..... II – 123

Tabel 2.99 Rasio Ketergantungan Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 124

Tabel 2.100 Perkembangan Pelanggan Listrik di Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 125

Tabel 2.101 Angka Kriminalitas Yang Tertangani Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 125

Tabel 2.102 Kegiatan Perbankan di Kota Langsa Tahun 2021 ..... II – 126

Tabel 3.1 Perkembangan Realisasi Proporsi Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 4

Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Derah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 5

Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi Proporsi Komponen Pembentuk Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 8

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Belanja Derah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 9

Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 12

Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 13

Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Aset Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 15

Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi Kewajiban Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 17

Tabel 3.9 Perkembangan Realisasi Ekuitas Dana Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 19

Tabel 3.10 Perkembangan Realisasi Neraca Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 21

Tabel 3.11 Perkembangan Balance Sheet Ratio Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 27

Tabel 3.12 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 28

Tabel 3.13 Surplus/Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 30

Tabel 3.14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 30

Tabel 3.15 Gambaran Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 31

Tabel 3.16 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 32

Tabel 5.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Langsa Tahun 2023-2026 ..... V – 2

Tabel 5.2 Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 ..... V – 6

Tabel 5.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 V – 10

Tabel 5.4 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023-2026 ..... V - 34

Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Langsa Tahun 2023-2026 ..... VI – 2

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Langsa Tahun 2023-2026 VI – 12

Tabel 6.3 Program Pembangunan Kota Langsa yang Disertai Dengan Pagu Indikatif Tahun 2023-2026 ..... VI – 14

Tabel 7.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026 ..... VII – 4

Tabel 7.2 Proporsi Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026 ..... VII – 5

Tabel 7.3 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026 ..... VII – 9

Tabel 7.4 Proporsi Komponen Pembentuk Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026 ..... VII – 10

Tabel 7.5 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026 ..... VII – 13

Tabel 7.6 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Langsa ..... VII – 17

Tabel 7.7 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2026..... VII – 19

Tabel 7.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Terhadap Rencana Program Prioritas Menurut Urusan, Bidang dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026 ..... VII - 33

Tabel 7.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Terhadap Rencana Program Prioritas Menurut Perangkat Daerah, Urusan dan Bidang Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2026..... VII – 39

Tabel 7.10 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2026..... VII - 47

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kota Langsa..... VIII – 1

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Langsa..... VIII - 5

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan (Persen)..... II – 2

Grafik 2.2 Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021 Kota Langsa (Jiwa)..... II – 10

Grafik 2.3 Jumlah Rumah Tangga Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 11

Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen) ..... II – 20

Grafik 2.5 Laju Pertumbuhan Implisit Tahun 2017-2021 Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II - 21

Grafik 2.6 Pendapatan Per Kapita Kota Langsa dan Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 2017-2020 Kota Langsa..... II - 22

Grafik 2.7 Gini Ratio Kota Langsa dan Provinsi Aceh Tahun 2017-2021.. II - 23

Grafik 2.8 Laju Perkembangan Kemiskinan Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen) ..... II – 24

Grafik 2.9 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen) ..... II – 25

Grafik 2.10 Perkembangan IPM Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)..... II – 26

Grafik 2.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 ..... II – 27

Grafik 2.12 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)..... II – 28

Grafik 2.13 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun) ..... II – 29

Grafik 2.14 Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Langsa,Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Tahun)..... II – 29

Grafik 2.15 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II – 30

Grafik 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Tahun) II – 31

Grafik 2.17 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun) ..... II – 32

Grafik 2.18 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin di Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Tahun) II – 32

Grafik 2.19 Perkembangan AKB dan AKHB Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 33

Grafik 2.20 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)..... II – 36

Grafik 2.21 Grup/Sanggar Seni di Kota Langsa Tahun 2019-2021 ..... II – 37

Grafik 2.22 Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Langsa Tahun Ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 ..... II – 42

Grafik 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan SD/SMP/SMA Kota Langsa Tahun 2017-2021 (Persen)..... II – 43

Grafik 2.24 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan SD/SMP/SMA Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Persen) ..... II – 43

Grafik 2.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/SMP/SMA Kota Langsa Tahun 2017-2021..... II – 44

Grafik 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan SD/SMP/SMA Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Persen) ..... II – 45

Grafik 2.27 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Usia SD/SMP/SMA Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Persen) ..... II – 46

Grafik 2.28 Perkembangan AKN Kota Langsa Tahun 2017-2021..... II – 52

Grafik 2.29 Perkembangan AKBa Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... II – 53

Grafik 2.30 Perkembangan AKI Kota Langsa Tahun 2017-2021..... II – 54

Grafik 2.31 Perkembangan Balita Stunting Kota Langsa Tahun 2021..... II – 56

Grafik 2.32 Indeks Pembangunan Gender Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 ..... II – 77

Grafik 2.33 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Langsa, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2020 ..... II – 77

Grafik 2.34 Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2021 Kota Langsa ..... II – 86

Grafik 2.35 Perkembangan Izin Trayek Kota Langsa Tahun 2017-2021 ... II – 90

Grafik 2.36 Kontribusi Sektor Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB Kota Langsa Tahun 2017-2021 (Persen)..... II – 103

Grafik 2.37 Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota Langsa Tahun 2021 ..... II – 106

Grafik 2.38 Kontribusi Sektor Kategori Pengadaan Listrik dan Gas Terhadap PDRB Tahun 2017-2021 Kota Langsa ..... II – 107

Grafik 2.39 Kontribusi Sektor Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil, Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2017-2021 Kota Langsa ..... II – 108

Grafik 2.40 Kontribusi Sektor Kategori Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2017-2021 Kota Langsa (Persen) ..... II – 109

Grafik 2.41 Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Langsa dan Provinsi Aceh Tahun 2017-2021 (Persen) ..... II - 124

Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 3

Grafik 3.2 Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 4

Grafik 3.3 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 7

Grafik 3.4 Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 8

Grafik 3.5 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 11

Grafik 3.6 Perkembangan Realisasi Aset Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 16

Grafik 3.7 Perkembangan Realisasi Kewajiban Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 18

Grafik 3.8 Perkembangan Realisasi Ekuitas Dana Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 20

Grafik 3.9 Perkembangan Realisasi Current Ratio Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 23

Grafik 3.10 Perkembangan Realisasi Quick Ratio Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 24

Grafik 3.11 Perkembangan Realisasi Debt to Asset Ratio Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III – 25

Grafik 3.12 Perkembangan Realisasi Debt to Equity Ratio Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 26

Grafik 3.13 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 28

Grafik 3.14 Perkembangan Realisasi Surplus/Defisit Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 29

Grafik 3.15 Realisasi Peningkatan/Penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021 ..... III - 31

Grafik 7.1 Target Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026 ... VII - 3

Grafik 7.2 Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026 ..... VII - 5

Grafik 7.3 Target Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026..... VII – 8

Grafik 7.4 Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026..... VII - 10

Grafik 7.5 Target Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026... VII - 12

Grafik 7.6 Target Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026..... VII - 16

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Proses Tahapan Penyusunan RPD Kota Langsa Tahun 2023–2026 ..... I – 3

Gambar 1.2 Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah..... I – 7

Gambar 2.1 Peta Kota Langsa ..... II – 1

Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kota Langsa..... II – 3

Gambar 2.3 Peta Klimatologi/Curah Hujan/Iklim ..... II – 4

Gambar 2.4 Peta Penggunaan Lahan Kota Langsa ..... II – 5

Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kota Langsa..... II – 9

Gambar 2.6 Tingginya Daya Saing Kota Langsa dibanding rata-rata Seluruh Pilar (12 Pilar)..... II - 121

Gambar 6.1 Proses Perumusan Strategi dan Kebijakan Pembangunan ... VI – 1

Gambar 6.2 Proses Perumusan Arah Kebijakan/Tema Pembangunan serta Prioritas Pembangunan ..... VI – 11

Gambar 6.3 Proses Pemetaan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Serta Program Prioritas Pembangunan Kota Langsa Tahun 2023-2026..... VI - 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pembangunan daerah dilaksanakan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengunakan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*);
3. Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*botton up*), pendekatan ini merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional; dan

4. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional tahun 2024.

Bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, untuk Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Langsa Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Langsa sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah RPJMD Kota Langsa Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2023-2026, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan Nasional dan regulasi yang berlaku.

Gambar 1.1

Proses Tahapan Penyusunan RPD Kota Langsa Tahun 2023–2026

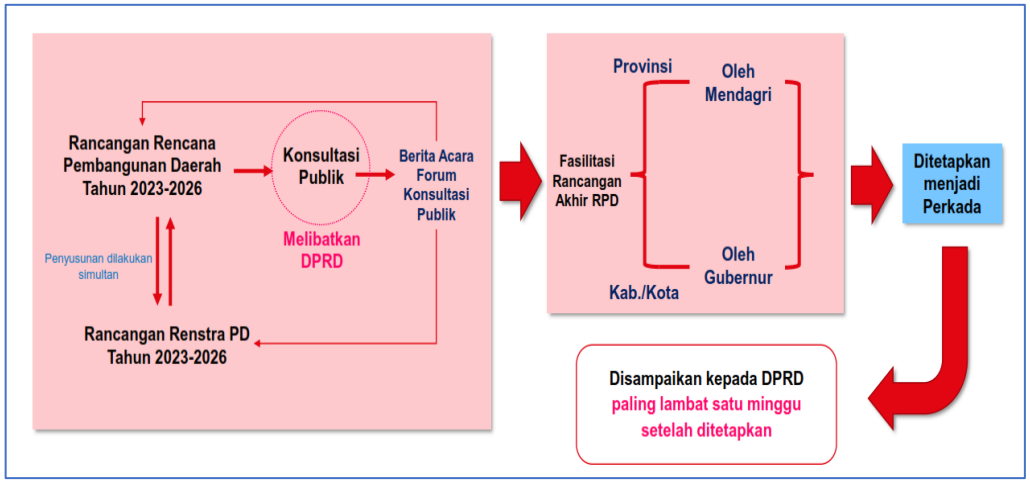

Penyusunan rancangan RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 melalui tahapan metode dan kerangka berpikir ilmiah, penyerapan saran dan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk DPRD melalui forum konsultasi publik, analisis gambaran umum daerah, analisis gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas, perumusan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, dan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan tahapan yang telah ditentukan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dalam penyusunan RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 tersebut, secara jelas menunjukkan bahwa RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 memiliki kedudukan strategis yaitu:

1. RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pembangunan daerah dengan penyelarasan terhadap pembangunan nasional, dan Aceh selama 4 (empat) tahun ke depan;
2. RPD Kota Langsa tahun 2023-2026 merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

3. RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi satuan evaluasi dan pengawas.
4. RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Aceh Tahun 2023-2026;
22. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027;
23. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032;
24. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Langsa Tahun 2023-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Aceh. Penyusunan RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Aceh Tahun 2023-2026, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Langsa Tahun 2007-2027. Agar RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 sinkron dengan kebijakan pembangunan Nasional, dilakukan telaahan terhadap pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi. Selanjutnya, RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah).

Gambar 1.2

Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

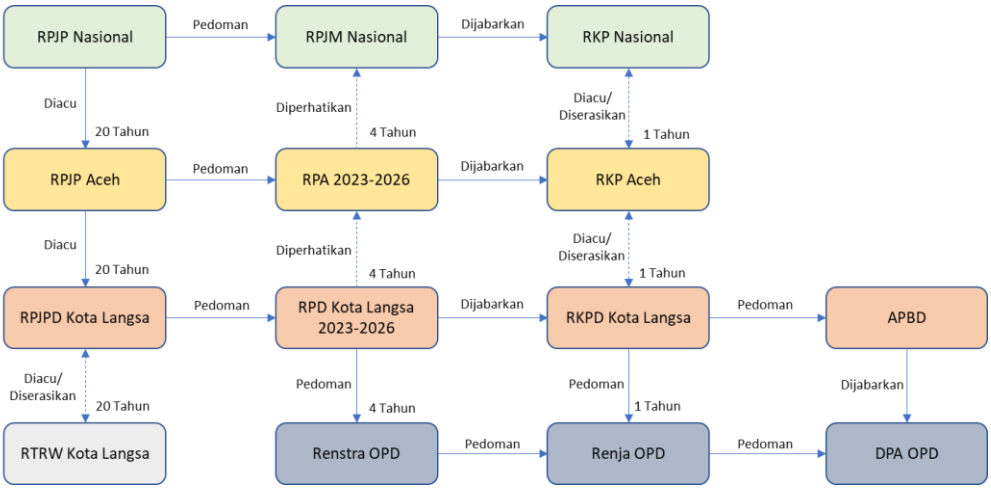

Adapun hubungan RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPD Kota Langsa 2023-2026 dengan RPJPD Kota Langsa

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, RPD Kota Langsa 2023-2026 adalah rencana pembangunan dari pelaksanaan RPJPD Kota Langsa Tahun 2007-2027. Oleh sebab itu, penyusunan RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 memuat tujuan dan sasaran didasarkan kepada visi dan misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap ke empat dan isu strategis aktual.

2. RPD Kota Langsa 2023-2026 dengan Renstra Perangkat Daerah 2023-2026

Dalam penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan RPD. Penentuan tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan yang menjadi wewenang daerah.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan

dalam penyempurnaan rancangan RPD dengan tujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan RPD.

3. RPD Kota Langsa 2023-2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Langsa yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Langsa yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Gampong, Kecamatan, dan Kota.

Penyusunan RKPD mengacu pada RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026, RKPD Aceh, serta RKP Nasional. Hal ini mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari disusunnya dokumen RPD ini antara lain:

1. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis antara tahun 2023-2026, termasuk dalam menentukan program, indikator, target dan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh PD;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, KUA- PPAS, dan RAPBD tahun 2023-2026;
3. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa antara tahun 2023-2026.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari disusunnya dokumen RPD ini adalah:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah tahun 2023-2026;
2. Sebagai pedoman yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Walikota Langsa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPD Tahun 2023–2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dengan sistematika terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

- Menjelaskan latar belakang penyusunan RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 yang mencakup pelaksanaan Pemilu serentak secara nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021;
- Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026;
- Menjelaskan hubungan RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lain yang relevan beserta penjelasannya;

Bab II Gambaran Umum

- Menyajikan dan menjelaskan data dan informasi hasil capaian pembangunan yang selaras dan mendukung permasalahan dan isu strategis pembangunan yang meliputi aspek geografi, demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

- Menyajikan gambaran kinerja pelaksanaan APBD Kota Langsa yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan; dan neraca daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis

- Menyajikan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan selaras dengan data capaian pembangunan yang menjadi titik fokus pembangunan Kota Langsa yang akan diselesaikan pada periode 2023-2026;
- Menjabarkan isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan daerah Kota Langsa yang dianggap paling prioritas untuk segera diselesaikan dan diintegrasikan dengan isu strategis dunia Internasional, Nasional dan Aceh.

Bab V Tujuan dan Sasaran

- Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Langsa dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menjabarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

- Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih serta program prioritas pembangunan Kota Langsa;

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

- Menjelaskan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dan menjelaskan asumsi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi. Menguraikan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra PD Kota Langsa beserta indikator kinerja, pagu indikatif target dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Langsa terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bab IX Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis Kota Langsa terletak antara 04º24'35.68"-04º33'47.03" Lintang Utara dan 97º53'14,59"-98º04'42,16" Bujur Timur. Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032, bahwa luas wilayah Kota Langsa adalah 239,83 km^2.

Batas-batas wilayah Kota Langsa, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Gambar 2.1
Peta Kota Langsa

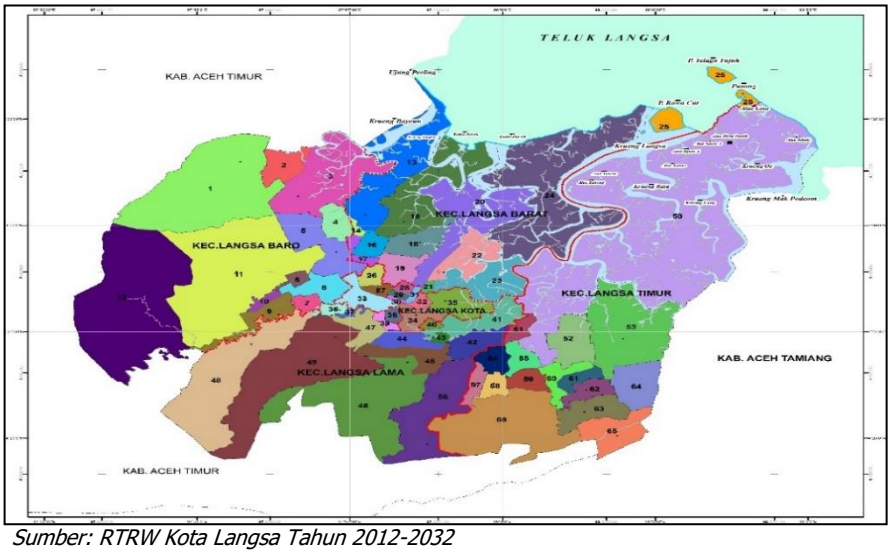

Sumber: RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Secara administrasi pemerintahan, Kota Langsa terbagi atas 5 Kecamatan dan 66 Gampong dengan luas wilayah dan persebaran jumlah Gampong di Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Banyaknya Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas dan Jumlah Gampong Kota Langsa

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (KM^2)	Persentase	Gampong
1	Langsa Timur	Seuneubok Antara	78,23	32,62	16
2	Langsa Lama	Meurandeh	45,02	18,77	15
3	Langsa Barat	Matang Seulimeng	48,78	20,34	13
4	Langsa Baro	Geudubang Aceh	61,69	25,72	12
5	Langsa Kota	Gampong Teungoh	6,11	2,55	10
Jumlah			239,83	100	66

Sumber: Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013

Grafik 2.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan (Persen) Kota Langsa

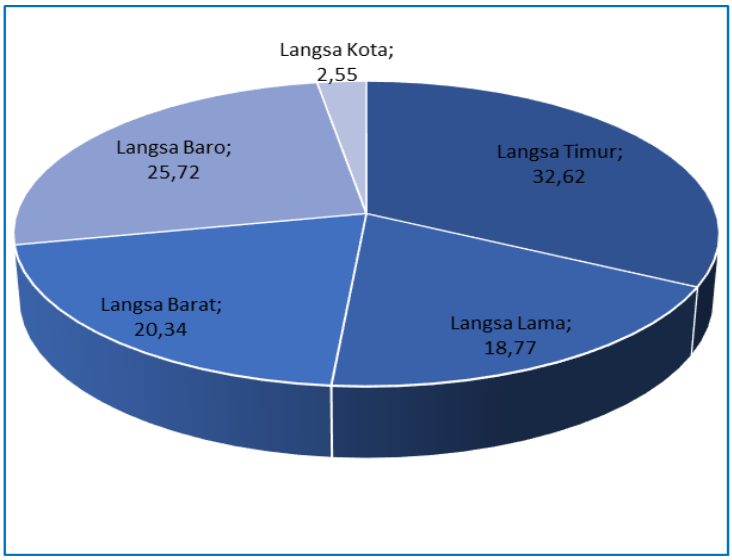

Sumber: RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

2.1.1.2 Topografi

Topografi adalah representasi grafis secara rinci dan akurat mengenai keadaan alam di suatu daratan yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran roman muka bumi dan dimensinya. Secara topografi Kota Langsa terletak pada dataran aluvial pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 m dari permukaaan laut di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pergunungan lipatan bergelombang sedang dengan elevasi sekitar 75 m, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas.

Gambar 2.2
Peta Ketinggian Kota Langsa

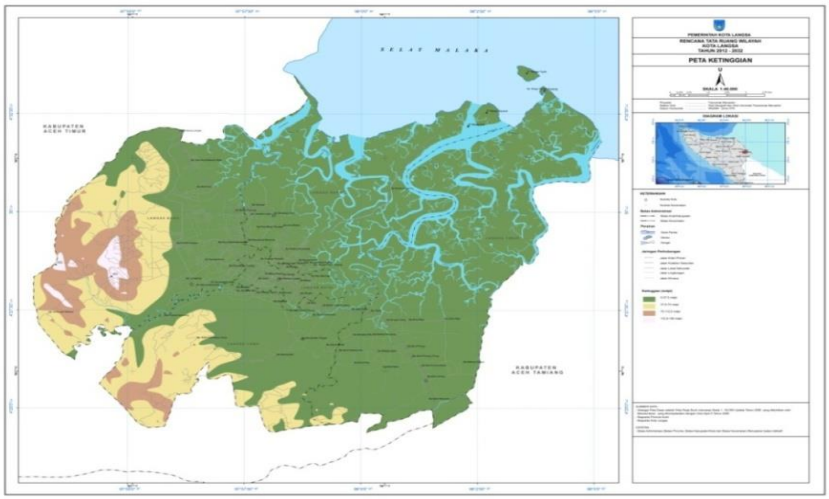

Sumber: RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

2.1.1.3 Geologi

Bentang lahan di Kota Langsa terbagi atas tiga jenis yaitu dataran aluvial, dataran *fluvio-marine* dan perbukitan struktural lipatan. Sekitar 20 persen atau 4.811,14 ha dari luas wilayah Kota Langsa yang berada pada Kecamatan Langsa Kota dan sebagian kecil Kecamatan Langsa Barat adalah dataran aluvial yang merupakan jenis tanah yang dapat terbentuk karena adanya endapan.

Luas wilayah Kota Langsa yang didominasi jenis dataran *fluvio marine* sekitar 45 persen atau sekitar 10.894,99 ha berada pada Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur serta sebagian kecil Kecamatan Langsa Baro. Dataran *fluvio marine* dihasilkan oleh aktivitas gerakan air laut, baik pada tebing curam, pantai berpasir, pantai berkarang maupun pantai berlumpur serta diakibatkan oleh aktivitas sungai seperti dataran banjir, tanggul alam, teras sungai, yang sebagian besar bermuara ke laut dan membentuk lahan dengan kombinasi *fluvial* dan *marine* dimana kawasan tersebut merupakan kawasan pesisir Teluk Langsa.

Sekitar 35 persen bentuk lahan Kota Langsa terdiri dari perbukitan struktural lipatan yang ditandai dengan adanya lipatan yang membentuk permukaan bumi menjadi cekung (sinklinal) seperti lembah dan lipatan yang membentuk permukaan bumi menjadi cembung (antiklinal) seperti pegunungan atau perbukitan dengan luas sebesar 8.276,81 ha yang sebagian besar berada di Kecamatan Langsa Baro dan Kecamatan Langsa Lama.

2.1.1.4 Hidrologi

Sistem hidrologi di Kota Langsa terdiri dari dua jenis, yaitu sistem hidrologi alami dan sistem hidrologi buatan. Sistem hidrologi alami terdiri dari sungai, sumur dan air tanah. Sedangkan sistem hidrologi buatan yaitu drainase.

Kota langsa memiliki satu buah sungai yaitu Krueng Langsa. Volume air sungai tersebut cukup besar namun kondisi warna airnya kekuning-kuningan. Daerah Aliran Sungai (DAS) krueng Langsa terus mengalami kerusakan lingkungan akibat perubahan tutupan lahan *(landuse)*. Pemanfaatan Sungai Langsa oleh penduduk sebagai tempat mencuci, mandi, dan perikanan.

2.1.1.5 Klimatologi

Kota Langsa merupakan daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahun ada dua musim berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata Kota Langsa berkisar antara 1.850-4.013 mm, dimana suhu udara berkisar antara 28^0C-33^0C serta berada pada ketinggian antara 0-29 m di atas permukaan laut, kelembaban nisbi Kota Langsa rata-rata 75 persen.

Gambar 2.3
Peta Klimatologi/Curah Hujan/Iklim Kota Langsa

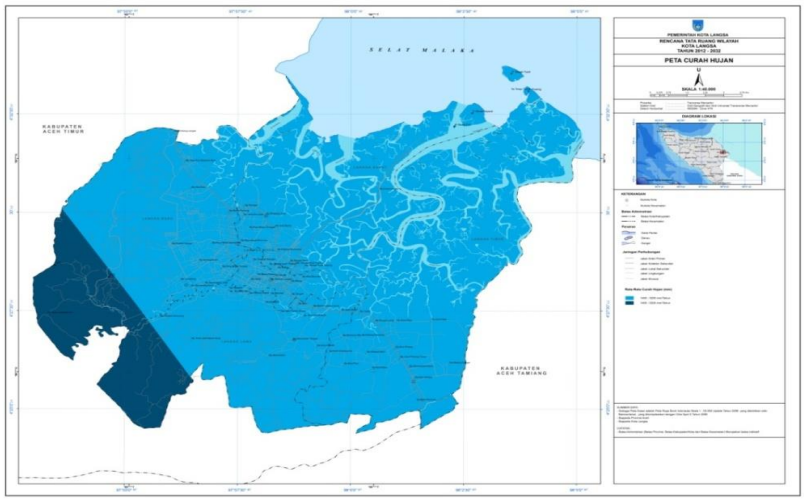

Sumber: RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan (*land use)* Kota Langsa berbentuk konsentrik, hal ini disebabkan oleh aktivitas perkotaan yang berkembang dan terdistribusi oleh sistem jaringan jalan dan aktivitas perkotaan, seperti kegiatan

perdagangan, pemerintahan, perindustrian dan kegiatan perkotaan lainnya, seperti:

1. Sebelah utara, dibentuk oleh kegiatan industri dan jaringan jalan utama menuju ke kawasan pelabuhan;
2. Sebelah selatan, dibentuk oleh sistem jaringan jalan utama dan beberapa fasilitas perkotaan lainnya, seperti pendidikan, pemerintahan, tempat pembuangan akhir sampah dan perkebunan;
3. Pusat kota, dibentuk oleh kegiatan *Central Business District* (CBD), pemerintahan dan kesehatan;
4. Sebelah barat, dibentuk oleh jaringan jalan alternatif dan kegiatan pemerintahan di sekitarnya, industri ringan, sedang dan pergudangan;
5. Sebelah timur, dibentuk oleh kegiatan pertanian.

Gambar 2.4
Peta Penggunaan Lahan Kota Langsa

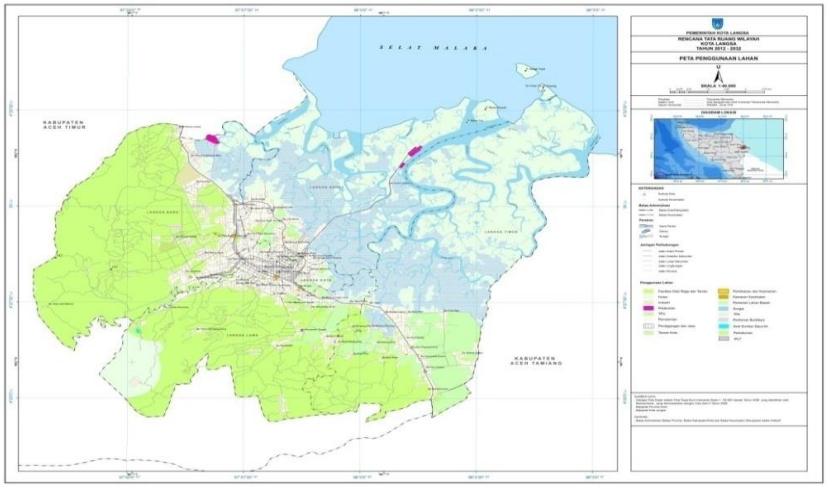

Sumber: RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Lanskap atau bentang darat Kota Langsa dicirikan oleh kondisi topografi yang tergantung mulai dari daerah pantai pada bagian utara serta sampai pada perbukitan pada bagian barat dan selatan kota. Di samping itu, lanskap kota dicirikan juga oleh alur sungai (Krueng Langsa) yang mengalir pada bagian selatan kota serta kombinasi vegetasi berupa tanaman perkebunan kelapa sawit, karet dan tanaman pekarangan. Kondisi topografi dan keragaman vegetasi merupakan unsur fisik alam yang paling potensial bagi pengembangan estetika

lingkungan kota. Secara sederhana lanskap Kota Langsa dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe spesifik, yaitu :

a. Lanskap PeDesaan

Kondisi lanskap peDesaan sebagian besar terdapat pada daerah-daerah pinggiran kota terutama sepanjang jalan utama Medan-Banda Aceh serta pada bagian barat kota. Lanskap tipe ini ditandai oleh dominannya lahan persawahan dan daerah perkebunan kelapa sawit dan karet. Perumahan sepanjang jalan masih bergaya sederhana dengan pagar tanaman khas peDesaan.

b. Lanskap Pantai Pesisir

Kondisi lanskap pantai/pesisir terdapat pada kawasan sepanjang jalan menuju pelabuhan Kuala Langsa. Pada kawasan ini dicirikan oleh sederetan kawasan permukiman nelayan dengan kondisi kumuh, dengan latar belakang daerah rawa-rawa dan daerah tambak udang yang dilengkapi dengan komunitas literal hutan bakau yang mulai terancam punah akibat berkembangnya kawasan permukiman dan tambak udang. Vegetasi hutan bakau tersebut merupakan tanaman asli dan hasil usaha penghijauan/rehabilitasi kawasan mangrove.

c. Lanskap Pusat Kota

Kondisi lanskap pada kawasan pusat kota ditandai oleh dua unsur utama fisik buatan yaitu jalan dan bangunan. Jalan Ahmad Yani merupakan koridor pergerakan utama yang paling penting, sehingga menjadi "*landmark"* Kota Langsa. Penataan pola hijau di sepanjang jalan terus dilakukan hingga saat ini.

Alun-alun dan taman kota di depan Pendopo Walikota merupakan "*open space*" yang paling menonjol di kawasan pusat kota. Letaknya yang strategis, membuat "*open space"* ini banyak diminati oleh masyarakat untuk mengunjunginya. Bahkan untuk membuat suatu even atau kegiatan sering menggunakan kawasan ini.

Salah satu bangunan yang cukup potensial menjadi "*landmark*" kota, seperti misalnya "*Gedung Balee Joeang*" yang mempunyai nilai sejarah dan arsitektur yang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan mulai maraknya penggunaan latar Gedung Balee Joeang ini oleh masyarakat untuk diabadikan sebagai momen penting, contohnya pemotretan menjelang pernikahan. Di Kota Langsa juga terdapat sejumlah monumen/relief dan bangunan artistik adat Aceh,

yang umumnya diletakkan pada perapatan jalan sebagai monumen peringatan atau ornamen jalan.

Selain itu Mesjid Raya Darul Falah atau yang lebih dikenal dengan nama Mesjid Raya Kota Langsa merupakan salah satu *landmark* lainnya di Kota Langsa. Hal ini disebabkan karena bangunan tersebut memiliki ketinggian yang sangat menonjol dibandingkan dengan bangunan lainnya. Mesjid ini berlokasi di jantung kota dengan fasilitas yang besar yang dapat menampung jamaah untuk melakukan ibadah. Mesjid ini juga sangat sesuai dengan kultur masyarakat Kota Langsa yang mayoritas menganut agama Islam.

Adapun tutupan lahan *(land cover)* Kota Langsa, adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Langsa Barat : mayoritas tutupan lahan yang berada di kecamatan Langsa Barat adalah rawa/tambak dan berada hampir di seluruh wilayah kecamatan. Hutan mangrove terletak di sebelah utara kecamatan, dan permukiman berada di sebelah selatan kecamatan berbatasan dengan sebelah utara Kota Langsa, dan terkonsentrasi di sepanjang jalan utama (jalan lintas Medan-Banda Aceh);
b. Kecamatan Langsa Kota : mayoritas tutupan lahan yang berada di kecamatan Langsa Kota adalah permukiman serta kawasan untuk perdagangan dan jasa. Kecamatan Langsa Kota merupakan pusat Kota Langsa.
c. Kecamatan Langsa Timur : tutupan lahan yang berada di sini berupa lahan rawa, sawah dan perkebunan. Di sebelah selatan berupa sawah dan perkebunan, sedangkan permukiman dan kegiatan perdagangan dan jasa terkonsentrasi di sepanjang arteri primer (jalan Langsa-Medan). Untuk kawasan permukiman tersebar juga di daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong sentra produksi pertanian dan perkebunan;
d. Kecamatan Langsa Lama : dominasi tutupan lahannya adalah perkebunan sawit dan karet. Hampir seluruh lahan yang ada dimanfaatkan untuk tanaman karet dan sawit utamanya oleh BUMN PTP Nusantara I. Di sebelah selatan kecamatan terdapat hutan lindung darat, tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di sebelah barat Gampong Pondok Pabrik sampai ke sebelah timur Gampong Pondok Keumuning. Di sebelah barat daya kecamatan tepatnya di Gampong Pondok Keumuning terdapat hutan

produksi. Lokasi permukiman berada di sebelah utara kecamatan tepatnya di sepanjang jalan Ahmad Yani;

e. Kecamatan Langsa Baro : dominasi penggunaan lahan berupa perkebunan sawit dan karet, serta diantara perkebunan sawit dan karet terdapat hutan produksi, yang berada di Gampong Geudubang Aceh. Lokasi permukiman sebelah timur kecamatan yaitu di sepanjang jalan Ahmad Yani.

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi topografi lahan di Kota Langsa yang sebagian besar merupakan dataran rendah dinilai memiliki potensi dan sangat rawan akan bencana alam. Wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik, serta kawasan yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada umumnya, bencana banjir di perkotaan kerap terjadi ketika intensitas curah hujan tinggi, sementara drainase tidak berfungsi secara optimal akibat terbatasnya daya tampung debit air.

Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kota Langsa terdiri atas:

1. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi:
   a. Gelombang pasang dengan intensitas tinggi terdapat di Gampong Telaga Tujuh, seluas 151,96 ha dan Kuala Langsa seluas 707,53 ha di Kecamatan Langsa Barat;
   b. Gelombang pasang dengan intensitas sedang terdapat di Gampong Sungai Pauh seluas 96,53 ha di Kecamatan Langsa Barat, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,60 ha di Kecamatan Langsa Lama, Gampong Sungai Lueng seluas 12,95 ha di Kecamatan Langsa Timur;
   c. Gelombang pasang dengan intensitas rendah terdapat di Gampong Matang Seulimeng seluas 2,08 ha di Kecamatan Langsa Barat.
2. Kawasan rawan banjir dengan luas 378,54 ha, meliputi:
   a. Gampong Paya Bujok Seulemak seluas 12,14 ha dan Gampong Birem Puntong seluas 17,86 ha yang berada di Kecamatan Langsa Baro;
   b. Gampong Teungoh seluas 37,48 ha dan Gampong Jawa seluas 18,09 ha yang berada di Kecamatan Langsa Kota; dan

c. Gampong Pondok Keumuning seluas 74,19 ha, Gampong Seulalah seluas 30,40 ha, Gampong Pondok Pabrik seluas 9,50 ha, Gampong Sidodadi seluas 7,18 ha, Gampong Sidorejo seluas 20,41 ha, Gampong Baroh Langsa Lama seluas 32,16 ha, Gampong Baro seluas 16,51 ha dan Gampong Meurandeh 101,90 ha yang berada di Kecamatan Langsa Lama.

Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana Kota Langsa

Sumber: RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032

Bencana alam harus ditanggulangi secara komprehensif mengingat dampaknya yang buruk baik bagi aktivitas sosial, ekonomi serta rusaknya infrastruktur. Berikut kejadian bencana di Kota Langsa selama periode 2017-2021.

Tabel 2.2
Kejadian Bencana Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angin Kencang dan Pohon Tumbang	18	3	18	18	21
Banjir	2	1	5	2	4
Banjir Rob	-	-	-	-	1
Gempa Bumi	-	1	-	-	-
Kabut Asap	-	-	1	-	-
Kebakaran	23	39	34	54	21
Kekeringan	-	-	1	-	-
Longsor	-	-	-	-	1
Orang Tenggelam	3	2	1	1	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa

2.1.2. Demografi

Penduduk Kota Langsa bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada di Indonesia, dengan mayoritas penduduk adalah suku Aceh. Jumlah penduduk di Kota Langsa tahun 2017 sebanyak 171.574 jiwa, jumlah tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 188.878 jiwa.

Grafik 2.2
Jumlah Penduduk Tahun 2017-2021 Kota Langsa (Jiwa)

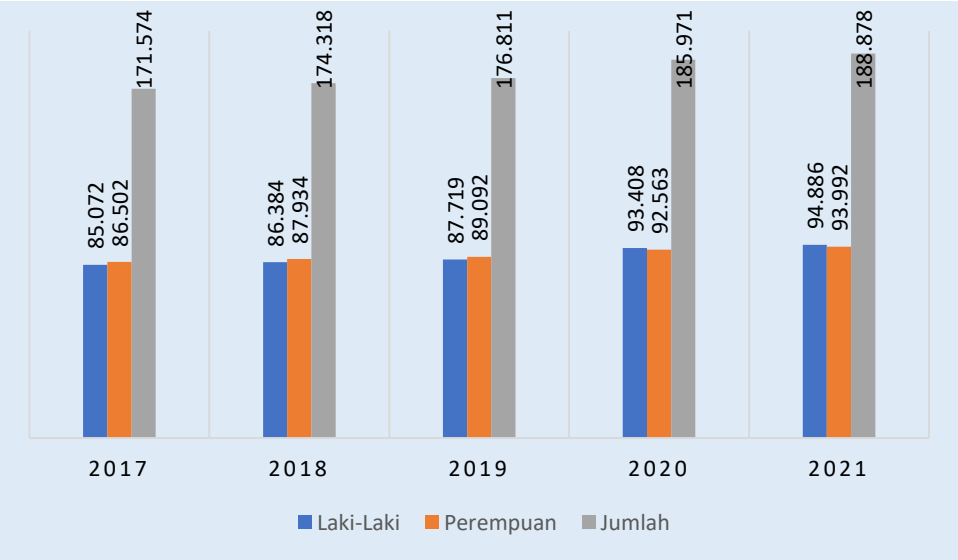

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Kepadatan penduduk Kota Langsa pada tahun 2021 adalah 788 jiwa/km^2. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Langsa Kota yang rata-rata per kilometer wilayahnya dihuni oleh sekitar 6.708 jiwa. Daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur yang hanya dihuni oleh sekitar 215 jiwa per kilometer wilayahnya.

Tabel 2.3
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2021 Kota Langsa

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Km^2)
1	Langsa Timur	78.23	16.823	215
2	Langsa Lama	45.02	33.712	749
3	Langsa Barat	48.78	40.300	826
4	Langsa Baro	61.69	57.055	925
5	Langsa Kota	6.11	40.988	6.708
Kota Langsa		239,83	188.878	788

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Langsa, jumlah rumah tangga juga turut meningkat. Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga di Kota Langsa sebanyak 38.087 rumah tangga dan terus bertambah setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 menjadi 41.991 rumah tangga.

Grafik 2.3
Jumlah Rumah Tangga Tahun 2017-2021 Kota Langsa

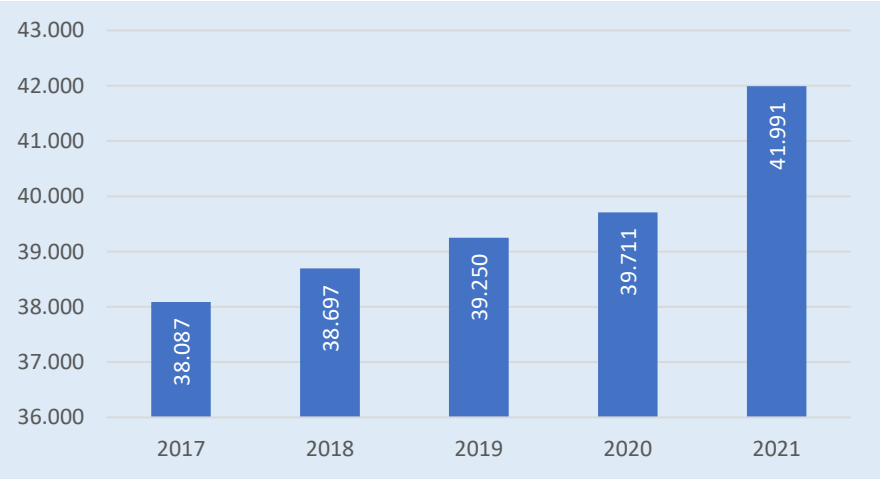

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Lanskap atau bentang darat Kota Langsa dicirikan oleh kondisi topografi mulai dari daerah pantai pada bagian utara serta sampai pada perbukitan pada bagian barat dan selatan kota. Di samping itu, lanskap kota dicirikan juga oleh alur sungai (Krueng Langsa) yang mengalir pada bagian selatan kota serta kombinasi vegetasi berupa tanaman perkebunan kelapa sawit, karet dan tanaman pekarangan. Kondisi topografi dan keragaman vegetasi merupakan unsur fisik alam yang paling potensial bagi pengembangan estetika lingkungan kota.

Dilihat dari kondisi daerah, Kota Langsa memiliki daya tarik sendiri untuk mendukung sektor pariwisata dan perikanan serta berbagai sektor lainnya. Daya tarik ini menjadi potensi daerah yang utama dalam meningkatkan perekonomian daerah di masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggali dan mengembangkan potensi alam yang dimiliki tersebut antara lain:

a. Pengembangan kawasan pantai sebagai wisata alam. Kawasan ini dibatasi pengembangannya untuk kegiatan fisik perkotaan atau untuk pengembangan

ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai *buffer zone*. Kawasan ini dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata pantai, wisata air atau bahari, pemancingan, kuliner dan tempat penelitian. Lokasi pengembangan pariwisata ini adalah di daerah Kecamatan Langsa Barat yaitu Pulau Telaga Tujoh/Pusong dan Pelabuhan Kuala Langsa;

b. Pengembangan potensi perikanan berupa perikanan laut maupun perikanan darat/tambak. Salah satu bentuk pengembangan potensi perikanan ini adalah rehabilitasi dan intensifikasi lahan untuk pengembangan industri perikanan yang diarahkan lokasinya di Gampong Kuala Langsa. Kegiatan industri perikanan ini berupa pengumpulan dan pengolahan ikan hasil tangkapan secara terpadu dari nelayan Kota Langsa dan daerah sekitarnya yang siap untuk kebutuhan sendiri maupun ekspor ke daerah lain dan luar negeri;
c. Pengembangan bahan galian memiliki potensi dengan produktivitas yang sangat baik. Adapun jenis bahan galian ini berupa pasir, tanah urug, kerikil dan batu.

Adapun pengembangan wilayah apabila ditinjau berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan dan jasa (*central bussines district*), pendidikan, perumahan, kesehatan, dan pemerintahan. Wilayah ini mencakup seluruh Kecamatan Langsa Kota.
b. Fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan, pendidikan, perumahan, kesehatan, perkantoran dan perkebunan. Wilayah ini mencakup seluruh Kecamatan Langsa Lama.
c. Fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, perkantoran, pertanian, perikanan/pertambakan. Wilayah ini mencakup seluruh Kecamatan Langsa Timur.
d. Fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan, industri rumah tangga, pendidikan, kesehatan, perkantoran, perikanan/pertambakan, terminal tipe A, dan terminal bongkar muat. Wilayah ini mencakup seluruh Kecamatan Langsa Barat.

e. Fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan, industri rumah tangga, pendidikan, kesehatan, perkantoran dan perkebunan. Wilayah ini mencakup seluruh Kecamatan Langsa Baro.

Kota Langsa yang terletak pada lintas jalan nasional di wilayah pantai timur Aceh, merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah *hinterland* di sekitarnya. Selain itu, posisi Kota Langsa yang relatif dekat dengan perbatasan wilayah Sumatera Utara memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan dan jasa serta pengembangan pariwisata.

Posisi geografis Kota Langsa yang dikelilingi Selat Malaka tepatnya bagian utara, merupakan potensi dan peluang untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang dan jasa melalui jalur laut, baik antar wilayah di pantai timur Aceh, pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Peluang lainnya adalah menjalin aktivitas bisnis dan perdagangan internasional (ekspor-impor) dengan berbagai negara seperti Malaysia, Singapura dan negara lainnya.

Beberapa wilayah di Kota Langsa direncanakan menjadi Kawasan Industri, yang meliputi:

1. Kawasan peruntukan industri besar

   Kawasan peruntukan industri besar memiliki luas 1.016,35 ha meliputi Kawasan Industri Alue Raya terdapat di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur dengan luas 600,83 ha; kawasan industri Buket Rata di Gampong Bukit Rata Kecamatan Langsa Timur dengan luas 300,00 ha; dan kawasan industri Eks Kopalmas di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat dengan luas 115,52 ha.

2. Kawasan peruntukan industri menengah

   Kawasan peruntukan industri menengah memiliki luas 208,92 ha meliputi kawasan industri menengah di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro dengan luas 102 ha; kawasan industri di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 ha; dan kawasan industri di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat seluas 56,92 ha.

3. Kawasan industri rumah tangga

   Industri rumah tangga tersebar diseluruh Gampong dalam wilayah Kota Langsa.

Kawasan Strategis Kota Langsa adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Kota Langsa meliputi :

1) Kawasan Strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :
   a. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa (CBD) seluas 253,91 ha;
   b. Kawasan Industri Alue Raya di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur seluas 600,83 ha;
   c. Kawasan Industri Buket Rata di Gampong Buket Rata Kecamatan Langsa Timur seluas 300 ha;
   d. Kawasan Industri Timbang Langsa di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro seluas 50 ha;
   e. Kawasan Industri Eks. Kopalmas di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 115,52 ha;
   f. Kawasan Industri Sedang Alue Dua di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro seluas 102,00 ha;
   g. Kawasan Industri Penyangga di Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat seluas 56,92 ha; dan
   h. Pelabuhan Kuala Langsa di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat seluas 13,00 ha.
2) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut pandang kepentingan sosial budaya, meliputi :
   a. Kawasan Pendidikan di Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama seluas 223,41 ha; dan
   b. Kawasan Kesehatan di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro seluas 15,32 ha.

Selain itu, Kawasan Strategis Provinsi yang berada di Kota Langsa meliputi;

1) Kawasan Strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Pusat Perdagangan dan Distribusi Aceh; dan
2) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu kawasan ekowisata mangrove seluas 888,81 Ha.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kota Langsa.

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kota Langsa atas harga konstan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2020 di akibatkan oleh pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 nilainya sebesar Rp.3,85 triliun turun menjadi Rp.3,81 triliun pada tahun 2020. Tahun 2021 nilai PDRB kembali meningkat menjadi Rp.3,97 triliun. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Hasil analisis PDRB atas harga konstan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Nilai (Juta Rupiah) dan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Langsa

Kategori	2017		2018		2019[r]		2020*		2021**	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	300,646.10	8.49	308,777.24	8.36	319,870.74	8.29	332,554.93	8.72	332,782.45	8.37
2. Pertambangan dan Penggalian	16,933.64	0.48	17,019.39	0.46	16,728.88	0.43	16,807.79	0.44	16,718.68	0.42
3. Industri Pengolahan	315,411.07	8.91	329,143.33	8.91	330,890.08	8.58	312,488.38	8.19	319,446.54	8.04
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4,565.84	0.13	4,530.33	0.12	4,611.09	0.12	4,607.61	0.12	4,523.43	0.11
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,764.76	0.05	1,710.93	0.05	1,882.92	0.05	1,870.76	0.05	1,915.67	0.05
6. Konstruksi	342,498.61	9.67	356,830.54	9.66	367,625.66	9.53	405,231.98	10.62	403,875.98	10.16
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,040,699.18	29.39	1,091,397.32	29.54	1,134,679.69	29.42	1,087,909.14	28.52	1,136,417.56	28.59
8. Transportasi dan Pergudangan	312,787.80	8.83	318,991.99	8.64	323,132.24	8.38	262,604.98	6.88	311,450.84	7.84
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91,798.84	2.59	105,062.76	2.84	119,403.25	3.10	109,189.86	2.86	108,198.51	2.72
10. Informasi dan Komunikasi	218,808.11	6.18	220,908.20	5.98	232,702.49	6.03	262,432.77	6.88	277,198.83	6.97
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	100,189.92	2.83	101,702.39	2.75	108,775.12	2.82	112,569.64	2.95	106,631.87	2.68
12. Real Estate	154,731.25	4.37	161,059.76	4.36	167,888.69	4.35	166,721.94	4.37	172,975.31	4.35
13. Jasa Perusahaan	32,902.00	0.93	34,484.59	0.93	36,163.98	0.94	35,962.98	0.94	36,095.25	0.91
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	261,678.59	7.39	276,420.40	7.48	298,672.47	7.75	294,546.87	7.72	309,528.61	7.79
15. Jasa Pendidikan	67,473.31	1.91	72,223.43	1.96	78,239.64	2.03	81,890.09	2.15	82,321.66	2.07
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193,277.20	5.46	204,661.23	5.54	218,434.93	5.66	227,780.88	5.97	250,398.67	6.30
17. Jasa lainnya	84,552.06	2.39	89,163.07	2.41	96,519.32	2.05	100,034.33	2.62	104,134.08	2.62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3,540,718.30	100.00	3,694,086.90	100.00	3,856,219.21	100.00	3,815,194.93	100.00	3,974,613.94	100.00

[r] *Angka revisi*
** Angka sementara*
***Angka sangat sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Langsa selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2017 yang nilainya sebesar Rp.4,53 triliun hingga tahun 2021 mencapai Rp.5,78 triliun. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Langsa selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar Rp.1,24 triliun. Pada tahun 2021 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Langsa meningkat tajam dari tahun 2020 sebesar Rp.503 milyar dari Rp.5,27 triliun menjadi Rp.5,78 triliun. Peningkatan ini merupakan peningkatan terbesar selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga pada tahun perhitungan, sehingga tidak dapat digunakan untuk melihat perkembangan nilai PDRB secara riil. Oleh karena itu digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Hasil analisis PDRB atas harga berlaku dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Nilai (Juta Rupiah) dan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Berlaku Kota Langsa

Kategori	2017		2018		2019[r]		2020*		2021**	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	370,696.27	8.17	395,892.09	8.12	423,221.08	8.08	453,630.61	8.60	499,899.44	8.65
2. Pertambangan dan Penggalian	18,207.07	0.40	18,486.53	0.38	19,384.42	0.37	19,388.55	0.37	19,714.74	0.34
3. Industri Pengolahan	431,287.22	9.50	457,800.59	9.39	473,492.44	9.04	461,313.07	8.75	583,809.15	10.10
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4,942.53	0.11	5,046.60	0.10	5,392.40	0.10	5,327.12	0.10	5,344.90	0.09
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,628.76	0.06	2,601.47	0.05	2,952.08	0.06	2,970.13	0.06	3,202.29	0.06
6. Konstruksi	452,181.59	9.96	499,138.58	10.24	532,274.26	10.17	588,156.26	11.15	620,211.42	10.73
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,395,793.53	30.76	1,504,257.10	30.87	1,577,564.21	30.13	1,528,790.65	28.99	1,631,294.79	28.21
8. Transportasi dan Pergudangan	352,220.92	7.76	360,852.05	7.40	367,864.93	7.03	300,669.05	5.70	377,094.85	6.52
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	127,112.62	2.80	153,236.83	3.14	180,459.43	3.45	168,912.60	3.20	174,666.02	3.02
10. Informasi dan Komunikasi	242,629.87	5.35	245,637.53	5.04	268,082.55	5.12	300,121.26	5.69	315,410.30	5.46
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	135,893.97	2.99	145,903.01	2.99	161,050.41	3.08	166,620.74	3.16	168,561.33	2.92
12. Real Estate	191,830.02	4.23	200,984.60	4.12	233,336.38	4.27	228,712.46	4.34	239,801.49	4.15
13. Jasa Perusahaan	41,021.01	0.90	45,328.22	0.93	50,087.68	0.96	52,122.79	0.99	55,854.13	0.97
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	357,908.33	7.89	384,920.34	7.90	440,184.66	8.41	449,112.30	8.52	484,674.63	8.38
15. Jasa Pendidikan	87,648.65	1.93	99,130.62	2.03	115,116.73	2.20	123,789.90	2.35	133,061.00	2.30
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219,576.54	4.84	236,460.13	4.85	263,736.90	5.04	287,205.79	5.45	316,169.73	5.47
17. Jasa lainnya	106,684.51	2.35	117,459.64	2.41	132,023.07	2.52	137,178.19	2.60	152,898.58	2.64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,538,326.43	100.00	4,873,136.18	100.00	5,236,223.62	100.00	5,278,581.46	100.00	5,781,668.78	100.00

[r] Angka revisi
**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*
Sumber: Kota Langsa Dalam Angka 2022, BPS

Untuk melihat perbandingan laju perkembangan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Perkembangan Kontribusi (Persen) Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kota Langsa

Kategori		2017		2018		2019r		2020*		2021**	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	8.17	8.49	8.12	8.36	8.08	8.29	8.60	8.72	8.65	8.37
2	Pertambangan dan Penggalian	0.40	0.48	0.38	0.46	0.37	0.43	0.37	0.44	0.34	0.42
3	Industri Pengolahan	9.50	8.91	9.39	8.91	9.04	8.58	8.75	8.19	10.10	8.04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.13	0.10	0.12	0.10	0.12	0.10	0.12	0.09	0.11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
6	Konstruksi	9.96	9.67	10.24	9.66	10.17	9.53	11.15	10.62	10.73	10.16
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30.76	29.39	30.87	29.54	30.13	29.42	28.99	28.52	28.21	28.59
8	Transportasi dan Pergudangan	7.76	8.83	7.40	8.64	7.03	8.38	5.70	6.88	6.52	7.84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.80	2.59	3.14	2.84	3.45	3.10	3.20	2.86	3.02	2.72
10	Informasi dan Komunikasi	5.35	6.18	5.04	5.98	5.12	6.03	5.69	6.88	5.46	6.97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.99	2.83	2.99	2.75	3.08	2.82	3.16	2.95	2.92	2.68
12	Real Estate	4.23	4.37	4.12	4.36	4.27	4.35	4.34	4.37	4.15	4.35
13	Jasa Perusahaan	0.90	0.93	0.93	0.93	0.96	0.94	0.99	0.94	0.97	0.91
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.89	7.39	7.90	7.48	8.41	7.75	8.52	7.72	8.38	7.79
15	Jasa Pendidikan	1.93	1.91	2.03	1.96	2.20	2.03	2.35	2.15	2.30	2.07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.84	5.46	4.85	5.54	5.04	5.66	5.45	5.97	5.47	6.30
17	Jasa Lainnya	2.35	2.39	2.41	2.41	2.52	2.05	2.60	2.62	2.64	2.62
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

r Angka revisi
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber: Kota Langsa Dalam Angka 2022, BPS

Katagori yang memegang peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kota Langsa adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya adalah kategori konstruksi dan kategori dengan peranan terbesar ketiga adalah kategori industri pengolahan. Berikut perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional:

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021 (Persen)

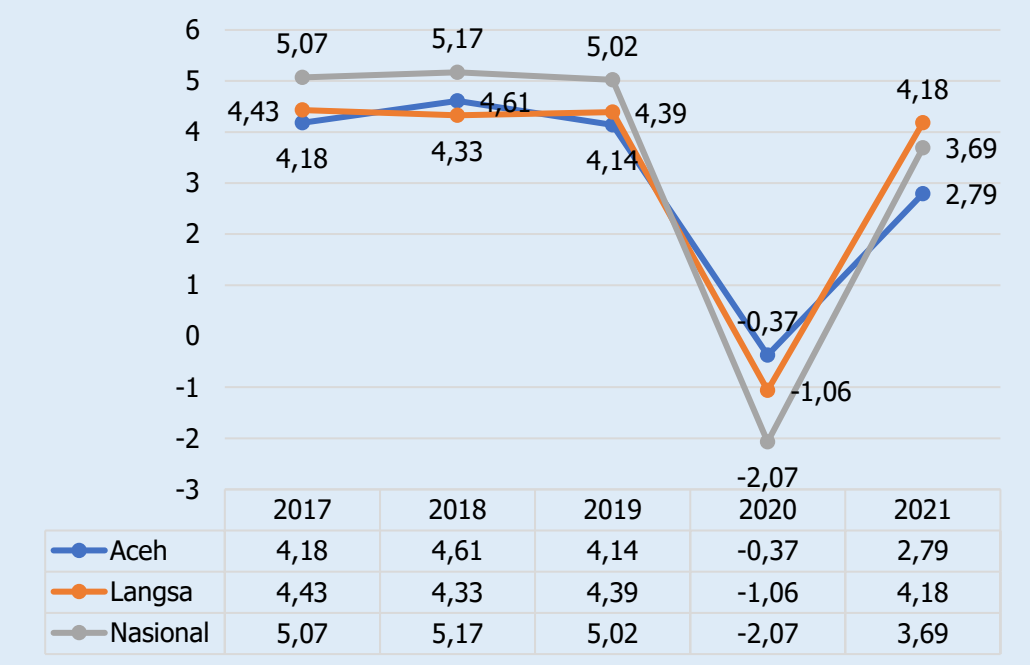

	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79
Langsa	4,43	4,33	4,39	-1,06	4,18
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber: Badan Pusat Statistik

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Langsa terjadi penurunan hingga menyentuh titik -1,06 persen. Begitu juga dengan Provinsi Aceh dan Nasional yang mengalami penurunan menjadi -0,37 persen dan -2,07 persen. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lesunya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Langsa mengalami peningkatan mencapai 4,18 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Langsa sejalan dengan Provinsi Aceh dan Nasional yang juga meningkat.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator yang memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Perhitungan laju inflasi Kota Langsa dihitung melalui laju pertumbuhan implisit.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan Implisit Tahun 2017-2021 Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

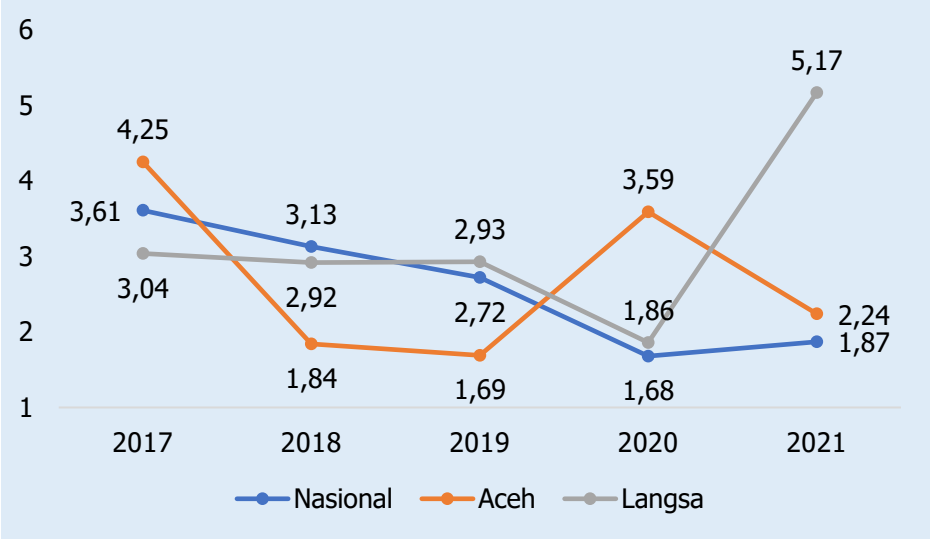

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2017-2021, laju pertumbuhan harga implisit Kota Langsa mengalami fluktuasi. Laju indeks harga implisit tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 5,17 persen. Hal ini mengidentifikasikan bahwa adanya kenaikan harga terhadap barang dan jasa di Kota Langsa selama kurun waktu tersebut. Laju indeks harga implisit paling rendah terjadi pada tahun 2020 salah satu dampak dari pademi Covid-19 yaitu sebesar 1,86 persen.

2.2.1.3. PDRB per Kapita

Peningkatan pada bidang ekonomi juga terlihat dari pencapaian PDRB per kapita. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu daerah. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan digunakan untuk perbandingan antar waktu.

Grafik 2.6
Pendapatan Per Kapita Kota Langsa Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021 Kota Langsa

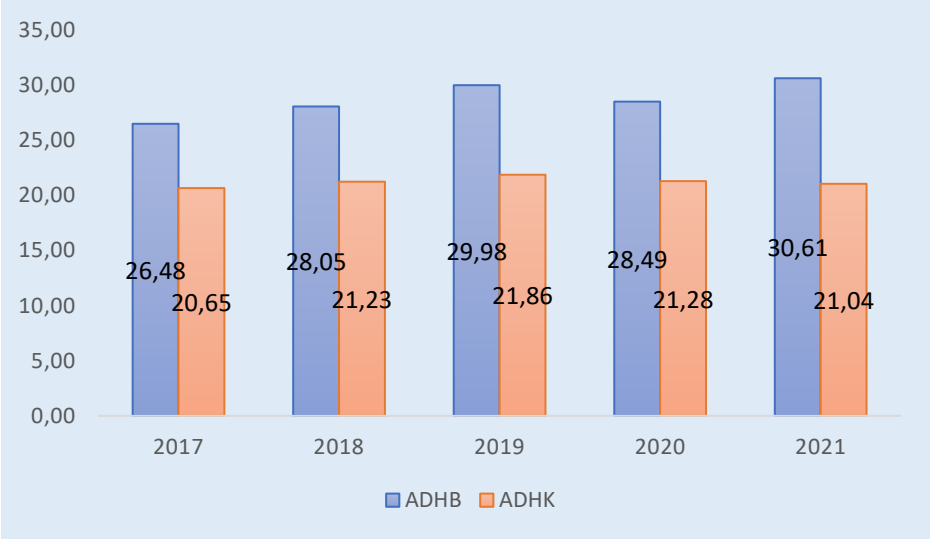

Sumber: Badan Pusat Statistik

PDRB per kapita Kota Langsa mengalami fluktuasi selama periode 2017-2021, baik untuk harga berlaku maupun harga konstan. Tahun 2021 PDRB per kapita Kota Langsa ADHB mengalami peningkatan, sementara itu untuk PDRB per kapita ADHK mengalami penurunan. PDRB per kapita Kota Langsa ADHK mengalami penurunan sebesar Rp.240.000. PDRB per kapita Kota Langsa ADHB pada tahun 2021 sebesar 30,61 juta rupiah meningkat sebesar Rp.1.920.000 dari nilai tahun 2020 yang sebesar 28,49 juta rupiah.

2.2.1.4. Indeks Gini

Indeks gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Grafik 2.7
Gini Ratio Kota Langsa dan Provinsi Aceh Tahun 2017-2021

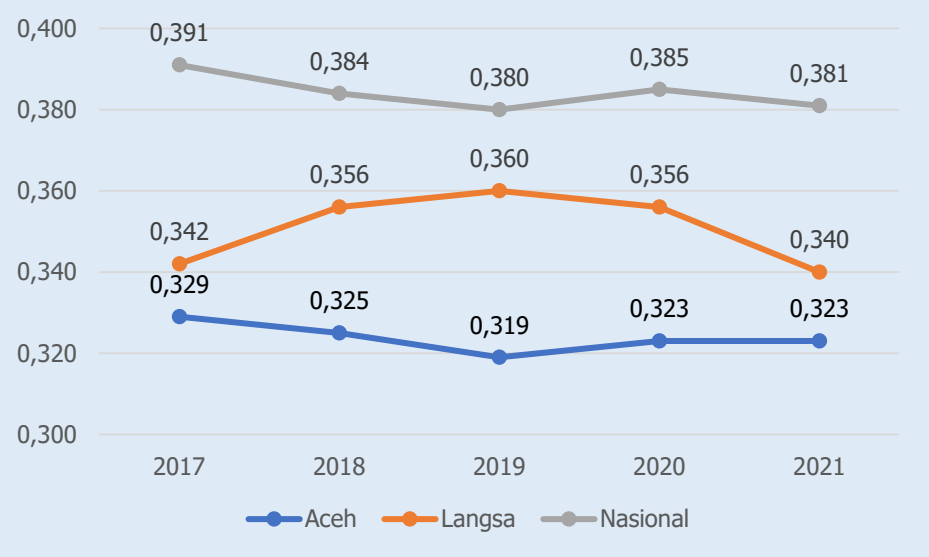

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Gini Ratio (IGR) di Kota Langsa selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi. Selama periode 2017-2021 IGR Kota Langsa berturut-turut sebesar 0,342; 0,356; 0,360; 0,356 dan 0,340. Dilihat dari hasil pencapaian IGR Kota Langsa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 maka penilaian IGR Kota Langsa termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan IGR Provinsi Aceh, terlihat bahwa capaian IGR Kota Langsa lebih tinggi. Namun sebaliknya, apabila dibandingkan dengan IGR Nasional, capaian IGR Kota Langsa lebih rendah meskipun ketiganya masih sama-sama berada dalam kategori Ketimpangan Sedang.

2.2.1.5. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Menurut BPS, Garis kemiskinan (GK) atau batas kemiskinan adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minumum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Langsa, garis kemiskinan di Kota Langsa tahun 2021 sebesar Rp.435.438 /kapita/bulan.

Tabel 2.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kemiskinan (%)	11,24	10,79	10,57	10,44	10,96
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	347.056	371.267	380.906	407.421	435.438
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	19,20	18,73	18,62	18,65	19,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Selama periode 2017-2020 kinerja Pemerintah Kota Langsa dalam menurunkan angka kemiskinan terus menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2017 angka kemiskinan Kota Langsa sebesar 11,24 persen, terus menurun setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 angka kemiskinan Kota Langsa sebesar 10,44 persen. Angka tersebut merupakan angka terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka kemiskinan menjadi 10,96 persen. Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa bertujuan meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program lainnya yang diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Grafik 2.8
Laju Perkembangan Kemiskinan Kota Langsa, Provinsi Aceh
dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)

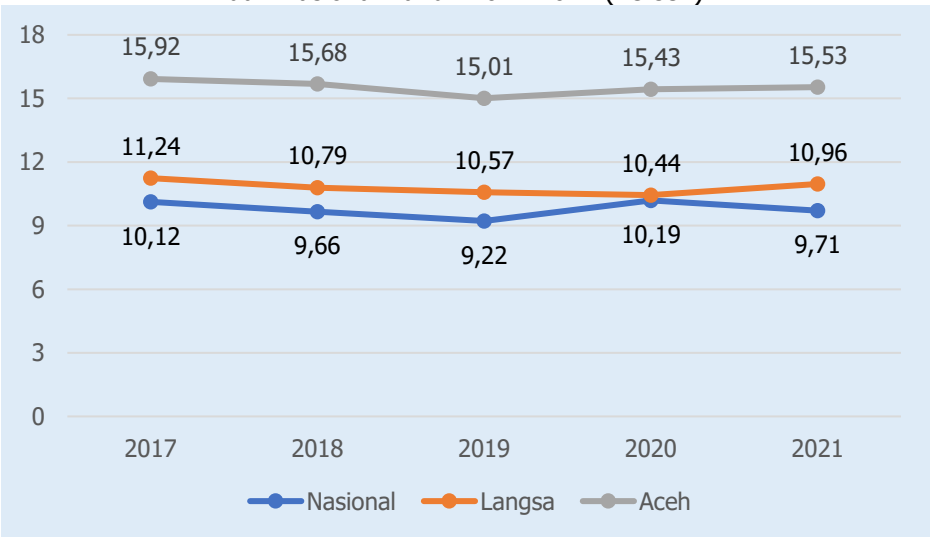

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa laju perkembangan kemiskinan Kota Langsa masih berada di bawah laju perkembangan kemiskinan Provinsi Aceh dan berada di atas Nasional. Meskipun capaian laju kemiskinan Kota Langsa lebih rendah dari Provinsi Aceh, Kota Langsa masih dianggap perlu

untuk menurunkan angka kemiskinannya melalui program-program strategis yang langsung menyentuh rumah tangga miskin.

Selain angka kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga merupakan indikator dalam mengukur kemiskinan suatu wilayah. Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan atau P2 merupakan indeks ketimpangan pengeluaran, dimana semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berikut perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indek Kedalaman Kemiskinan Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional:

Grafik 2.9
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021 (Persen)

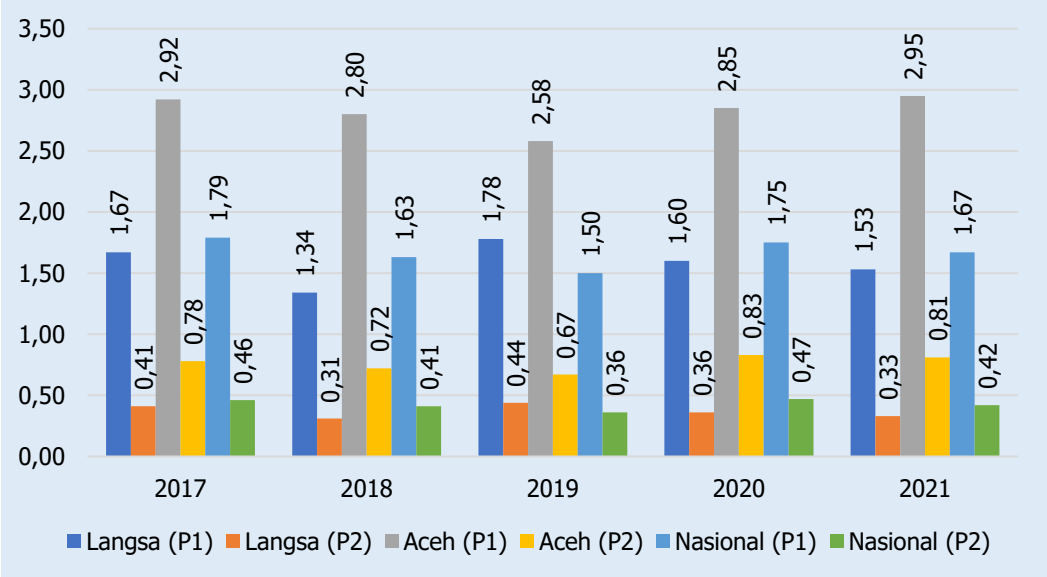

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Langsa selama kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi, dimana pada tahun 2017 sebesar 1,67. Selanjutnya turun pada tahun 2018 menjadi sebesar 1,34. Namun pada tahun 2019 indeks ini mengalami kenaikan sebesar 0,44 menjadi 1,78, menurun pada tahun 2020 menjadi 1,60 serta mengalami penurunan kembali menjadi 1,53 di tahun 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Langsa masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional. Hal ini menunjukan bahwa

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kota Langsa masih lebih rendah daripada Provinsi Aceh dan Nasional. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Langsa selama periode 2017-2021 mengalami penurunan sebanyak 0,08 poin menjadi 0,33. Hal ini menandakan ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2021 semakin berkurang dibanding tahun 2017. Sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Langsa masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Upaya Pemerintah Kota Langsa dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terbukti dengan IPM Kota Langsa yang terus meningkat dari tahun 2017 sebesar 75,89 persen menjadi 77,44 persen pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan IPM Provinsi Aceh dan Indonesia, capaian IPM Kota Langsa masih lebih tinggi. Berikut perkembangan IPM Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun :

Grafik 2.10
Perkembangan IPM Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021

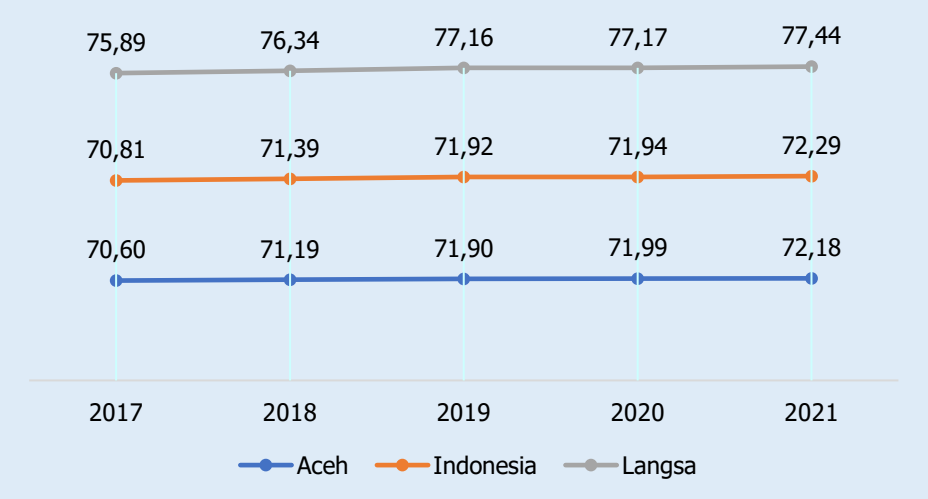

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Selama tahun 2017-2021 perkembangan IPM Kota Langsa telah mengalami kenaikan sebesar 2,04 persen, hingga pada tahun 2021 IPM Kota Langsa mencapai 77,44. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Aceh sebesar 72,18 dan Nasional sebesar 72,29 maka capaian IPM Kota Langsa masih lebih tinggi. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kota Langsa yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi semakin membaik.

Grafik 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021

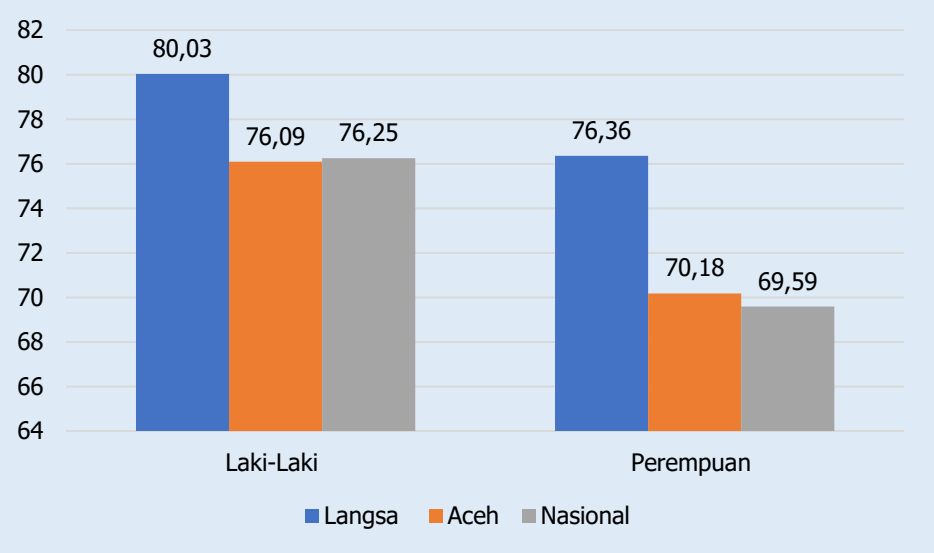

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tahun 2021 IPM laki-laki Kota Langsa mencapai 80,03 persen dan perempuan mencapai 76,36 persen sedangkan IPM laki-laki Provinsi Aceh mencapai 76,09 persen dan perempuan mencapai 70,18 persen. Pada tahun yang sama IPM laki-laki tingkat Nasional sebesar 76,25 persen dan perempuan 69,59 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM laki-laki capaiannya lebih tinggi dibandingkan IPM perempuan baik Kota Langsa, Provinsi Aceh maupun Nasional.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Analisis kondisi

pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif. Perkembangan angka melek huruf di Kota Langsa tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.12
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)

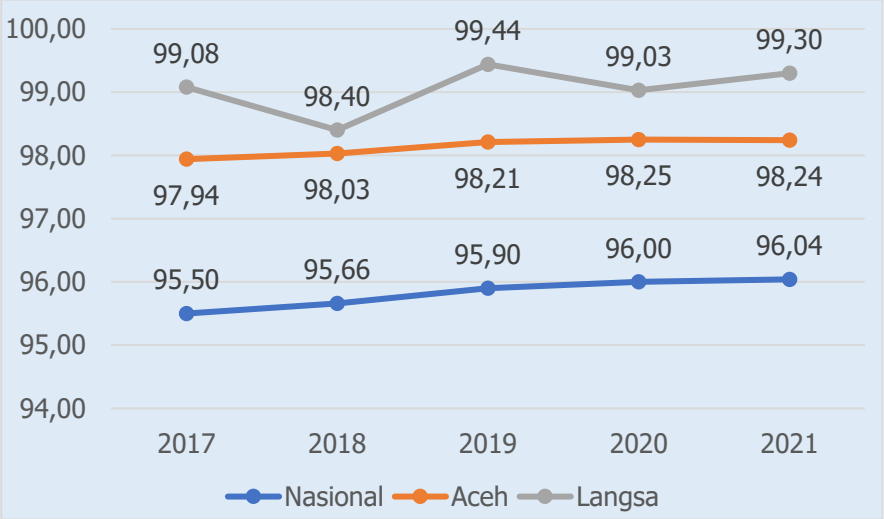

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Perkembangan angka melek huruf di Kota Langsa selama periode pada 2017-2021 mengalami peningkatan 0,22 persen. Pada tahun 2018 angka melek huruf turun 0,68 persen, hal ini disebabkan banyaknya pendatang yang berumur di atas 15 tahun tinggal di Kota Langsa. Pada tahun 2021 angka melek huruf Kota Langsa mencapai 99,30 persen. Sementara itu Provinsi Aceh mencapai 98,24 persen dan Nasional sebesar 96,04 persen. Angka melek huruf Kota Langsa selama kurun waktu lima tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional.

2.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu dimasa mendatang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada penduduk usia 7 tahun keatas.

Perkembangan angka harapan lama sekolah penduduk di Kota Langsa dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.13
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Langsa,
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

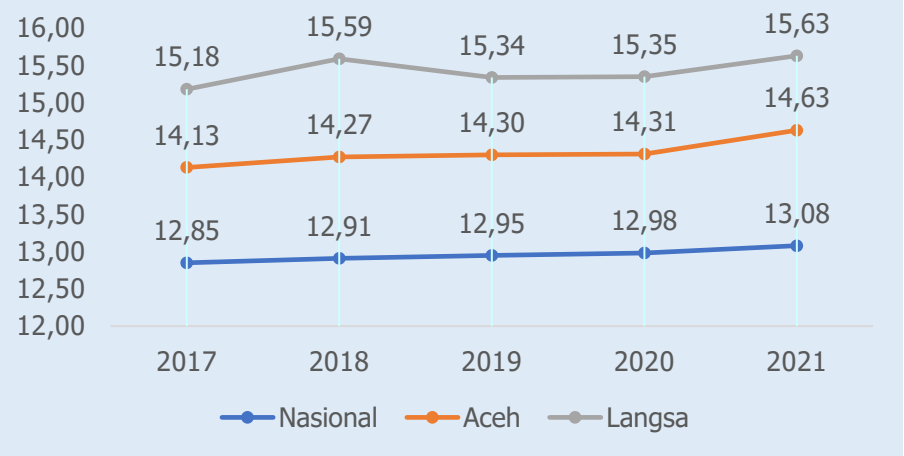

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Selama kurun waktu lima tahun angka HLS di Kota Langsa mengalami fluktuasi. Angka HLS tertinggi tercatat pada tahun 2021 yaitu 15,63 tahun, hal ini menandakan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,63 tahun atau setara dengan Diploma III. Pada tingkat Provinsi Aceh angka HLS tahun 2021 sebesar 14,63 tahun dan angka HLS Nasional sebesar 13,08 tahun. Hal ini menandakan bahwa angka HLS Kota Langsa lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional.

Grafik 2.14
Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Langsa,
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Tahun)

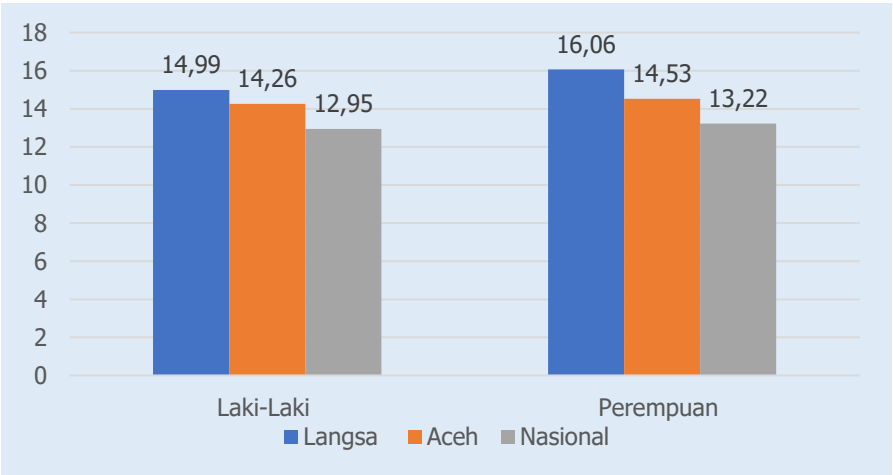

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tahun 2021 HLS laki-laki Kota Langsa mencapai 14,99 tahun dan perempuan mencapai 16,06 tahun sedangkan HLS laki-laki Provinsi Aceh mencapai 14,26 tahun dan perempuan mencapai 14,53 tahun. Pada tahun yang sama HLS laki-laki tingkat Nasional sebesar 12,95 tahun dan perempuan 13,22 tahun. Secara umum angka HLS laki-laki lebih rendah dibandingkan HLS perempuan.

2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan tertentu secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di suatu wilayah.

Selama periode 2017-2021, angka rata-rata lama sekolah Kota Langsa selalu berada di atas Provinsi Aceh dan Nasional. Tahun 2021 angka rata-rata lama sekolah Kota Langsa sebesar 11,12 tahun atau setara dengan kelas 2 tingkat SMA. Sementara itu di tahun yang sama angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh sebesar 9,37 tahun atau setingkat kelas 3 SMP dan angka rata-rata lama sekolah Indonesia hanya mencapai angka 8,54 tahun atau setingkat kelas 2 SMP.

Grafik 2.15
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Langsa,
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

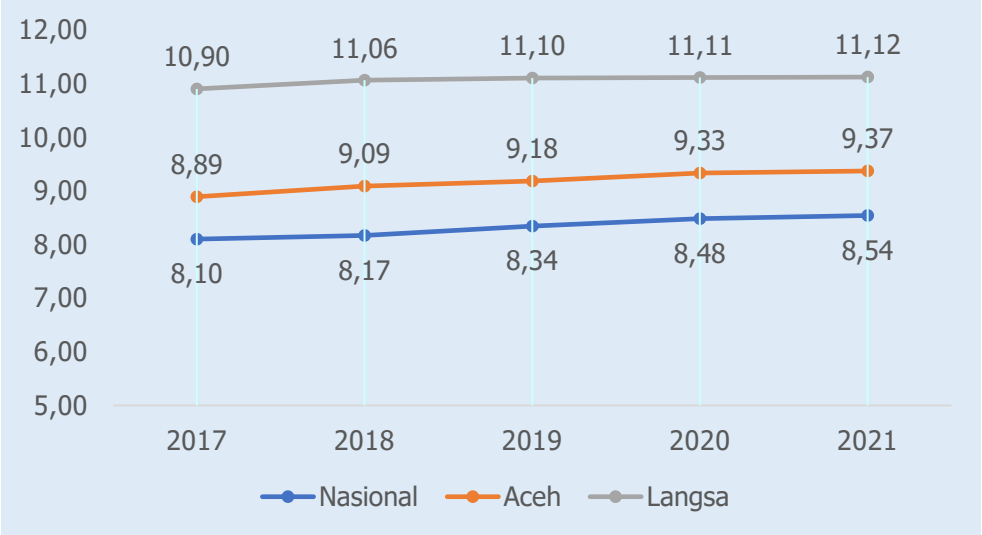

Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Langsa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 angka rata-rata lama sekolah mencapai 11,12 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kota Langsa semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Grafik 2.16
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Tahun)

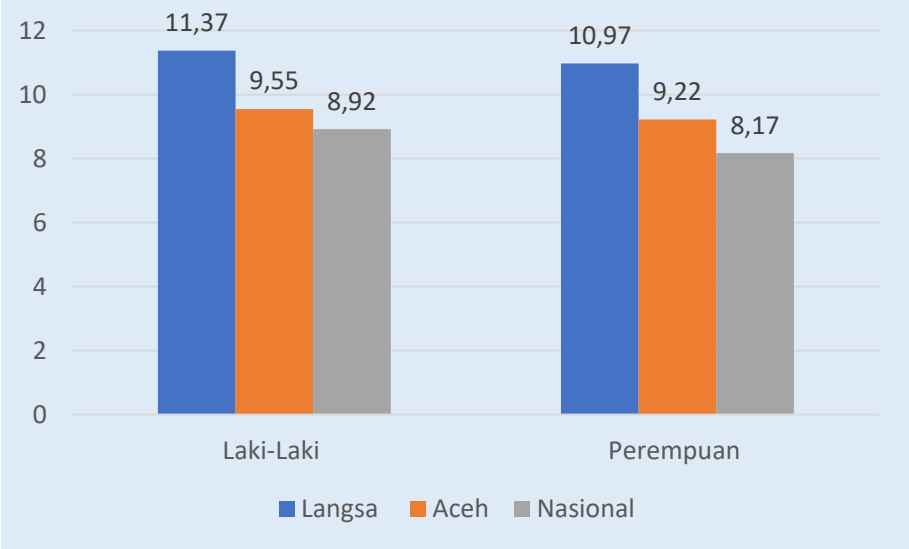

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tahun 2021 RLS laki-laki Kota Langsa mencapai 11,37 tahun dan perempuan mencapai 10,97 tahun sedangkan RLS laki-laki Provinsi Aceh sebesar 9,55 tahun dan perempuan sebesar 9,22 tahun. Pada tahun yang sama RLS laki-laki pada tingkat Nasional sebesar 8,92 tahun dan perempuan 8,17 tahun. Secara umum angka RLS laki-laki lebih tinggi dibandingkan RLS perempuan.

2.2.2.4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan masyarakat di dalamnya.

Selama periode tahun 2017-2021, AHH Kota Langsa terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 AHH Kota Langsa sebesar 69,06 tahun dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 berada diangka 69,43 tahun. Tahun 2021 AHH Provinsi Aceh sebesar 69,96 tahun dan Nasional mencapai 71,57 tahun. Hal

tersebut menunjukkan bahwa capaian AHH Kota Langsa berada di bawah Provinsi Aceh dan Nasional.

Grafik 2.17
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)

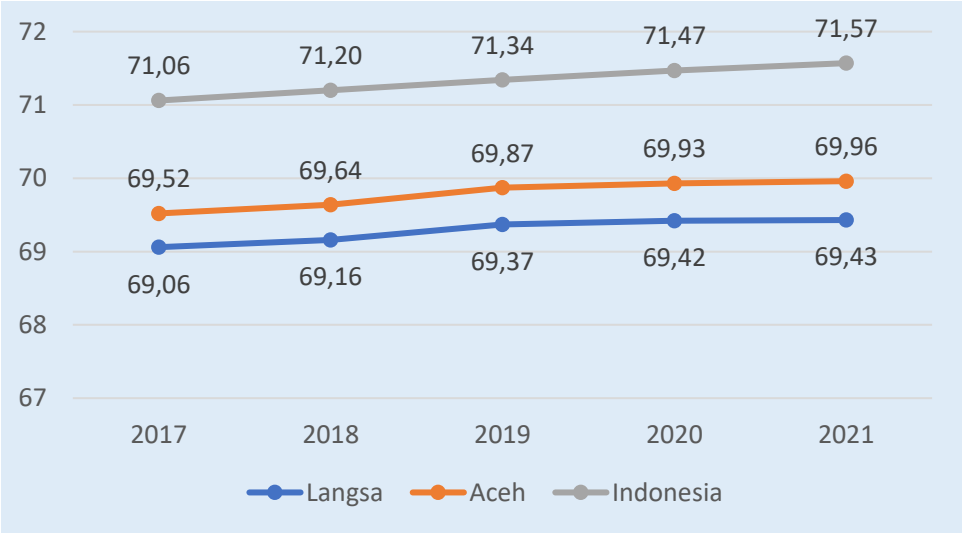

Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan AHH menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan AHH Kota Langsa tidak lepas dari berbagai kebijakan yang di upayakan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar, dimulai dari penyediaan infrastruktur, sarana prasarana maupun tenaga kesehatan serta kualitas layanan.

Grafik 2.18
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin di Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Tahun)

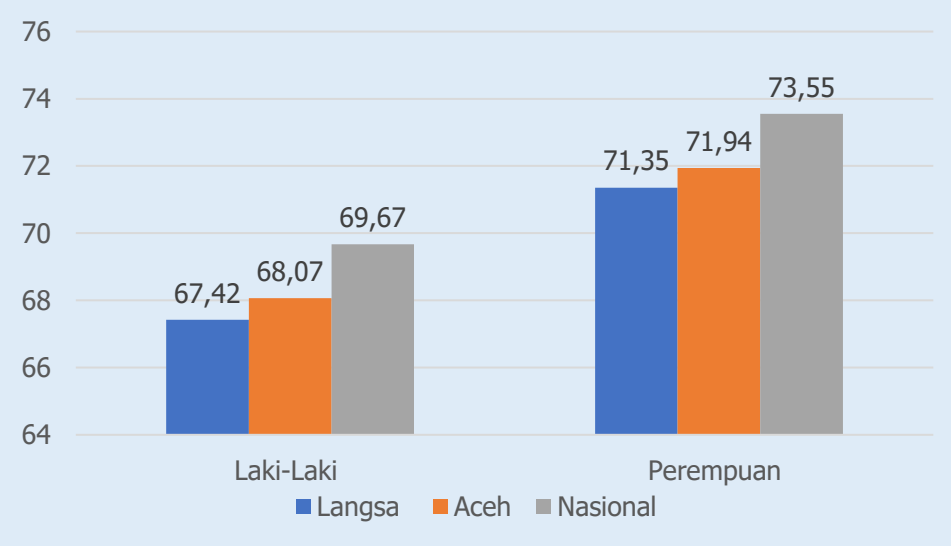

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2021 capaian AHH laki-laki Kota Langsa mencapai 67,42 tahun dan perempuan mencapai 71,35 tahun sedangkan AHH Provinsi Aceh menunjukkan laki-laki mencapai 68,07 tahun dan perempuan mencapai 71,94 tahun serta pada tingkat Nasional AHH laki-laki 69,67 tahun dan perempuan 73,55 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa AHH perempuan capaiannya lebih tinggi dibandingkan AHH laki-laki baik di Kota Langsa, Provinsi Aceh maupun Nasional.

2.2.2.5. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai usia 1 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, dan merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan congenital. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain.

Grafik 2.19
Perkembangan AKB dan AKHB Kota Langsa dan Provinsi Aceh
Tahun 2017-2021

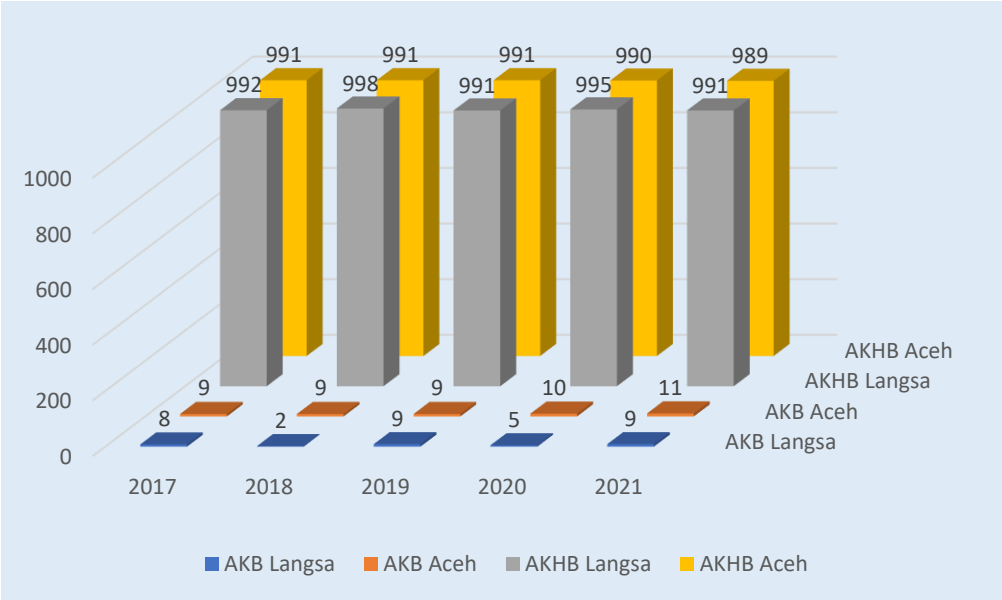

Sumber: SIPD E-database Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Angka Kematian Bayi (AKB) berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika AKB meningkat maka AKHB akan semakin menurun. AKB Kota Langsa selama periode 2017-2021 mengalami fluktuasi. AKB tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2021 yaitu sebesar 9 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2018 sebesar 2 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. AKHB Kota Langsa pada periode yang sama juga turut mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya AKB. Capaian AKB Kota Langsa lebih rendah dibandingkan AKB Provinsi. Sejalan dengan rendahnya AKB Kota Langsa maka capaian AKHB Kota Langsa lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh.

2.2.2.6. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita gizi buruk adalah persentase Balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah Balita. Penyebab langsung masalah gizi pada anak adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun.

Keadaan tubuh anak atau bayi, dilihat dari berat badan menurut umur. saStatus gizi Balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Sedangkan di bawah standar disebut gizi kurang.

Tabel 2.8
Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kota Langsa
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Balita Gizi Buruk	Jiwa	4	4	1	2	2
Jumlah Balita Gizi Kurang	Jiwa	101	106	86	59	78
Jumlah Balita	Jiwa	14.006	13.375	13.906	12.441	13.606
Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,028	0,029	0,007	0,016	0,014
Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	0,72	0,79	0,61	0,47	0,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Langsa

Selama periode waktu 2017-2021 prevalensi Balita gizi buruk dan gizi kurang bersifat fluktuatif. Prevalensi Balita gizi buruk dan gizi kurang tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu masing-masing sebesar 0,029% atau sebanyak 4 jiwa dan 0,79% atau sebanyak 106 jiwa.

Status gizi Balita masih bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta. Untuk itu masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan Balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan Balita agar dapat meminimalisir jumlah Balita dengan gizi buruk dan kurang.

2.2.2.7. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja erat dengan jumlah penduduk. Ukuran besar-kecilnya angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Definisi angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 64 tahun. Namun, tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja disebut angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan).

Tabel 2.9
Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Bekerja	Jiwa	78.465	70.799	76.830	77.618	81.655
Pengangguran Terbuka	Jiwa	5.937	5.431	6.411	8.389	6.346
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,84	62,88	67,44	66,58	67,04
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,03	7,12	7.70	9,75	7,21

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Tahun 2017 sebesar 70,84 persen dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 62,88 persen, kembali meningkat tahun 2019 menjadi 67,44 persen, dan di tahun 2020 kembali terjadi penurunan menjadi 66,58 persen. Tahun 2021 capaian TPAK kembali meningkat mencapain 67,04 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada tahun 2020 TPT Kota Langsa terjadi peningkatan sebesar 2,05 persen dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya pembatasan kegiatan sosial di masyarakat. Pada tahun yang sama TPT Provinsi Aceh dan Nasional juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,42 persen dan 1,84 persen. Meskipun di Kota Langsa tidak sampai diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetapi sudah menyumbang angka tinggi untuk TPT di Kota Langsa. Berikut perkembangan TPT Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional:

Grafik 2.20
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)

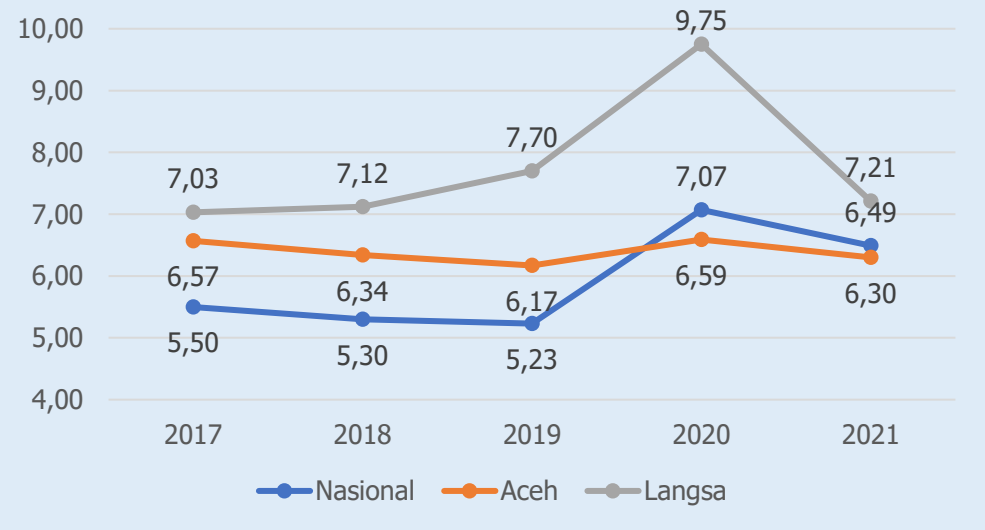

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.2.2.8. Indeks Kepuasan Masyarakat

Standar pelayanan merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil dari pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks ini merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tabel 2.10
Perkembangan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
Rumah Sakit Umum Daerah	%	81,17	75,81	80,17	81,36
Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan	%	79,20	75,59	72,57	83,78
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	-	83,19	95,79	83,69

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Langsa

Selama periode 2018 – 2021 nilai IKM di Kota Langsa terhadap pelayanan publik bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Kota Langsa masih terus perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Seni Budaya

Seni budaya merupakan penjelmaan rasa seni yang sudah membudaya, yang termasuk dalam aspek kebudayaan dan sudah dapat dirasakan oleh orang banyak dalam rentang perjalanan sejarah peradaban manusia. Dasar pembagunan seni budaya yang ada di Kota Langsa merupakan minat masyarakat Kota Langsa terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Melestarikan dan mempertahankan suatu kebudayaan bisa dilakukan dengan cara mendalami dan mengembangkan seni budaya tersebut.

Wadah untuk menyalurkan minat-minat seni budaya adalah melalui sanggar-sanggar atau grup-grup kesenian. Jumlah sanggar atau grup kesenian di Kota Langsa hingga tahun 2021 sebanyak 20 grup.

Grafik 2.21
Jumlah Grup/Sanggar Seni Tahun 2017-2021 Kota Langsa

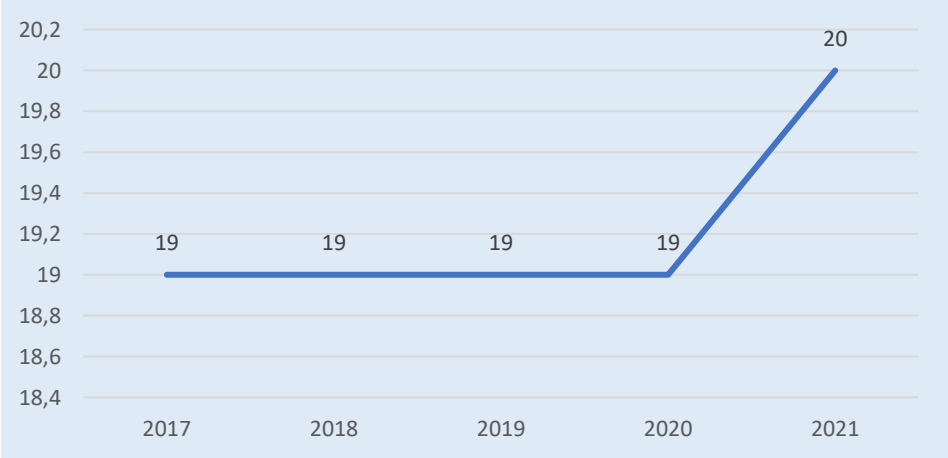

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

2.2.3.2. Olahraga

Jumlah cabang olahraga di Kota Langsa sampai dengan tahun 2021 sebanyak 43 cabang olahraga. Untuk memberikan fasilitas pembinaan terhadap organisasi olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Gedung olahraga yang tersedia di Kota Langsa hanya sebanyak 1 gedung.

2.3. Aspek Layanan Umum

Kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib, fokus layanan urusan pilihan dan urusan penunjang.

2.3.1. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

2.3.1.1. Pendidikan Islami

Pendidikan Islami merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar bagi masyarakat Aceh. Lembaga pendidikan tertua dalam sejarah pendidikan di Aceh adalah Dayah. Dayah adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang sudah sangat mengakar sejak Islam bertapak di Aceh pada abad pertama hijriyah. Anak-anak Aceh pada masa lalu, meskipun tidak mengenyam pendidikan formal seperti SD, SMP dan SMA, namun mereka tetap menjalani proses belajar pada dayah-dayah yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka.

Dayah di Aceh merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing generasi Islam secara umum melalui pendidikannya untuk menjadi manusia yang berkepribadian islami. Santri yang merupakan peserta didik pada dayah diharapkan mampu menjadi kader ulama, kader bangsa yang pada gilirannya akan menjadi tokoh masyarakat bangsa. Diharapkan dari Dayah lahir insan-insan yang menekankan pentingnya penerapan akhlak agama Islam yang merupakan pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.

Kiprah dayah hingga saat ini masih tetap eksis di Provinsi Aceh. Di Kota Langsa jumlah Pesantren/Dayah terus bertambah setiap tahunnya. Selama kurun waktu empat tahun jumlah Pesantren/Dayah bertambah sebanyak 17 Pesantren/Dayah. Pada tahun 2021 Kota Langsa memiliki 37 Pesantren/Dayah, baik tradisional maupun modern dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 852

ustadz/guru. Jumlah santri/murid pada seluruh pesantren setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2018 jumlah santri/murid hanya 3.779 orang, lalu meningkat menjadi 6.080 orang santri pada tahun 2021. Jumlah Pesantren/Dayah Provinsi Aceh mengalami peningkatan 397 unit pada tahun 2019 menjadi 1.136 Pesantren/Dayah dengan jumlah Ustadz/Guru sebanyak 22.951 orang.

Tabel 2.11
Jumlah Pesantren/Dayah, Ustadz dan Santri
Kota Langsa dan Provinsi Aceh Tahun 2018-2021

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
Pesantren/Dayah Kota Langsa	Unit	20	19	24	37
Ustadz/Guru Kota Langsa	Orang	509	496	735	852
Santri/Murid	Orang	3.779	4.475	5.414	6.080
Pesantren/Dayah Provinsi Aceh	Unit	739	1.136	1.136	1.136
Ustadz/Guru Provinsi Aceh	Orang	NA	22.951	22.951	22.951

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.3.1.2. Syari'at Islam

Syari'at Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam yang berlaku sepanjang masa dan dimanapun. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, Syari'at Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia.

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh termasuk di Kota Langsa meliputi bidang aqidah, syari'ah, dan akhlak. Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syari'at Islam, dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam. Selain itu, Pemerintah Aceh termasuk Pemerintah Kota Langsa juga menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Demikian juga dengan penerapan Syari'at Islam terhadap pelanggaran Qanun. Beberapa kasus pelanggaran Syari'at Islam telah ditindaklanjuti sesuai dengan Qanun tentang pelanggaran Syari'at, berikut adalah tabel jumlah pelanggaran Syari'at Islam di Kota Langsa:

Tabel 2.12
Penegakan Qanun Syari'at Islam Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Qanun No. 11 Tahun 2002	Pelanggaran	526	292	280	289	272
Qanun No. 06 Tahun 2014	Pelanggaran	51	62	41	54	37

Sumber: Dinas Syari'at Islam Kota Langsa

Pelanggaran Qanun Nomor 11 tahun 2002 di Kota Langsa tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 272 pelanggaran. Sama halnya dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pada tahun yang sama juga terjadi penurunan 17 pelanggaran dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakkan qanun Syari'at Islam di Kota Langsa terus ditingkatkan.

2.3.1.3. Perdamaian

Penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia secara damai dilakukan melalui penandantanganan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Kesepakatan Helsinki memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Terdapat 71 butir pasal dalam Kesepakatan Helsinki. Di antaranya, Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi. Hasil kesepakatan ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Penguatan implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif terus dilakukan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di samping itu, menguatkan kembali nilai-nilai K3 *(sustainable peace)* guna menciptakan situasi aman tentram dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Melalui Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 330/106/2006 tertanggal 2 Mei 2006, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi pemangku mandat penyaluran

dana dan pelaksanaan empat program utama reintegrasi yaitu pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan perlindungan sosial, anak korban konflik yang mendapat perhatian pemerintah, dan lembaga penanganan korban konflik.

Kombatan atau pejuang adalah status hukum seseorang yang memiliki hak untuk terlibat dalam peperangan selama konflik bersenjata internasional. Mantan kombatan GAM yang ada di Kota Langsa sebanyak 269 orang. Di tahun 2022, dalam rangka pemberdayaan ekonomi, para mantan kombatan akan diberikan bantuan berupa lahan.

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Langsa. Urusan wajib pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

2.3.2.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan yang dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Peningkatan di bidang pendidikan akan berimbas pada kualitas penduduk yang semakin baik. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

A. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Grafik 2.22
Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tahun Ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 Kota Langsa

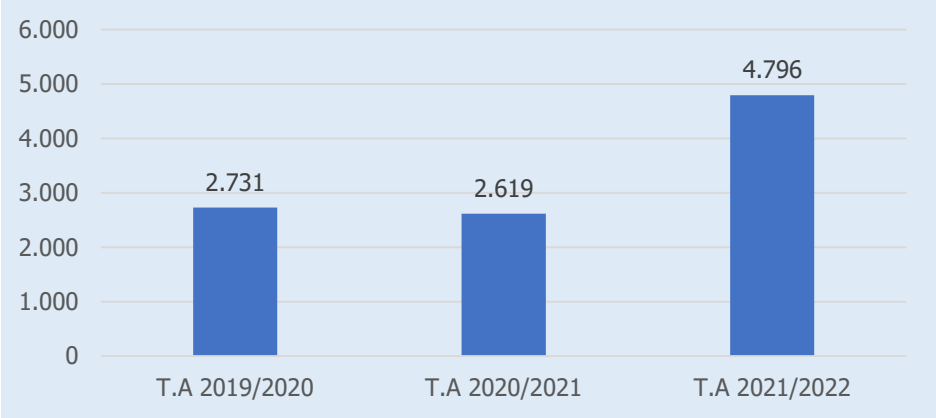

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Pandemi Covid-19 mempengaruhi jumlah siswa pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini. Jumlah murid jenjang TK/RA/BA pada tahun ajaran 2020/2021 berjumlah sebanyak 2.619 siswa, lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 2.731 siswa pada jenjang TK/RA/BA. Pada tahun 2021 jumlah siswa TK/RA/BA meningkat tajam mencapai 4.796 siswa. Hal ini dikarenakan sudah diperbolehkannya pembelajaran tatap muka sehingga banyak anak yang mendaftar TK/RA/BA.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai.

Grafik 2.23
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang Pendidikan SD/SMP/SMA
Tahun 2017-2021 Kota Langsa (Persen)

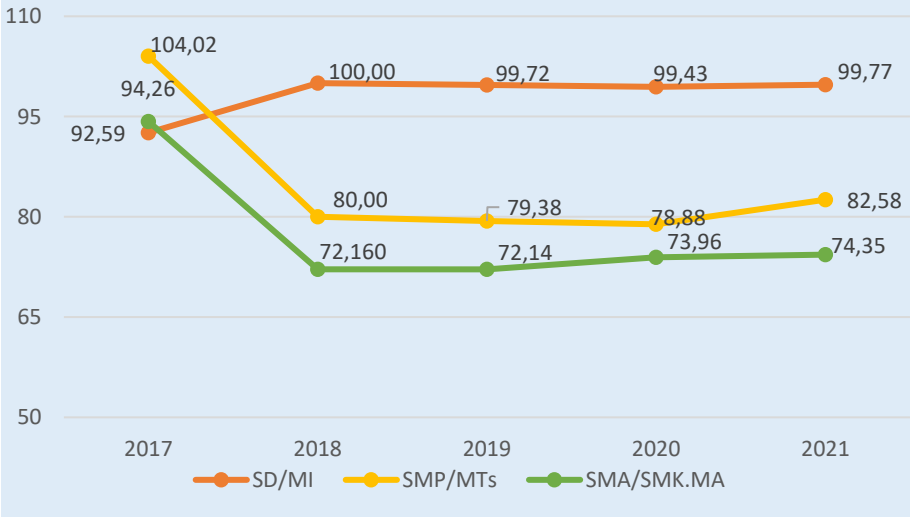

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Capaian APM Kota Langsa tahun 2021 pada masing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. APM Kota Langsa tahun 2021 pada jenjang SD/MI sebesar 99,77 persen, jenjang SMP/MTs sebesar 82,58 persen dan pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 74,35 persen. Adapun aspek yang mendorong tingginya nilai APM adalah sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Grafik 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Berdasarkan Jenjang
Pendidikan SD/SMP/SMA Kota Langsa, Provinsi Aceh
dan Nasional Tahun 2021 (Persen)

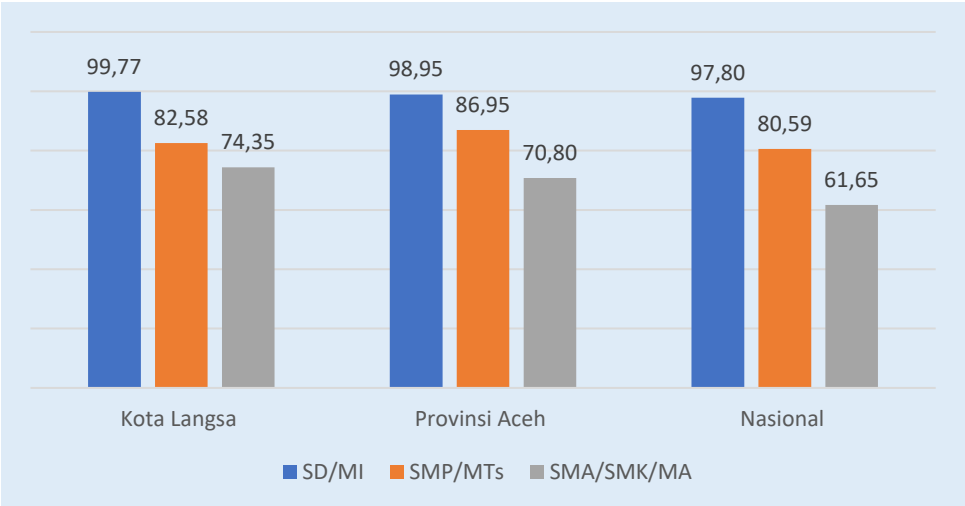

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa secara umum Angka Partisipasi Murni Kota Langsa lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional. Pada jenjang pendidikan SD/MI APM Provinsi Aceh mencapai 98,95 persen dan Nasional mencapai 97,80 persen sementara pada jenjang Pendidikan SMP/MTs APM Provinsi Aceh mencapai 86,95 persen dan Nasional mencapai 80,59 persen. Jenjang SMA/SMK/MA APM Provinsi Aceh mencapai 70,80 persen dan Nasional mencapai 61,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa APM Kota Langsa pada jenjang SMP/MTs lebih rendah dibandingkan Provinsi Aceh namun lebih tinggi dari Nasional. Pada jenjang SD/MI dan jenjang SMA/SMK/MA, APM Kota Langsa berada di atas Provinsi Aceh dan Nasional.

C. Angka Partsipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa (berapa pun usianya) yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berikut perkembangan APK di Kota Langsa:

Grafik 2.25
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/SMP/SMA
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

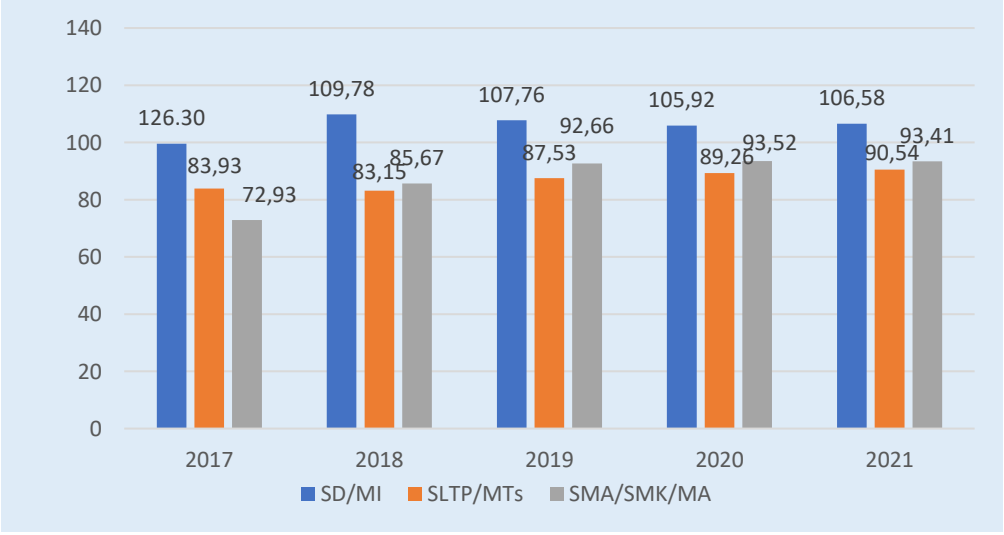

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2021, APK tingkat pendidikan SD meningkat sebesar 0,66 persen menjadi 106,58 persen. APK tingkat pendidikan SLTP naik sebesar 1,28 persen mencapai 90,54 persen namun APK tingkat pendidikan SLTA menurun sebanyak 0,11 persen menjadi 93,41 persen. Nilai capaian APK yang lebih dari 100 persen

menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Grafik 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan SD/SMP/SMA Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Persen)

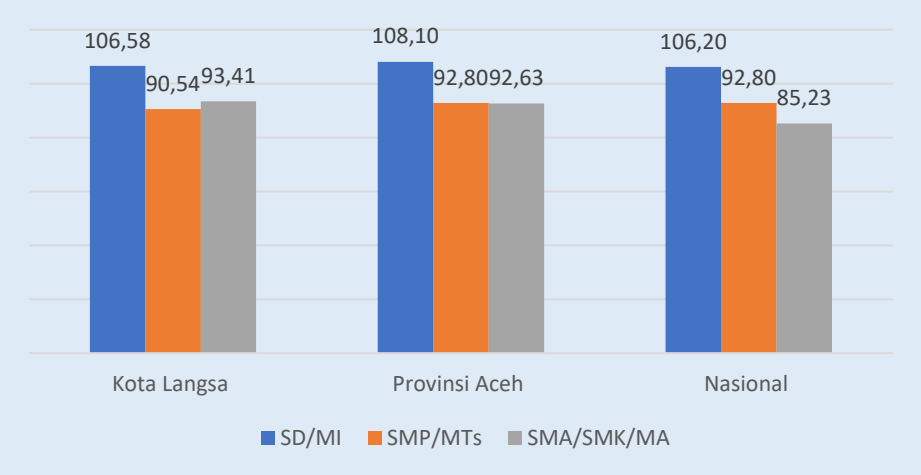

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa pada jenjang pendidikan SD/MI APK Kota Langsa lebih rendah dari Provinsi Aceh namun lebih tinggi dibandingkan Nasional. Pada jenjang Pendidikan tingkat SMP/MTs, APK Provinsi Aceh dan Nasional berada di atas Kota Langsa sementara itu pada tingkat SMA/SMK/MA APK Kota Langsa berada di atas Provinsi Aceh dan Nasional.

D. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di daerah tertentu. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2017-2021 Kota Langsa (Persen)

Kelompok Usia/Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
7-12	99,59	100	99,94	99,96	99,77
13-15	98,19	98,89	98,22	98,10	99,67
16-18	79,94	85,74	86,92	86,76	86,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Perkembangan APS di Kota Langsa periode 2017-2021 bersifat fluktuatif. Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD kelompok usia 7-12 tahun pada tahun 2021 mencapai 99,77 persen, dimana masih terdapat 0,23 persen penduduk usia tingkat SD yang tidak ikut mengenyam pendidikan di tingkat SD. Pada tingkat SLTP kelompok usia 13-15 tahun Angka Partisipasi Sekolah tahun 2021 mencapai 99,67 persen meningkat sebanyak 1,57 persen. Sedangkan pada pendidikan SLTA kelompok usia 16-18 tahun mengalami sedikit penurunan APS dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 86,73 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk Kota Langsa kelompok usia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP sebesar 0,33 persen pada tahun 2021 serta sebanyak 13,27 persen penduduk kelompok usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA.

Grafik 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Usia SD/SMP/SMA Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (Persen)

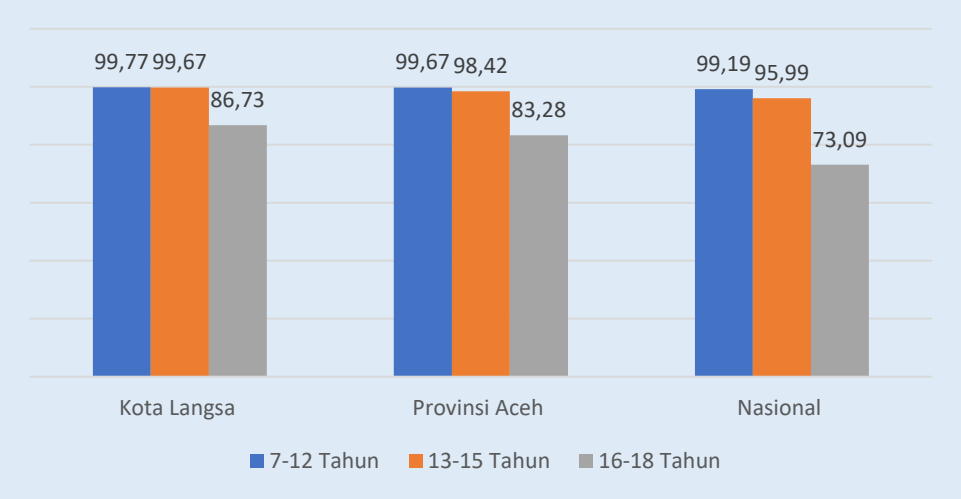

Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Langsa kelompok usia 7-12 tahun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional. Pada kelompok usia 13-15 tahun APS Provinsi Aceh dan Nasional menunjukan hal yang sama berada di bawah Kota Langsa masing-masing sebesar 98,42 persen dan 95,99 persen. Kelompok umur 16-18 tahun APS Kota Langsa berada di atas Provinsi Aceh dan Nasional yang masing-masing mencapai 83,28 persen dan 73,09 persen.

E. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APtS) yaitu proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat jangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang kurang baik dan tidak merata, sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik dan merata.

Tabel 2.14
Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan SD/SMP/SMA
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI	Siswa	0	4	16	1	19
Jumlah siswa pada tingkat dan jenjang SD/MI	Siswa	19.635	18.245	20.406	20.215	19.543
Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs	Siswa	4	10	3	0	3
Jumlah siswa pada tingkat dan jenjang SMP/MTs	Siswa	8.220	9.732	10.397	10.496	10.205
Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	2	3	18	0	54
Jumlah siswa pada tingkat dan jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	10.486	7.630	9.670	9.430	9.297
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0,02	0,08	0,004	0,10
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,05	0,10	0,03	0	0,03
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,02	0,04	0,18	0	0,58

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Berdasarkan tabel di atas, angka putus sekolah di Kota Langsa pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 angka putus sekolah pada jenjang SD/MI mencapai 0,10 persen atau masih terdapat 19 siswa yang mengalami putus sekolah dari 19.543 siswa. Pada tahun yang sama, jenjang SMP/MTS juga mengalami peningkatan angka putus sekolah menjadi 0,03 persen yang mana pada tahun sebelumnya telah mencapai posisi ideal yaitu sebesar 0 persen. Pada jenjang SMA/SMK/MA jumlah putus sekolah sebanyak 54 siswa atau sebesar 0,58 persen. Penyebab utama putus

sekolah antara lain karena kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depan serta kondisi ekonomi orang tua yang tidak memadai. Angka putus sekolah berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan dibidang pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

F. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan (AL) menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. AL untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Angka Kelulusan (AL) Jenjang Pendidikan SD/SMP/SMA
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

raian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah AL SD/MI	Siswa	3.061	3.048	2.386	2.398	2.409
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	19.635	3.060	2.409	2.398	2.384
Jumlah AL SMP/MTs	Siswa	3.051	3.262	2.105	2.217	2.089
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3.153	3.264	2.089	2.027	2.259
Jumlah AL SMA/SMK/MA	Siswa	2.968	3.025	NA	2.283	2.286
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	1.869	2.994	2.407	2.466	2.297
Angka kelulusan SD/MI	%	15,59	98,76	99,04	100	101,04
Angka kelulusan SMP/MTs	%	96,76	99,94	100,76	109,37	92,47
Angka kelulusan SMA/SMK/MA	%	158,80	101,03	NA	92,57	99,52

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Pada tahun 2021 Angka kelulusan tertinggi yaitu pada tingkat pendidikan SD/MI yang sebesar 101,04 persen. Tingginya AL ini di pengaruhi oleh adanya siswa yang mengikuti ujian paket untuk memperoleh ijazah tingkat Pendidikan SD/MI. Sementara persentase AL SMP/MTs sebesar 92,47 persen dan persentase AL SMA/SMK/MA sebesar 99,52 persen dimana masih terdapat sebanyak 0,48 persen siswa yang tidak/belum lulus.

G. Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase. AM digunakan

untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan SD-SMP dan SMP-SMA
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa	3.354	3.242	2.314	2.312	2.054
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3.061	3.022	2.386	2.398	2.409
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	3.642	3.251	2.649	2.283	2.649
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3.051	3.262	2.105	2.217	2.089
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	109,57	107,28	96,98	96,41	85,26
Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	119,37	99,66	125,84	102,97	126,80

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Angka melanjutkan sekolah tingkat SD/MI Ke SMP/MTS periode tahun 2017-2021 mengalami penurunan disetiap tahunnya. Pada tahun 2021 AM dari SD/MI ke SMP/MTS sebesar 85,26 persen. Hal ini dikarenakan adanya lulusan dari tingkat SD/MI di Kota Langsa yang tidak memilih jalur melanjutkan Pendidikan Ke tingkat SMP/MTS di Kota Langsa. Pada tahun yang sama, AM dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 126,80 persen. Hal ini menandakan tidak hanya lulusan yang berada di wilayah Kota Langsa yang melanjutkan pendidikan dari tingkat SMP/MTs ke SMA/AMK/MA, tetapi masyarakat di luar Kota Langsa juga ikut mengenyam pendidikan di Kota Langsa.

H. Fasilitas Pendidikan

Salah satu dari fasilitas belajar adalah adanya ketersediaan sekolah yang mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar. Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik. Fasilitas pendidikan kondisi bangunan baik di Kota Langsa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.17
Fasilitas Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah sekolah pendidikan SD	Unit	64	66	67	67	68
Jumlah sekolah pendidikan SDLB	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah sekolah pendidikan MI	Unit	8	10	10	10	11
Jumlah seluruh sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	73	77	78	78	80
Jumlah sekolah pendidikan SMP	Unit	17	18	18	18	21
Jumlah sekolah pendidikan SMPLB	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah sekolah pendidikan MTs	Unit	10	11	11	11	11
Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	28	30	30	30	33
Jumlah sekolah pendidikan SMA	Unit	9	9	10	10	9
Jumlah sekolah pendidikan SMALB	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah sekolah pendidikan SMK	Unit	10	10	10	10	9
Jumlah sekolah pendidikan MA	Unit	7	7	8	8	9
Jumlah sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Unit	27	27	29	29	28
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Jumlah fasilitas tingkat pendidikan Dasar di Kota Langsa pada tahun 2021 sekolah SD mencapai 68 sekolah sedangkan untuk MI hanya berjumlah 11 bangunan sekolah, demikian juga dengan tingkat SMP sebanyak 21 sekolah dan MTs hanya 11 sekolah. Pada tingkat menengah atas, jumlah SMA sebanyak 9 sekolah, SMK sebanyak 9 sekolah dan MA sebanyak 9 sekolah.

I. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi merupakan prasyarat menciptakan guru yang profesional. Guru profesional menjadi jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi, maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang

berkompetensi di setiap sekolah. Semakin tinggi persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV maka mutu pendidikan di Kota Langsa akan semakin membaik. Secara umum kualitas guru di Kota Langsa dilihat dari jenjang pendidikan guru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Tahun 2019-2021 Kota Langsa

Tingkat/Jenjang Pendidikan	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah Guru PAUD/TK Minimal S1/D4	Orang	62	62	59
Jumlah Guru PAUD/TK	Orang	69	69	63
Jumlah Guru SD Minimal S1/D4	Orang	572	538	498
Jumlah Guru SD	Orang	621	579	526
Jumlah Guru SMP Minimal S1/D4	Orang	384	379	349
Jumlah Guru SMP	Orang	397	392	353
Persentase Guru PAUD/TK Berkualifikasi D4/S1	Persen	89,86	89,86	93,65
Persentase Guru SD Berkualifikasi D4/S1	Persen	92,11	92,92	94,68
Persentase Guru SMP Berkualifikasi D4/S1	Persen	96,73	96,68	98,87

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Pada tahun 2021 jumlah guru yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa berjumlah 942 orang dengan tingkat pendidikan berijazah kualifikasi S1/D-IV mencapai 906 orang atau sebanyak 96,17 persen guru sudah memenuhi kualifikasi S1/D4. Pada jenjang PAUD/TK jumlah tenaga pendidik sebanyak 63 orang, yang sudah memenuhi kualifikasi sebanyak 59 guru yang artinya sudah 93,65 persen guru memenuhi kualifikasi S1/D4. Pada jenjang SD jumlah guru menurun 53 orang dibanding tahun sebeumnya menjadi 526 guru, yang sudah memenuhi kualifikasi sebanyak 498 guru atau 94,68 persen. Selanjutnya pada jenjang SMP jumlah guru sebanyak 353 orang, diantaranya sebanyak 349 guru sudah memenuhi kualifikasi. Pada tahun yang sama, jumlah tenaga pendidik pada jenjang SMA sebanyak 775 guru, dengan jumlah guru yang berijazah S1/D-IV sebanyak 770 guru atau mencapai 99,35 persen.

2.3.2.2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah, sehingga akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik sehingga memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

A. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Bayi
Kota Langsa Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	29	7	31	16	30
Jumlah kelahiran hidup	3.627	3.728	3.491	3.272	3.336
Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran	8	2	9	5	9
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	992	998	991	995	991

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa

Perkembangan angka kelangsungan hidup bayi di Kota Langsa pada tahun 2021 menurun 4 poin dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 991 dengan jumlah angka kematian bayi meningkat menjadi 9 bayi terhadap 1.000 kelahiran.

B. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (umur 0-28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup di Kota Langsa terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 AKN Kota Langsa sebesar 0 jiwa per 1.000 kelahiran hidup.

Grafik 2.28
Perkembangan AKN Tahun 2017-2021 Kota Langsa

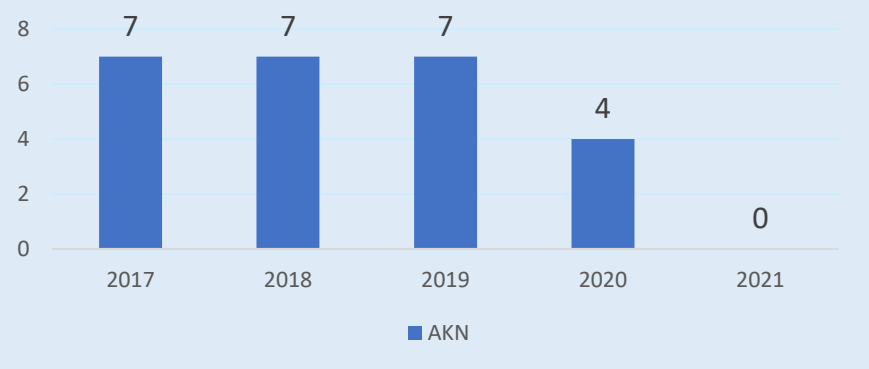

Sumber : SIPD E-database Kota Langsa (diolah)

C. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKBa merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun.

Grafik 2.29
Perkembangan AKBa Tahun 2017-2021 Kota Langsa

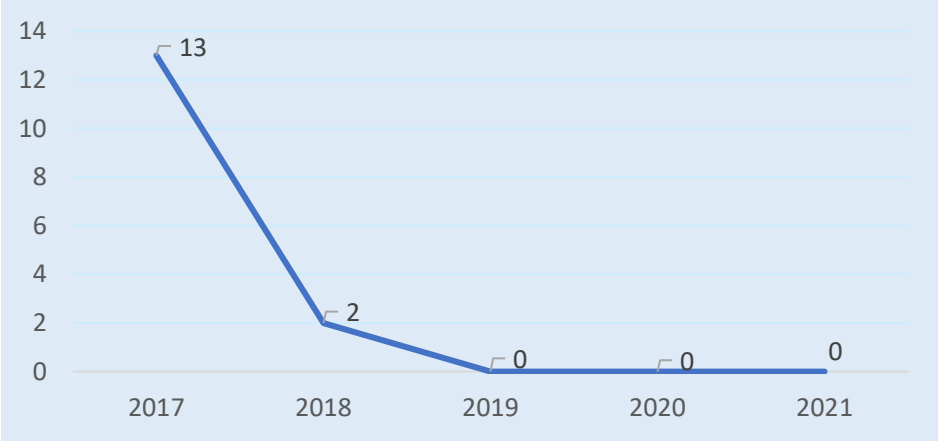

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Langsa

Angka kematian Balita (AKBa) Kota Langsa selama kurun waktu lima tahun terkahir mengalami penurunan. Selama periode waktu 2017-2021 AKBa terendah terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2021 sebesar 0 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan AKBa tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup.

D. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. Indikator Angka Kematian Ibu berguna untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi.

Angka Kematian Ibu di Kota Langsa selama kurun waktu lima tahun terkahir bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 83 per 100.000 kelahiran hidup, namun terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2018 menjadi 241 per 100.000 kelahiran hidup lalu kembali turun menjadi 86 per 100.000 kelahiran

hidup di tahun 2019, dan kembali meningkat 122 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 hingga pada tahun 2021 terjadi kenaikan tajam menjadi 300 per 100.000 kelahiran. Upaya efektif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dapat dilakukan dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional difasilitas kesehatan, serta meningkatkan penggunaan kontrasepsi paska persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

Grafik 2.30
Perkembangan AKI Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Langsa

E. Stunting

Selain permasalahan gizi buruk dan gizi kurang, salah satu hal yang menjadi permasalah gizi saat ini adalah stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Balita stunting disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Salah satu fokus Pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.

Penghitungan jumlah Balita stunting di Kota Langsa dilakukan melalui dua metode yaitu melalui SSGI dan e-PPGBM. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui

perkembangan status gizi Balita (*stunting, wasting,* dan *underweight*) pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Data SSGI berasal dari survei yang menyasar rumah tangga dengan anak Balita serta dilakukan oleh enumerator terlatih yang memiliki latar belakang pendidikan gizi. Sementara itu, data yang ada di e-PPGBM berasal dari penginputan data yang dilakukan oleh petugas gizi Puskesmas berdasarkan hasil penimbangan di Posyandu setiap bulannya. Perbedaan metode ini menentukan perbedaan kegunaan data. Data SSGI digunakan untuk monitoring dan evaluasi kemajuan intervensi gizi di tingkat nasional dan daerah. Sementara, data e-PPGBM berguna untuk memonitor pertumbuhan Balita setiap bulannya dan termasuk ke dalam surveilans program gizi. Data e-PPGBM juga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penetapan sasaran program gizi di daerah karena bersifat *real-time.* Berikut jumlah Balita stunting yang ada di Kota Langsa:

Tabel 2.20
Jumlah Balita Stunting Tahun 2018-2021 Kota Langsa

Metode	Satuan	2018	2019	2020	2021
e-PPGBM	Balita	-	579	280	171
SSGI	Balita	82	-	-	76

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Langsa

Selama periode tahun 2019-2021 jumlah Balita stunting apabila dihitung melalui metode e-PPGBM mengalami tren menurun, dimana selama tiga tahun jumlah Balita stunting menurun sebanyak 408 jiwa hingga pada tahun 2021 jumlah Balita stunting sebanyak 171 Balita. Pada tahun 2018 tidak ada penghitungan stunting melalui metode e-PPGBM, namun melalui metode SSGI ditemukan terdapat 82 Balita stunting. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada penghitungan stunting dengan metode SSGI. Pada tahun 2021 kembali dilakukan penghitungan dan ditemukan 76 Balita berstatus stunting dari 300 Balita yang menjadi sample survei.

Pada tahun 2021 prevalensi Balita stunting di Kota Langsa sebesar 25,5 persen, Provinsi Aceh mencapai 33,2 persen dan Nasional sebesar 24,4 persen. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional maka posisi Kota Langsa berada di atas Nasional dan di bawah Provinsi Aceh.

Grafik 2.31
Prevalensi Balita Stunting Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021 (persen)

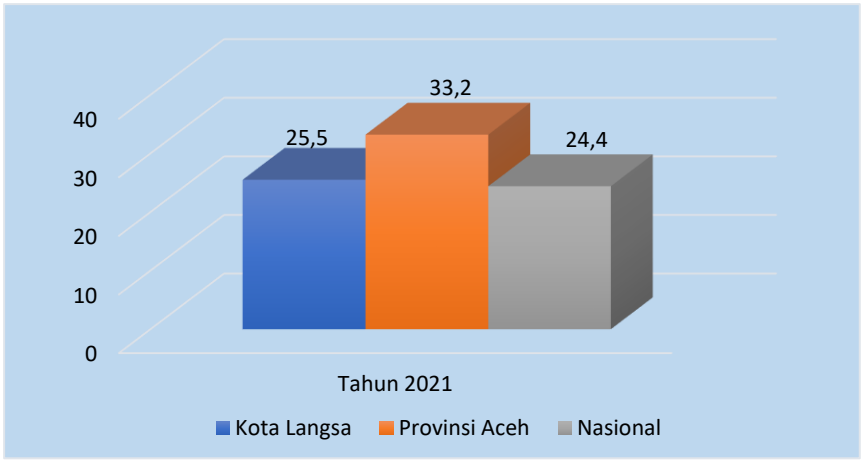

Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Indonesia berkomitmen mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada Tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Stranas percepatan penurunan stunting sebagai acuan bersama dalam melaksanakan program diseluruh kabupaten/Kota, dimana Kepala Bappenas telah menetapkan tambahan 154 Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi prioritas untuk tahun 2022, melalui surat keputusan Kementrian PPN Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 dimana termasuk Kota Langsa menjadi lokasi prioritas intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi secara nasional untuk tahun 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Langsa masih harus bekerja keras dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting yang terintregasi. Percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi dengan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota.

F. Rasio Posyandu Terhadap Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Tujuan utama

Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.21
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Posyandu	Unit	120	121	119	119	120
Jumlah Balita	Orang	14.006	13.375	13.906	12.441	13.606
Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per 1.000	9	9	9	10	9

Sumber: SIPD E-database Kota Langsa (diolah)

Jumlah Posyandu di Kota Langsa pada tahun 2021 sebanyak 120 unit. Idealnya 1 Posyandu melayani 100 Balita, untuk itu perlu dihitung rasio ketersediaan Posyandu per Balita. Tahun 2021 rasio Posyandu per satuan Balita sebesar 9 per 1.000, yang artinya dimana tersedia 9 Posyandu untuk melayani 1.000 Balita atau 1 Posyandu melayani sebanyak 113 Balita. Hal ini menandakan bahwa rasio Posyandu terhadap satuan Balita di Kota Langsa belum ideal.

G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu serta Rumah Sakit Terhadap Satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu merupakan sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaanya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu serta rumah sakit bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap 1.000 penduduk di Kota Langsa pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,19. Sedangkan untuk rasio rumah sakit terhadap 1.000 penduduk di Kota Langsa pada tahun yang sama yaitu sebesar 0,026.

Tabel 2.22
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Serta Rumah Sakit
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Puskesmas	Unit	5	5	5	5	5
Jumlah Poliklinik	Unit	19	13	13	15	22
Jumlah Pustu	Unit	7	7	8	8	8
Rasio Puskesmas, Poliklinik	Per	0,18	0,14	0,14	0,15	0,19

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
dan Pustu Per Satuan Penduduk	1.000					
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Swasta	Unit	3	3	3	3	4
Jumlah Penduduk	Orang	171.574	174.318	186.827	185.971	188.878
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Per 1.000	0,023	0,020	0,020	0,021	0,026

Sumber: SIPD E-database Kota Langsa (diolah)

Terhadap rasio rumah sakit yang masih terlalu kecil, dimana setiap 1.000 penduduk di Kota Langsa hanya mendapat manfaat layanan sebesar 0,026, hal ini menandakan bahwa masyarakat Kota Langsa masih sangat membutuhkan keberadaan rumah sakit yang lebih banyak lagi guna pemenuhan layanan kesehatannya.

H. Rasio Dokter dan Tenaga Medis Terhadap Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter dan tenaga medis terhadap satuan penduduk menggambarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Salah satu manfaat tersedianya dokter di Kota Langsa yaitu dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Apabila dikaitan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Kota Langsa belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Kota Langsa.

Tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian juga dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Secara rinci rasio dokter dan tenaga medis terhadap satuan penduduk di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Dokter	Orang	16	194	157	159	188
Jumlah Tenaga Medis	Orang	301	712	953	675	494
Jumlah Penduduk	Orang	171.574	174.318	186.827	185.971	188.878
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 1.000	0,09	1,11	0,67	0,85	0,99

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Per 1.000	1,75	4,08	6,97	3,63	2,61

Sumber: SIPD E-database Kota Langsa (diolah)

Tahun 2021 rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk mencapai 0,99 artinya untuk setiap 1.000 penduduk dapat dilayani oleh 1 orang dokter. Sementara itu ditahun yang sama rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk menurun dari tahun sebelumnya menjadi 2,61.

I. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.24
Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Pertolongan Persalinan
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Orang	627	707	509	481	451
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Orang	627	707	509	481	451
Jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan	Orang	3.877	3.727	3.478	3.242	3.224
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Orang	3.877	3.841	3.808	3.255	3.510
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	100	97.03	91,36	99,60	91,85

Sumber: SIPD E-database Kota Langsa (diolah)

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kota Langsa pada periode tahun 2017-2021 sudah mencapai 100%, artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan telah ditangani seluruhnya. Sedangkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menurun menjadi 91,85 persen. Ini menandakan bahwa masih adanya jumlah sasaran ibu bersalin yang tidak tertolong oleh tenaga kesehatan serta adanya ibu bersalin melakukan persalinan di tempat lain atau luar kota.

J. *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Imunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Desa UCI adalah Desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di Desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Tabel 2.25
Cakupan *Universal Child Imunization* (UCI) Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa UCI	Desa	66	66	55	44	66
Jumlah seluruh Desa	Desa	66	66	66	66	66
Cakupan Desa UCI	%	100	100	83,33	66,66	100

Sumber: SIPD E-database Kota Langsa (diolah)

Cakupan Desa UCI selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktasi, pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 100 persen. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan cakupan Desa UCI menjadi 83,33 persen dan 66,66 namun pada tahun 2021 cakupan Desa UCI kembali meningkat menjadi 100 persen.

K. Penyakit TBC TBA dan Penderita Penyakit DBD

Perkembangan penyakit *Tuberkolosis* dan *Dengue Hermorhagic Fever* (DBD) di Kota Langsa selama 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA dan Penderita Penyakit DBD Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Jiwa	112	97	303	100	289
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Jiwa	692	965	1.487	879	956
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa	129	119	91	41	18
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	129	119	91	41	18
Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	%	16,18	10.05	20,38	11,37	30,23
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: SIPD E-database Kota Langsa (diolah)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA selama kurun waktu tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 30,23 persen. Capaian ini diharapkan angka dapat terus meningkat setiap tahunnya sehingga keseluruhan cakupan penderita TBC BTA yang ada di Kota Langsa dapat ditemukan dan mendapat penanganan medis. Seperti hal nya cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD secara keseluruhan atau sudah mencapai angka 100 persen setiap tahunnya.

L. Covid-19

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu Sars-CoV2. Covid-19 telah menjadi masalah kesehatan global setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia/ *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 sudah menyebar di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Covid-19 ditetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Covid-19 dapat menyebar melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid-19 batuk, bersin atau berbicara. Peningkatan kasus terjadi akibat meningkatnya mobilitas penduduk dan kurangnya kesadaran terkait penerapan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Pandemi Covid-19 di Kota Langsa hingga Januari 2022 telah menginfeksi sebanyak 1.157 orang dengan tingkat kematian mencapai 95 orang. Angka kesembuhan Covid-19 Kota Langsa sebesar 91,8 persen. Upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah namun perlu sinergitas dan kontribusi dari semua elemen masyarakat. Salah satu upaya penanggulangan Covid-19 adalah melalui vaksinasi.

Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan

jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Macam-macam vaksin Covid-19 yang mendapat izin penggunaan di Indonesia semakin banyak. Hingga saat ini ada 10 macam vaksin Covid-19 yang mendapat izin penggunaan darurat atau *emergency use authorization* (EUA) diantaranya Sinovac, Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V, Janssen, Convidecia dan Zifivax.

Pemerintah Kota Langsa terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini vaksin Covid-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Hingga Januari 2022 total vaksinasi Kota Langsa sudah mencapai 179.572. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan Covid-19.

2.3.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.2.3.1. Pekerjaan Umum

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Pembangunan infrastruktur jalan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan arus distribusi barang dan jasa dalam mendukung perekonomian. Panjang jalan Kota Langsa keseluruhan mencapai 661,770 Km. Berikut proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Langsa.

Tabel 2.27
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	Panjang Jalan				
		2017	2018	2019	2020	2021
Panjang jalan kondisi baik	Km	304,171	312,502	315,920	419,440	525,21
Panjang jalan keseluruhan	Km	661,769	661,769	661,770	661,770	661,770
Jumlah penduduk	Jiwa	171.574	174.318	186.827	185.971	188.878
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	45,96	47,22	47,73	63,38	79,36
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/jiwa	3,85	3,79	3,54	3,55	3,50

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Langsa (diolah)

Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Selama kurun waktu lima tahun panjang jalan dengan kondisi baik di Kota Langsa meningkat 221,039 km. Pada tahun 2021 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 525,21 km. Sejalan dengan

semakin banyaknya penduduk berkendaraan, maka intensitas lalu lintas akan jalan juga semakin tinggi. Demikian pula dengan kemampuan kendaraan melaju di jalan dalam wilayah Kota Langsa dengan kecepatan km/jam yang diinginkan, untuk mengetahui jalan Kota Langsa dalam kondisi baik (>40 Km/jam) dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.28
Jalan Dalam Kondisi Baik dan Jalan yang Memiliki Trotoar/Saluran Pembuangan Air dan Sepadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Liar
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	Panjang Jalan				
		2017	2018	2019	2020	2021
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	304,171	312,501	315,920	369,050	462,49
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Panjang seluruh jalan kabupaten/kota	Km	611,369	611,369	611,370	611,370	611,370
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	Km	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten/Kota	Km	611,370	611,370	611,370	611,370	611,370
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (40 KM/Jam)	%	49,67	51,11	51,67	60,36	85,57
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	%	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Langsa

B. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Semakin lebar sempadan sungai maka akan memberi manfaat yang semakin baik bagi keberlanjutan fungsi sungai, yang akhirnya juga akan memberikan manfaat lebih besar bagi kehidupan manusia secara jangka panjang. Garis sempadan ini diciptakan untuk menjamin kelestarian dan fungsi sungai, serta menjaga masyarakat dari bahaya bencana di sekitar sungai, seperti banjir dan longsor. Kawasan sempadan sungai dapat dikembangkan menyatu dengan ruang terbuka hijau sebagai kawasan rekreasi dan olahraga bagi masyarakat.

Tabel 2.29
Perkembangan Panjang Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Km	8,2	8,2	8,2	8,2	0,50
Panjang seluruh sempadan sungai	Km	38,13	38,13	38,13	38,13	12,40
Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	21,51	21,51	21,51	21,51	4,03

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Langsa

Selama tahun 2017-2020 panjang sempadan sungai sepanjang 38,13 km dengan persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar sepanjang 21,51 persen. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan panjang sempadan sungai menjadi 12,40 persen dengan persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar sepanjang 4,03 persen. Hilangnya sempadan sungai karena diokupasi peruntukan lain yang menyebabkan turunnya kualitas air sungai karena hilangnya filter yang menahan pencemaran *non-point source*.

C. Drainase

Drainase memiliki tujuan penting dalam pembangunannya yaitu untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar lahan tersebut bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan kegunaannya. Drainase merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dalam rancangan perencanaan pembangunan. Komponen ini telah menjadi prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat khususnya diperkotaan dalam rangka menuju kehidupan kota yang nyaman, bersih, dan sehat.

Tabel 2.30
Perkembangan Drainase Tahun 2019-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air	Km	2,51	3,11	4,04
Panjang seluruh Drainase	Km	5,40	5,90	7,16
Panjang drainase sistem terbuka	Km	3,56	3,80	4,86
Panjang drainase sistem tertutup	Km	1,84	2,10	2,30
Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	46,48	52,71	56,42

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

Berdasarkan konstruksi, drainase terbagi menjadi drainase sistem terbuka dan tertutup. Drainase terbuka adalah drainase yang berguna untuk mengalirkan

air hujan pada wilayah yang luas. Selain itu, juga berfungsi sebagai media mengalirkan air yang tidak membahayakan kelestarian lingkungan. Sedangkan, drainase tertutup merupakan saluran yang berfungsi menghanyutkan air yang mengandung limbah. Dibuat tertutup agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Drainase tertutup juga berperan sebagai saluran dalam kota.

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Langsa selama periode tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 56,42 persen, dimana panjang drainase tidak tersumbat sepanjang 4,04 km dari total panjang drainase sepanjang 7,16 km. Hal ini menandakan bahwa masih ada sepanjang 3,12 km drainase yang masih mengalami penyumbatan. Tersumbatnya pembuangan aliran air ini kerap menimbulkan genangan air atau banjir pasca hujan.

D. Perkembangan Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Rawan Longsor

Turap atau dinding penahan tanah adalah konstruksi yang dapat menahan tekanan tanah di sekelilingnya, mencegah terjadinya kelongsoran dan biasanya terdiri dari dinding turap dan penyangganya.

Tabel 2.31
Perkembangan Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Rawan Longsor Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Km	0,24	0,24	0,24	0,24	2
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor	Km	12,04	12,04	12,04	12,04	5
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	1,99	1,99	1,99	1,99	40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Langsa

Selama tahun 2017-2020 pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan Kota Langsa sebesar 1,99 persen, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 40 persen.

E. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah sehat salah satunya haruslah memiliki sistem sanitasi yang baik. Persentase rumah tangga bersanitasi di Kota Langsa pada tahun 2021 adalah 61,97 persen. Hanya 34.617 rumah yang memiliki sanitasi dari total keseluruhan rumah sebanyak 50.931 rumah. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar rumah di Kota Langsa belum memenuhi standar rumah sehat.

Tabel 2.32
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Langsa Tahun 2021

Uraian	Satuan	2021
Rumah Tinggal Bersanitasi	Unit	34.617
Jumlah Rumah Tinggal	RT	50.931
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	61,97

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Langsa

F. Air Bersih

Air adalah salah satu kebutuhan yang menjadi bagian tidak terpisahkan bagi seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat hidup jika tidak ada air, sehingga air sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Air bersih merupakan air yang dibutuhkan untuk dikonsumsi menjadi air minum. Sedangkan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Tabel 2.33
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2018-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	RT	14.172	14.834	15.033	15.924
Jumlah seluruh rumah tangga	RT	38.697	39.250	39.711	41.991
Persentase rasio rumah tangga pengguna air bersih	%	38,70	39,25	39,71	37,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa (diolah)

Jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih di Kota Langsa terus bertambah setiap tahunnya, hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan PDAM. Pada tahun 2021 jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih sebanyak 15.924 rumah tangga, dengan persentase sebesar 37,92 persen.

G. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Definisi kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dan pada umumnya terjadi di perkotaan. Beberapa indikator yang dapat

dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.

Pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan di Kota Langsa, telah menyebabkan semakin berkembangnya rumah petak kecil yang diperjualbelikan dan disewakan kepada para pendatang. Rumah-rumah petak kecil tersebut kemudian berkembang menjadi kawasan padat dan kumuh.

Tabel 2.34
Perkembangan Areal Kawasan Kumuh Tahun 2018-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
Luas kawasan kumuh	Ha	532,729	525,801	473,579	359,395
Luas wilayah	Ha	23.983	23.983	23.983	23.983
Persentase areal kawasan kumuh	%	2,22	2,19	1,97	1,50

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Langsa

Perkembangan areal Kawasan kumuh di Kota Langsa setiap tahunnnya terus berkurang, hal ini sejalan dengan salah satu program kementerian PUPR melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

H. Tempat Ibadah

Tempat ibadah merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing. Mayoritas penduduk di Kota Langsa memeluk agama Islam dengan persentase mencapai 99 persen lebih. Saat ini mesjid/meunasah, tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah semata-mata, tetapi juga merupakan pusat segala kegiatan sosial kemasyarakatan dan lebih jauh lagi mesjid/meunasah merupakan sentral segala kegiatan umat Islam. Berikut jumlah tempat ibadah yang ada di Kota Langsa:

Tabel 2.35
Perkembangan Tempat Ibadah Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Mesjid/Meunasah	Unit	199	202	219	219	204
Gereja	Unit	1	1	1	1	1
Vihara	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah Tempat Ibadah Keseluruhan	Unit	201	204	221	221	206
Jumlah Penduduk	Orang	171.574	174.318	186.827	185.971	188.878
Rasio Tempat Ibadah Per 1.000 Satuan Penduduk	Unit/orang	1,17	1,17	1,18	1,18	1,09

Sumber: SIPD E-database Kota Langsa (diolah)

Pada tahun 2021 jumlah Mesjid/Meunasah di Kota Langsa berkurang 15 unit dari tahun sebelumnya menjadi 204 unit, sementara untuk Gereja dan Vihara masing-masing berjumlah 1 unit.

2.3.2.3.2. Penataan Ruang

Penataan ruang di Kota Langsa sepenuhnya mengacu pada RTRW Kota Langsa yang tercantum dalam Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032.

Tabel 2.36
Ketaatan Terhadap RTRW, Wilayah Produktif, Wilyah Industri, Wilayah Kebanjiran, Wilayah Kekeringan dan Wilayah Perkotaan Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi RTRW	Ha	18.013	18.013	22.364	22.364	23.983
Rencana Peruntukan	Ha	23.938	23.938	23.938	23.938	31.345,65
Jumlah luas wilayah produktif	Ha	13.755	11.803	11.803	11.803	11.803
Jumlah luas wilayah industri	Ha	1.225	1.225	1.225	1.225	1.016,35
Luas wilayah kebanjiran	Ha	363	360	378	1.439	378,54
Luas wilayah kekeringan	Ha	39	39	0	0	0
Luas wilayah perkotaan	Ha	4.566	4.566	4.566	4.566	4.566
Jumlah seluruh wilayah budidaya	Ha	19.184	20.240	20.240	20.240	19.176
Ketaatan terhadap RTRW	%	75,24	75,24	93,42	93,42	76,51

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

Tahun 2021 untuk kategori ketaatan terhadap RTRW Kota Langsa menurun 16,91 persen menjadi 76,51 persen, dimana sudah terealisasi seluas 23.983 hektar terhadap rencana peruntukan seluas 31.345,65 hektar. Disisi lain, luas wilayah kebanjiran di Kota Langsa pada tahun yang sama kian membaik dimana pada tahun tersebut luas wilayah kebanjiran menurun 1.060,46 hektar menjadi 378,54 hektar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus ada pada kawasan permukiman adalah sebesar 30%. Dari luas tersebut, 20% diantaranya adalah RTH publik, dan sebesar 10% adalah untuk RTH privat.

Tabel 2.37
Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	373,5	373,5	476,14	1.258,71
Jumlah Ruang Terbuka Hijau	Unit	93	93	93	93

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
Luas Wilayah Keseluruhan	Ha	23.983	23.983	23.983	23.983
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Ha	0,015	0,015	0,019	0,052

Sumber: SIPD E-database Kota Langsa (diolah)

2.3.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Rumah Layak Huni

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Rumah Layak Huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan suplai air bersih di rumah tersebut. Terkait dengan kebutuhan rumah layak huni, Pemerintah Kota Langsa terus berusaha untuk menambah jumlah rumah dengan cara membangun dan melakukan rehab bagi para penduduk yang dikategorikan tidak mampu.

Tabel 2.38
Perkembangan Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah layak huni	Unit	29.664	32.334	33.304	34.303	35.332
Jumlah seluruh rumah	Unit	35.526	38.723	39.885	41.082	42.314
Jumlah penduduk	Orang	168.820	171.574	174.318	185.971	188.878
Rasio rumah layak huni	Unit/Orang	0,18	0,19	0,19	0,18	0,19
Cakupan rumah layak huni	%	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50

Sumber: SIPD E-database Kota Langsa dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Selama periode tahun 2017-2021 cakupan rumah layak huni di Kota Langsa sebesar 83,50 persen. Selama kurun lima tahun jumlah rumah layak huni bertambah sebanyak 5.568 unit, pada tahun 2017 jumlah rumah layak huni sebanyak 29.664 unit kemudian meningkat menjadi 35.332 pada tahun 2021.

B. Pemukiman Kumuh

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perDesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman kumuh

adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kawasan pemukiman kumuh dianggap sebagai permasalahan kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong berkembangnya pemukiman kumuh. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelolaan kota akan menentukan kualitas pemukiman yang terwujud. Berikut perkembangan lingkungan pemukiman kumuh di Kota Langsa.

Tabel 2.39
Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Luas lingkungan Pemukiman kumuh	Ha	90,140	71,44	333,43	313,67	359,395
Luas wilayah	Ha	23.983	23.983	23.983	23.983	23.983
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,37	0,29	1,39	1,30	1,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan tabel di atas persentase lingkungan pemukiman kumuh di Kota Langsa dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan 1,12 persen dengan kenaikan luas lingkungan 269,255 ha. Luas lingkungan pemukiman kumuh terbesar di Kota Langsa terjadi pada tahun 2021 dengan luas sebesar 359,395 ha atau 1,49 persen. Sementara itu pada tahun 2018 merupakan nilai terkecil dari capaian luas lingkungan pemukiman kumuh yaitu hanya sebesar 71,44 ha atau 0,29 persen.

2.3.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah Kota Langsa mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda/qanun,

penyelesaian pelanggaran K3, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang yang berlaku. Upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif terus dilakukan secara profesional, efektif dan produktif, hal ini ditujukan agar masyarakat dapat merasa tenang dalam melakukan aktivitas keseharian.

Tabel 2.40
Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Ketentraman, Keindahan Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Buah	927	127	154	138	491
Jumlah Pelanggaran K3	Buah	927	127	194	138	491
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraan, Keindahan)	%	100	100	79,38	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa

Tahun 2021 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Langsa mencapai 100 persen, dengan jumlah pelanggaran sebanyak 491 pelanggaran, Jumlah pelanggaran tersebut meningkat sebanyak 353 pelanggaran dari tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kinerja para petugas perlindungan masyarakat.

Tingkat pelaksanaan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam selama lima periode menunjukkan angka terendah pada tahun 2021 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 272 pelanggaran. Sedangkan untuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat angka pelanggaran terendah selama lima periode juga terjadi pada tahun 2021 dengan tingkat pelanggaran mencapai 37 pelanggaran yang terjadi, untuk lebih jelasnya terkait perkembangan pelaksanaan penegakan Syari'at Islam di Kota Langsa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Penegakan Qanun Syari'at Islam Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Qanun No. 11 Tahun 2002	Pelanggaran	526	292	280	289	272
Qanun No. 06 Tahun 2014	Pelanggaran	51	62	41	54	37

Sumber: Dinas Syari'at Islam Kota Langsa

Pelanggaran Qanun Nomor 11 tahun 2002 di Kota Langsa tahun 2021 menurun 17 pelanggaran dari tahun sebelumnya menjadi 272 pelanggaran. Sama halnya dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pada tahun yang sama juga

terjadi penurunan 17 pelanggaran dari tahun sebelumnya hingga menjadi 37 pelanggaran.

Konflik merupakan hal yang sulit dihidari ketika hidup bermasyarakat. Karena adanya keanekaragaman sehingga perbedaan itu menjadi sangat sensitif dan rentan untuk terjadi perselisihan. Konflik sosial yang kerap terjadi umumnya bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Konflik erat kaitannya dengan kerusuhan seperti pertikaian dan unjuk rasa. Berikut perkembangan konflik sosial di Kota Langsa.

Tabel 2.42
Pertikaian dan Unjuk Rasa Tahun 2019-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Pertikaian Antar Etnis	Kasus	-	-	-
Pertikaian Antar Wilayah Desa	Kasus	-	-	-
Pertikaian Antar Agama	Kasus	1	1	-
Pertikaian Antar Simpatisan Parpol	Kasus	-	-	-
Pertikaian Antar Pelajar	Kasus	-	-	-
Unjuk Rasa Bidang Politik	Kasus	1	-	-
Unjuk Rasa Bidang Ekonomi	Kasus	1	2	-
Unjuk Rasa Bidang Agama	Kasus	-	-	-
Unjuk Rasa Lainnya	Kasus	3	3	4

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa

Pertikaian antar agama yang terjadi di Kota Langsa, yaitu pertikaian antar umat muslim yang mana terdapat kondisi yang menimbulkan konflik atau ketegangan internal agama yaitu karena munculnya ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jama'ah serta tidak sesuai dengan Qanun Syari'at yang berlaku. Penyelesaian pertikaian dilakukan pemerintah Kota Langsa melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Kondisi politik Kota Langsa dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilu Kepala Daerah yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pemerintah Kota Langsa melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan pembinaan politik daerah setiap akan diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum serentak direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pemilu serentak dimaksud adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tingkat partisipasi politik dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilu. Pada tahun 2017 telah diadakan pemilihan Kepada Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Langsa. Sementara pada tahun 2019 dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Legislatif.

Tabel 2.43
Tingkat Partisipasi Politik Tahun 2017 dan 2019 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2019
Jumlah Pemilih	Orang	108.380	114.748
Jumlah Partai Politik	Partai	20	20
-Partai Nasional	Partai	16	16
-Partai Lokal	Partai	4	4

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilu tahun 2017 sebesar 68,95 persen dan tahun 2019 partisipasi masyarakat meningkat menjadi 81,89 persen. Jumlah partai politik yang ikut serta dalam pemilu 2017 dan 2019 masing-masing sebanyak 20 partai, yang terdiri dari 16 partai nasional dan 4 partai lokal.

2.3.2.6. Sosial

Ketersediaan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Langsa telah melakukan upaya melalui pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Langsa sampai dengan tahun 2021 meningkat tajam mencapai 95.228 jiwa. Faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah PMKS di Kota Langsa antara lain adalah faktor ekonomi, juga faktor mobilitas penduduk/PMKS yang berasal dari luar wilayah Kota Langsa.

Tabel 2.44
PMKS yang Dibiayai Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang	599	8.383	3.629	3.110	32.394
Jumlah PMKS yang serharusnya menerima bantuan	Orang	2.277	17.800	3.746	3.691	95.228
Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	599	8.383	4.697	6.084	32.394
Jumlah PMKS yang ada	Orang	11.387	NA	18.730	18.459	95.228

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	26,30	47,10	96,82	84,25	34,01
PMKS yang tertangani	%	5,26	NA	19,38	32,95	34,01

Sumber: Dinas Sosial Kota Langsa dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Penanganan PMKS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa tahun 2017-2021 sebanyak 52.157 jiwa. Selama kurun waktu lima tahun terkahir, tahun 2021 merupakan capaian tertinggi dari jumlah PMKS yang tertangani yaitu sebesar 32.394 orang sejalan dengan meningkat tajamnya jumlah PMKS pada tahun tersebut.

Salah satu unsur yang berperan dalam pembangunan penyelenggaran kesejahteraan sosial adalah PSKS. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adanya dukungan PSKS sebagai pilar-pilar partisipasi kesejahteraan sosial diharapkan dapat mendukung pelayanan di bidang sosial. Berikut PSKS yang ada di Kota Langsa:

Tabel 2.45
Jumlah PSKS di Kota Langsa Tahun 2019-2021

No	Jenis	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Karang Taruna	66	66	66
2	LKS/Orsos	-	-	-
3	PSM	20	20	20
4	TKSK	5	4	4
5	LK3	1	1	1
6	Kader Perempuan	-	-	-
7	Dunia Usaha	-	-	-
8	Tagana	30	30	30

Sumber: Dinas Sosial Kota Langsa

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Langsa hingga tahun 2021 terdiri dari Karang Taruna sebanyak 66 kelompok, Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 20 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 5, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebanyak 1 lembaga, dan Taruna Siaga Bencana sebanyak 30 kelompok.

Salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana diperlukan adanya bantuan sosial bagi korban bencana. Pada tahun 2021 jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 19.973

orang dengan jumlah korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 19.442 orang.

2.3.3. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.3.1. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia memiliki peran yang besar dalam pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang masuk ke dalam kelompok tenaga kerja yaitu penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

Tabel 2.46
Informasi Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Pencari kerja terdaftar	Orang	655	NA	175	193	74
Penempatan tenaga kerja	Orang	116	NA	67	2	1
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	17,70	NA	38,28	1,03	1,35

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa

Pada tahun 2021 jumlah pencari kerja Kota Langsa yang terdaftar sebanyak 74 orang, namun jumlah penempatan tenaga kerja hanya sebanyak 1 orang. Jumlah penempatan tenaga kerja tahun 2021 merupakan jumlah terkecil selama periode 2017-2021, hingga besaran pencari kerja yang ditempakan hanya 1,35 persen.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Indikator keberhasilan kinerja bidang ketenagakerjaan dapat diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Makin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.47
Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Bekerja	Jiwa	78.465	70.799	76.830	77.618	81.655
Pengangguran Terbuka	Jiwa	5.937	5.431	6.411	8.389	6.346
Tingkat Pengangguran	%	7,03	7,12	7.70	9,75	7,21

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Terbuka (TPT)						
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,84	62,88	67,44	66,58	67,04

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Tahun 2017 sebesar 70,84 persen, mengalami penurunan 7,96 poin pada tahun 2018. Tahun 2019 kembali meningkat 4,56 poin dan kembali mengalami penurun sebanyak 0,86 poin pada tahun 2020. Pada tahun 2021 capaian TPAK kembali meningkat menjadi 67,04 persen. Naik turunnya capaian TPAK tidak lepas dari faktor jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, serta berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis.

TPT menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kota Langsa dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 TPT sebesar 7,03 persen meningkat menjadi 9,75 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 capaian TPT menurun menjadi 7,21 persen.

2.3.3.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Grafik 2.32
Indeks Pembangunan Gender Kota Langsa, Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021

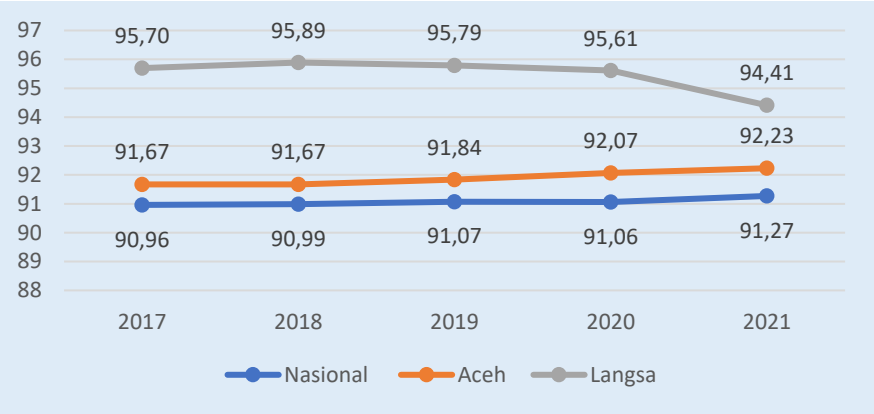

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Perkembangan IPG Kota Langsa selama kurun waktu lima tahun mengalami penurunan sebanyak 1,29 poin. Namun capaian IPG Kota Langsa pada tahun 2021 lebih tinggi apabila di bandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional.

B. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari indikator proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta persentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang di ukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Grafik 2.33
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Langsa, Provinsi dan Nasional
Tahun 2017-2021

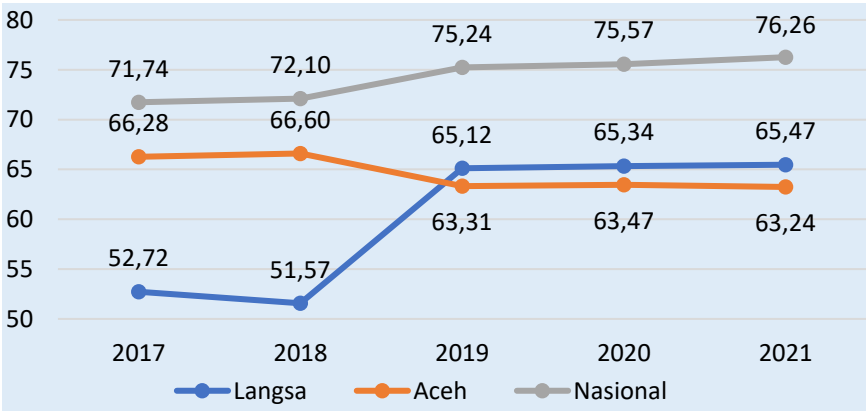

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh

Perkembangan IDG Kota Langsa selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan 12,75 poin. Pada tahun 2021 IDG Kota Langsa sebesar 65,47, Provinsi Aceh 63,24 dan Nasional 76,26. Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Aceh dan Nasional maka IDG Kota Langsa lebih tinggi dari Provinsi Aceh dan berada di bawah capaian Nasional.

C. Partisipasi Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun konsep diri.

Dalam konteks ketenagakerjaan, jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Langsa tahun 2021 mencapai 54,44 persen, hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan lebih tinggi dibandingkan dengan angka partisipasi perempuan di lembaga swasta yang mencapai 45,56 persen dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR yang mencapai 20 persen pada tahun 2021 untuk masa pemerintahan 2020-2024.

Tabel 2.48
Perkembangan Partisipasi Perempuan Kota Langsa Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	3.010	2.433	4.782	4.710	3.215
Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	750	740	2.559	2.690	2.690
Jumlah pekerja perempuan	Orang	3.760	3.173	7.341	7.400	5.905
Jumlah kursi DRPR yang diduduki perempuan	Orang	2	3	5	5	5
Jumlah total kursi di DPR	Kursi	25	25	25	25	25
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	80,05	76,68	65,14	63,64	54,44
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	19,95	23,32	34,46	36,36	45,56
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8	12	20	20	20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

D. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2.49
Rasio KDRT Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kasus kekerasan rumah tangga	Kasus	12	7	3	14	5
Jumlah rumah tangga	Rumah Tangga	38.087	38.697	39.250	39.711	41.991
Rasio KDRT	Persen	0,032	0,018	0,008	0,035	0,012

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Langsa selama periode lima tahun terakhir tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah KDRT mencapai 14 kasus dari keseluruhan 39.711 rumah tangga. Adapun rasio KDRT pada tahun tersebut sebesar 0,035 persen. Angka ini menunjukkan tingginya kasus KDRT yang terjadi di Kota Langsa, sehingga diharapkan selain adanya campur tangan Pemerintah Kota Langsa, diperlukan juga peran aktif masyarakat dalam upaya menekan seminimal mungkin jumlah kasus KDRT, mengingat dampak dari KDRT akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga.

2.3.3.3. Pangan

Menurut Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau. Pangan utama adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Bahan makanan pokok utama penduduk Kota Langsa yaitu beras.

Tabel 2.50
Perkembangan Pangan Tahun 2018-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
Luas panen padi	Ha	1.162	1.537	1.607	1.689
Produktivitas	Ton/Ha	4,44	4,12	4,09	5,85
Produksi padi	Ton	5.158	6.333	6.568	9.029
Jumlah stok beras Bulog di gudang Sub Drive Langsa	Ton	34.917.993,22	45.334.756,47	31.217.039,82	31.217.039,82

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Luas panen padi terus bertambah setiap tahun demikian juga dengan jumlah produksi. Pada tahun 2021 jumlah luas panen padi sebesar 1.689 ha dan produksi padi mencapai 9.029 ton. Sedangkan jumlah produktivitas padi pada tahun 2018-2020 terus mengalami penurunan setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 5,85 ton/ha. Salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas padi yaitu dengan mengatur kerapatan tanaman.

2.3.3.4. Pertanahan

Pertanahan adalah suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan serta menyelesaikan berbagai kasus tanah. Kasus tanah merupakan kasus terkait kepemilikan tanah dan bangunan. Berikut perkembangan urusan pertanahan di Kota Langsa.

Tabel 2.51
Perkembangan Urusan Pertanahan Tahun 2017-2020 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	4	0	2	0
Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	8	0	4	1
Penyelesaian kasus tanah	%	50	-	50	0

Sumber: Langsa Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Terhadap kasus-kasus pertanahan yang terjadi di Kota Langsa selama periode 2017-2020, hanya pada tahun 2020 yang belum ada penyelesaian terhadap kasus tanah yang terdaftar pada tahun yang bersamaan.

Bukti kepemilikan atau tanda bukti hak tanah antara lain; sertifikat tanah dengan status Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP). Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Langsa mengalami fluktuasi. Kegiatan pelayanan sertifikat hak tanah yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota langsa dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Kegiatan Pelayanan Sertifikat Hak atas Tanah Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jual beli	1.026	1.235	1.367	1.498	1.694
Hibah	64	100	82	126	223
Pemisahan hak	285	298	1.698	361	328
Warisan	87	93	126	186	194
Hak tanggungan	749	855	836	632	678
Pengakuan hak	249	2.768	177	169	166
Pemberian hak	3.779	3.550	103	79	81
Jumlah	6.239	8.899	4.389	3.051	3.364

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan kegiatan pelayanan sertifikat hak atas tanah di Kota Langsa tahun 2021 meningkat sebanyak 313 sertifikat dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan pada kategori jual beli, hibah, warisan, hak tanggungan dan pemberian hak. Sementara itu kategori pemisahan hak mengalami penurunan terbesar yaitu 33 sertifikat.

Tanah adalah salah satu bentuk aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. Peruntukan dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa ada yang digunakan untuk kepentingan umum, misalnya taman terbuka, sekolah dan ada yang digunakan untuk fungsi pelaksanaan pemerintahan. Aset milik daerah pada dasarnya memiliki dua fungsi yakni fungsi pelayanan dan fungsi *budgeter*. Fungsi pelayanan diartikan sebagai aset digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan fungsi *budgeter* diartikan bahwa aset dapat menjadi sumber tambahan PAD melalui bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Berikut daftar aset tanah bersertifikat dan belum bersertifikat Pemerintah Kota Langsa.

Tabel 2.53
Jumlah Aset Tanah Bersertifikat dan Belum Bersertifikat Pemerintah Kota Langsa Tahun 2021

Uraian	Satuan	2021
Jumlah aset tanah yang bersertifikat	Unit	210
Jumlah aset tanah yang belum bersertifikat	Unit	308
Jumlah aset tanah	Unit	518

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Jumlah aset tanah Pemerintah Kota Langsa hingga tahun 2021 sebanyak 518 unit dengan jumlah tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 210 unit dan yang belum bersertifikat mencapai 308 unit.

2.3.3.5. Lingkungan Hidup

A. Persentase Jumlah Sampah Tertangani

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses, dalam proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya.

Seiring dengan laju pertambahan penduduk, volume sampah juga ikut bertambah. Penanganan sampah di Kota Langsa masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari persentase penanganan sampah di Kota Langsa yang belum mencapai 100 persen. Berikut persentase penanganan sampah di Kota Langsa:

Tabel 2.54
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Volume sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	36.071	27.491,50	24.870,62	25.762,28	25.918,49
Volume produksi sampah	Ton/ Tahun	66.521	35.800,29	34.522,61	34.737,78	34.999,49
Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	54,22	76,79	72,04	74,16	74,05

Sumber: SIPD E-database Kota Langsa dan SIPSN

Perkembangan produksi persampahan di Kota Langsa terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021 jumlah timbunan sampah mencapai 34.999,49 ton/tahun dengan tingkat persentase jumlah sampah yang tertangani atau sampah terkelola mencapai 74,05 persen, masih ada sebanyak 25,95 persen sampah tidak terkelola di Kota Langsa.

Operasional pengangkutan sampah merupakan sub-sistem yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting guna menjaga dan memelihara

kebersihan lingkungan. Pengangkutan sampah yang optimal membutuhkan sarana pemindahan sampah berupa alat pengangkut yang memadai.

Tabel 2.55
Alat Angkut, TPS dan TPA Sampah Kota Langsa Tahun 2021

Uraian	Satuan	2021
Alat Angkut		
-Truk pengangkut sampah	Unit	16
-Motor pengangkut sampah	Unit	27
-Pickup pengangkut sampah	Unit	2
Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Unit	14
Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)	Unit	1
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Unit	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Warga Kota Langsa diperkenankan membuang sampah sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan yaitu pukul 21.00-07.00 WIB pada tempat pembuangan sementara yang ada. Namun pada implementasinya masih ada warga yang tidak mematuhi aturan dengan membuang sampah tidak pada waktu dan tempatnya. Mendindaklanjuti permasalahan tersebut Pemerintah Kota Langsa menerapkan aturan proses penangkutan sampah dilaksanakan secara langsung *(door to door)*. Petugas pengangkut sampah setiap harinya datang mengangkut sampah dari depan rumah warga untuk dibawa ke depo sampah

2.3.3.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Setiap penduduk wajib memiliki kartu tanda pengenal, berupa KTP yang merupakan identitas resmi yang diakui oleh negara sebagai bukti kependudukan di negara tersebut. Selama kurun waktu 2017-2021 persentase penduduk yang memiliki KTP di Kota Langsa meningkat 24,24 persen. Pada tahun 2017 sebanyak 70,25 persen penduduk Kota Langsa sudah memiliki KTP, hingga pada tahun 2021 persentase kepemilikan KTP meningkat menjadi 94,49 persen.

Tabel 2.56
Persentase Kepemilikan KTP di Kota Langsa Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP	Jiwa	96.035	138.082	135.571	120.086	123.861
Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	136.697	140.066	158.607	138.969	131.076
Penerapan KTP Berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Kepemilikan KTP	%	70,25	98,58	85,47	86,41	94,49

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa

Selain kepemilikan KTP, pelayanan administrasi kependudukan lainnya adalah penerbitan akta kelahiran dan akta nikah. Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan kelahiran ini merupakan sebagai wujud pengakuan negara tentang status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang. Sementara akta perkawinan merupakan dokumen penting sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan seseorang dengan pasangannya.

Tabel 2.57
Rasio Bayi Berakta Kelahiran dan Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Langsa Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bayi Berakta kelahiran	Lembar	3.627	4.965	2.949	3.500	3.345
Jumlah bayi lahir hidup	Jiwa	3.627	3.728	3.491	3.272	3.345
Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	1.427	12.342	32.544	41.200	43.126
Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	1.427	12.342	46.056	38.424	77.379
Rasio bayi berakta kelahiran	Lembar/ Jiwa	1	1,33	0,84	1,06	1
Rasio pasangan berakte nikah	Lembar/ Pasangan	1	1	0,70	1,07	0,55

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa

Selama kurun waktu 2017-2021 rasio bayi berakta kelahiran di Kota Langsa mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 rasio bayi berakta kelahiran sebesar 1 lembar/jiwa, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,06 lembar/jiwa. Hal ini dikarenakan adanya jumlah bayi yang lahir hidup bukan di Kota Langsa, tetapi mereka membuat akte kelahiran di Kota Langsa sehingga angka bayi berakte kelahiran melebihi angka bayi lahir hidup di Kota Langsa. Pada tahun 2021 rasio bayi berakta kelahiran sebesar 1 lembar/jiwa.

Rasio pasangan berakta nikah di Kota Langsa pada tahun 2021 sebesar 0,55. Hal ini menandakan bahwa masih adanya pasangan yang tidak memiliki akta nikah. Sedangkan pada tahun sebelumnya rasio pasangan berakta nikah mencapai 1,07 lembar/pasangan.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya inovasi guna mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi. Salah satu inovasi pelayanan adalah dengan pelayanan jemput bola menggunakan fasilitas kendaraan khusus perekaman administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke gampong-gampong sehingga pelayanan bisa mencakup ke seluruh wilayah. Selama ini Pemerintah Kota Langsa belum memiliki mobil khusus perekaman sehingga pelayanan jemput bola masih jarang dilakukan.

2.3.3.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Gampong/Desa dan Kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Sarana dan prasarana perkantoran pemerintah Desa menjadi salah satu pendukung terwujudnya aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang kondusif. Berikut perkembangan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah Desa di Kota Langsa:

Tabel 2.58
Perkembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa
Kota Langsa Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kantor Pemerintahan yang baik	Unit	62	66	66	66	41
Jumlah seluruh Pemerintahan Desa	Unit	66	66	66	66	66
Cakupan sarana dan prasarana perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	%	93,93	100	100	100	62,12

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa

Pada tahun 2021 terjadi penurunan cakupan sarana dan prasarana perkantoran Desa yang baik menjadi 62,12 persen. Capaian ini menurun 37,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100 persen. Jumlah kantor

pemerintahan Desa yang baik di Kota Langsa pada tahun 2020 sebanyak 41 kantor dari jumlah keseluruhan 66 kantor, sehingga cakupan sarana dan prasarana yang baik pada tahun tersebut hanya sebesar 62,12 persen.

Dalam Undang-Undang terdapat konsep Desa membangun yang merupakan tahapan proses yang harus dilakukan oleh Desa. Dalam pengukuran status Desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status Desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status tersebut adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Berikut perkembangan Indeks Desa Membangun di Kota Langsa:

Grafik 2.34
Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2021 Kota Langsa

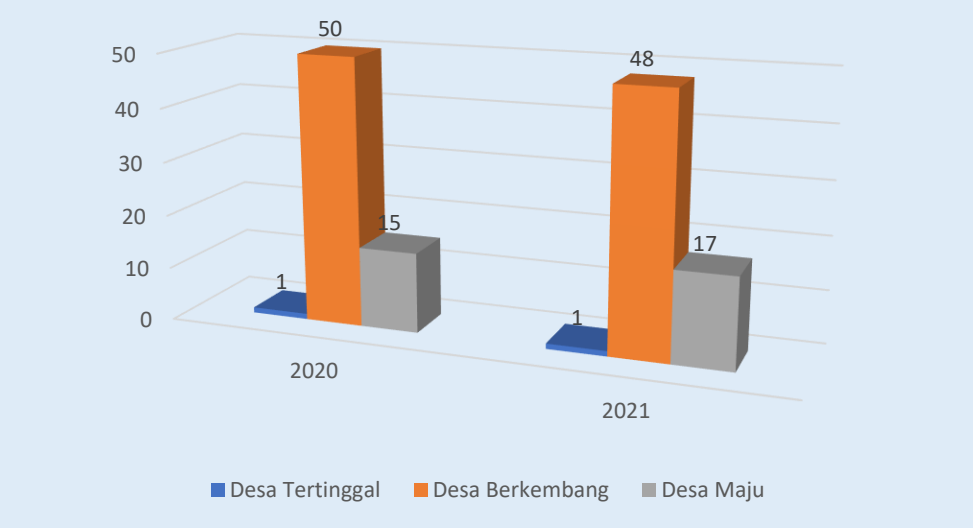

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa

Kota Langsa pada tahun 2020 dalam pengukuran status Desa terdapat klasifikasi status Desa tertinggal sebanyak 1 Desa, status Desa berkembang sebanyak 50 Desa dan status Desa maju sebanyak 15 Desa kemudian pada tahun 2021 jumlah Desa maju meningkat menjadi 17 Desa, Desa berkembang menurun menjadi 48 Desa dan Desa tertinggal sebanyak 1 Desa.

A. Persentase PKK Aktif

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Langsa memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Jumlah PKK di Kota Langsa hingga tahun 2021 sebanyak 71 kelompok dengan persentase PKK aktif sebesar 100 persen.

Tabel 2.59
Persentase PKK Aktif Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PKK aktif	Kelompok	72	66	66	66	71
Jumlah PKK	Kelompok	72	72	66	66	71
Persentase PKK aktif	%	100	91,66	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa

B. Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu Lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Jumlah Posyandu di Kota Langsa pada tahun 2021 bertambah 1 unit dibanding tahun sebelumnya, namun jumlah Posyandu yang aktif menurun menjadi hanya 93 dari jumlah total sebanyak 120 Posyandu. Persentase Posyandu aktif di Kota Langsa pada tahun 2021 sebesar 77,5 persen, capain ini merupakan capaian persentase Posyandu aktif terendah selama periode tahun 2017-2021.

Tabel 2.60
Persentase Posyandu Aktif Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Posyandu aktif	Pos	120	121	119	119	93
Jumlah Posyandu	Pos	120	121	119	119	120
Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	77,5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa

2.3.3.8. Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai peran penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang maka perlu dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana (KB) dapat diukur melalui indikator cakupan jumlah peserta KB aktif serta jumlah akseptor KB.

Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB aktif di Kota Langsa selama periode 2017-2021 mengalami fluktuasi. Cakupan peserta KB aktif tertinggi pada tahun 2018 mencapai 87,36% dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 23.511 orang.

Tabel 2.61
Perkembangan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah akseptor KB	Orang	17.325	20.540	11.491	16.578	16.437
Jumlah peserta KB aktif	Orang	7.745	20.540	11.491	16.578	16.437
Jumlah pasangan usia subur	Pasang	24.290	23.511	19.932	24.440	25.093
Rasio akseptor KB	%	71,32	87,36	57,49	67,83	65,50
Cakupan peserta KB aktif	%	31,88	87,36	57,65	67,83	65,50
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	31,88	87,36	57,49	67,83	65,50

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB dalam periode waktu tertentu per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB di Kota Langsa bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 rasio akseptor KB sebesar 71.32% lalu tahun 2018 meningkat menjadi 87,36%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan mencapai 57,49% lalu kembali meningkat pada 2020 menjadi 67,83%. Tahun 2021 kembali menurun menjadi 65,50%.

Tabel 2.62
Perkembangan Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah anak	Orang	63.701	62.560	68.364	68.530	15.354
Jumlah keluarga	RT	38.087	38.697	38.250	39.711	39.700
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang/ RT	1,67	1,61	1,78	1,72	0,38

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

Selama periode tahun 2017-2020 jumlah rata-rata anak per keluarga di Kota Langsa sebanyak 1 hingga 2 orang. Pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah anak secara signifikan menjadi 15.354 orang, sehingga rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun tersebut sebesar 0,38 anak per rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa program KB Nasional di Kota Langsa telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang mandiri.

2.3.3.9. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kota Langsa. Perkembangan urusan perhubungan erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur daerah, peningkatan jumlah kendaraan serta perkembangan jumlah penduduk.

A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus transportasi Kota Langsa secara umum terbagi menjadi armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Adapun jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Perkembangan Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	70.080	72.720	183.117	162.772	267.991

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Langsa

Jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang masuk dan keluar daerah dari tahun 2016 hingga 2019 terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 , jumlah arus penumpang angkutan umum menurun sebanyak 20.345 orang penumpang. Penurunan jumlah arus penumpang satunya disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Kekhawatiran masyarakat akan penyebaran Covid-19 menjadikan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menurun serta memilih memakai kendaraan pribadi. Pada tahun 2021 jumlah arus penumpang kembali meningkat mencapai 267.991 penumpang.

B. Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada sebuah jalur transportasi. Seluruh angkutan umum yang menjalankan trayek antar Kabupaten/Provinsi (AKDP dan AKAP) wajib memiliki izin trayek sesuai dengan trayek yang diusulkan serta armada yang didaftarkan.

Grafik 2.35
Perkembangan Izin Trayek Tahun 2017-2021 Kota Langsa

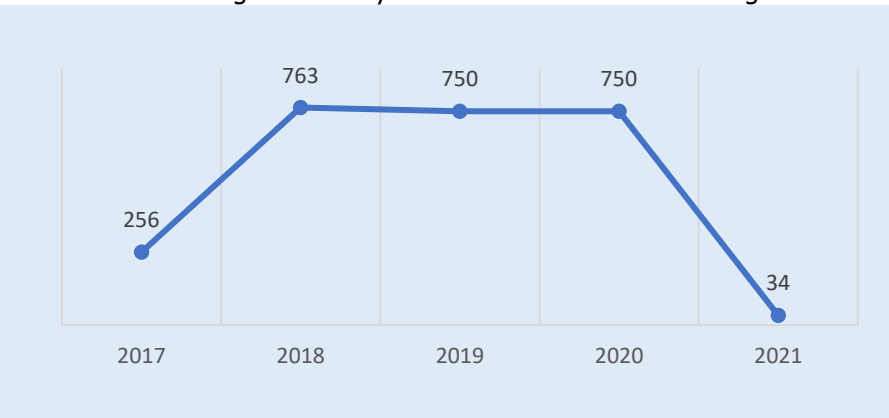

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Langsa

Izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa pada tahun 2017 hingga 2021 sebanyak 2.553 izin. Pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam jumlah izin trayek menjadi hanya 34 izin.

C. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji KIR merupakan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan baik penumpang maupun barang. Pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Langsa dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Pengujian tersebut dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam melakukan pengujian kelayakan angkutan umum meliputi pengecekan administrasi dan kelayakan kendaraan.

Tabel 2.64
Perkembangan Jumlah Uji KIR dan Lama Pengujian Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	477	509	1.300	600	900
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Menit	30	30	15	15	30

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Langsa

Jumlah Uji KIR yang dilalukan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa selama periode tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Jumlah Uji KIR angkutan umum tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.300 kendaraan dengan lama pengujian kelayakan selama 15 menit.

D. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kota Langsa sampai dengan saat ini memiliki satu terminal angkutan darat yang melayani angkutan umum dengan jenis bus dan minibus serta satu pelabuhan laut.

Tabel 2.65
Perkembangan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Terminal	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah Pelabuhan Udara	Unit	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Langsa

Dalam mewujudkan Kota Langsa sebagai kota jasa dan perdagangan, dilakukan upaya optimalisasi pelabuhan laut sebagai fasilitas pendukung perdagangan. Salah satunya, dengan meningkatkan jumlah arus impor dan ekspor barang melalui Pelabuhan Kuala Langsa. Selama periode 2019-2021 arus barang impor dan ekspor melalui Pelabuhan Kuala Langsa cenderung menurun. Adapun data arus barang dirinci menurut jenis komoditi yang melalui Pelabuhan Kuala Langsa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Arus Barang Impor dan Ekspor melalui Pelabuhan Kuala Langsa Tahun 2019-2021

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Impor				
-Methanol	Ton	5.750	2.550	1.800
-Phenol	Ton	2.278	3.061	1.598
-General	Ton	279,5	-	2.714
Ekspor				
-Ikan Kerapu	Ton	30	10	-
-Cangkang	Ton	-	10.000	9.811
-Minuman	Ton	60	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Penurunan arus impor dan ekspor barang tidak berdampak signifikan pada banyaknya kunjungan kapal ke Pelabuhan Kuala Langsa. Pada tahun 2021 jumlah kunjungan kapal ke Pelabuhan Kuala Langsa sebanyak 53 kali kunjungan, meningkat 48 kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.67
Banyaknya Kunjungan Kapal Pelabuhan Kuala Langsa Tahun 2019-2021

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Samudra	Kunjungan	16	5	53
Nusantara	Kunjungan	-	6	-

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2019-2021 kunjungan kapal di Pelabuhan Kuala Langsa didominasi oleh pelayaran samudra dengan total 74 kunjungan, sementara kunjungan dari pelayaran nusantara hanya terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 6 kunjungan. Adapun lalu lintas barang apabila ditinjau dari jenis pelayaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Lalu Lintas Barang di Pelabuhan Kuala Langsa Tahun 2019-2021

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Samudra				
-Bongkar	KGS	14.667	1.520	3.433
-Muat	KGS	30	10.010	12.435
Nusantara				
-Bongkar	Ton	-	3.350	-
-Muat	Ton	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sejalan dengan jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Kuala Langsa, jumlah lalu lintas barang juga didominasi oleh pelayaran samudra. Pada tahun 2021 jumlah bongkar barang di Pelabuhan Kuala Langsa sebesar 3.433 KGS dengan jumlah muat sebesar 12.435 KGS. Jumlah muat barang pada tahun tersebut merupakan angka tertinggi dari muat barang selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

2.3.3.10. Komunikasi dan Informatika

Teknologi saat ini menjadi komponen penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu media penerapan teknologi informasi adalah *website*. Saat ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat luas. Saat ini, Pemerintah Kota Langsa telah menyediakan *website* resmi yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui http://www.langsakota.go.id. Berbagai informasi terkait Kota Langsa dapat diakses dengan mudah.

Selain teknologi informasi, teknologi komunikasi menjadi salah satu prasarana yang harus ada disuatu daerah sehingga perlu adanya sistem yang cepat, bebas tanpa batas dan dapat digunakan di daerah terpencil sekalipun. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur jaringan, salah satunya dengan membangun *Base Transceiver Station* (BTS).

Tabel 2.69
Perkembangan Jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) Tahun 2019-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Base Transceiver Station (BTS)	Unit	78	78	80

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa

Hingga tahun 2021 Kota Langsa sudah mempunyai BTS sebanyak 80 unit yang tersebar di setiap kecamatan. BTS terbanyak berada di wilayah Kecamatan Langsa Baro mencapai 27 unit, selanjutnya Kecamatan Langsa Kota sebanyak 25 unit, Kecamatan Langsa Lama 12 unit, Kecamatan Langsa Barat 10 unit dan Kecamatan Langsa Timur sebanyak 6 unit.

Perkembangan telekomunikasi sangat terbantu berkat adanya BTS. Tanpa BTS, perkembangan teknologi komunikasi nirkabel akan stagnan dan tak mampu menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Terlebih lagi saat ini telepon genggam sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Kebutuhan akan HP/telepon/*smartphone* sangat tinggi, masyarakat bisa berkomunikasi dengan mudah mengakses berbagai informasi sesuai dengan kebutuhannya hanya dengan *browsing* melalui internet. Pemanfaatan HP/telepon/*smartphone* digunakan dalam segala hal, baik telekomukasi dari sektor perkantoran, pendidikan, perdagangan, dan juga pergaulan. Berikut perkembangan layanan telekomunikasi di Kota Langsa.

Tabel 2.70
Perkembangan Layanan Telekomunikasi Tahun 2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2021
Luas wilayah tercoverage	Km²	237,68
Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Orang	83.730
Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	99,10
Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Persen	44,33

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa

Cakupan layanan telekomunikasi Kota Langsa pada tahun 2021 mencapai 99,10 persen, luas wilayah yang tercoverage yaitu 237,68 km² dari total wilayah Kota Langsa sebesar 239,83 km². Sementara itu persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/*smartphone* sebesar 44,33 persen atau sebanyak 83.730 orang yang menggunakan HP/telepon/*smartphone*. Capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD Kota Langsa tahun 2017-2022 yaitu sebesar 76 persen.

2.3.3.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Upaya pemberdayaan Koperasi & UKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan UKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan. Berikut perkembangan koperasi dan UKM di Kota Langsa:

Tabel 2.71
Perkembangan Indikator Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	129	134	136	145	155
Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	340	345	351	360	210
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	1.238	1.400	2.009	11.946	24.044
Jumlah Seluruh UKM	Unit	1.665	1.936	2.812	12.696	24.044
Persentase Koperasi Aktif	%	37,94	38,84	38,75	40,27	73,80
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	74,35	72,31	71,44	94,09	100

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa

Jumlah koperasi di Kota Langsa setiap tahunnya terus bertambah namun pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah koperasi sebanyak 150 unit menjadi 210 unit. Pada tahun yang sama jumlah koperasi yang aktif sebanyak 155 unit. Dengan demikian persentase koperasi aktif di Kota Langsa mencapai 73,80 persen, hal ini menunjukkan bahwa persentase koperasi aktif sudah melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD sebelumnya yaitu sebesar 45 persen.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Berbeda dengan persentase koperasi, persentase usaha mikro dan kecil selama kurun waktu lima tahun terakhir capaiannya sudah di atas 50 persen. Tahun 2021 Usaha Mikro dan Kecil bertambah sebanyak 12.098 unit usaha dari tahun sebelumnya dengan jumlah seluruh UKM sebanyak 24.044 Unit. Persentase usaha mikro dan kecil di Kota Langsa pada tahun 2021 Langsa mencapai 100 persen.

Pelaku usaha dan Pemerintah Kota Langsa terus berupaya mengembangkan usaha kecil dan menengah yang ada. Beberapa produk olahan pangan yang menjadi produk lokal unggulan Kota Langsa seperti produk olahan

mangrove, terasi, kecap serta keripik pisang. Jumlah UKM yang ada di Kota Langsa setiap tahunnya terus bertambah, namun jumlah UKM tidak sebanding dengan tingkat daya saing. Perkembangan UKM masih terkendala oleh rendahnya daya saing produk. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas produk yang belum mampu bersaing dengan produk unggulan dari daerah lain, terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar, serta masih lemahnya kemampuan pelaku UKM dalam penguasaan teknologi dan informasi.

2.3.3.12. Penanaman Modal

Investasi atau penanaman modal adalah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan investasi penanaman modal di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Perkembangan Investasi Penanaman Modal Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	7	18	10	10	85
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	642,8	846,310	52,322	52,322	265,324
Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan	Orang	148	383	9.849	10.658	930
Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ Pemodal	21	21	984	1.065	11

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa

Perkembangan investasi penanaman modal berskala nasional di Kota Langsa baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode 2017-2021 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja. Pada tahun 2021 rasio daya serap tenaga kerja menurun tajam dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 11

orang/pemodal sementara jumlah investor pada tahun yang sama meningkat sebanyak 75 investor.

Untuk menarik perhatian investor dalam menanamkan modalnya di Kota Langsa diperlukan adanya promosi. Selama ini pemerintah daerah maupun pihak swasta Kota Langsa masih minim promosi dalam menarik minat investasi. Website DPMPTSP dalam portal langsakota.go.id sebagai media informasi yang selama ini dimiliki belum dimanfaatkan optimal. Informasi potensi dan peluang investasi yang dimuat tidak *update.* Selain website, sosial media sebagai media informasi yang dinilai luas jangkauannya bahkan belum dimanfaatkan sama sekali sebagai media promosi investasi.

2.3.3.13. Kepemudaan dan Olahraga

Peran serta pemuda dalam pembangunan dapat teraktualisasi dalam berbagai bidang pembangunan. Guna meningkatkan partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan, maka perlu difasilitasi dengan ketersediaan anggaran dan sarana-prasarana kepemudaan, penghargaan kepemudaan serta optimalisasi manajemen organisasi kepemudaan. Organisasi pemuda di Kota Langsa hingga tahun 2021 berjumlah 47 organisasi namun yang aktif berjumlah 22 organisasi. Hal ini menandakan bahwa persentase organisasi yang aktif tidak mencapai setengahnya yaitu hanya 46,80 persen.

Tabel 2.73
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2018-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	22	22	22	22
Jumlah seluruh organisasi pemuda	Organisasi	47	47	47	47
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	46,80	46,80	46,80	46,80

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa

Pada bidang olahraga, pembinaan dan pengembangan dilakukan guna meningkatkan kualitas manusia yang diarahkan pada peningkatan kesegaran jasmani, mental, dan rohani masyarakat, serta ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

Tabel 2.74
Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2018-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang	2	2	2	43
Jumlah cabang olahraga yang	Cabang	11	11	12	43

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
ada/terdaftar					
Cakupan pembinaan olahraga	%	18,18	18,18	16,66	100

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa

Jumlah cabang olahraga yang ada di Kota Langsa pada tahun 2021 bertambah sebanyak 31 cabang menjadi 43 cabang olahraga. Seluruh cabang olahgara yang ada di Kota Langsa sudah mendapat pembinaan, sehingga cakupan pembinaan olahraga di Kota Langsa mencapai 100 persen.

Tabel 2.75
Jumlah Pelatih, Atlet, Prestasi dan Gedung Olahraga Tahun 2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2021
Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	33
Jumlah seluruh pelatih	Orang	54
Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	5
Jumlah seluruh atlet pelajar	Orang	118
Jumlah atlet berprestasi (kejuaraan tkt. Nasional/ Internasional)	Orang	1
Jumlah prestasi olahraga	Cabang	7
Jumlah gedung olahraga	Unit	1
Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	61,11
Cakupan pembinaan atlet muda	%	4,23

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa

Cakupan pelatih yang bersertifikat pada tahun 2021 sebesar 61,11 persen sementara cakupan pembinaan atlet muda hanya mencapai 4,23 persen. Rendahnya cakupan pembinaan atlet muda berdampak pada jumlah prestasi olahraga. Pada tahun yang sama jumlah prestasi olahraga sebanyak 7 cabang dengan jumlah atlet berprestasi yang memenangkan kejuaraan tingkat Nasional/Internasional hanya 1 orang. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh terbatasnya sarana dan prasarana olahraga, hingga saat ini Kota Langsa hanya memilik 1 gedung olahraga.

2.3.3.14. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pelestarian budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah. Guna mewujudkan kelestariaan budaya, Pemerintah Kota Langsa selama ini rutin mengadakan berbagai penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Tabel 2.76
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2019-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	28	-	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Pada tahun 2019 penyelenggaraan seni budaya dilaksanakan sebanyak 25 kali serta pameran seni budaya sebanyak 3 kali. Sementara itu pada tahun 2020 kegiatan pagelaran seni budaya dan juga pameran seni budaya tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 1 kali.

Selain penyelenggaraan festival seni dan budaya, cagar budaya juga merupakan kekayaan budaya bangsa. Cagar budaya sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut perkembangan cagar budaya di Kota Langsa:

Tabel 2.77
Perkembangan Cagar Budaya Tahun 2019-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Jumlah benda cagar budaya	Unit	347	347	262
Jumlah bangunan cagar budaya	Unit	16	16	15
Jumlah struktur cagar budaya	Unit	1	1	1
Jumlah situs cagar budaya	Unit	-	-	3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

Pada tahun 2021 jumlah benda cagar budaya di Kota Langsa sebanyak 262 unit berkurang 85 unit dari tahun sebelumnya, sama halnya dengan jumlah bangunan cagar budaya yang berkurang 1 unit menjadi 15 bangunan. Jumlah situs cagar budaya pada tahun 2021 sebanyak 3 situs.

2.3.3.15. Statistik

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah karena data tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung dengan adanya data statistik sektoral yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).

Data statistik yang selama ini tersedia di Kota Langsa adalah (1) Langsa Dalam Angka dengan jenis data ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan; (2) PDRB Kota Langsa yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Langsa; (3) IPM Kota Langsa yang memberikan informasi dengan derajat pendapatan per kapita masyarakat, usia harapan hidup penduduk, serta angka melek huruf masyarakat Kota Langsa; dan (4) Statistik Daerah yang memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kota Langsa yang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Dalam beberapa sektor, masih ditemukan inkonsistensi data antar instansi. Data yang dikumpulkan oleh BPS berbeda dengan data yang dikumpulkan oleh Dinas atau Instansi terkait. Sebagai contoh, terjadi perbedaan data jumlah penduduk Kota Langsa antara BPS dengan Dinas Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data BPS mencatat pada tahun 2021 jumlah penduduk berjumlah 188.878 orang, namun data Dinas menjelaskan jumlah penduduk berjumlah 185.662 orang.

Perbedaan data disebabkan oleh perbedaan metodologi pengumpulan data yang dipakai serta berbedanya waktu pengumpulan data yang dilakukan. Untuk itu diperlukan adanya pengelolaan satu data dalam satu portal Kota Langsa yaitu melalui Satu Data Kota Langsa (SDKL).

Selain perbedaan metode dan waktu pengumpulan, minimnya sumber daya fungsional statistik juga turut menjadi permasalahan. Higga tahun 2021, hanya ada satu fungsional statistik yang merupakan hasil dari penyetaraan jabatan fungsional yang berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa. Sebelumnya sumber daya fungsional statistik hanya ada di BPS.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 25 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Langsa, Pemerintah Kota Langsa saat ini tengah mengimplemtasikan amanat yang tertuang dalam peraturan tersebut guna menghasilkan data akurat yang dapat menjadi acuan dalam pembuatan

kebijakan. Diharapkan dengan adanya Satu Data, inkonsisten data antar instansi tidak ditemukan lagi.

2.3.3.16. Perpustakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar. Ketersediaan perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Tabel 2.78
Perkembangan Indikator Perpustakaan Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Kunjungan	30.480	24.238	24.323	8.826	8.826
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia	Unit	7.488	8.413	8.413	9.962	13.370
Jumlah koleksi buku yang tersedia	Unit	46.049	47.899	47.899	49.652	58.460
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat	Orang	0	0	4	4	8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa

Kota Langsa hingga saat ini memiliki satu unit perpustakaan daerah dengan jumlah koleksi judul buku mencapai 13.370 judul buku dan 58.460 jumlah koleksi buku pada tahun 2021. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi jumlah pengunjung ke perpustakaan Kota Langsa. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan tajam jumlah pengunjung perpustakaan menjadi 8.826 kunjungan selama satu tahun.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pelayanan yang prima diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai guna memberikan rasa nyaman pada para pengunjung. Sarana dan prasarana perpustakaan merupakan semua peralatan dan perlengkapan baik pokok maupun penunjang agar kegiatan didalam perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Peralatan dan perlengkapan yang ada diperpustakaan disediakan selain untuk mendukung kegiatan rutin para

staf perpustakaan juga berguna untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung sehingga dapat menjadi salah satu aspek kekuatan guna mengembangkan perpustakaan secara berkelanjutan.

2.3.3.17. Kearsipan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT. Arsip secara baku meliputi pengelolaan arsip dinamis aktif pada organisasi perangkat daerah dan Desa dengan beberapa indikator: pencatatan, pendistribusian dan penyimpanan di filling kabinet.

Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa hingga tahun 2021 jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 6 OPD dari 36 organisasi perangkat atau sebesar 16,66 persen. Masih ada sebanyak 30 OPD yang belum melaksanakan penerapan arsip secara baku.

2.3.4. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah di Kota Langsa.

2.3.4.1. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi sumber daya yang ada di Kota Langsa. Objek wisata yang banyak dikunjungi yaitu Hutan Kota Langsa dan Hutan Manggrove Kuala Langsa, ada juga objek wisata buatan seperti Taman Bambu Runcing, Pusat Jajanan Kuliner Kota Langsa, Mutiara *Water Park*, Virta Tirta Raya *Swimming Pool* dan Royal *Water Boom* yang jadi destinasi wisata di Kota Langsa.

Tabel 2.79
Objek Wisata Tahun 2021 Kota Langsa

Uraian	2021
Objek Wisata Budaya	2
Objek Wisata Alam	2
Objek Wisata Sejarah	2
Objek Wisata Buatan	7

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa

Pemerintah Kota Langsa terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik dan akses objek-objek wisata dengan tujuan agar mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Langsa. Adapaun jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Langsa selama periode tahun 2017-2021 berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada pada tahun 2017 kunjungan wisatawan ke kota Langsa sebanyak 746.586 kunjungan, kemudian terjadi penurunan kunjungan pada tahun 2018 menjadi 626.585 kunjungan. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan jumlah kunjungan yaitu mencapai 726.386 kunjungan. Kemudian pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 membuat kunjungan wisatawan ke Kota Langsa menurun drastis menjadi hanya sebanyak 163.898 kunjungan. Pada tahun 2021 terjadi pemulihan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Langsa meningkat menjadi 283.179 kunjungan.

Tabel 2.80
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kunjungan Wisatawan Asing (Mancanegara)	Jiwa	0	0	0	0	0
Jumlah kunjungan Wisatawan Domestik (Nasional)	Jiwa	746.586	626.585	726.386	163.898	283.179

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa

Perkembangan pariwisata yang pesat didorong oleh penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan pariwisata serta adanya sistem tata kelola informasi dan promosi pariwisata yang terintegrasi. Strategi promosi yang tepat mampu meningkatkan kunjungan wisata yang pada akhirnya dapat mewujudkan tata kelola wisata yang baik. Strategi promosi yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Langsa yaitu dengan cara memasang iklan/promosi periklanan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Selain itu, pemerintah daerah kerap membuat event atau festival dalam rangka menarik minat wisatawan.

Sektor pariwisata juga turut mempengaruhi sektor lainnya seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor ini terus mengalami fluktuasi

setiap tahunnya, dimana konstribusi sektor tersebut terhadap PDRB ADHB selama kurun waktu lima tahun meningkat 0,22 persen.

Grafik 2.36
Kontribusi Sektor Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB
Tahun 2017-2021 Kota Langsa (Persen)

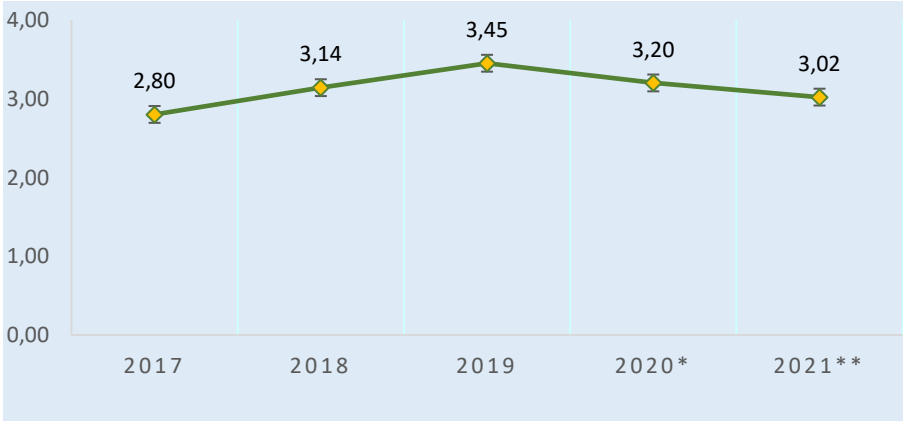

**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Kontribusi sektor kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,02 persen atau terjadi penurunan sebesar 0,18 persen dari tahun sebelumnya.

2.3.4.2. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia menghasilkan bahan pangan. Salah satu subsektor pertanian adalah tanaman pangan. Subsektor ini mencakup tanaman padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel 2.81
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Tanaman Padi dan Palawija
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Komoditi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Panen Padi	Ha	2.656	1.162	1.537	1.607	1.689
Produktivitas	Ton/Ha	4,75	4,44	4,12	4,09	5,85
Produksi Padi	Ton	12.616	5.158	6.333	6.568	9.029
Luas Tanam Ubi Kayu	Ha	13	5	6	2	NA
Luas Panen Ubi kayu	Ha	12	6	6	2	NA
Produksi Ubi Kayu	Ton	360	11	-	400	NA

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa dan Bappeda Kota Langsa (diolah)

Luas panen padi di Kota Langsa pada tahun 2021 seluas 1.689 Ha dengan jumlah produksi padi mencapai 9.029 ton. Adapun capaian produktivitasnya sebesar 5,85 Ton/Ha, capaian ini meningkat 1,76 Ton/Ha dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk tanaman ubi kayu, luas panen pada tahun 2020 seluas 2 Ha sejalan dengan luas tanam ubi kayu, adapun jumlah produksi ubi kayu pada tahun tersebut mencapai 400 ton.

Petani sangat berperan penting sebagai salah satu tonggak penghasil pangan. Patani wanita juga memiliki peran yang sama. Saat ini sudah banyak Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ada di setiap gampong-gampong. KWT adalah keompok tani yang anggotanya para perempuan yang melaksanakan usaha di bidang pertanian. Tujuan dibentuknya KWT ini sebagai upaya pelibatan kaum perempuan dalam rangka peningkatan produktivitas hasil pertanian serta berpotensi untuk meningkatkan pendapatan maupun ketahanan pangan menuju kesejahteraan rumah tangga wanita tani. KWT merupakan pendobrak utama dalam menyediakan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Berikut kelompok wanita tani yang ada di Kota Langsa.

Tabel 2.82
Kelompok Wanita Tani Tahun 2021 Kota Langsa

Kecamatan	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota
Kecamatan Langsa Timur	11	330
Kecamatan Langsa Barat	17	510
Kecamatan Langsa Kota	8	240
Kecamatan Langsa Lama	8	240
Kecamatan Langsa Baro	8	240
Jumlah	52	1.560

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa

Pada tahun 2021 jumlah kelompok wanita tani yang ada di Kota Langsa sebanyak 52 kelompok yang tersebar di seluruh kecamatan. Adapun jumlah anggota kelompok tani mencapai 1.560 orang dengan jumlah anggota tertinggi berada pada Kecamatan Langsa Barat sebanyak 510 orang.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor dari sektor pertanian. Subsektor perkebunan sebagai penghasil bahan baku mampu meningkatkan pendapatan petani perkebunan serta memperluas lapangan kerja. Komoditas yang termasuk komoditas sub sekor perkebunan meliputi kelapa sawit, kelapa, karet, kakao dan tebu. Berikut perkembangan perkebunan di Kota Langsa.

Tabel 2.83
Produksi Perkebunan Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Komoditi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Kelapa sawit	Ton	865	880	839	810,29	3.966,31
Kelapa	Ton	216	228	121	130,47	68,06
Karet	Ton	368	351	1.818	712,90	273,56
Kakao	Ton	503	78	81	397,40	60,60
Tebu	Ton	892	3	1	1,60	4,25
Jumlah	Ton	2.844	1.540	2.860	2.052,66	4.372,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik Aceh

Jumlah produksi sub sektor perkebunan di Kota Langsa pada tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan produksi. Pada jenis komoditi karet dan kakao mengalami penurunan tajam masing-masing mengalami penurunan produksi sebesar 439,34 dan 336,80 ton namun pada komoditi kelapa sawit. Pada tahun yang sama terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada komoditi kelapa sawit sebesar 3.156,02 ton.

2.3.4.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat dan merupakan sumber daya yang paling ekonomis yang dapat digunakan dalam berbagai macam kegiatan. Hampir segala aktivitas manusia didukung oleh keberadaan energi listrik. Kebutuhan akan energi listrik terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan bertambahnya jumlah populasi manusia. Berikut perkembangan energi listrik di Kota langsa:

Tabel 2.84
Perkembangan Energi Listrik Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Kapasitas terpasang	KW	292	292	292	382	382
Produksi listrik	KW	167.455.658	176.851.571	188.921.774	196.238.540	200.240.577
Pelanggan listrik	Pelanggan	41.220	49.243	53.122	56.158	58.371

Sumber: PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh UP3 Langsa

Selama periode tahun 2017-2021 jumlah produksi listrik di Kota Langsa bertambah setiap tahunnya. Bertambahnya produksi listrik sejalan dengan meningkatnya kapasitas listrik yang terpasang dan jumlah pelanggan listrik yang terus bertambah. Hingga tahun 2021 jumlah pelanggan listrik yang ada di Kota Langsa sebanyak 58.371 pelanggan dengan jumlah produksi listrik mencapai 200.240.577 kW.

Pentingnya keberadaan tenaga listrik justru disertai dengan munculnya permasalahan yang melingkupi sektor ketenagalistrikan tersebut. Salah satunya adalah masalah pemadaman listrik yang cukup sering terjadi. Pemadaman listrik turut mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat. Terjadinya pemadaman listrik dilatabelakangi oleh kurangnya pasokan energi listrik serta adanya perbaikan jaringan kabel.

Pembangunan jaringan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional. Pada tahun 2019 di Kota Langsa telah dilakukan pendataan calon pengguna gas bumi, selanjutnya pada tahun 2020 pembangunan jaringan gas mulai dilaksanakan. Pada tahun 2021 penggunaan jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga sudah mulai digunakan. Sumber jaringan gas Kota Langsa berasal dari pipa Arun Belawan sementara *regulating station* jaringan gas Kota Langsa terdapat di Alue Sabo, Gampong Gedubang Aceh Kecamatan Langsa Baro.

Grafik 2.37
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota Langsa Tahun 2021

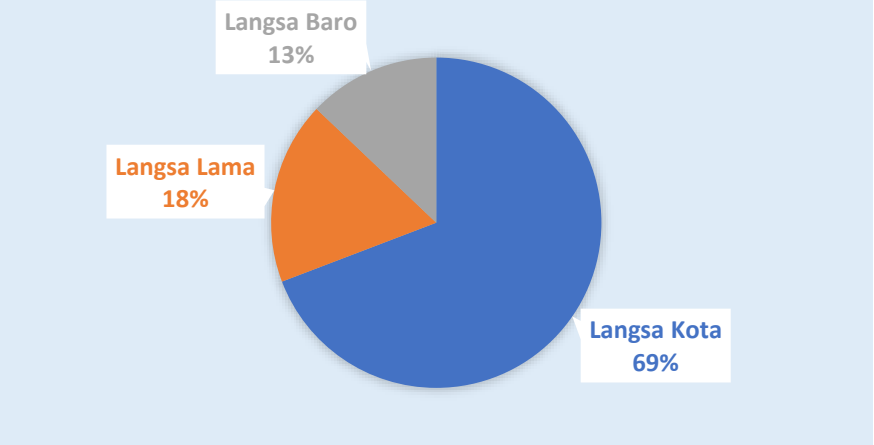

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kota Langsa

Jumlah sambungan rumah jaringan gas bumi pada tahun 2021 sebanyak 1.040 SR tersebar di beberapa kecamatan. Kecamatan Langsa Kota 4.021 SR, Langsa Lama 1.040 SR dan Langsa baru 750 SR.

Grafik 2.38
Kontribusi Sektor Kategori Pengadaan Listrik dan Gas Terhadap PDRB Tahun 2017-2021 Kota Langsa (Persen)

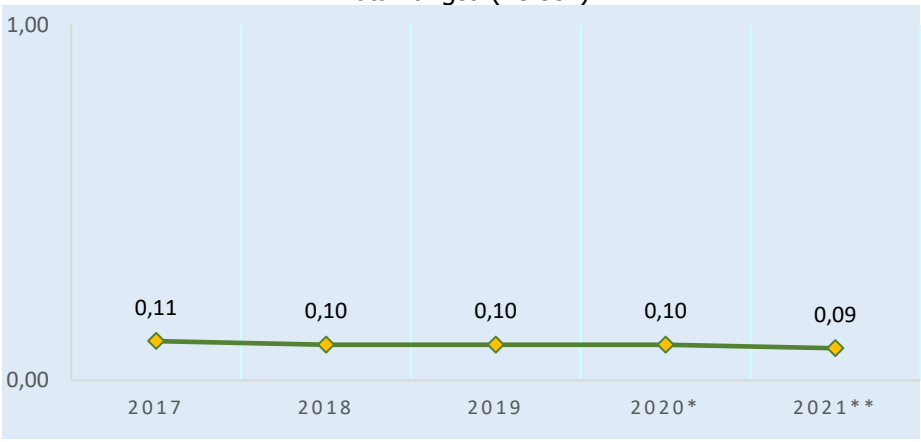

**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB atas harga berlaku selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan 0,02 persen. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB sebesar 0,11 persen lalu menurun pada tahun 2021 menjadi 0,09 persen.

2.3.4.4. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian Kota Langsa. Sektor perdagangan meningkat secara signifikan di Kota Langsa. Toko-toko dan restoran-restoran yang bermunculan menjadikannya ideal sebagai kota persinggahan dari kabupaten-kabupaten tetangga.

Tabel 2.85
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Jenis Sarana	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Pasar	Unit	3	7	7	9	9
Toko	Unit	180	468	282	301	821
Kios	Unit	475pm	475	417	459	505
Warung	Unit	30	39	42	45	70
Jumlah	Unit	688	989	748	814	1.405

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Langsa

Peranan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor berpengaruh langsung dalam mempercepat kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai wilayah perkotaan, perekonomian Kota

Langsa bertumpu pada kategori ini yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Langsa menempati urutan pertama diantara kategori-kategori lainnya.

Grafik 2.39
Kontribusi Sektor Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil, Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2017-2021 (Persen) Kota Langsa

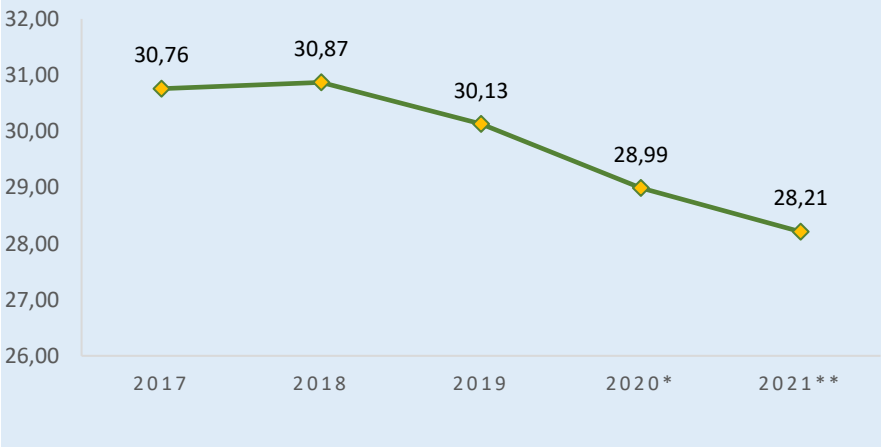

**) Angka Sementara*
**) Angka Sangat Sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Peranan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor selam lima tahun terus berfluktuasi, dimana kontribusi sektor ini terbesar terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 30,87 persen terhadap total PDRB.

2.3.4.5. Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan sektor yang cukup berkontribusi terhadap perekonomian Kota Langsa. Jumlah industri tradisional di Kota Langsa pada tahun 2017 sebanyak 1.086 industri, lalu meningkat menjadi 1.352 industri pada tahun 2018. Tahun 2020 jumlah industri tradisional mencapai 2.754 industri lalu kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 3.004 industri.

Tabel 2.86
Jumlah Industri Tradisional yang Terdaftar Di Dinas Perindustrian
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Industri Tradisional	1.086	1.352	-	2.754	3.004

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Tahun 2021 jumlah industri tradisional yang terdaftar di Kota Langsa sebanyak 3.004 industri. Adapun jenis industri menurut kecamatan pada tahun tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.87
Jumlah Industri Tradisional yang Terdaftar Menurut Jenisnya Tahun 2021 Kota Langsa

Jenis Industri	Langsa Timur	Langsa Lama	Langsa Barat	Langsa Baro	Langsa Kota
Sandang	26	166	72	106	182
Pangan	82	433	205	374	341
Papan	12	51	27	32	56
Kerajinan	13	63	7	25	23
Logam	15	45	21	41	21
Kimia	10	71	16	45	42
Elektronika	2	8	3	6	20
Aneka	1	11	8	5	31
Jasa reparasi kendaraan	33	65	49	47	92
Jumlah	194	913	408	681	808
Kota Langsa	3.004				

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Sektor industri pengolahan memiliki peran utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun hal ini tidak sejalan dengan pembinaan yang diberikan pemerintah kepada kelompok industri terutama pengrajin. Pada tahun 2021 cakupan bina kelompok pengrajin hanya sebesar 20 persen, yang mana dari 5 kelompok pengrajin yang ada di Kota Langsa hanya 1 kelompok yang mendapat bantuan binaan dari pemerintah.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Langsa pada periode 2017-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 9,50 persen kemudian menurun menjadi 8,74 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mengalami peningkatan menjadi 10,1 persen.

Grafik 2.40
Kontribusi Sektor Kategori Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Tahun 2017-2021 Kota Langsa (Persen)

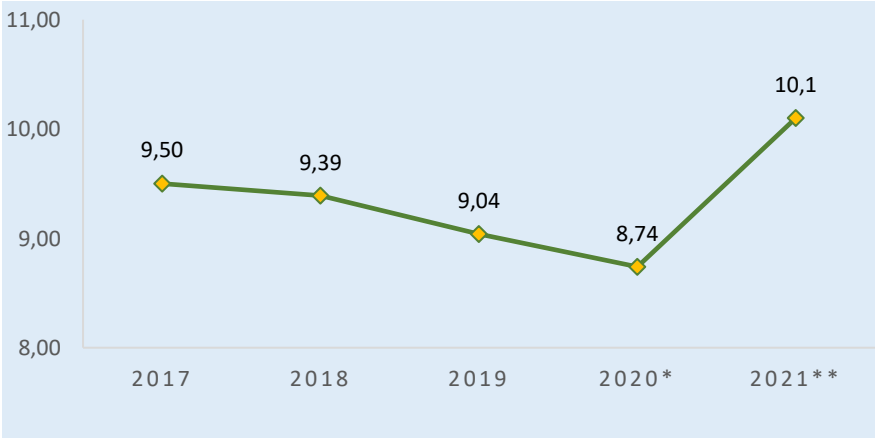

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

2.3.4.6. Kelautan dan Perikanan

Kota Langsa memiliki potensi perikanan khususnya perikanan laut dan tambak, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Kota Langsa berada tepat bersebelahan dengan Selat Malaka. Berikut perkembangan kelautan dan perikan di Kota Langsa:

Tabel 2.88
Perkembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah produksi ikan keseluruhan	Ton	16.921	17.986	65.163	72.279*	90.731
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda	Kelompok	23	25	22	31	21
Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	60	64	68	73	94
Cakupan bina kelompok nelayan	%	38,33	39,06	32,35	43,66	22,34

**Angka sementara*
Sumber: Dinas Pangan, Pertanian,Kelautan dan Perikanan Kota Langsa

Jumlah produksi ikan di Kota Langsa setiap tahunnya terus bertambah. Selama kurun waktu 2017-2021 jumlah produksi ikan bertambah 73.810 ton menjadi 90.731 ton pada tahun 2021. Bertambahnya produksi ikan setiap tahun sejalan dengan bertambahnya jumlah kelompok nelayan. Pada tahun 2021 jumlah kelompok nelayan di Kota Langsa sebanyak 94 kelompok namun kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah hanya sebesar 21 kelompok.

Produksi ikan di Kota Langsa diperoleh dari kegiatan penangkapan dan budidaya ikan. Penangkapan ikan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan di laut/perairan umum secara bebas dan bukan milik perseorangan sementara budidaya ikan merupakan kegiatan memelihara ikan dengan menggunakan fasilitas buatan, termasuk juga kegiatan pembenihan ikan. Penerapan teknologi budidaya perikanan di Kota Langsa masih rendah. Selama ini jenis teknologi budidaya yang digunakan pembudidaya hanya secara tradisional dan semi intensif.

2.3.5. Layanan Urusan Penunjang

2.3.5.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja namun diperlukannya keterlibatan kelompok masyarakat secara bersama-sama dan bersinergi. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat secara bersama-sama untuk memecahkan berbagai persoalan. Pentingnya masyarakat dalam pembangunan ialah mengingat masyarakat yang lebih mengetahui berbagai permasalahan seperti, pembangunan infrasrtuktur sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ada sehingga memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui BAPPEDA usulan masyarakat dikategorisasi berdasarkan urusan dan alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Musrenbang dilaksanakan pada tingkat gampong, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan *bottom-up* di mana suara masyarakat bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Fenomena yang terjadi yaitu minimnya motivasi dan keterlibatan aktif masyarakat, yang pada gilirannya menjadikan masyarakat tidak berdaya dan tidak diberdayakan serta munculnya sikap apatisme masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mempercayakan hasil perencanaan pembangunan kepada pemerintah.

Guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, Pemerintah Kota Langsa telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang ada di Kota Langsa antara lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.89
Perkembangan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018-2022 Kota Langsa

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Qanun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Qanun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Qanun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Qanun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Jumlah Program RKPD	220	144	143	150	159
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan	222	157	157	157	243
Penjabaran Konsistensi Program RPJM kedalam RKPD (%)	99,10	91,72	91,08	95,54	65,43

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

Siklus dalam sistem perencanan pembangunan adalah tahap penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dokumen perencanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan. Evaluasi dalam perencanaan pembangunan adalah suatu penilaian objektif dan sistematis dalam proses perumusan kebijakan yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan suatu program pembangunan. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, evaluasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus perencanaan pembangunan. Perangkat daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan DPA kepada Bappeda setiap tiga bulan namun pada implementasinya sering kali perangkat daerah pada saat menyampaikan hasil evaluasi hanya berupa laporan hasil evaluasi output kegiatan dan realisasi anggaran bukan hasil kinerja program *(outcome)* bahkan sasaran *(impact).*

Penyelenggaraan pembangunan tidak bisa berjalan tanpa arahan. Fungsi regulasi menjadi salah satu acuan berjalannya pembangunan tanpa mengesampingkan fungsi yang lain. Peran regulasi sangat signifikan guna menciptakan iklim pembangunan yang diharapkan. Pembenahan pebentukan regulasi juga diperlukan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan hasil produk pembentukan peraturan perundang-undangan sinkron dengan strategi pembangunan nasional.

2.3.5.2. Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan asas umum pengelolaaan keuangan dengan menambahkan uraian sebagai berikut:

a) **Taat pada peraturan perundang-undangan** adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
b) **Efektif** merupakan capaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
c) **Efisien** merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan pemasukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
d) **Ekonomis** merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada pada tingkat harga yang terendah;
e) **Transparan** merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
f) **Bertanggungjawab** merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
g) **Keadilan** adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif;
h) **Kepatutan** adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
i) **Manfaat dan masyarakat** adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.90
Perkembangan Keuangan Tahun 2018-2022 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP*	WTP*
Penetapan APBD	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Juta Rupiah	113.190	179.735	180.915	223.216	187.970
Jumlah Belanja Bidang	Juta	117.666	269.202	263.916	223.929	211.392

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Urusan Kesehatan	Rupiah					
Jumlah Belanja Langsung	Juta Rupiah	377.698	541.820	482.872	-	-
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Juta Rupiah	307.705	437.836	436.624	-	-
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/Kota/Desa	Juta Rupiah	1.571	1.893	105.644	1.941	2.228
Total APBD	Juta Rupiah	685.403	979.657	919.496	949.674	843.829
Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	16,51	18,35	19,67	23,50	22,27
Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	25,92	27,48	28,70	23,58	25,05
Perbandingan antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	55: 45	55 :45	53:47	-	-
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%	0,23	0,19	11,49	0,20	0,26

**Target*
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Langsa dalam kurun waktu empat tahun terakhir dapat dikategorikan baik, hal ini ditandai dengan berhasilnya Pemerintah Kota Langsa dalam memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun 2021 dan 2022 Opini BPK terhadap laporan keuangan ditargetkan WTP.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sejalan dengan berfluktuasinya APBD, total Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa juga turut mengalami fluktuasi.

Laporan keuangan daerah merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun masyarakat luas. Sebab laporan keuangan daerah berisikan seluruh kegiatan penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat penatausahaan keuangan daerah tentang kesesuaian dana yang ada, pengelolaan keuangan daerah yang direalisasikan pada kegiatan-kegiatan yang tepat dan sesuai dengan perencanaan. Semakin efisien dan efektifnya penatausahaan keuangan daerah akan memberikan dampak yang baik terhadap pencapaian *good governance* yakni terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

2.3.5.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) ASN adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN. Tujuan dilaksanakannya program pendidikan dan pelatihan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap seorang ASN agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum merupakan kunci keberhasilan pembangunan Nasional, karena diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, khususnya untuk PNS atau aparatur agar dicapainya kompetensi tertentu.

Tabel 2.91
Perkembangan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan	Hari	120	120	120	120	120
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan formal	Orang	131	105	186	279	83
Jumlah total ASN	Orang	3.744	3.623	3.668	3.538	3.474
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,50	2,89	5,07	7,88	2,38
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	31	19	32	25	27
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1.717	1.690	1.764	1.757	135
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.227	1.914	2.362	1.747	1.853

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kota Langsa masih sangat rendah dikarenakan keterbatasan anggaran. Pemerintah Kota Langsa melalui BKPSDM terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan pengetahuan serta pengembangan sumber daya ASN di Kota Langsa.

Pengaturan PNS sebagai sumber daya aparatur melalui Manajemen PNS sebagai bagian dari Manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Kolusi Kurupsi Nepotisme (KKN). Manajemen

ASN adalah fungsi dalam organisasi yang dirancang untuk memaksimalkan kinerja pegawai dalam memaksimalkan kinerja organisasi. Salah satu aktivitas organisasi untuk memajukan kemampuan pegawainya adalah pengembangan karir pegawai.

Dalam pengembangan karir pegawai di Kota Langsa hingga saat ini masih terkendala oleh rendahnya pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan fungsional menuju aparatur yang profesional sehingga hal ini berdampak pada terbatasnya kompetensi SDM apatrur. Selain itu, belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi/keahliannya juga masih ditemui.

Disamping Sumber Daya Manusia, dalam menjalankan roda pemerintahan daerah tiap-tiap OPD diberi kewenangan untuk menggunakan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas, program dan kegiatan pelayanan masyarakat. Sarana dan prasarana yang digunakan meliputi seluruh aset yang ada, terdiri dari gedung perkantoran, peralatan dan perlengkapan kantor serta alat transportasi. Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif sangat dibutuhkan oleh OPD dalam menyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka tujuan akan sulit dicapai. Hingga saat ini masih ada beberapa OPD di Kota Langsa yang belum memiliki gedung kantor secara permanen.

2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan. Rekomendasi dari hasil penelitian dan pengembangan dapat memberikan arah dan kebijakan strategis dalam proses perencanaan pembangunan Kota Langsa.

Tabel 2.92
Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Program	1	1	1	1	1
Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Program	1	1	1	1	1
Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

Persentase implementasi rencana kelitbangan selama kurun waktu lima tahun terakhir sudah mencapai 100 persen. Urusan penelitian dan pengembangan antara lain diselenggarakan melalui penyusunan studi ataupun kajian. Hasilnya akan digunakan untuk menyempurnakan kebijakan serta perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya.

Hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan adalah terciptanya suatu produk kajian yang tertuang dalam bentuk: materi pembelajaran, buku/modul, sistem pembelajaran, model-model perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran/manajemen, media pembelajaran, program, test/kuis, dan kurikulum.

Tabel 2.93
Produk Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kota Langsa Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Produk hasil kegiatan penelitian dan pengembangan	Buku	1	1	1	2	2

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

Selama periode lima tahun kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Langsa telah menghasilkan tujuh produk. Adapun judul kajian yang telah dilakukan adalah; Data Potensi Kelautan Dan Perikanan Berbasis Sumberdaya Lokal Di Kecamatan Langsa Barat; Analisa Ekososionomik Ekosistem Magrove Dalam Upaya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pesisir; Studi Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Destinasi Wisata; Kajian Identifikasi Potensi Desa Di Kota Langsa; Analis Pemetaan Potensi Ekonomi Kreatif; Laporan Penelitian Pengembangan UMKM Berbasir Ekonomi Kreatif, dan Penelitian Peningkatan Kapasitas BUMG.

Dalam hal inovasi, penyusunan penguatan roadmap SIDa saat ini masih dalam tahapan draft rencana, namun tidak mengurangi fungsi dan peran dari Kelitbangan. Hal ini dibuktikan dengan semakin baiknya nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Langsa dari tahun 2020 yang mendapatkan skor 361 rangking 256 kategori kurang inovatif secara nasional dan pada tahun 2021 mendapatkan rangking 56 untuk kategori Kota dengan skor nilai indeks 44.28 kategori inovatif. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 002.6-5848 tahun

2021 Kota Langsa mendapatkan nilai tertinggi untuk kategori Kota dalam wilayah Aceh.

2.3.5.5. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dapat bersifat pengawasan *intern* dan pengawasan *ekstern*. Pengawasan *intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur dalam instansi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan dilakukan oleh pucuk pimpinan. Sedangkan pengawasan *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar instansi sendiri. Seperti pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau oleh Inspektorat Kota Langsa sebagai pengawasan instasi daerah.

Tabel 2.94
Perkembangan Pelaksanaan Pengawasan Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Temuan	1.024	1.075	1.673	2.007	2.158
Jumlah total temuan	Temuan	1.064	1.343	2.047	2.438	2.591
Jumlah temuan BPK	Temuan	33	573	600	642	35
Persentase tindak lanjut temuan	%	96,24	80,04	81,73	82,32	83,28

Sumber: Inspektorat Kota Langsa

Selama periode lima (5) tahun perkembangan persentase tindak lanjut temuan di Kota Langsa berfluktuatif, capaian tertinggi tindak lanjut terhadap temuan di Kota Langsa terjadi pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 96,24 persen. Pada tahun 2021 tindak lanjut terhadap temuan di Kota Langsa hanya sebesar 83,28 persen atau terdapat 16,72 persen temuan yang belum ditindaklanjuti.

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel dan berorientasi hasil, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Pada tahun 2021, Inspektorat melakukan evaluasi terhadap nilai SAKIP OPD Kota Langsa. Dari 20 OPD yang dilakukan evaluasi, masih terdapat 2 OPD

yang nilainya tidak mencapai 60,00 dengan predikat CC. Sementara 18 OPD lainnya mendapatkan predikat B.

2.3.5.6. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DRPD Kota Langsa mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.95
Perkembangan Pelaksanaan Kesekretariatan Dewan Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Ada/ Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa

Salah satu kegiatan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD adalah kegiatan rapat DPRD. Bagian hukum dan persidangan merupakan bagian yang berperan sebagai penanggungjawab utama dalam mengelola kegiatan rapat DPRD Kota Langsa.

Tabel 2.96
Jumlah Sidang/Rapat DPRD Menurut Jenisnya Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Jenis Sidang/Rapat	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Paripurna terbuka	Kali	40	29	36	30	36
Paripurna istimewa	Kali	3	1	4	0	0
Paripurna khusus	Kali	1	9	14	8	7
Panitia musyawarah	Kali	8	8	10	10	7

Jenis Sidang/Rapat	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Panitia anggaran	Kali	10	11	24	10	7
Rapat fraksi	Kali	8	8	8	8	8
Rapat komisi	Kali	30	110	110	60	58
Panitia khusus	Kali	0	0	2	15	0
Rapat tim kunjungan kerja	Kali	1	1	1	1	1
Jumlah	Kali	128	101	177	209	124

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa

Tahun 2021 pelaksanaan sidang/rapat yang dilaksanakan DPRD Kota Langsa sebanyak 124 kali, jumlah ini berkurang dari tahun sebelumnya terutama untuk pelaksanaan rapat komisi.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks daya saing daerah adalah suatu *tool* yang dibuat oleh Kemenristek/BRIN untuk menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelajutan. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. IDSD ini diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Berdasarkan Surat Deputi Pemanfaatan Riset Dan Inovasi Nomor : B-307/II/RI/12/2021 Perihal : Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi Melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2021, Kota Langsa Tahun 2021 memperoleh nilai 2,682 (predikat tinggi) yang terdiri dari empat aspek daya saing yaitu ekosistem inovasi memperoleh nilai 1,606; faktor penguat/*enabling environment* memperoleh nilai 3,1; dan sumber daya manusia/*human capital* memperoleh nilai 3,5; faktor pasar memperoleh nilai 2,521.

Selain itu, hasil pemetaan pilar terdiri 12 (dua belas) yaitu dinamika bisnis sebesar 2; kapasitas inovasi sebesar 1,06667; Kapasitas Teknologi 1,75; Kelembagaan 3,55; Insfrastruktur 3,75; Perekomomian Daerah 2; Kesehatan 3,625; Pendidikan dan keterampilan 3,375; Efisiensi Pasar Produk 2,75; Ketenagakerjaan 2,5; Akses Keuangan 2,33333; Ukuran Pasar 2,5.

Berdasarkan hasil pemetaan pilar dengan merujuk pemetaan aspek. Maka, dari 12 (duabelas pilar) tersebut terdapat ada dua pilar di bawah rata-rata keseluruhan indeks yaitu pilar akses keuangan dan pilar kapasitas inovasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.6
Tingginya Daya Saing Kota Langsa dibanding rata-rata Seluruh Pilar (12 Pilar)

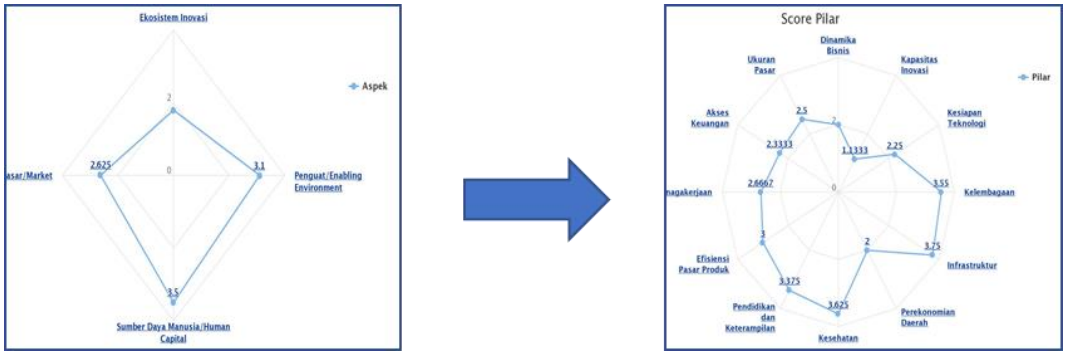

Sumber: Bappeda Kota Langsa (diolah)

Tingginya Indeks daya saing daerah pilar Dinamika Bisnis; Kapasitas Inovasi; Kesiapan Teknologi; Kelembagaan; Infrastruktur; Perekonomian Daerah; Kesehatan; Pendidikan dan keterampilan; Efisiensi Pasar Produk; Ketenagakerjaan; Akses Keuangan; Ukuran Pasar. Masih rendahnya Indeks Daya Saing Daerah pada pilar akses keuangan; dan pilar kapasitas inovasi.

2.4.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat. Adapun pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Langsa pada periode 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97
Rician Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Barang Selama 1 (Satu) Bulan Tahun 2017-2021 Kota Langsa (Rupiah)

Kelompok Barang		2017	2018	2019	2020	2021
A	MAKANAN					
1	Padi-padian	56.827	51.885	55.689	53.725	60.036
2	Umbi-umbian	3.924	3.396	3.114	3.668	3.567
3	Ikan/Udang/ Cumi/Kerang	66.188	66.683	61.444	70.590	83.319
4	Daging	17.696	14.470	12.319	16.231	14.421
5	Telur dan susu	36.264	39.733	33.376	34.721	39.996
6	Sayur-sayuran	39.124	39.680	35.219	45.004	51.518
7	Kacang-kacangan	9.773	9.218	8.113	8.349	8.304
8	Buah-buahan	29.330	33.236	31.192	35.756	33.624
9	Minyak dan kelapa	14.864	15.084	13.504	14.916	16.606
10	Bahan minuman	18.285	16.324	14.371	17.467	17.258
11	Bumbu-bumbuan	8.331	9.508	9.948	12.077	12.701
12	Konsumsi Lainnya	9.977	6.622	6.957	7224	9.372
13	Makanan dan minuman jadi	191.742	234.244	227.652	234.582	246.953
14	Rokok	62.865	54.779	69.819	67.580	74.834
Jumlah Makanan		502.026	565.192	594.859	621.888	672.509
B	BUKAN MAKANAN					
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	248.284	298.427	271.979	283.784	317.793
2	Barang dan jasa	146.531	202.695	195.943	199.402	193.155
3	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	51.656	65.605	56.883	62.101	62.211
4	Barang-barang yang tahan lama	59.705	94.415	120.269	112.695	90.112
5	Pajak dan asuransi	47.389	47.679	46.301	51.684	59.460
6	Keperluan pesta dan upacara	13.271	20.160	14.896	11.527	14.518
Jumlah Bukan Makanan		566.835	728.980	706.273	721.192	737.250
TOTAL		1.132.027	1.323.840	1.288.989	1.343.080	1.409.758

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Total pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Langsa selama kurun waktu lima tahun bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 rata-rata pengeluaran per kapita bertambah mencapai Rp.1.409.758, dimana terjadi

kenaikan terhadap proporsi pengeluaran makanan dan bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan meningkat 1,4 persen dari tahun sebelumnya menjadi 47,70 persen terhadap total pengeluaran, hal ini menandakan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan di Kota Langsa.

2.4.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lainnya, atas dasar upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Jika NTP > 100 berarti petani mengalami surplus lalu apabila NTP = 100, berarti petani mengalami impas sementara itu jika NTP < 100 berarti petani mengalami defisit.

Tabel 2.98
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021 Kota Langsa

Uraian	2021
Indeks yang Diterima Petani	103.29
Indeks yang Dibayar Petani	107.24
NTP	96.31

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa

Nilai Tukar Petani Kota Langsa pada tahun 2021 sebesar 96.31 persen. Capaian ini menandakan bahwa petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya sehingga pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

2.4.4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Rasio ketergantungan sebagai indikator demografi digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila *dependency ratio* tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula.

Rasio ketergantungan yang tinggi dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat

memengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Selain itu, tingginya rasio ketergantungan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah, karena tinnginya beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif.

Tabel 2.99
Rasio Ketergantungan Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Usia <15 thn - usia >64 thn	Orang	55.322	59.079	59.748	55.660	56.232
Penduduk usia 15-64 thn	Orang	116.252	115.239	117.063	130.311	132.646
Persentase Rasio Ketergantungan	%	47,58	51,26	51,04	42,71	42,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Angka *dependency ratio* Kota Langsa tahun 2021 mencapai 42,39 persen yang menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dimana rasio ketergantungan sebesar 42,39 persen dapat diartikan bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Kota Langsa jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh, maka selama periode 2017-2021 angka ketergantungan Kota Langsa lebih rendah daripada Provinsi Aceh.

Grafik 2.41
Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Langsa dan Provinsi Aceh
Tahun 2017-2021 (Persen)

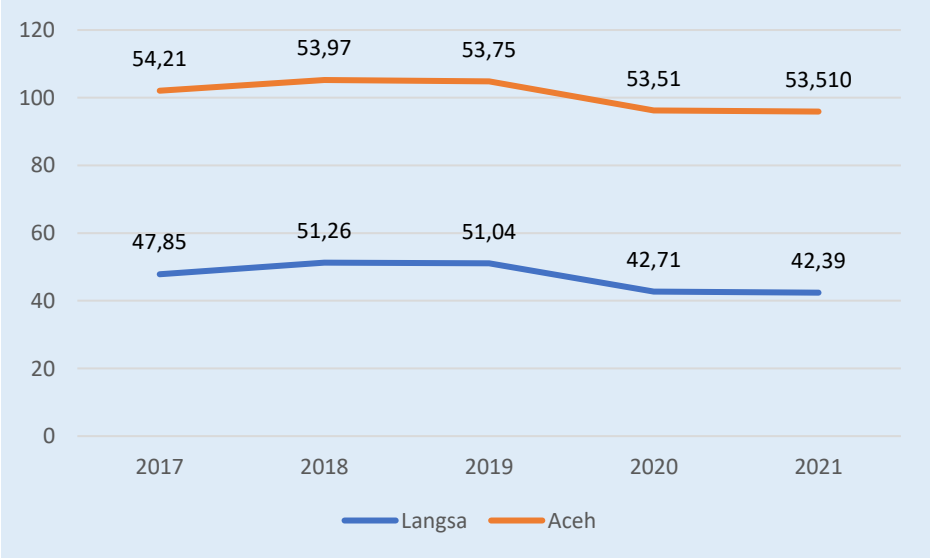

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.4.5. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik di Kota Langsa disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Langsa. Kebutuhan yang terus meningkat, ikut pula meningkatkan produksi listrik di Kota Langsa setiap tahunnya. Berikut perkembangan pelanggan listrik di Kota Langsa:

Tabel 2.100
Perkembangan Pelanggan Listrik di Kota Langsa Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi listrik	KW	167.455.658	176.851.571	188.921.774	196.238.540	200.240.577
Pelanggan listrik	Pelanggan	41.220	49.243	53.122	56.158	58.371

Sumber: PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh UP3 Langsa

Pelanggan listrik di Kota Langsa selama periode 2017-2021 mengalami tren meningkat. Selama kurun waktu lima tahun pelanggan listrik bertambah sebanyak 17.151 pelanggan. Pada tahun 2017 jumlah pelanggan listrik sebanyak 41.220 pelanggan dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 jumlah pelanggan listrik mencapai 58.371 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan sejalan dengan meningkatnya jumlah produksi listrik. Pada tahun 2021 jumlah produksi listrik di Kota Langsa sebesar 200.240.577 kW.

2.4.6. Kriminalitas

Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum. Meningkatnya tindak kriminalitas yang terjadi menunjukkan bahwa situasi keamanan yang tidak kondusif. Untuk mencegah kriminalitas dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, masyarakat dan aparat perlu membentuk kerjasama yang solid dalam upaya pencegahan preventif. Dengan demikian angka kriminalitas dapat diminimalisir. Pemerintahan Daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Tabel 2.101
Angka Kriminalitas Yang Tertangani Tahun 2017-2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah tindak kriminalitas selama 1 tahun	Kasus	634	375	387	497	513
Jumlah tindak kriminalitas yang tertangani selama 1 tahun	Kasus	363	219	70	120	410

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	Orang	171.574	174.318	186.827	185.971	188.878
Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk	Kasus	21	12	4	6	22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Selama periode tahun 2017-2021, jumlah tindak kriminalitas di Kota Langsa berfluktuasi. Pada tahun 2021 merupakan angka tertinggi dari jumlah kriminalitas yang tertangani yaitu sebanyak 410 kasus dari total keseluruhan 513 kasus, adapun angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk mencapai 22 kasus. Banyak faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas, baik faktor eksternal maupun internal. Dengan semakin banyaknya mobilitas penduduk di Kota Langsa maka semakin besar peluang untuk tindak kriminalitas terjadi sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat perlu ditingkatkan.

2.4.7. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peran penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Salah satu lembaga keuangan adalah Bank. Berikut kegiatan perbankan di Kota Langsa:

Tabel 2.102
Kegiatan Perbankan Tahun 2021 Kota Langsa

Uraian	Satuan	2021
Jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank umum menurut jenis penggunaan	Juta Rupiah	26.154.944
Jumlah pinjaman UMKM yang diberikan oleh bank umum menurut jenis penggunaan	Juta Rupiah	9.658.512
Jumlah dana simpanan berupa giro, tabungan dan deposito di bank umum	Juta Rupiah	24.888.590

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Langsa

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah untuk menggerakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai bidang-bidang pembangunan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Gambaran keuangan daerah pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis kapasitas kemampuan keuangan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat gambaran keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis dapat dilakukan terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBD setidaknya 5 (lima) tahun sebelumnya.

III.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu merupakan kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang dapat dijadikan salah satu dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Kinerja keuangan masa lalu yang akan dibahas mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah dengan penjabaran sebagai berikut :

III.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari gambaran tingkat realisasi dan proporsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Secara umum gambaran tersebut adalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Langsa selama 5 (lima) tahun terakhir sangat fluktuatif, dengan tingkat pertumbuhannya rata-sebesar rata -3,28%. Minusnya rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh Covid-19 yang telah menjadi pandemi di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama, pada dasarnya pandemi Covid-19 tertular melalui interaksi fisik individu yang pada akhirnya berdampak pada transaksi ekonomi masyarakat. Sehingga dengan demikian potensi sumber-sumber pendapatan daerah tidak dapat memberikan kontribusi secara optimal.

Realisasi pendapatan daerah Kota Langsa pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.014.888.423.313,13,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 30.828.371.835,07,- atau sebesar 3,13% terhadap tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 984.060.051.478,06,-. Pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah Kota Langsa mencapai sebesar Rp. 806.608.245.619,65,-, mengalami penurunan sebesar Rp. 208.280.177.693,48,- atau sebesar 20,52% terhadap tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah Kota Langsa sebesar Rp. 909.788.751.296,94,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 103.180.505.677,29,- atau sebesar 12,79% terhadap tahun 2018. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah Kota Langsa sebesar Rp. 861.563.457.580,70,-, mengalami penurunan sebesar Rp. 48.225.293.716,24,- atau sebesar 5,30% terhadap tahun 2019.

Sementara itu pada tahun 2021, realisasi pendapatan daerah Kota Langsa tercatat sebesar Rp. 888.259.626.264,76,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 26.696.168.684,06,- atau sebesar 3,10% terhadap tahun 2020.

Grafik 3.1.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021

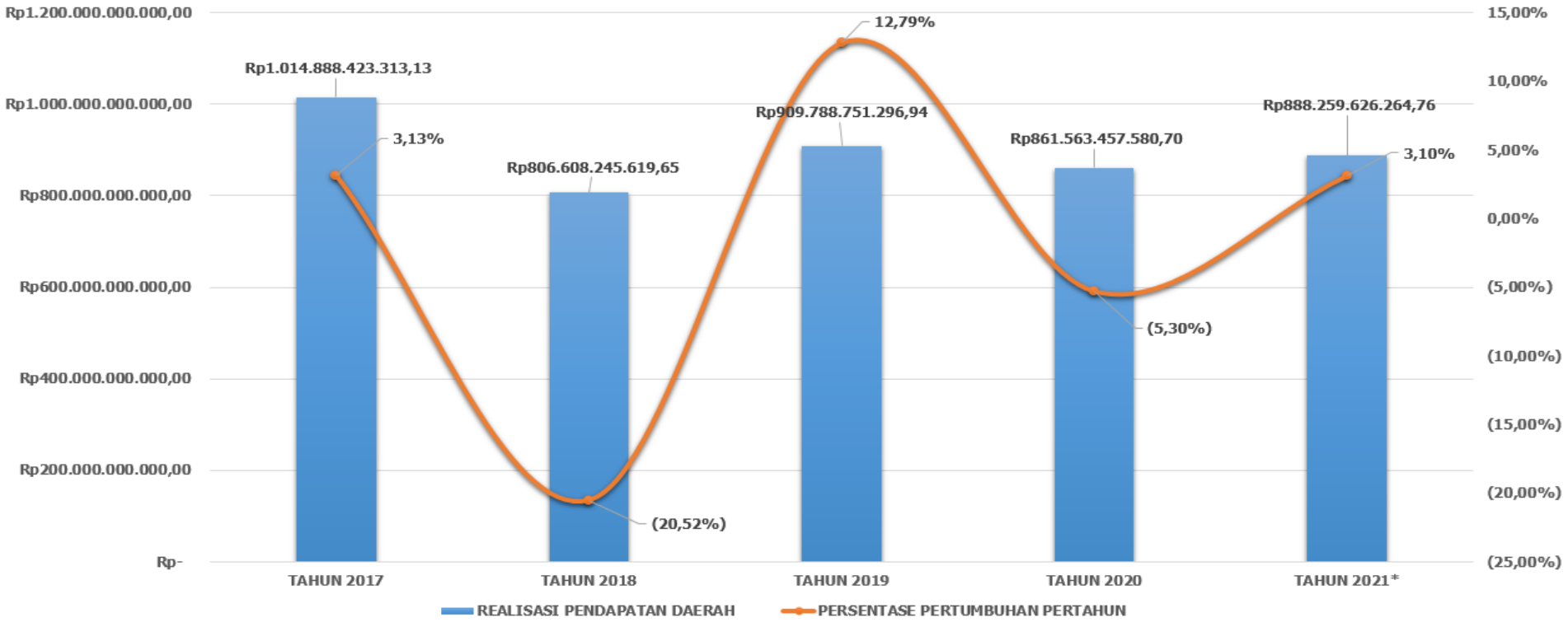

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
Keterangan : * Data Sementara

Komponen pembentuk pendapatan daerah Kota Langsa terbesar disumbangkan oleh kelompok Pendapatan Transfer, dengan rata-rata kontribusinya mencapai sebesar 85,29%, kemudian disusul oleh kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,22% dan selanjutnya kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 1,49%.

Grafik 3.2.
Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021

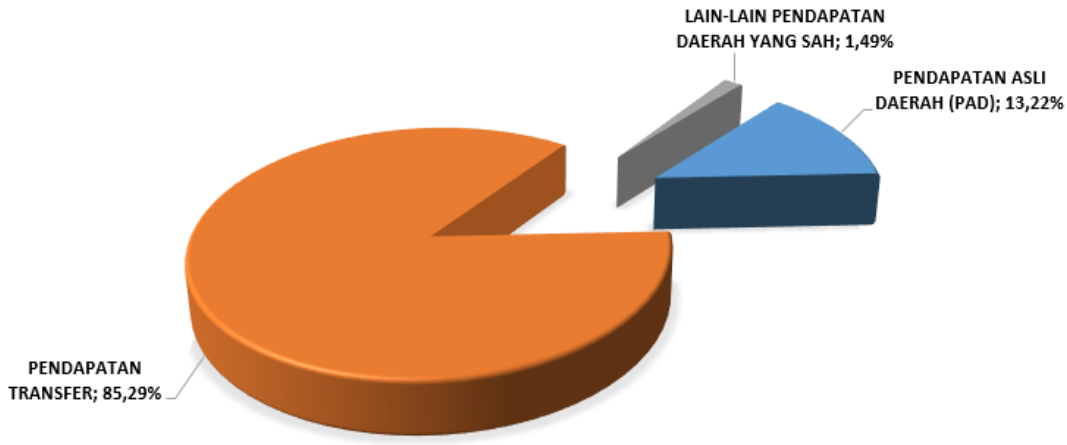

Tabel 3.1.
Perkembangan Realisasi Proporsi Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	PENDAPATAN DAERAH	TAHUN					RATA-RATA
		2017	2018	2019	2020	2021*	
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendapatan Asli Daerah	11,84	15,04	12,57	14,66	11,91	**13,22**
2.	Pendapatan Transfer	88,16	82,84	85,52	83,22	86,70	**85,29**
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	2,12	1,82	2,12	1,39	**1,49**
JUMLAH		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Tabel 3.2.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Derah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	PENDAPATAN DAERAH	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		TAHUN 2017 (Rp.)	TAHUN 2018 (Rp.)	TAHUN 2019 (Rp.)	TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021* (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**120.138.956.032,87**	**121.316.713.328,93**	**115.244.246.710,49**	**126.277.867.970,70**	**105.765.746.825,76**	**(3,14)**
	1. 1. Pajak Daerah	13.293.761.532,50	13.428.662.525,00	14.338.755.716,00	15.346.995.749,00	15.479.103.788,00	3,88
	1. 2. Retribusi Daerah	4.501.489.952,00	4.468.645.079,66	4.007.455.080,00	3.657.591.595,00	3.428.735.390,00	(6,58)
	1. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	604.966.136,22	994.160.566,00	1.077.991.273,42	1.019.953.168,00	833.278.387,00	8,33
	1. 4. Lain-lain PAD yang Sah	101.738.738.412,15	102.425.245.158,27	95.820.044.641,07	106.253.327.458,70	86.024.629.260,76	(4,11)
2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**894.749.467.280,26**	**668.155.012.887,72**	**778.029.464.586,45**	**717.004.656.510,00**	**770.136.669.439,00**	**(3,68)**
	2. 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	782.933.395.793,00	647.081.287.570,00	675.555.060.396,00	580.363.940.398,00	671.226.170.733,00	(3,78)
	2. 1. 1. Dana Perimbangan	677.192.132.793,00	593.621.554.571,00	617.782.373.399,00	520.941.107.171,00	599.592.780.108,00	(3,00)
	2. 1. 1. 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.457.123.485,00	17.662.766.108,00	14.785.376.334,00	14.053.003.198,00	17.886.841.244,00	(4,45)
	2. 1. 1. 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	444.012.586.000,00	444.012.586.000,00	456.700.561.000,00	414.459.534.000,00	407.519.092.000,00	(2,12)
	2. 1. 1. 3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	162.357.964.616,00	83.368.238.542,00	102.648.613.782,00	46.339.693.777,00	126.653.281.442,00	(6,02)
	2. 1. 1. 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	49.364.458.692,00	48.577.963.921,00	43.647.822.283,00	46.088.876.196,00	47.533.565.422,00	(0,94)
	2. 1. 2. Dana Insentif Daerah (DID)	51.569.612.000,00	-	-	-	15.224.797.000,00	(70,48)
	2. 1. 2. 1. DID	51.569.612.000,00	-	-	-	15.224.797.000,00	(70,48)
	2. 1. 3. Dana Desa	54.171.651.000,00	53.459.732.999,00	57.772.686.997,00	59.422.833.227,00	56.408.593.625,00	1,02
	2. 1. 3. 1. Dana Desa	54.171.651.000,00	53.459.732.999,00	57.772.686.997,00	59.422.833.227,00	56.408.593.625,00	1,02
	2. 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	111.816.071.487,26	21.073.725.317,72	102.474.404.190,45	136.640.716.112,00	98.910.498.706,00	(3,02)
	2. 2. 1. Pendapatan Bagi Hasil	19.647.779.922,26	21.073.725.317,72	24.343.520.889,45	28.991.428.763,00	26.147.613.842,00	7,41
	2. 2. 1. 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.647.779.922,26	21.073.725.317,72	24.343.520.889,45	28.991.428.763,00	26.147.613.842,00	7,41
	2. 2. 2. Bantuan Keuangan	92.168.291.565,00	-	78.130.883.301,00	107.649.287.349,00	72.762.884.864,00	(7,58)
	2. 2. 2. 1. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	92.168.291.565,00	-	78.130.883.301,00	107.649.287.349,00	72.762.884.864,00	(7,58)
3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**17.136.519.403,00**	**16.515.040.000,00**	**18.280.933.100,00**	**12.357.210.000,00**	**(10,33)**
	3. 1. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	17.136.519.403,00	16.515.040.000,00	18.280.933.100,00	12.357.210.000,00	(10,33)
	3. 1. 1. Lain-lain Pendapatan	-	17.136.519.403,00	16.515.040.000,00	18.280.933.100,00	12.357.210.000,00	(10,33)
	3. 1. 1. 1. Pendapatan Hibah Dana BOS	-	17.136.519.403,00	16.515.040.000,00	18.280.933.100,00	12.357.210.000,00	(10,33)
JUMLAH		**1.014.888.423.313,13**	**806.608.245.619,65**	**909.788.751.296,94**	**861.563.457.580,70**	**888.259.626.264,76**	**(3,28)**
PERTUMBUHAN PERTAHUN (Rp.)		**30.828.371.835,07**	**(208.280.177.693,48)**	**103.180.505.677,29**	**(48.225.293.716,24)**	**26.696.168.684,06**	
(%)		**3,13**	**(20,52)**	**12,79**	**(5,30)**	**3,10**	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Keterangan
* : Data Sementara

B. Belanja Daerah

Sebagaimana halnya perkembangan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah Kota Langsa juga mengalami hal yang sama. Tingkat pertumbuhan rata-rata belanja daerah kota langsa selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar -4,13%. Minusnya rata-rata pertumbuhan belanja daerah dipengaruhi tingkat pendapatan yang mengalami penurunan sejalan dengan dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19.

Realisasi belanja daerah Kota Langsa pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.021.681.327.934,35,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.410.274.520,35,- atau sebesar 2,35% terhadap tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 998.271.053.414,00,-. Pada tahun 2018 realisasi belanja daerah Kota Langsa mencapai sebesar Rp. 792.041.640.361,25,- mengalami penurunan sebesar Rp. 229.639.687.573,10,- atau sebesar 22,48% terhadap tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2019, realisasi belanja daerah Kota Langsa sebesar Rp. 930.309.326.664,95,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 138.267.686.303,70,- atau sebesar 17,46% terhadap tahun 2018. Pada tahun 2020 realisasi belanja daerah Kota Langsa sebesar Rp. 860.018.230.824,04,-, mengalami penurunan sebesar Rp. 70.291.095.840,91,- atau sebesar 7,56% terhadap tahun 2019.

Sementara itu pada tahun 2021, realisasi belanja daerah Kota Langsa tercatat sebesar Rp. 862.898.732.955,19,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.880.502.131,15,- atau sebesar 0,33% terhadap tahun 2020.

Grafik 3.3.
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021

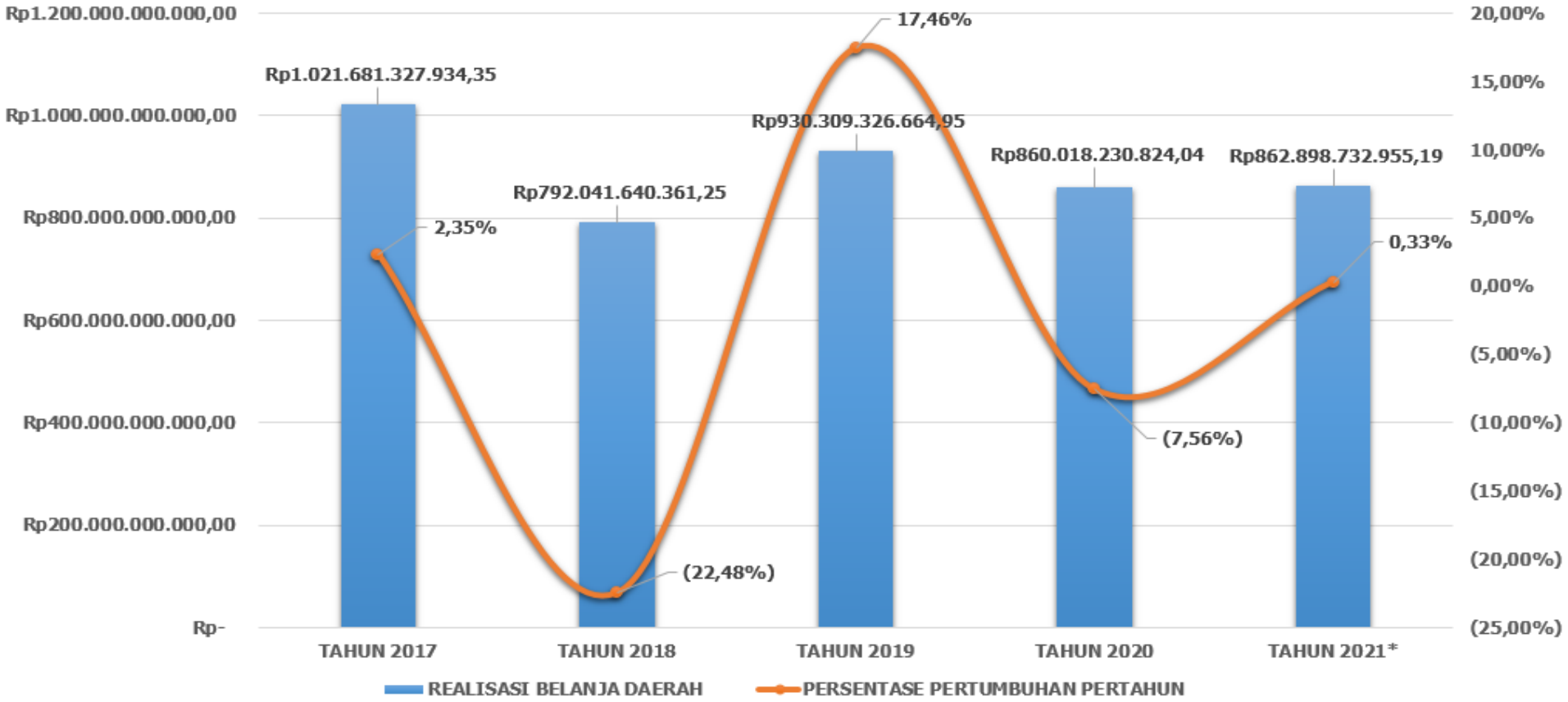

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
Keterangan : * Data Sementara

Komponen pembentuk belanja daerah Kota Langsa terbesar disumbangkan oleh kelompok belanja operasi, dengan rata-rata kontribusinya mencapai sebesar 66,17%, kemudian disusul oleh kelompok belanja modal sebesar 21,82% dan selanjutnya kelompok belanja transfer sebesar 11,72%, serta kelompok belanja tidak terduga sebesar 0,30%.

Grafik 3.4.
Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021

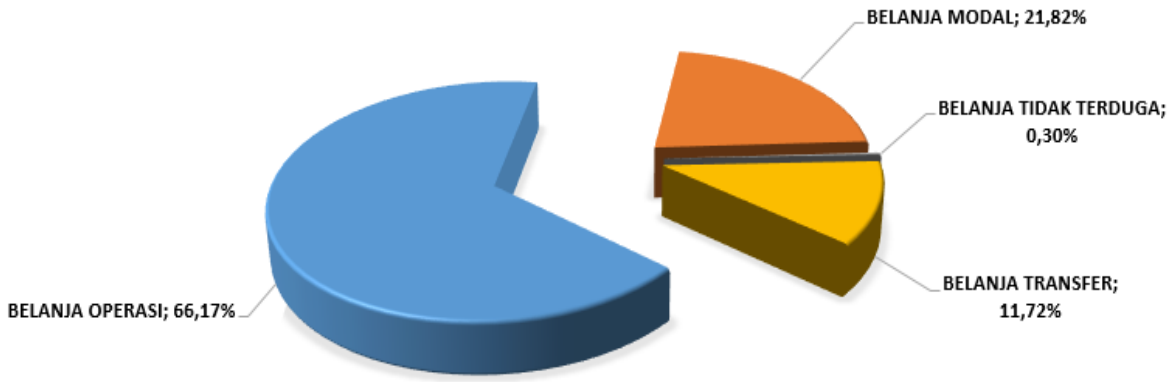

Tabel 3.3.
Perkembangan Realisasi Proporsi Komponen Pembentuk Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	BELANJA DAERAH	TAHUN					RATA-RATA
		2017	2018	2019	2020	2021*	
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Belanja Operasi	57,27	72,50	67,01	67,23	66,84	**66,17**
2.	Belanja Modal	32,62	14,58	21,35	19,23	21,30	**21,82**
3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,02	1,25	0,21	**0,30**
4.	Belanja Transfer	10,10	12,92	11,63	12,28	11,66	**11,72**
JUMLAH		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Tabel 3.4.
Perkembangan Realisasi Belanja Derah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	BELANJA DAERAH	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		TAHUN 2017 (Rp.)	TAHUN 2018 (Rp.)	TAHUN 2019 (Rp.)	TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021* (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**BELANJA OPERASI**	**585.158.924.391,00**	**574.257.394.662,25**	**623.366.627.353,34**	**578.207.381.321,86**	**576.751.712.759,60**	**(0,36)**
	1. 1. Belanja Pegawai	308.695.503.054,00	370.535.569.812,00	386.140.461.671,00	308.167.950.308,00	310.608.119.805,00	0,15
	1. 2. Belanja Barang dan Jasa	212.936.526.311,00	189.626.213.850,25	221.636.434.682,34	257.065.088.513,86	194.641.283.394,00	(2,22)
	1. 3. Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
	1. 4. Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	1. 5. Belanja Hibah	27.372.269.000,00	9.624.200.000,00	11.178.531.000,00	9.012.045.500,00	24.493.513.328,60	(2,74)
	1. 6. Belanja Bantuan Sosial	36.154.626.026,00	4.471.411.000,00	4.411.200.000,00	3.962.297.000,00	47.008.796.232,00	6,78
2.	**BELANJA MODAL**	**333.296.714.479,35**	**115.478.103.942,00**	**198.592.250.990,61**	**165.408.124.583,18**	**183.767.874.953,59**	**(13,83)**
	2. 1. Belanja Modal Tanah	6.090.275.830,00	7.973.967.520,00	4.046.127.000,00	3.640.559.000,00	536.739.000,00	(45,51)
	2. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.470.987.023,00	44.514.932.912,00	77.907.038.767,02	35.394.941.692,44	39.716.068.571,00	(7,59)
	2. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.361.472.915,35	25.885.332.000,00	44.012.698.773,13	86.526.371.065,44	68.625.889.394,84	7,00
	2. 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	219.759.257.711,00	36.737.613.760,00	70.206.737.600,46	39.350.039.830,30	73.002.536.987,75	(24,08)
	2. 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	614.721.000,00	366.257.750,00	2.419.648.850,00	496.212.995,00	1.886.641.000,00	32,36
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**-**	**-**	**175.000.000,00**	**10.759.370.538,00**	**1.803.054.723,00**	**220,99**
	3. 1. Belanja Tidak Terduga	-	-	175.000.000,00	10.759.370.538,00	1.803.054.723,00	220,99
4.	**BELANJA TRANSFER**	**103.225.689.064,00**	**102.306.141.757,00**	**108.175.448.321,00**	**105.643.354.381,00**	**100.576.090.519,00**	**(0,65)**
	4. 1. Belanja Bagi Hasil	728.160.219,00	1.571.242.255,00	2.016.400.534,00	2.097.777.450,00	2.223.029.490,00	32,18
	4. 1. Belanja Bantuan Keuangan	102.497.528.845,00	100.734.899.502,00	106.159.047.787,00	103.545.576.931,00	98.353.061.029,00	(1,03)
JUMLAH		**1.021.681.327.934,35**	**792.041.640.361,25**	**930.309.326.664,95**	**860.018.230.824,04**	**862.898.732.955,19**	**(4,13)**
PERTUMBUHAN PERTAHUN (Rp.)		**23.410.274.520,35**	**(229.639.687.573,10)**	**138.267.686.303,70**	**(70.291.095.840,91)**	**2.880.502.131,15**	
(%)		**2,35**	**(22,48)**	**17,46**	**(7,56)**	**0,33**	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Keterangan
* : Data Sementara

C. Pembiayaan Daerah

Perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kota Langsa selama 5 (lima) tahun terakhir sangat fluktuatif, dengan tingkat pertumbuhannya rata-sebesar rata - 15,74%. Minusnya rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah Kota Langsa terutama diakibatkan oleh fluktuatif komponen penerimaan pembiayaan daerah pada pos sisa lebih perhitungan anggaran yang dapat diinterpretasikan sebagai penghematan dan atau penangguhan pengeluaran belanja daerah pada pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi pembiayaan daerah Kota Langsa pada tahun 2017 sebesar Rp. 30.343.606.997,96,-, mengalami penurunan sebesar Rp. 14.487.269.275,78,- atau sebesar 32,32% terhadap tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 44.830.876.273,74,. Pada tahun 2018 realisasi pembiayaan daerah Kota Langsa mencapai sebesar Rp. 23.204.372.485,48,- mengalami penurunan sebesar Rp. 7.139.234.512,48,- atau sebesar 23,53% terhadap tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2019, realisasi pembiayaan daerah Kota Langsa sebesar Rp. 36.570.977.743,88,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 13.366.605.258,40,- atau sebesar 57,60% terhadap tahun 2018. Pada tahun 2020 realisasi pembiayaan daerah Kota Langsa sebesar Rp. 14.750.402.375,87,-, mengalami penurunan sebesar Rp. 21.820.575.368,01,- atau sebesar 59,67% terhadap tahun 2019.

Sementara itu pada tahun 2021, realisasi pembiayaan daerah Kota Langsa tercatat sebesar Rp. 15.295.629.132,53,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 545.226.756,66,- atau sebesar 3,70% terhadap tahun 2020.

Grafik 3.5.
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021

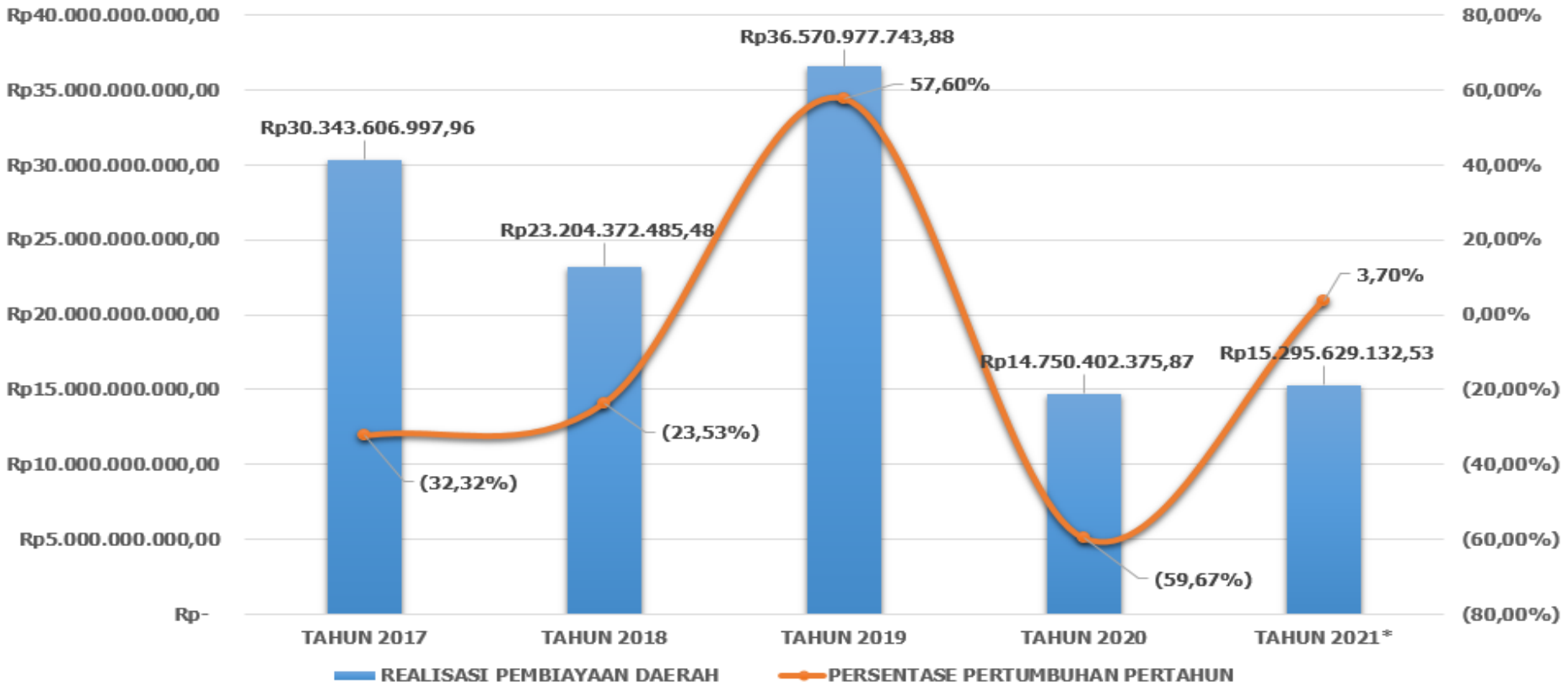

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
Keterangan : * Data Sementara

Tabel 3.5.
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	PEMBIAYAAN DAERAH	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		TAHUN 2017 (Rp.)	TAHUN 2018 (Rp.)	TAHUN 2019 (Rp.)	TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021* (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**30.603.667.873,82**	**23.204.372.485,48**	**37.770.977.743,88**	**16.050.402.375,87**	**16.295.629.132,53**	**(14,58)**
	1. 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.603.667.873,82	23.204.372.485,48	37.770.977.743,88	16.050.402.375,87	16.295.629.132,53	(14,58)
	1. 2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	1. 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
	1. 4. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	1. 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	1. 6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**260.060.875,86**	**-**	**1.200.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**56,67**
	2. 1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	2. 2. Penyertaan Modal Daerah	-	-	1.200.000.000,00	1.300.000.000,00	1.000.000.000,00	(8,71)
	2. 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	260.060.875,86	-	-	-	-	(100,00)
	2. 4. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	2. 5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN DAERAH		**30.343.606.997,96**	**23.204.372.485,48**	**36.570.977.743,88**	**14.750.402.375,87**	**15.295.629.132,53**	**(15,74)**
PERTUMBUHAN PERTAHUN (Rp.)		**(14.487.269.275,78)**	**(7.139.234.512,48)**	**13.366.605.258,40**	**(21.820.575.368,01)**	**545.226.756,66**	
(%)		**(32,32)**	**(23,53)**	**57,60**	**(59,67)**	**3,70**	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Keterangan
* : Data Sementara

Tabel 3.6.
Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	BELANJA DAERAH	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		TAHUN 2017 (Rp.)	TAHUN 2018 (Rp.)	TAHUN 2019 (Rp.)	TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021* (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.014.888.423.313,13**	**806.608.245.619,65**	**909.788.751.296,94**	**861.563.457.580,70**	**888.259.626.264,76**	**(3,28)**
	1. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**120.138.956.032,87**	**121.316.713.328,93**	**115.244.246.710,49**	**126.277.867.970,70**	**105.765.746.825,76**	**(3,14)**
	1. 1. 1. Pajak Daerah	13.293.761.532,50	13.428.662.525,00	14.338.755.716,00	15.346.995.749,00	15.479.103.788,00	3,88
	1. 1. 2. Retribusi Daerah	4.501.489.952,00	4.468.645.079,66	4.007.455.080,00	3.657.591.595,00	3.428.735.390,00	(6,58)
	1. 1. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	604.966.136,22	994.160.566,00	1.077.991.273,42	1.019.953.168,00	833.278.387,00	8,33
	1. 1. 4. Lain-lain PAD yang Sah	101.738.738.412,15	102.425.245.158,27	95.820.044.641,07	106.253.327.458,70	86.024.629.260,76	(4,11)
	1. 2. PENDAPATAN TRANSFER	**894.749.467.280,26**	**668.155.012.887,72**	**778.029.464.586,45**	**717.004.656.510,00**	**770.136.669.439,00**	**(3,68)**
	1. 2. 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	782.933.395.793,00	647.081.287.570,00	675.555.060.396,00	580.363.940.398,00	671.226.170.733,00	(3,78)
	1. 2. 1. 1. Dana Perimbangan	677.192.132.793,00	593.621.554.571,00	617.782.373.399,00	520.941.107.171,00	599.592.780.108,00	(3,00)
	1. 2. 1. 2. Dana Insentif Daerah (DID)	51.569.612.000,00	-	-	-	15.224.797.000,00	(70,48)
	1. 2. 1. 3. Dana Desa	54.171.651.000,00	53.459.732.999,00	57.772.686.997,00	59.422.833.227,00	56.408.593.625,00	1,02
	1. 2. 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	111.816.071.487,26	21.073.725.317,72	102.474.404.190,45	136.640.716.112,00	98.910.498.706,00	(3,02)
	1. 2. 2. 1. Pendapatan Bagi Hasil	19.647.779.922,26	21.073.725.317,72	24.343.520.889,45	28.991.428.763,00	26.147.613.842,00	7,41
	1. 2. 2. 2. Bantuan Keuangan	92.168.291.565,00	-	78.130.883.301,00	107.649.287.349,00	72.762.884.864,00	(7,58)
	1. 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**-**	**17.136.519.403,00**	**16.515.040.000,00**	**18.280.933.100,00**	**12.357.210.000,00**	**(10,33)**
	1. 3. 1. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	17.136.519.403,00	16.515.040.000,00	18.280.933.100,00	12.357.210.000,00	(10,33)
	1. 3. 1. 1. Lain-lain Pendapatan	-	17.136.519.403,00	16.515.040.000,00	18.280.933.100,00	12.357.210.000,00	(10,33)
2.	**BELANJA DAERAH**	**1.021.681.327.934,35**	**792.041.640.361,25**	**930.309.326.664,95**	**860.018.230.824,04**	**862.898.732.955,19**	**(4,13)**
	2. 1. BELANJA OPERASI	**585.158.924.391,00**	**574.257.394.662,25**	**623.366.627.353,34**	**578.207.381.321,86**	**576.751.712.759,60**	**(0,36)**
	2. 1. 1. Belanja Pegawai	308.695.503.054,00	370.535.569.812,00	386.140.461.671,00	308.167.950.308,00	310.608.119.805,00	0,15
	2. 1. 2. Belanja Barang dan Jasa	212.936.526.311,00	189.626.213.850,25	221.636.434.682,34	257.065.088.513,86	194.641.283.394,00	(2,22)
	2. 1. 3. Belanja Hibah	27.372.269.000,00	9.624.200.000,00	11.178.531.000,00	9.012.045.500,00	24.493.513.328,60	(2,74)
	2. 1. 4. Belanja Bantuan Sosial	36.154.626.026,00	4.471.411.000,00	4.411.200.000,00	3.962.297.000,00	47.008.796.232,00	6,78
	2. 2. BELANJA MODAL	**333.296.714.479,35**	**115.478.103.942,00**	**198.592.250.990,61**	**165.408.124.583,18**	**183.767.874.953,59**	**(13,83)**
	2. 2. 1. Belanja Modal Tanah	6.090.275.830,00	7.973.967.520,00	4.046.127.000,00	3.640.559.000,00	536.739.000,00	(45,51)
	2. 2. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.470.987.023,00	44.514.932.912,00	77.907.038.767,02	35.394.941.692,44	39.716.068.571,00	(7,59)
	2. 2. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.361.472.915,35	25.885.332.000,00	44.012.698.773,13	86.526.371.065,44	68.625.889.394,84	7,00
	2. 2. 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	219.759.257.711,00	36.737.613.760,00	70.206.737.600,46	39.350.039.830,30	73.002.536.987,75	(24,08)
	2. 2. 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	614.721.000,00	366.257.750,00	2.419.648.850,00	496.212.995,00	1.886.641.000,00	32,36

NO	BELANJA DAERAH	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		TAHUN 2017 (Rp.)	TAHUN 2018 (Rp.)	TAHUN 2019 (Rp.)	TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021* (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. 3. BELANJA TIDAK TERDUGA	**-**	**-**	**175.000.000,00**	**10.759.370.538,00**	**1.803.054.723,00**	**220,99**
	2. 3. 1. Belanja Tidak Terduga	-	-	175.000.000,00	10.759.370.538,00	1.803.054.723,00	220,99
	2. 4. BELANJA TRANSFER	**103.225.689.064,00**	**102.306.141.757,00**	**108.175.448.321,00**	**105.643.354.381,00**	**100.576.090.519,00**	**(0,65)**
	2. 4. 1. Belanja Bagi Hasil	728.160.219,00	1.571.242.255,00	2.016.400.534,00	2.097.777.450,00	2.223.029.490,00	32,18
	2. 4. 2. Belanja Bantuan Keuangan	102.497.528.845,00	100.734.899.502,00	106.159.047.787,00	103.545.576.931,00	98.353.061.029,00	(1,03)
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(6.792.904.621,22)**	**14.566.605.258,40**	**(20.520.575.368,01)**	**1.545.226.756,66**	**25.360.893.309,57**	
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**30.343.606.997,96**	**23.204.372.485,48**	**36.570.977.743,88**	**14.750.402.375,87**	**15.295.629.132,53**	**(15,74)**
	3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**30.603.667.873,82**	**23.204.372.485,48**	**37.770.977.743,88**	**16.050.402.375,87**	**16.295.629.132,53**	**(14,58)**
	3. 1. 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.603.667.873,82	23.204.372.485,48	37.770.977.743,88	16.050.402.375,87	16.295.629.132,53	(14,58)
	3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**260.060.875,86**	**-**	**1.200.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**56,67**
	3. 2. 1. Penyertaan Modal Daerah	-	-	1.200.000.000,00	1.300.000.000,00	1.000.000.000,00	(8,71)
	3. 2. 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	260.060.875,86	-	-	-	-	(100,00)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**23.550.702.376,74**	**37.770.977.743,88**	**16.050.402.375,87**	**16.295.629.132,53**	**40.656.522.442,10**	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Keterangan
* : Data Sementara

III.1.2. Neraca Daerah

Perkembangan Neraca Kota Langsa selama 5 (lima) tahun terakhir cukup baik. Dari sisi aset, tingkat pertumbuhannya rata-rata mencapai sebesar 5,85%. Pada tahun 2017 posisi aset Pemerintah Kota Langsa tercatat sebesar Rp. 1.678.092.469.720,98,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 248.727.408.700,57,- atau sebesar 17,40% terhadap tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.429.365.061.020,41,-. Pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 1.813.733.115.666,74,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 135.640.645.945,76,- atau sebesar 8,08% terhadap tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2019 aset Pemerintah Kota Langsa tercatat sebesar Rp. 1.878.172.258.047,03,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 64.439.142.380,29,- atau sebesar 3,55% terhadap tahun 2018. Pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 1.906.260.617.984,94,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.088.359.937,91,- atau sebesar 1,50% terhadap tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2021 posisi aset Pemerintah Kota Langsa tercatat sebesar Rp. 2.106.625.436.246,25,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 200.364.818.261,31,- atau sebesar 10,51% terhadap tahun 2020.

Tabel 3.7.
Perkembangan Realisasi Aset Pemerintah Kota Langsa
Tahun 2017-2021

NO	TAHUN	REALISASI ASET (Rp.)	PERTUMBUHAN (%)
1	2	3	4
1.	2017	1.678.092.469.720,98	17,40
2.	2018	1.813.733.115.666,74	8,08
3.	2019	1.878.172.258.047,03	3,55
4.	2020	1.906.260.617.984,94	1,50
5.	2021*	2.106.625.436.246,25	10,51
RATA-RATA PERTUMBUHAN			**5,85**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Grafik 3.6.
Perkembangan Realisasi Aset Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

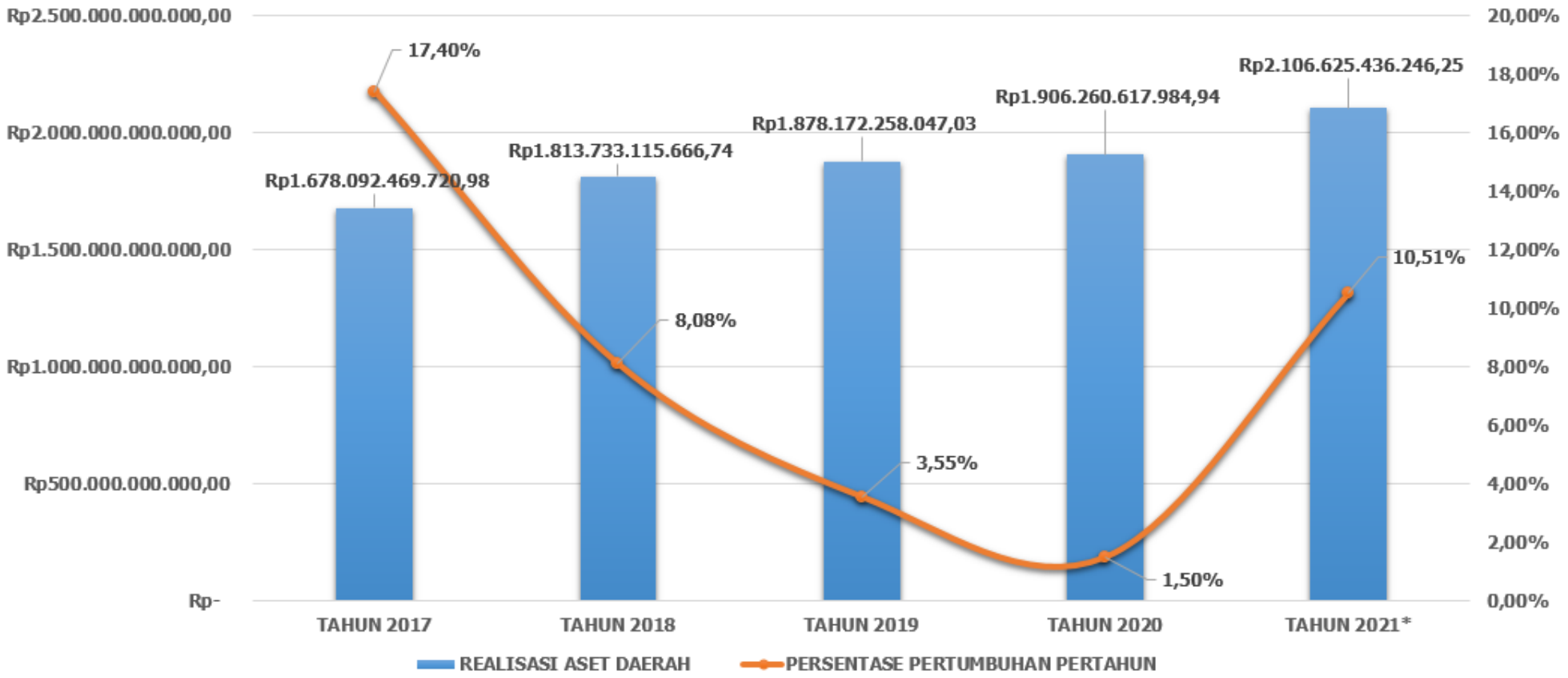

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Dari sisi kewajiban, selama periode tahun 2017-2022 tingkat pertumbuhannya rata-rata mencapai sebesar -24,71%. Pada tahun 2017 kewajiban yang diselesaikan Pemerintah Kota Langsa setidaknya tercatat sebesar Rp. 49.613.739.537,60,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.976.429.288,81,- atau sebesar 19,16% terhadap tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 41.637.310.248,79,-. Pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 40.096.539.856,46,-, mengalami penurunan sebesar Rp. 9.517.199.681,14,- atau sebesar 19,18% terhadap tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2019 kewajiban Pemerintah Kota Langsa tercatat sebesar Rp. 40.808.837.267,43,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 712.297.410,97,- atau sebesar 1,78% terhadap tahun 2018. Pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 17.892.134.422,80,-, mengalami penurunan sebesar Rp. 22.916.702.844,63,- atau sebesar 56,16% terhadap tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2021 posisi kewajiban Pemerintah Kota Langsa tercatat sebesar Rp. 15.940.646.165,80,-, mengalami penurunan sebesar Rp. 1.951.488.257,00,- atau sebesar 10,91% terhadap tahun 2020.

Tabel 3.8.
Perkembangan Realisasi Kewajiban Pemerintah Kota Langsa
Tahun 2017-2021

NO	TAHUN	REALISASI KEWAJIBAN	PERTUMBUHAN
		(Rp.)	(%)
1	2	3	4
1.	2017	49.613.739.537,60	19,16
2.	2018	40.096.539.856,46	-19,18
3.	2019	40.808.837.267,43	1,78
4.	2020	17.892.134.422,80	-56,16
5.	2021*	15.940.646.165,80	-10,91
RATA-RATA PERTUMBUHAN			**-24,71**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Grafik 3.7.
Perkembangan Realisasi Kewajiban Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

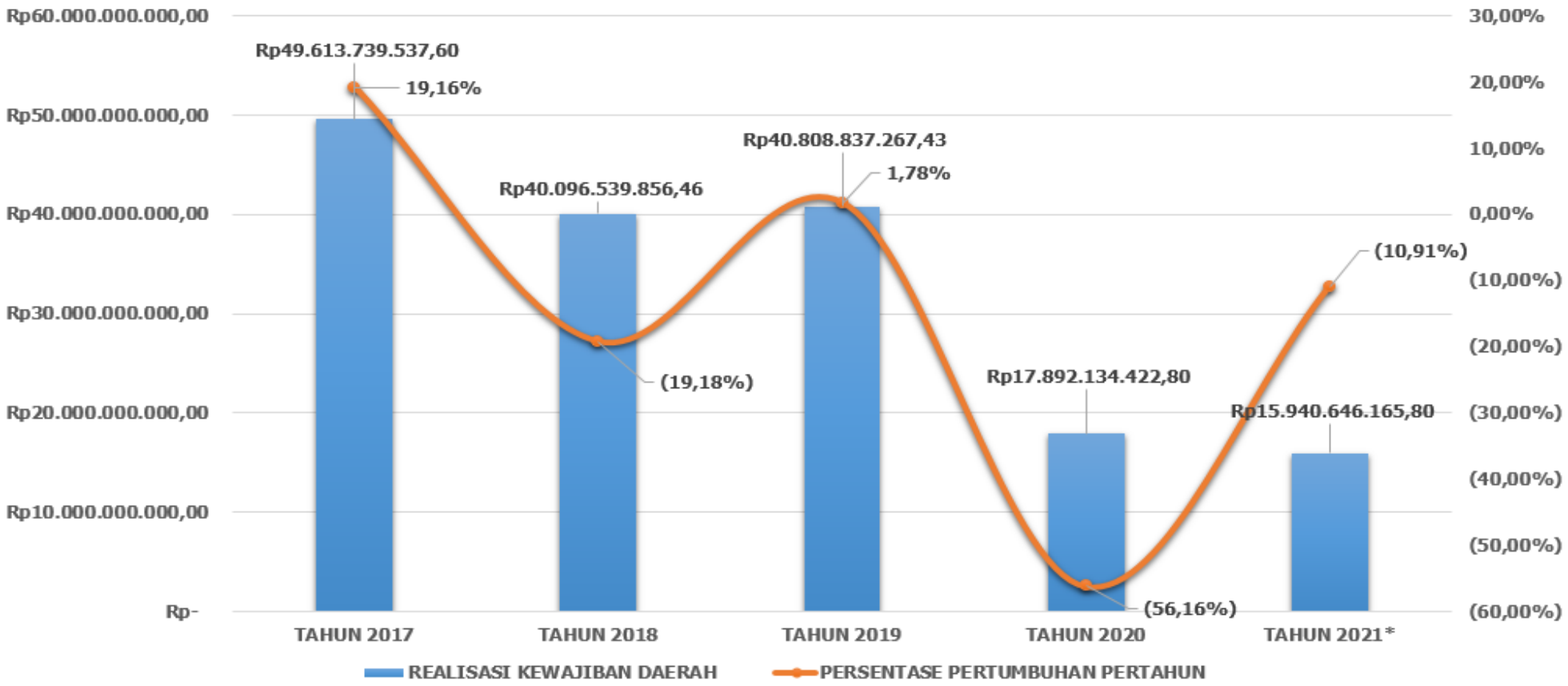

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Dengan demikian, berdasarkan aset dan kewajiban maka diperoleh nilai ekuitas dana yang merupakan kekayaan bersih. Pada tahun 2017 ekuitas dana Pemerintah Kota Langsa mencapai sebesar Rp. 1.628.478.730.183,38,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 240.750.979.411,76,- atau sebesar 17,35% terhadap tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.387.727.750.771,62,-. Pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 1.773.636.575.810,28,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 145.157.845.626,90,- atau sebesar 8,91% terhadap tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2019 ekuitas dana Pemerintah Kota Langsa tercatat sebesar Rp. 1.837.363.420.779,60,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 63.726.844.969,32,- atau sebesar 3,59% terhadap tahun 2018. Pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 1.888.368.483.562,14,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 51.005.062.782,54,- atau sebesar 2,78% terhadap tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2021 posisi ekuitas dana Pemerintah Kota Langsa tercatat sebesar Rp. 2.090.684.790.080,45,-, mengalami peningkatan sebesar Rp. 202.316.306.518,31,- atau sebesar 10,71% terhadap tahun 2020.

Tabel 3.9.
Perkembangan Realisasi Ekuitas Dana Pemerintah Kota Langsa
Tahun 2017-2021

NO	TAHUN	REALISASI EKUITAS DANA	PERTUMBUHAN
		(Rp.)	(%)
1	2	3	4
1.	2017	1.628.478.730.183,38	17,35
2.	2018	1.773.636.575.810,28	8,91
3.	2019	1.837.363.420.779,60	3,59
4.	2020	1.888.368.483.562,14	2,78
5.	2021*	2.090.684.790.080,45	10,71
RATA-RATA PERTUMBUHAN			**6,45**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Grafik 3.8.
Perkembangan Realisasi Ekuitas Dana Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

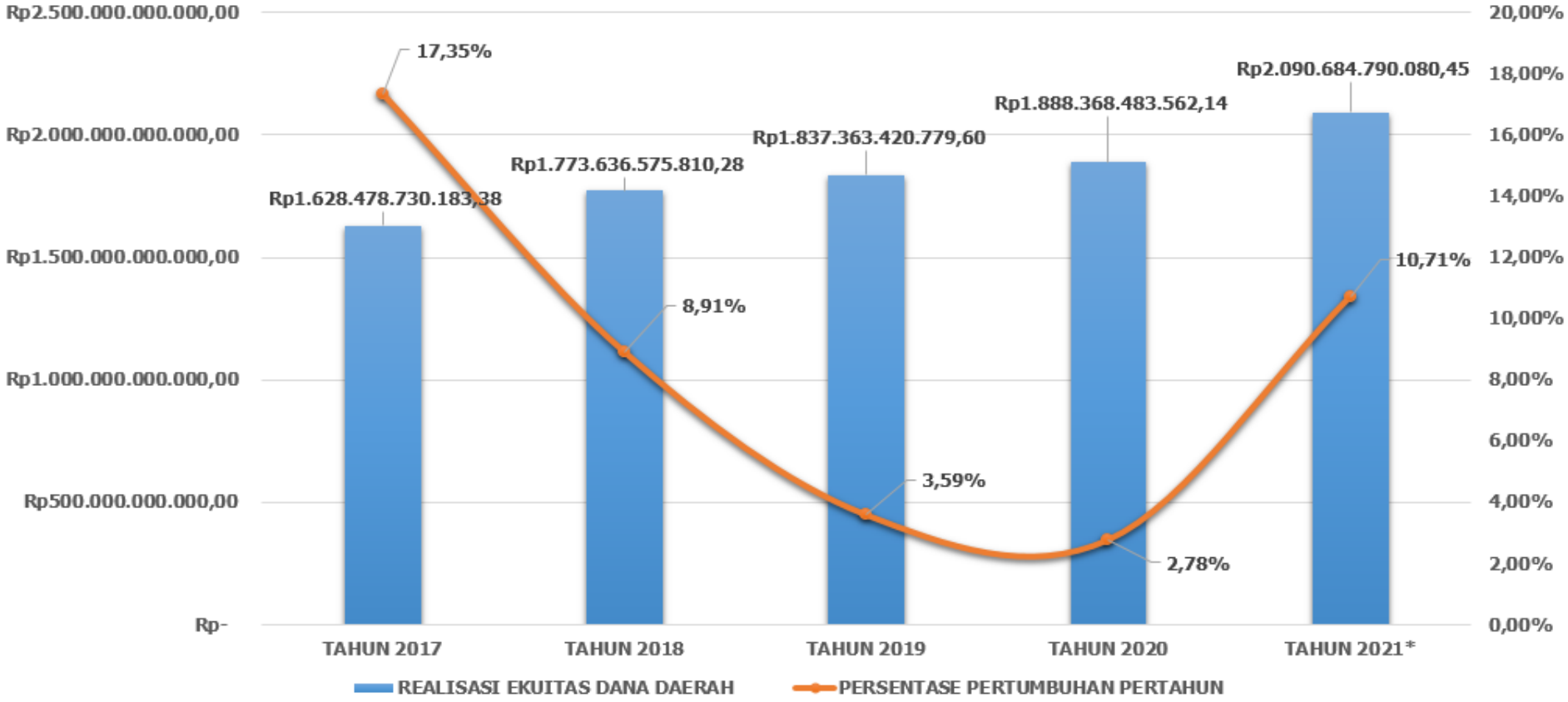

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Tabel 3.10.
Perkembangan Realisasi Neraca Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	NERACA DAERAH	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		TAHUN 2017 (Rp.)	TAHUN 2018 (Rp.)	TAHUN 2019 (Rp.)	TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021* (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**ASET**	**1.678.092.469.720,98**	**1.813.733.115.666,74**	**1.878.172.258.047,03**	**1.906.260.617.984,94**	**2.106.625.436.246,25**	**5,85**
	1. 1. Aset Lancar	62.222.270.826,40	82.823.190.890,80	70.749.455.362,58	49.718.068.932,25	67.338.258.835,97	2,00
	1. 1. 1. Kas	23.228.419.475,83	37.758.249.653,88	16.065.896.140,87	17.184.801.293,53	43.934.573.914,10	17,27
	1. 1. 2. Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	1. 1. 3. Piutang Lain-Lain	48.220.733.263,00	58.013.117.742,45	72.832.551.554,00	49.011.050.414,00	40.120.676.717,00	(4,49)
	1. 1. 4. Persediaan	7.261.021.900,71	7.588.982.802,74	10.717.488.671,61	10.496.189.618,78	10.468.626.288,78	9,58
	1. 1. 5. Penyisihan Piutang	(17.171.564.999,16)	(21.007.679.176,63)	(29.237.219.179,64)	(27.185.618.083,91)	(27.185.618.083,91)	12,17
	1. 1. 6. Beban Dibayar Dimuka	683.661.186,02	470.519.868,36	370.738.175,74	211.645.689,85	-	(100,00)
	1. 2. Investasi Jangka Panjang	15.345.824.423,60	13.974.664.101,22	17.545.550.714,88	32.220.987.376,94	33.220.987.376,94	21,30
	1. 2. 1. Investasi Permanen	15.345.824.423,60	13.974.664.101,22	17.545.550.714,88	32.220.987.376,94	33.220.987.376,94	21,30
	1. 2. 2. Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
	1. 3. Aset Tetap	1.445.647.584.717,70	1.594.712.715.869,12	1.661.517.497.579,84	1.689.773.944.504,02	1.871.034.252.861,61	6,66
	1. 3. 1. Tanah	230.678.213.667,00	410.760.774.457,00	407.862.832.457,00	409.955.405.923,00	410.492.144.923,00	15,50
	1. 3. 2. Peralatan dan Mesin	313.904.541.466,00	366.022.790.896,00	445.002.881.608,02	479.195.825.465,46	517.488.873.288,46	13,31
	1. 3. 3. Gedung dan Bangunan	511.337.393.165,11	508.042.676.347,02	534.546.576.652,02	606.595.150.134,46	671.851.023.351,30	7,06
	1. 3. 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	856.895.269.888,15	910.510.013.535,03	993.582.340.238,49	1.038.619.632.182,79	1.110.231.570.170,54	6,69
	1. 3. 5. Aset Tetap Lainnya	34.533.502.217,00	37.957.135.071,00	33.378.678.473,00	36.122.092.358,00	39.510.413.688,00	3,42
	1. 3. 6. Kontruksi Dalam Pengerjaan	30.334.708.090,00	8.337.204.292,00	19.296.087.768,00	34.813.894.518,00	36.988.283.518,00	5,08
	1. 3. 7. Akumulasi Penyusutan	(532.036.043.775,56)	(646.917.878.728,93)	(772.151.899.616,69)	(915.528.056.077,69)	(915.528.056.077,69)	14,53
	1. 4. Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	1. 4. 1. Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	1. 5. Aset Lainnya	154.876.789.753,28	122.222.544.805,60	128.359.754.389,73	134.547.617.171,73	135.031.937.171,73	(3,37)
	1. 5. 1. Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
	1. 5. 2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	38.402.155.083,00	38.341.695.388,00	38.175.295.388,00	39.090.552.107,00	39.090.552.107,00	0,45
	1. 5. 3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	9.233.350.000,00	52.872.270.221,00	52.872.270.221,00	52.872.270.221,00	52.872.270.221,00	54,69
	1. 5. 4. Aset Tidak Berwujud	958.891.745,00	1.005.788.411,00	757.316.609,00	1.364.047.071,00	1.848.367.071,00	17,83
	1. 5. 5. Aset Lain-Lain	106.282.392.925,28	30.002.790.785,60	36.554.872.171,73	41.220.747.772,73	41.220.747.772,73	(21,08)
2.	**KEWAJIBAN**	**49.613.739.537,60**	**40.096.539.856,46**	**40.808.837.267,43**	**17.892.134.422,80**	**15.940.646.165,80**	**(24,71)**
	2. 1. Kewajiban Jangka Pendek	49.613.739.537,60	40.096.539.856,46	40.808.837.267,43	17.892.134.422,80	15.940.646.165,80	(24,71)
	2. 1. 1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10.167.457,00	-	28.221.855,00	82.386.489,00	-	(100,00)
	2. 1. 2. Utang Bunga	3.754.576.484,16	-	-	-	-	(100,00)
	2. 1. 3. Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
	2. 1. 4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	2. 1. 5. Pendapatan Diterima Dimuka	284.843.827,64	239.043.003,73	177.611.452,73	312.541.560,50	312.541.560,50	2,35
	2. 1. 6. Utang Jangka Pendek Lainnya	45.564.151.768,80	39.857.496.852,73	40.603.003.959,70	17.497.206.373,30	15.628.104.605,30	(23,47)

NO	NERACA DAERAH	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		TAHUN 2017 (Rp.)	TAHUN 2018 (Rp.)	TAHUN 2019 (Rp.)	TAHUN 2020 (Rp.)	TAHUN 2021* (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. 2. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	2. 2. 1. Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
	2. 2. 2. Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
3.	**EKUITAS DANA**	**1.628.478.730.183,38**	**1.773.636.575.810,28**	**1.837.363.420.779,60**	**1.888.368.483.562,14**	**2.090.684.790.080,45**	**6,45**
	3. 1. Ekuitas Dana Lancar	12.608.531.288,80	42.726.651.034,34	29.940.618.095,15	31.825.934.509,45	51.397.612.670,17	42,09
	3. 1. 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	23.228.419.475,83	37.758.249.653,88	16.065.896.140,87	17.184.801.293,53	43.934.573.914,10	17,27
	3. 1. 2. Cadangan Piutang	31.732.829.449,86	37.475.958.434,18	43.966.070.550,10	22.037.078.019,94	12.935.058.633,09	(20,10)
	3. 1. 3. Cadangan Persediaan	7.261.021.900,71	7.588.982.802,74	10.717.488.671,61	10.496.189.618,78	10.468.626.288,78	9,58
	3. 1. 4. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(49.613.739.537,60)	(40.096.539.856,46)	(40.808.837.267,43)	(17.892.134.422,80)	(15.940.646.165,80)	(24,71)
	3. 1. 5. Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
	3. 2. Ekuitas Dana Investasi	1.615.870.198.894,58	1.730.909.924.775,94	1.807.422.802.684,45	1.856.542.549.052,69	2.039.287.177.410,28	5,99
	3. 2. 1. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	15.345.824.423,60	13.974.664.101,22	17.545.550.714,88	32.220.987.376,94	33.220.987.376,94	21,30
	3. 2. 2. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.445.647.584.717,70	1.594.712.715.869,12	1.661.517.497.579,84	1.689.773.944.504,02	1.871.034.252.861,61	6,66
	3. 2. 3. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	154.876.789.753,28	122.222.544.805,60	128.359.754.389,73	134.547.617.171,73	135.031.937.171,73	(3,37)
	3. 2. 4. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	3. 3. Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	3. 3. 1. Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	3. 4. Koreksi Ekuitas	-	-	-	-	-	-
	3. 4. 1. Koreksi Ekuitas	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**1.678.092.469.720,98**	**1.813.733.115.666,74**	**1.878.172.258.047,03**	**1.906.260.617.984,94**	**2.106.625.436.246,25**	**5,85**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Keterangan
* : Data Sementara

A. Current Ratio

Kemampuan Pemerintah Kota Langsa dalam membiayai kewajiban melalui aset lancar selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cukup baik, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,7425 atau sebesar 74,25%. Kemampuan Pemerintah Kota Langsa dalam membiayai kewajiban melalui aset lancar pada tahun 2017 adalah sebesar 1,2541 dengan kata lain, pada tahun 2017 kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Langsa yaitu sebesar Rp. 62.222.270.826,40,- dapat memenuhi 1,2541 kali atau 125,41% dari kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebesar Rp. 49.613.739.537,60,-. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sehingga menjadi 2,0656 kali atau 206,56%.

Selanjutnya pada tahun 2019 kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Langsa mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 1,7337 kali atau 173,37% terhadap kewajiban. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga menjadi 2,7788 atau sebesar 277,88%. Sementara itu pada tahun 2021 kemampuan aset lancar Pemerintah Kota Langsa mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar 4,2243 kali atau sebesar 422,43% terhadap kewajiban.

Grafik 3.9.
Perkembangan Realisasi Current Ratio Pemerintah Kota Langsa
Tahun 2017-2021

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

B. Quick Ratio

Kemampuan Pemerintah Kota Langsa dalam membiayai kewajiban melalui aset lancar dikurangi persediaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cukup baik, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,6150 atau sebesar 61,50%. Kemampuan Pemerintah Kota Langsa dalam membiayai kewajiban melalui aset lancar dikurangi persediaan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,1078 dengan kata lain, pada tahun 2017 kemampuan aset lancar dikurangi persediaan yaitu sebesar Rp. 54.961.248.925,69,- dapat memenuhi 1,1078 kali atau 110,78% dari kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebesar Rp. 49.613.739.537,60,-. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sehingga menjadi 1,8763 kali atau 187,63%.

Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 1,4711 kali atau 147,11%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga menjadi 2,1921 atau sebesar 219,21%. Sementara itu pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi sebesar 3,5676 kali atau sebesar 356,76%.

Grafik 3.10.
Perkembangan Realisasi Quick Ratio Pemerintah Kota Langsa
Tahun 2017-2021

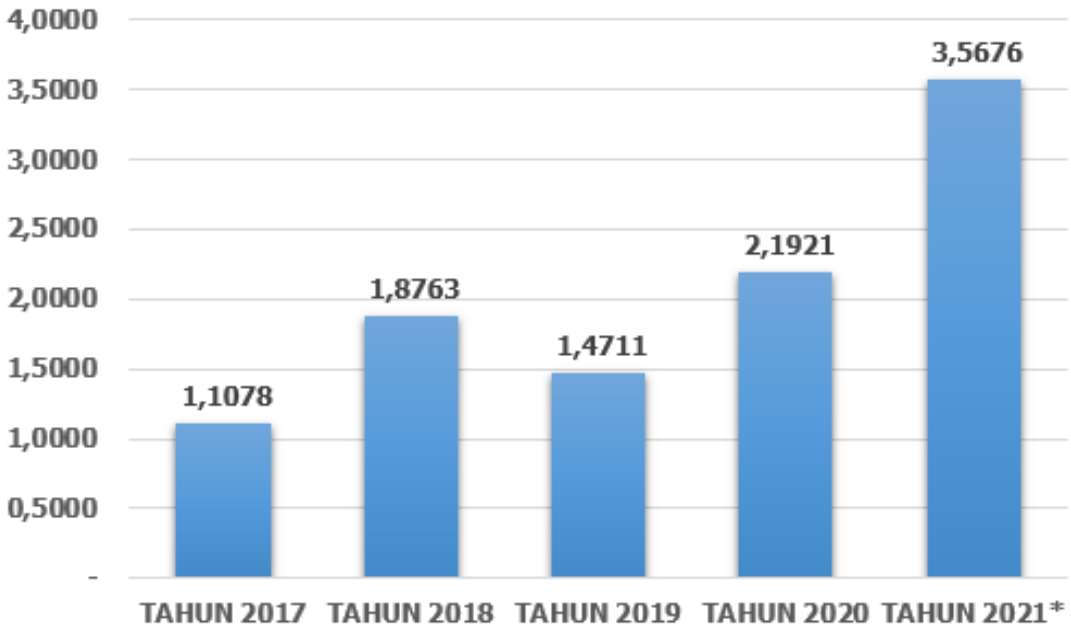

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

C. Debt to Asset Ratio

Pengaruh hutang/kewajiban terhadap total aset Pemerintah Kota Langsa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sangat baik, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar -0,0055 atau sebesar -0,55% yang menandakan pengaruh hutang terhadap aset sangat kecil. Rasio total kewajiban terhadap total aset Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2017 adalah sebesar 0,0296 atau sebesar 2,96%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 0,0221 atau sebesar 2,21%.

Selanjutnya pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 0,0217 atau sebesar 2,17%. Tahun 2020 mengalami penurunan kembali sehingga menjadi sebesar 0,0094 atau sebesar 0,94%. Sementara itu pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 0,0076 atau sebesar 0,76%.

Grafik 3.11.
Perkembangan Realisasi Debt to Asset Ratio Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

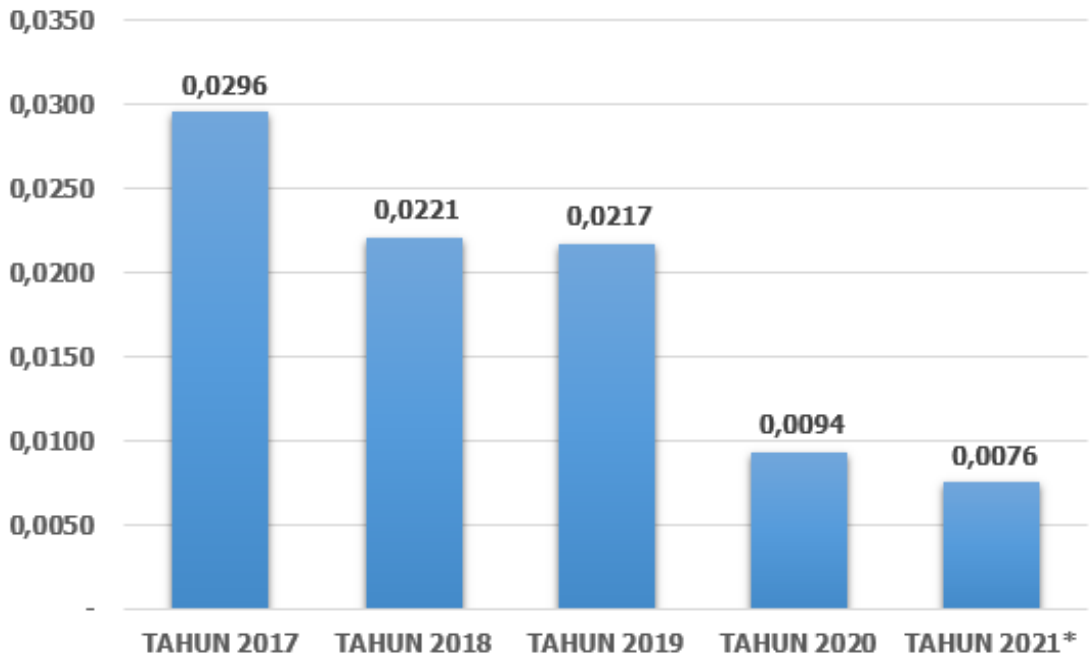

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

D. Debt to Equity Ratio

Pengaruh hutang/kewajiban terhadap ekuitas/kekayaan bersih Pemerintah Kota Langsa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sangat baik, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar -0,0057 atau sebesar -0,57% yang menandakan pengaruh hutang terhadap ekuitas sangat kecil. Rasio total kewajiban terhadap ekuitas Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2017 adalah sebesar 0,0305 atau sebesar 3,05%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 0,0226 atau sebesar 2,26%.

Selanjutnya pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 0,0222 atau sebesar 2,22%. Tahun 2020 mengalami penurunan kembali sehingga menjadi sebesar 0,0095 atau sebesar 0,95%. Sementara itu pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 0,0076 atau sebesar 0,76%.

Grafik 3.12.
Perkembangan Realisasi Debt to Equity Ratio
Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

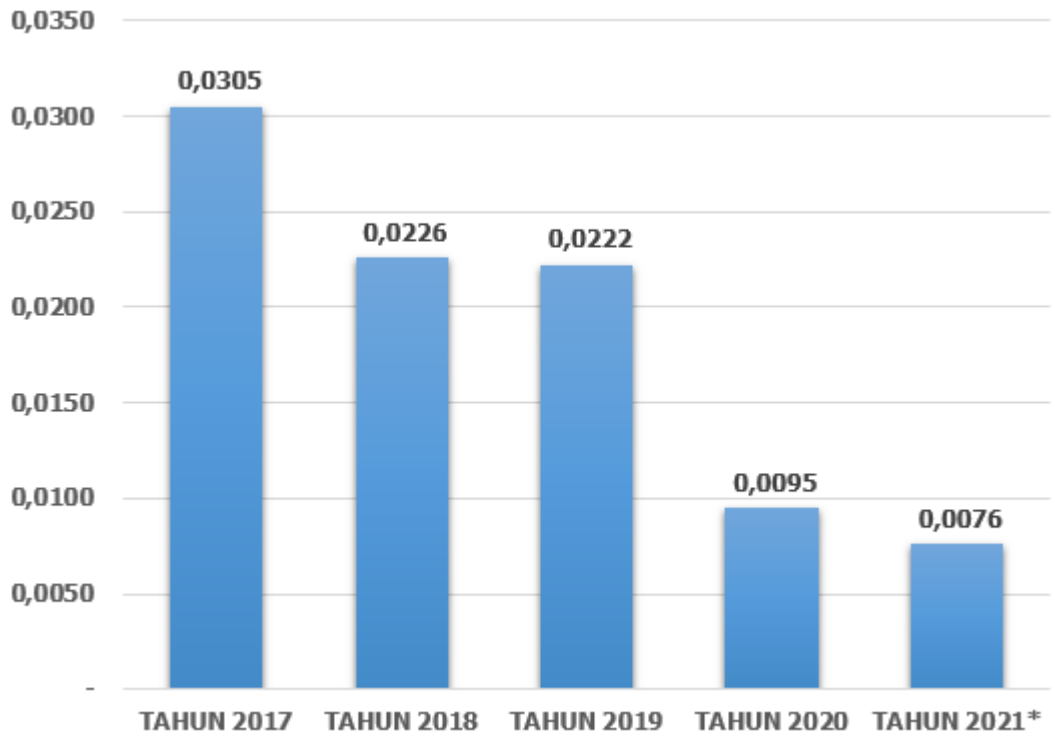

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Tabel 3.11.
Perkembangan Balance Sheet Ratio Daerah Kota Langsa
Tahun 2017-2021

NO	BALANCE SHEET RATIO		TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
			2017	2018	2019	2020	2021*	
1	2		3	4	5	6	7	9
1.	LIQUIDITY RATIO	Current Ratio	1,2541	2,0656	1,7337	2,7788	4,2243	0,7425
		Quick Ratio	1,1078	1,8763	1,4711	2,1921	3,5676	0,6150
2.	SOLVABILITY RATIO	Debt to Asset Ratio	0,0296	0,0221	0,0217	0,0094	0,0076	-0,0055
		Debt to Equity Ratio	0,0305	0,0226	0,0222	0,0095	0,0076	-0,0057

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dapat dilihat melalui proposi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan mendefinisikan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, sementara itu analisis pembiayaan mendefinisikan sejauh mana kemampuan pendapatan daerah menutupi pengeluaran daerah pada tahun pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya.

III.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kota Langsa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cukup baik, secara rata-rata persentasenya tercatat sebesar 53,65%. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2017 tercatat sebesar 49,75%, mengalami peningkatan pada tahun 2018 sehingga menjadi sebesar 56,98%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 50,47%. Sementara itu Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi sebesar 54,84% dan 56,20%.

Grafik 3.13.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

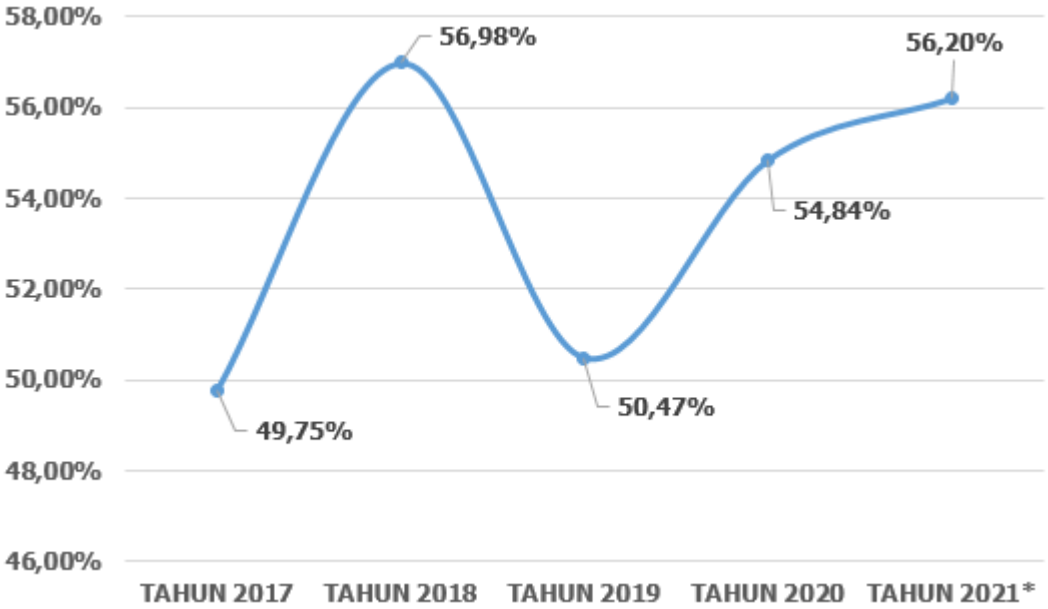

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Tabel 3.12.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA+PENGELUARAN PEMBIAYAAN	RATA-RATA
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Tahun 2017	508.461.968.578,86	1.021.941.388.810,21	49,75
2.	Tahun 2018	451.295.892.018,00	792.041.640.361,25	56,98
3.	Tahun 2019	470.177.123.824,00	931.509.326.664,95	50,47
4.	Tahun 2020	472.350.693.849,00	861.318.230.824,04	54,84
5.	Tahun 2021*	485.489.574.607,60	863.898.732.955,19	56,20
RATA-RATA PERSENTASE				**53,65**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

III.2.2. Analisis Pembiayaan

Kondisi anggaran Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2017 mengalami defisit riil sebesar Rp. 7.052.965.497,08,-, sehingga dengan demikian untuk menutupi defisit tersebut digunakan 23,05% dari SiLPA tahun anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 30.603.667.873,82,-. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2019 yang mengalami defisit riil sebesar Rp. 21.720.575.368,01,- sehinga dengan demikian untuk menutupi defisit tersebut digunakan 57,51% dari SiLPA tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 37.770.977.743,88,-

Sementara itu pada tahun 2018, 2020 dan 2021 Kondisi anggaran Pemerintah Kota Langsa mengalami surplus riil yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 14.566.605.258,40,-, tahun 2020 sebesar 245.226.756,66,- dan tahun 2021 sebesar Rp. 24.360.893.309,57,-.

Grafik 3.14.
Perkembangan Realisasi Surplus/Defisit Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

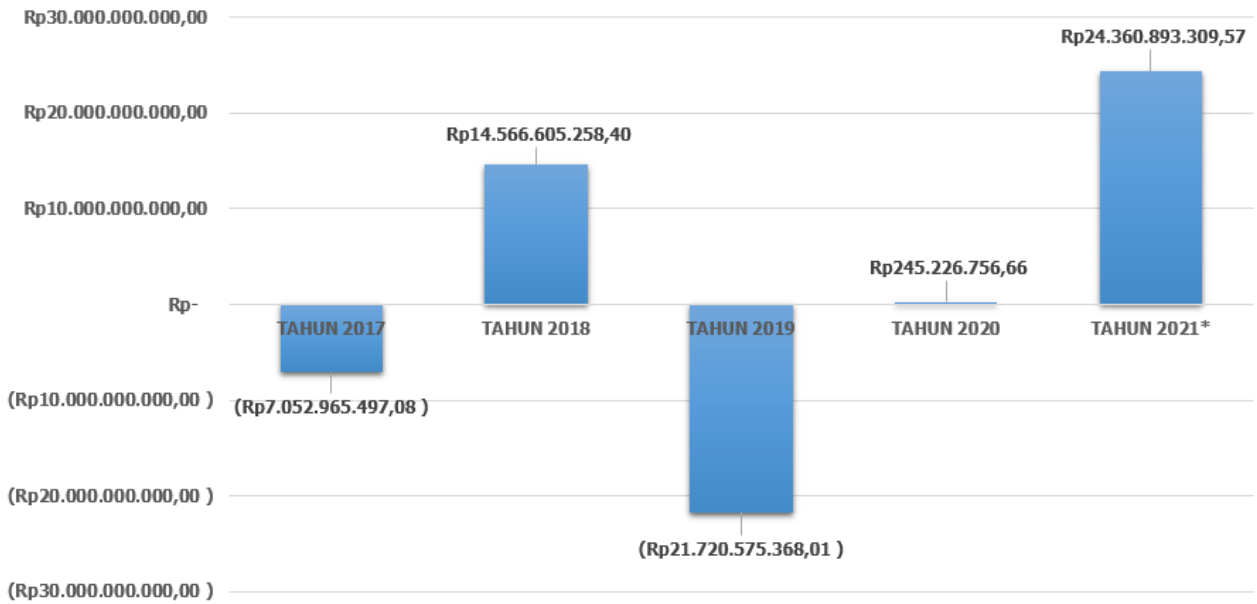

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Tabel 3.13
Surplus/Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021* (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.014.888.423.313,13	806.608.245.619,65	909.788.751.296,94	861.563.457.580,70	888.259.626.264,76
	Dikurangi					
2.	Realisasi Belanja Daerah	1.021.681.327.934,35	792.041.640.361,25	930.309.326.664,95	860.018.230.824,04	862.898.732.955,19
3.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	260.060.875,86	-	1.200.000.000,00	1.300.000.000,00	1.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) RIIL		**(7.052.965.497,08)**	**14.566.605.258,40**	**(21.720.575.368,01)**	**245.226.756,66**	**24.360.893.309,57**

Tabel 3.14
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL									
		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021*	
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	30.603.667.873,82	23,05	-	-	37.770.977.743,88	57,51	-	-	-	-
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**30.603.667.873,82**	**23,05**	**-**	**-**	**37.770.977.743,88**	**57,51**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Keterangan
* : Data Sementara

Dari sisi realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun 2017 tercatat mengalami penurunan sebesar Rp. 15.160.614,99,- dan pada tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.644.727.723,48. Sementara itu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 realisasi silpa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.15.
Realisasi Peningkatan/Penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

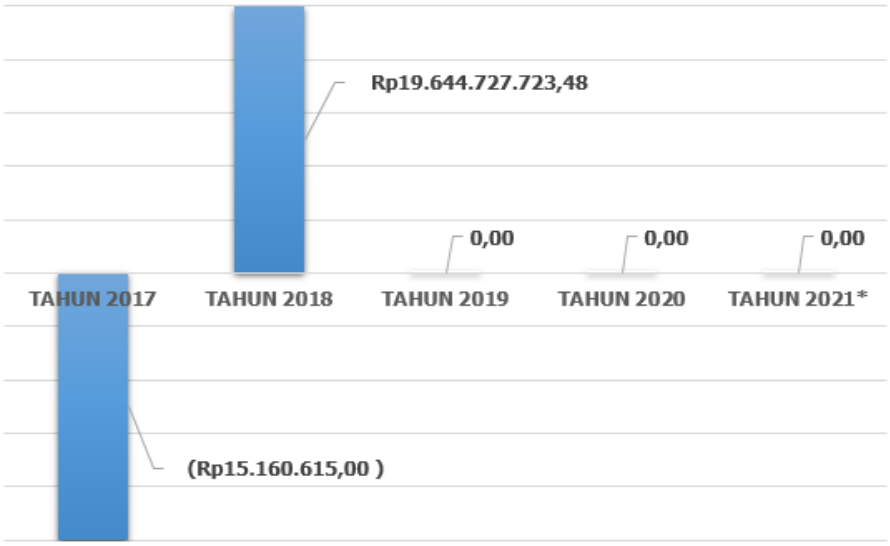

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Tabel 3.15.
Gambaran Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	TAHUN	SILPA		
		TARGET	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Tahun 2017	30.618.828.488,82	30.603.667.873,82	(15.160.615,00)
2.	Tahun 2018	3.559.644.762,00	23.204.372.485,48	19.644.727.723,48
3.	Tahun 2019	37.770.977.743,88	37.770.977.743,88	-
4.	Tahun 2020	16.050.402.375,87	16.050.402.375,87	-
5.	Tahun 2021*	16.295.629.133,00	16.295.629.133,00	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
*Keterangan : * Data Sementara*

Tabel 3.16
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Langsa Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021*	
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah SiLPA	23.550.702.376,74	100,00	37.770.977.743,88	100,00	16.050.402.375,87	100,00	16.295.629.132,53	100,00	40.656.522.442,10	100,00
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	(7.186.548.572,13)	(30,52)	(4.317.970.486,07)	(11,43)	(38.474.537.547,51)	(239,71)	(33.314.988.540,30)	(204,44)	(38.242.737.287,24)	(94,06)
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(1.993.457.125,00)	(8,46)	129.412.134.571,00	342,62	(13.503.628.411,00)	(84,13)	(8.713.510.738,00)	(53,47)	(18.217.739,00)	(0,04)
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(799.973.927,74)	(3,40)	(330.256.130,28)	(0,87)	3.025.267.585,45	18,85	(1.153.968.991,00)	(7,08)	(7.858.290.000,00)	(19,33)
5.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	33.797.488.708,61	143,51	(106.637.657.934,25)	(282,33)	65.003.300.748,93	404,99	59.478.097.401,83	364,99	86.775.767.468,81	213,44
6.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	(251.646.092,00)	(1,07)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**(15.160.615,00)**	**(0,06)**	**19.644.727.723,48**	**52,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

Keterangan
* : Data Sementara

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Secara umum permasalahan pembangunan Kota Langsa masih dihadapkan pada belum maksimalnya pemanfaatan potensi sumber daya daerah, hal ini terlihat dari belum adanya pemanfaatan keluaran dari satu sektor produksi menjadi input bagi sektor produksi lainnya secara maksimal dan berkesinambungan. Ketergantungan pembiayaan daerah dari sumber dana Pemerintah Pusat juga ikut menyebabkan keterlambatan pembangunan sehingga manfaat pembangunan yang harusnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat menjadi terkendala.

Dalam ruang lingkup makro, dampak negatif dari pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -1,06 persen pada tahun 2020, sudah mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif menuju angka 4,18 persen. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,44 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,21 persen akan menjadi tantangan sendiri bagi Pemerintah Kota Langsa dalam meningkatkan kesejahteraan bagi penduduknya.

Berbagai hambatan dan kendala juga masih terjadi dalam aspek sosial kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur daerah seperti masih terdapat Balita stunting, menurut metode perhitungan SSGI pada tahun 2021 ditemukan 76 Balita berstatus stunting dari 300 Balita yang menjadi sampel survei dan menurut metode e-PPGBM pada tahun yang sama ditemukan sebanyak 171 Balita stunting. Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi dimana angka kematian ibu pada tahun 2021 sebesar 300 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi sebesar 9 per 1.000 kelahiran. Pendistribusian guru-guru berkualifikasi D4/S1 belum merata dimana pada jenjang SD guru berkualifikasi D4/S1 sebanyak 94,68 persen dan pada jenjang SMP sebanyak 98,87 persen. Masih terdapat rumah tangga yang belum menikmati akses air bersih sebanyak 26.067 rumah tangga. Selain itu, masih terjadinya genangan banjir dibeberapa wilayah yaitu seluas 378,54 Ha yang tersebar di beberapa titik dan terdapat juga 148,88 Km ruas jalan dalam kondisi tidak baik.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berikut beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aspek geografi dan demografi yang selama ini menjadi potensi sekaligus kendala dalam pembangunan, antara lain:

1. Kota Langsa memiliki dataran yang rendah dan secara administrasi berbatasan langsung dengan Selat Malaka sehingga ketika curah hujan tinggi dan pasang purnama (gelombang pasang) kerap terjadi banjir genangan (rob) di wilayah Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Timur.
2. Sistem hidrologi alami sungai Krueng Langsa memiliki volume air cukup besar dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Langsa terus mengalami kerusakan lingkungan akibat perubahan tutupan lahan *(landuse)*.
3. Kondisi topografi lahan di Kota Langsa yang sebagian besar merupakan dataran rendah memiliki potensi dan sangat rawan akan bencana alam terutama bencana banjir yang rutin setiap tahunnya.
4. Penyebaran penduduk di setiap kecamatan belum merata dimana pada Kecamatan Langsa Kota dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu 6.708 penduduk/km^2 dan Kecamatan Langsa Timur dengan tingkat terendah sebesar 215 penduduk/km^2.

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Ruang lingkup permasalahan yang terdapat dalam aspek kesejahteraan masyarakat meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks harga implisit, pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, harapan hidup, kematian bayi, tingkat pengangguran, serta seni budaya dan olah raga.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tercermin dari meningkatnya aktivitas perekonomian yang mulai membaik meskipun pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir, yaitu sebesar 4,18 persen dengan laju indeks harga implisit mencapai 5,17 persen yang menandakan adanya kenaikan terhadap harga barang dan jasa yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,86 persen.

2. Dilihat dari indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk di suatu daerah melalui PDRB per kapita ADHK, pendapatan per kapita penduduk masih tergolong rendah yaitu hanya Rp.21,04 juta rupiah, jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang berada pada angka Rp.21,28 juta rupiah.
3. Tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota Langsa ditinjau melalui indeks gini sebesar 0,340, capaian ini lebih rendah dari Nasional yang sebesar 0,381 akan tetapi lebih tinggi dari Provinsi Aceh yang berada di angka 0,323.
4. Jumlah penduduk miskin di Kota Langsa mencapai 19.780 orang atau sekitar 10,96 persen, angka ini berada jauh di atas angka nasional yang hanya 9,71 persen namun jauh berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Aceh yang mencapai 15,53 persen.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Angka harapan hidup Kota Langsa mencapai 69,43 tahun masih rendah dari angka harapan hidup Provinsi Aceh 69,96 tahun dan juga angka harapan hidup Nasional keseluruhan yang mencapai 71,57 tahun. Tinggi rendahnya angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh faktor pola hidup dan kesehatan, keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya.
2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup mencapai 9 bayi, meskipun masih di bawah angka Provinsi Aceh yang berjumlah 11 bayi per 1.000 kelahiran hidup, namun AKB Kota Langsa pada tahun 2017 (8 bayi), 2019 (9 bayi), dan 2021 (9 bayi) merupakan angka tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir.
3. Diperlukan upaya untuk mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru agar dapat menurunkan jumlah pengangguran, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Langsa mencapai 7,21 persen. Angka ini merupakan tertinggi jika dibandingkan TPT Aceh sebesar 6,30 persen dan TPT nasional yang hanya 6,49 persen.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Minimnya penyelenggaraan seni dan budaya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan grup-grup kesenian untuk melaksanakan eksibisi dalam rangka mengasah minat. Pada tahun 2021 hanya terdapat 1 kali

penyelenggaraan even seni dan budaya yang berskala kota. Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya yang sangat minim tersebut dikhawatirkan akan memicu menurunnya semangat masyarakat pecinta seni dan budaya di Kota Langsa dan pada jangka panjang akan berdampak kepada menghilangnya seni dan budaya lokal.

2. Terdapat berbagai permasalahan yang harus diatasi dalam upaya pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang, antara lain terbatasnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, pembinaan dan upaya pembibitan atlet olahraga yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, dan rendahnya penghargaan bagi olahragawan berprestasi. Minimnya prestasi olahraga dapat dilihat dari jumlah atlet berprestasi yang memenangkan kejuaraan tingkat Nasional/Internasional yaitu hanya 1 orang. Cakupan pelatih yang bersertifikat sebesar 61,11 persen sementara cakupan pembinaan atlet muda hanya mencapai 4,23 persen. Rendahnya cakupan pembinaan atlet muda berdampak pada jumlah prestasi olahraga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh terbatasnya sarana dan prasarana olahraga, dimana di Kota Langsa hanya terdapat 1 gedung olahraga dengan cabang olahraga yang ada atau terdaftar sebanyak 43 cabang olahraga.

4.1.3. Aspek Layanan Umum

Terdapat berbagai permasalahan aspek pelayanan umum yang meliputi Layanan Urusan Keistimewaan Aceh, Layanan Urusan Wajib Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Layanan Urusan Penunjang.

A. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

1. Jumlah pelanggaran Syariat Islam di Kota Langsa masih tinggi, dimana pelanggaran terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2022 sebesar 272 kasus dan pelanggaran terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebanyak 37 kasus.
2. Penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia secara damai berikut pemenuhan butir-butir persetujuan bersama harus segera diselesaikan agar tidak memunculkan konflik baru

antara dua belah pihak. Terdapat 4 program utama reintegrasi yaitu pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan perlindungan sosial, anak korban konflik yang mendapat perhatian pemerintah, dan lembaga penanganan korban konflik. Menindaklanjuti hal itu, perlu kiranya dilakukan implementasi ke 4 program tersebut kepada para mantan kombatan GAM yang ada di Kota Langsa. Pada tahun 2022 dalam rangka pemberdayaan ekonomi, mantan kombatan rencananya akan diberikan bantuan berupa lahan.

B. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

   Masih adanya angka putus sekolah pada semua tingkat jenjang pendidikan di Kota Langsa dimana untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,10 persen, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs 0,03 persen dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA mencapai 0,58 persen.

   Kualitas tenaga pendidik untuk menjamin kualitas peserta didik juga sangat perlu ditingkatkan, namun hingga saat ini dengan berbagai macam persoalan tenaga pendidik belum seluruhnya berkualifikasi D4/S1 dimana untuk guru PAUD/TK mencapai 93,65 persen, guru SD mencapai 94,68 persen, dan guru SMP mencapai 98,87 persen,

2. Kesehatan

   Terdapat beberapa permasalahan di bidang kesehatan antara lain masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI) yang mengalami kenaikan secara signifikan yaitu mencapai 300 per 100.000 kelahiran hidup dari tahun sebelumnya yang hanya 122 per 100.000 kelahiran hidup.

   Selain itu, masih adanya kasus stunting sebanyak 171 kasus pada tahun 2021 berdasarkan data e-PPGBM. Hal ini tentu saja memerlukan penanganan yang bersifat kolaboratif dari berbagai pihak.

   Di bidang prasarana Kesehatan, keberadaan rumah sakit yang dapat melayani masyarakat masih sangat dibutuhkan. Hingga saat ini jumlah rasio rumah sakit per 1.000 penduduk hanya 0,026. Kondisi ini tentu saja akan menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa layanan rumah sakit.

Permasalahan Covid-19 beserta penanganannya tetap menjadi hal utama yang harus diselesaikan mengingat dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Pandemi Covid-19 di Kota Langsa hingga Januari 2022 telah menginfeksi sebanyak 1.157 orang dengan tingkat kematian mencapai 95 orang. Angka kesembuhan Covid-19 Kota Langsa sebesar 91,8 persen.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Jumlah penduduk yang semakin banyak dan tingkat pendapatan yang semakin tinggi akan berpengaruh kepada banyaknya jumlah kendaraan yang ada di jalan, dan keberadaan jaringan jalan yang baik jika tidak dilakukan peningkatan atau pemeliharaan terhadap jalan itu sendiri akan berakibat kepada rusaknya jaringan jalan yang ada. Hingga saat ini proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik masih sebesar 79,36 persen, hal ini menandakan masih adanya adanya jaringan jalan dalam kondisi tidak baik yang harus segera perlu dilakukan penanganannya.

   Di sisi lain, dukungan penataan ruang dalam rangka perbaikan penataan kota akan sangat dibutuhkan terutama dalam hal kesesuaian peruntukan lahan sebagaimana yang tertuang dalam RTRW Kota Langsa. Hingga tahun 2021, tingkat kesesuaian pemanfaatan atau tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 76,51 persen terhadap rencana peruntukan yang seluas 31.345,65 hektar. Keadaan ini tentu saja akan menjadi salah satu agenda utama yang akan segera diselesaikan sehingga seluruh rencana di berbagai macam bidang pembangunan dapat diwujudkan dengan baik dan sesuai dengan karakter ruang Kota Langsa serta secara lingkungan juga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

   Rumah yang baik adalah rumah yang menjadikan para penghuninya merasa nyaman dan aman dari berbagai macam kondisi cuaca dan juga memiliki berbagai fasilitas dasar yang memenuhi standar kesehatan. Di Kota Langsa hingga tahun 2021, terdapat rumah layak huni sekitar 83,50 persen dengan rasio rumah layak huni sebesar 0,19 unit per orang. Hal ini juga menjadi permasalahan yang perlu segera ditangani agar seluruh

penduduk di Kota Langsa merasa nyaman di tempat kediamannya masing-masing.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

   Potensi konflik sosial perlu terus diwaspadai dengan terus meningkatkan kewaspadaan daerah terhadap permasalahan-permasalahan yang sensitif dan dapat mengganggu stabilitas keamanan. Unjuk rasa yang terjadi sepanjang tahun 2021 sebanyak 4 kali mengindentifikasi perlu adanya kewaspadaan dini terhadap konflik-konflik yang kemungkinan terjadi terlebih mengingat pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024.

6. Sosial

   Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum maksimal dan masih rendahnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial. Hingga tahun 2021, perkembangan PMKS di Kota Langsa masih sekitar 34,01 persen atau sekitar 32.394 orang dari jumlah keseluruhan PMKS sebanyak 95.228 orang. Hal ini menandakan, bahwa masih banyak PMKS yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan sosial yang baru.

C. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Ketenagakerjaan

   Berdasarkan informasi keternagakerjaan yang ada di Kota Langsa hingga tahun 2021 jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 74 orang dengan penempatan tenaga kerja sebanyak 1 orang. Hal ini menandakan jumlah pencari kerja terdaftar lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan. Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani, maka tingkat pengangguran akan semakin melonjak dan akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Terdapat beberapa cara untuk mengetahui capaian pembangunan gender antara lain dengan menilai capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan,

sedangkan IDG melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang terus menurun selama periode tahun 2018-2021 sebanyak 1,48 poin dari 95,89 menjadi 94,41. Penurunan nilai indeks tersebut kemungkinan disebabkan oleh penurunan pada harapan lama sekolah, umur harapan hidup dan pengeluaran. Berbeda dengan IPG, nilai IDG cenderung mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir (2019-2021) yaitu dari 65,12 naik menjadi 65,47. Nilai tersebut masih lebih rendah dari Nasional yaitu 76,26.

Fenomena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan juga masih terjadi yaitu sebanyak 5 kasus kekerasan di tahun 2021. Jumlah ini cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu mencapai 14 kasus.

3. Pangan

   Berkurangnya lahan pertanian mengakibatkan kegiatan pertanian juga ikut berkurang. Hal ini berdampak pada ketersediaan pangan masyarakat. Di Kota Langsa, tanaman padi merupakan sebagai sumber pangan utama bagi penduduknya. Produksi padi di Kota Langsa pada tahun 2021 mencapai 9.029 ton, jumlah ini meningkat signifikan dari tahun 2020 yang hanya 6.568 ton. Luas panen padi di Kota Langsa mencapai 1.689 ha. Luas lahan panen padi yang relatif sangat terbatas ini perlu disiasati dengan mengatur kerapatan tanaman dan juga memperbaiki infrastruktur irigasi untuk mengairi area persawahan yang ada.

4. Pertanahan

   Sebagian besar permasalahan dibidang pertanahan adalah terkait administrasi kepemilikan tanah dan penyelesaian kasus atau sengketa tanah. Jumlah kasus pertanahan yang terdaftar di Kota Langsa paling banyak terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 8 kasus dengan 4 kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2018, tidak terdapat kasus pertanahan yang terdaftar. Dan pada tahun 2019, kasus pertanahan yang terdaftar adalah sebanyak 4 kasus dengan 2 kasus yang terselesaikan. Sedangkan pada tahun 2020, kasus pertanahan yang terdaftar adalah sebanyak 1 kasus dan belum terdapat keterangan terkait dengan penyelesaian kasus tersebut.

Terhadap administrasi kepengurusan kepemilikan tanah atau layanan sertifikasi tanah, hingga tahun 2021 layanan sertifikasi pertanahan paling banyak terjadi ada akivitas jual beli tanah yang mencapai 1.694 sertifikat dan jumlah layanan kepemilikan tanah yang paling rendah terjadi pada pemberian hak yaitu hanya sebanyak 81 sertifikat.

5. Lingkungan Hidup

   Permasalahan lingkungan hidup yang menjadi prioritas utama yang harus ditangani adalah terkait dengan penanganan sampah. Masih adanya 25,95 persen sampah tidak terkelola dari 34.999 ton sampah yang dihasilkan menandakan bahwa Pemerintah Kota Langsa agar lebih baik lagi dalam penanganan dan pengelolaan sampah berikut penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Dampak negatif dari tidak tertanganinya sampah dengan baik adalah penurunan kualitas lingkungan melalui pencemaran terhadap air permukaan, air tanah dan udara.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

   Salah satu fungsi Pemerintah Daerah adalah menghadirkan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah bentuk layanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan. Meskipun peran aktif masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan sangat diperlukan namun peran Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung juga sangat menentukan keberhasilan capaian pembangunan di bidang kependudukan. Meskipun cakupan layanan administrasi kependudukan kepemilikan KTP relatif tinggi yaitu mencapai 94,49 persen namun cakupan layanan yang belum sepenuhnya mencapai 100 persen ini mengindikasikan keterlibatan aktif masyarakat untuk memiliki kartu identitas masih belum sepenuhnya baik. Layanan dengan sistem "jemput bola" perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memiliki kartu identitas dapat terlayani seluruhnya mengingat manfaat dari kepemilikan kartu identitas itu sendiri sangatlah banyak dan penting.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

   Terdapat beberapa permasalahan di Desa atau Gampong, mulai dari kemiskinan, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, kualitas

SDM yang rendah, sarana dan prasarana yang terbatas, dan juga tingkat pendidikan yang rendah. Untuk melihat sejauhmana kualitas pembangunan desa dapat diketahui melalui Indeks Desa Membangun. Hingga tahun 2021 jumlah Desa Maju meningkat menjadi 17 Desa dari 15 Desa di tahun 2020, Desa Berkembang menurun menjadi 48 Desa dan Desa Tertinggal sebanyak 1 Desa. Sedangkan untuk kategori Desa Mandiri hingga tahun 2021 di Kota Langsa belum ada Desa yang berstatus mandiri.

8. Perhubungan

   Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan di Kota Langsa relatif belum memadai. Izin trayek untuk mengangkut orang/penumpang oleh mobil bus dan/atau mobil penumpang umum tahun 2021 sebanyak 34 izin, ini merupakan izin trayek terendah selama lima tahun yang dikeluarkan. Di aktivitas kepelabuhanan, jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Kuala Langsa didominasi oleh pelayaran samudra. Pada tahun 2021 jumlah bongkar barang di Pelabuhan Kuala Langsa sebesar 3.433 KGS dengan jumlah muat sebesar 12.435 KGS lebih banyak dari tahun sebelumnya. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan di bidang perhubungan antara lain meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak diimbangi oleh panjang jalan dalam kondisi baik, keberadaan ruas jalan yang sempit, minimnya rambu-rambu lalu lintas, minimnya infrastruktur kepelabuhanan, keberadaan terminal bongkar muat yang kurang memadai, serta minimnya fasilitas uji kelaikan kendaraan.

9. Komunikasi dan Informasi

   Cakupan layanan telekomunikasi Kota Langsa pada tahun 2021 masih mencapai 99,10 persen atau luas wilayah yang dapat dijangkau yaitu 237,68 km² dari total wilayah Kota Langsa seluas 239,83 km². Sementara itu persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/*smartphone* sebesar 44,33 persen atau sebanyak 83.730 orang yang menggunakan HP/telepon/*smartphone*.

   Hingga tahun 2021, ketersediaan infrastruktur jaringan *Base Transcerver Station* (BTS) sebanyak 80 unit yang tersebar di setiap kecamatan. BTS terbanyak berada di wilayah Kecamatan Langsa Baro yang mencapai 27 unit, selanjutnya Kecamatan Langsa Kota sebanyak 25 unit, Kecamatan

Langsa Lama 12 unit, Kecamatan Langsa Barat 10 unit dan Kecamatan Langsa Timur sebanyak 6 unit.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

    Keberadaan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai penggerak roda perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan dapat digerakkan meskipun dengan permodalan yang relatif terbatas.

    Pada tahun 2021, jumlah koperasi yang aktif sebanyak 155 unit dari 210 koperasi atau sekitar 73,80 persen. Berbeda dengan koperasi, jumlah UKM yang aktif adalah sebesar 100 persen dari seluruh UKM yang ada yaitu sebanyak 24.044 UKM.

11. Penanaman Modal

    Manfaat investasi yang dilaksanakan dalam satu wilayah antara lain adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar lokasi tersebut dilaksanakan. Selain itu, tujuan investasi dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan daerah. Perkembangan jumlah investasi Kota Langsa di tahun 2021 adalah sebesar 265 milyar rupiah yang dilaksanakan oleh 85 investor dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 930 orang. Jika ditinjau dari kemampuan daya serap tenaga kerja, jumlah daya serap tenaga kerja di tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020 yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.658 orang dengan nilai investasi lebih rendah yang hanya sebesar 52 milyar rupiah.

    Perkembangan perbedaan data tersebut menjelaskan bahwa nilai investasi yang besar belum tentu dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, dan juga sebaliknya jumlah investasi yang sedikit bukan berarti hanya dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang rendah. Hal ini dapat terjadi antara lain dikarenakan faktor teknologi yang diikutsertakan dalam proses investasi tersebut.

12. Kepemudaan dan Olahraga

    Meskipun pembinaan terhadap pemuda/organisasi kepemudaan dan olahraga terus dilakukan, namun pembinaan yang dilaksanakan tersebut masih belum optimal. Dampak dari minimnya pembinaan terhadap pemuda/organisasi kepemudaan dan olahraga adalah masih rendahnya

jumlah pemuda/organisasi kepemudaan yang berprestasi. Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif di Kota Langsa sebanyak 22 organisasi, sedangkan sisanya sebanyak 25 organisasi kepemudaan berstatus tidak aktif. Demikian juga dengan olahraga, masih perlu dilakukannya optimalisasi pembinaan terhadap 43 cabang olahraga agar prestasi olahraga dapat meningkat.

13. Kebudayaan

    Terdapat beberapa cara menjaga agar seni dan budaya tetap lestari adalah dengan melaksanakan berbagai macam event seni dan budaya dan memelihara kesenian dan budaya atau situs/cagar budaya daerah. Hal ini perlu dilaksanakan agar seni dan budaya lokal tetap ada dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman ataupun terhindar dari pengaruh seni dan budaya asing yang tidak sesuai dengan karakteristik penduduk lokal. Jumlah benda cagar budaya di Kota Langsa sebanyak 262 unit, sedangkan jumlah bangunan cagar budaya sebanyak 15 bangunan serta jumlah situs cagar budaya yang ada sebanyak 3 situs. Permasalahan utama yang sering muncul adalah masuknya budaya asing sehingga budaya lokal menjadi terpinggirkan dan lambat laun akan menghilang.

D. Layanan Urusan Pilihan

1. Pawisata

   Selama beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Langsa berusaha untuk fokus kepada pembangunan sektor kepariwisataan. Hal ini ditujukan agar meningkatkan daya tarik terhadap objek-objek wisata alam maupun objek wisata buatan. Terdapat 2 lokasi objek wisata utama di Kota Langsa yaitu Hutan Kota dan Hutan Mangrove. Meskipun kunjungan wisata di 2 lokasi tersebut ramai dikunjungi baik oleh wisatawan lokal maupun luar daerah namun ketersediaan sarana dan prasarana kepariwisataan masih tetap perlu terus ditingkatkan guna menarik daya tarik wisata. Jumlah kunjungan wisatawan pasca pandemi Covid-19 sebanyak 283.179 kunjungan.

   Sektor pariwisata juga turut mempengaruhi sektor lainnya seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 3,02 persen dari total nilai tambah seluruh sektor ekonomi Produk Domestik Bruto.

2. Pertanian

   Sebagai kota perdagangan dan jasa, namun sektor pertanian juga ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah produksi komoditi kelapa sawit mencapai 3.966,31 ton. Sementara itu, jumlah produksi jenis komoditi karet sebesar 273,56 ton serta komoditi kakao sebesar 60,60 ton. Rendahnya produktivitas sektor pertanian dan juga lahan pertanian yang terbatas dikarenakan belum optimalnya pengembangan potensi pertanian.

3. Perdagangan

   Sektor perdagangan merupakan sektor andalan Kota Langsa yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian Kota Langsa. Namun selama periode 2017-2021 kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kota Langsa mengalami penurunan sebesar 2,55 persen. Di sisi lain, perkembangan aktivitas perdagangan masih terdapat perspektif negatif terhadap komoditas bersubsidi, kebutuhan pokok serta transaksi jual beli yang tidak tepat sasaran atau bukan penerima manfaat. Selain itu, aktivitas ekspor-impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa masih belum optimal hanya beberapa komoditas.

4. Perindustrian

   Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kota Langsa dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) meningkat 0,60 persen. Jenis industri yang paling banyak mendukung sektor perindustrian adalah industri tradisional yang berjumlah 3.004 yang tersebar di 5 kecamatan. Cakupan bina kelompok pengrajin di Kota Langsa masih rendah yaitu sebesar 20 persen, dari 5 kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah. Memasuki era revolusi industri 4.0, industri tradisional diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat memperluas akses pasar hingga ke luar daerah.

5. Kelautan Perikanan

   Sebagai wilayah yang berada di wilayah pesisir timur pulau Sumatera, Kota Langsa tentunya memiliki potensi perikanan baik laut maupun darat. Namun permasalahannya adalah potensi perikanan yang ada tersebut belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Penerapan teknologi budidaya perikanan di Kota Langsa masih rendah. Selama ini jenis teknologi budidaya yang digunakan pembudidaya hanya secara tradisional dan semi

intensif. Jumlah kelompok nelayan di Kota Langsa sebanyak 94 kelompok namun kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah hanya sebesar 21 kelompok sehingga cakupan bina kelompok nelayan hanya sebesar 22,34 persen.

E. Layanan Urusan Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan

   Permasalahan pembangunan di urusan perencanaan pembangunan yang masih perlu ditingkatkan adalah terkait konsistensi program yang terdapat dalam dokumen induk perencanaan seperti dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Terdapat banyak hal yang menyebabkan inkonsistensi antar program perencanaan pembangunan antara lain keterbatasan anggaran pembangunan tahunan, perubahan regulasi yang bersifat mendesak, hingga ketidakmampuan perangkat daerah dalam menyiapkan dokumen pendukung program. Hingga tahun 2022, program RPJMD yang dapat diakomodir dalam RKPD adalah sekitar 65,43 persen, jumlah ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2. Keuangan

   Secara laporan keuangan, Pemerintah Kota Langsa telah berhasil mengelola keuangan daerah dengan baik yaitu dilihat dari pencapaian Kota Langsa dalam memperoleh penghargaan Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan. Meskipun secara pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Langsa tergolong sudah lebih baik namun secara perolehan pendapatan, kemampuan Pemerintah Kota Langsa dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan masih kurang baik. Hal ini ditandai dengan jumlah APBD Kota Langsa yang masih berada di bawah 1 triliun rupiah. Menurunnya alokasi dana otonomi khusus akan ikut berpengaruh terhadap sumber pembiayaan pembangunan di Kota Langsa. Permasalahan keterbatasan anggaran pembangunan ini akan berakibat kepada perlambatan realisasi pencapaian pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

   Tidak dapat dipungkiri bahwasanya salah satu cara untuk dapat meningkatkan kualitas SDM adalah dengan mengikutsertakan ASN dalam berbagai pendidikan dan pelatihan formal. Hanya saja hingga saat ini, di Kota Langsa ASN yang diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan masih di bawah 8 persen disetiap tahunnya. Dampaknya adalah, tingkat kompetensi SDM ASN yang rendah sehingga akan menghasilkan kualitas *output* dan *outcome* yang rendah pula.

4. Penelitian dan Pengembangan

   Terdapat beberapa peran penting hasil penelitian dan pengembangan antara lain adalah sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah; sebagai katalisator pencapaian sasaran pembanguan; sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan atau program pembangunan; dan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan inovasi daerah. Namun terdapat berbagai macam permasalahan terkait pelaksanaan kelitbangan di daerah antara lain kebijakan politis yang sering berubah dan juga perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat yang mengharuskan untuk dilakukan penyesuaian terhadap aktivitas kelitbangan. Produk hasil kegiatan penelitian dan pengembangan selama periode 2017-2021 telah menghasilkan tujuh produk kelitbangan. Jumlah ini tentu masih relatif sangat sedikit, untuk itu diperlukan sumberdaya yang memadai agar produk kelitbangan dapat ditingkatkan.

5. Pengawasan

   Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menjamin kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun pengawasan itu dilaksanakan secara terus menerus namun masih saja ditemukan sejumlah temuan yang terindikasi menyalahi prosedur yang telah ditetapkan. Permasalahan ini terus saja meningkat setiap tahun dalam periode 2017-2021, yaitu dari 1.064 tahun 2017 menjadi 2.158 temuan di tahun 2021. Menanggapi hal tersebut, aparatur pengawas terus berupaya melakukan pembinaan agar jumlah temuan dapat menurun secara signifikan.

4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

A. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Berdasarkan Surat Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Nomor : B-307/II/RI/12/2021 Perihal : Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi Melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2021, Kota Langsa secara keseluruhan memperoleh nilai 2,682 dari empat aspek daya saing yaitu ekosistem inovasi dengan nilai 1,606; faktor penguat/*enabling environment* ngan nilai 3,1; dan sumber daya manusia/*human capital* dengan nilai sebesar 3,5; faktor pasar dengan nilai 2,521. Sedangkan hasil pemetaan pilar yaitu dinamika bisnis sebesar 2; kapasitas inovasi sebesar 1,06667; kapasitas teknologi 1,75; kelembagaan 3,55; insfrastruktur 3,75; perekomomian daerah 2; kesehatan 3,625; pendidikan dan keterampilan 3,375; efisiensi pasar produk 2,75; ketenagakerjaan 2,5; akses keuangan 2,33333; ukuran pasar 2,5.

Berdasarkan hasil pemetaan pilar dengan merujuk pemetaan aspek, terdapat dua pilar di bawah rata-rata keseluruhan indeks yaitu pilar akses keuangan dan pilar kapasitas inovasi.

B. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Salah satu cara untuk meninjau tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilakukan dengan melihat tingkat pengeluaran rumah tangga penduduk. Jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk Kota Langsa setiap tahun meningkat, namun pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk rendah yang hanya sebesar Rp.1.409.758 rupiah per bulan yang dikeluarkan untuk makanan sebesar Rp.672.509 dan bukan makanan sebesar Rp.737.250. Untuk kelompok barang makanan, pengeluaran paling besar ada pada kategori makanan dan minuman jadi. Sementara pada kelompok barang bukan makanan, pengeluaran terbesar pada kategori perumahan dan fasilitas rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

D. Kriminalitas

Angka kriminilitas di Kota Langsa selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 tindak kriminalitas yang terjadi sebanyak 375 kasus, hingga tahun 2021 jumlah tindak kriminalitas yang terjadi mencapai 513 kasus. Banyak hal yang menjadi dasar pelaku kriminal dalam melakukan tindak kejahatan. Namun sebagai langkah awal dalam

mencegah kriminalitas dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, masyarakat dan aparat perlu membentuk kerjasama yang solid dalam upaya pencegahan preventif. Selain itu, pencegahan tindak kriminal dapat dilakukan dengan meningkatkan taraf pendidikan, kehidupan sosial dan kesejahteraan penduduk mulai dari tingkat Gampong hingga Kota.

F. Lembaga Keuangan

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan sangatlah menentukan aktivitas perekonomian di daerah. Semakin banyak lembaga keuangan yang memudahkan akses pembiayaan maka akan semakin banyak pula bermunculan usaha-usaha baru yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi penduduk. Namun dukungan pembiayaan tersebut tentu akan mempertimbangkan standar kelayakan usaha yang akan dibiayai. Kelayakan usaha inilah yang sering menjadi hambatan dalam pembiayaan modal usaha. Jumlah pinjaman UMKM yang diberikan oleh bank umum di Kota Langsa hanya sebesar Rp. 9.658.512 juta rupiah, nilai dukungan pembiayaan usaha UMKM ini masih tergolong rendah.

4.2. Isu Strategis

Isu Strategis Kota Langsa mengacu pada isu strategis internasional, nasional dan Aceh.

Isu Strategis Internasional meliputi:

1) Globalisasi ekonomi dan bisnis digital;
2) Transformasi Teknologi berbasis *Artificial Intelligence*;
3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
4) Sumber energi alternatif;
5) Perubahan iklim global; dan
6) Munculnya pusat dan kekuatan ekonomi baru di Samudera Hindia.

Isu strategis Nasional meliputi:

1) Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan;
2) Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita;

3) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);
4) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
5) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Ekosistem Leuser, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Sedangkan isu-isu strategis Aceh, meliputi:

1) Peningkatan Kualitas Demokrasi;
2) Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur;
3) Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5) Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6) Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7) Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9) Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10) Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11) Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12) Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13) Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana;
14) Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan;

Berdasarkan isu-isu strategis internasional, nasional dan Aceh, maka isu-isu strategis Kota Langsa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Syiar Islam dan Pelestarian Seni serta Adat Budaya Daerah

Secara umum syari'at Islam meliputi aspek aqidah, muamalah dan syari'at akhlak. Pelaksanaan syari'at Islam sudah diterapkan di Kota Langsa dari awal terbentuknya Kota Langsa pada tahun 2001. Dimana pelaksanaan syari'at Islam mulai diterapkan di Aceh dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pelaksanaan syari'at Islam di Kota Langsa masih belum optimal karena masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Budaya yang berkembang di masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai Islami, hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat Aceh sarat dengan keimanan dan ketakwaan. Pergelaran seni dan budaya adalah upaya untuk menyalurkan minat-minat seni budaya. Hal ini perlu terus ditingkatkan sehingga masyarakat luas mengenal dan dapat mengembangkan minat-minat lainnya yang ada di Kota Langsa. Dengan banyaknya event-event yang dilaksanakan diharapkan kelompok-kelompok kesenian yang ada di Kota Langsa terus mengasah keahlian dan kekompakan seperti Tari Rampoe Aceh dimana Kota Langsa pada ajang API tahun 2020 dinobatkan sebagai juara satu tingkat nasional kategori atraksi budaya terpopuler.

Diharapkan dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah agar terus disemarakkan dan diagungkan pelaksanaan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan dengan aqidah islamiah menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah guna menciptakan suasana dan lingkungan yang islami.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah

Dalam mendukung upaya pemerataan pendidikan yang seimbang dengan terjaminnya kualitas pendidikan, diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak seperti meningkatkan berbagai fasilitas pendukung agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Tantangan bukan hanya peningkatan kualitas tapi bagaimana bisa melakukan distribusi kualitas secara lebih merata. Hal lain yang dapat dilakukan untuk menjamin kualitas para pendidik adalah dengan mengisyaratkan tenaga pendidik memiliki kualifikasi minimal sarjana.

Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara, pendidikan juga merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pada kenyataannya, sebagian kecil bagi peserta didik hanya menjadi sebatas mimpi karena permasalahan yang komplek dalam mengakses pendidikan. Masih terdapat anak-anak usia sekolah di Kota Langsa yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Dari 100 persen siswa pada jenjang SD, yang melanjutkan sekolah hingga lulus hanya sebesar 99,90 persen, sedangkan 0,10 persen lainnya mengalami putus sekolah. Dari siswa SD yang berhasil lulus sekolah, hanya 85,26 persen yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMP atau sekolah yang setingkat lainnya. Sementara itu, terdapat 0,03 persen anak yang pendidikannya terhenti di jenjang SMP atau sekolah yang setingkat lainnya serta pada tingkat jenjang SMA atau sekolah yang setingkat lainnya sekitar 0,58 persen anak yang putus sekolah.

Dalam ruang lingkup pendidikan Islam, keberadaan madrasah sebagai institusi yang memadukan antara sistem pesantren dan sekolah, serta sistem pembelajarannya pun kini telah berubah dari sistem tradisional menuju sistem modern. Sampai saat ini jumlah pesantren/dayah di Kota Langsa telah mencapai 37 lembaga. Keberadaaan lembaga pendidikan Islam termasuk dayah sebagai filter bagi daerah dalam menangkal budaya-budaya asing yang dapat merusak moral masyarakat serta mampu mewujudkan pendidikan Aceh yang islami.

Di sisi lain, fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan masih terjadi di Kota Langsa. Sejumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan maupun anak menjadi bukti pentingnya upaya perlindungan maksimal untuk mendapatkan hak rasa aman. Diperlukan keterlibatan pihak ketiga dalam proses mediasi ketika terjadi permasalahan, jika tidak bisa ditangani, selanjutnya dapat dilaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang baru terbentuk di Kota Langsa.

Dalam hal pemberdayaan gender, proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki diharuskan mempunyai akses dan *control* yang sama terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses seluruh program pembangunan, implementasi program dan kebijakan pemerintah yang tidak diskriminatif.

Mengingat nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang terus menurun setiap tahunnya, maka pemberdayaan perempuan perlu terus ditingkatkan demikian juga dengan peran politik perempuan.

Di bidang kepemudaan dan olah raga, peran generasi muda merupakan potensi dan aset pembangunan manusia yang sangat besar yang tentu saja memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pembinaan kepemudaan dan organisasi kepemudaan perlu terus dilakukan sebagai upaya pengembangan potensi serta peran aktif dalam pembangunan untuk peningkatan kapasitas kepemudaan itu sendiri.

Selanjutnya terkait dengan keolahragaan, perlu juga dilakukan peningkatan pembinaan terhadap atlit-atlit dan cabang-cabang olah raga prestasi secara terus menerus agar prestasi Kota Langsa dalam bidang olah raga dapat diperhitungkan secara nasional.

3. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Kesehatan

Terdapat berbagai macam isu kesehatan yang berkembang antara lain terkait *stunting*. *Stunting* adalah ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Mengingat *wasting* (gizi akut), *stunting* (balita pendek) dan gizi buruk saling keterkaitan, maka diperlukan penanganan secara kolaborasi.

Penyediaan sarana prasarana kesehatan juga merupakan isu yang harus dipenuhi agar masyarakat yang memiliki gangguan atau keluhan kesehatan dapat terlayani dengan baik. Selama ini, pelayanan kesehatan di rumah sakit belum optimal, terlebih untuk pasien rujukan yang penanganannya masih belum memadai sehingga terjadi kendala terhadap tujuan rumah sakit yang akan dirujuk akibat penumpukan pasien yang cukup banyak terutama di rumah sakit rujukan Provinsi. Kehadiran rumah sakit regional diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan peran rumah sakit dalam pelayanan kesehatan masyarakat Kota Langsa khususnya dan Aceh umumnya.

Isu kesehatan selanjutnya adalah terkait keberlangsungan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Keberlangsungan jaminan kesehatan bagi masyarakat perlu dilaksanakan agar dapat meringankan beban keuangan keluarga atau warga yang menggunakan layanan kesehatan di wilayah Aceh dan Kota Langsa khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya.

Selanjutnya isu di bidang kesehatan lainnya adalah terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Kedua hal tersebut terus dilakukan untuk memutuskan mata rantai penularan Covid-19 di Kota Langsa. Selain itu, penerapan praktik 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) dan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terus dilakukan. Mengingat dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Penanganan covid-19 perlu terus dilakukan peningkatan sampai pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir.

4. *Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Keberlangsungan Perdamaian*

Isu terkait konflik sosial perlu diwaspadai mengingat kondisi keamanan dan politik dalam dan luar negeri cenderung dapat berubah sewaktu-waktu dengan cepat. Potensi konflik sosial perlu terus dipantau dengan terus meningkatkan kewaspadaan daerah terhadap permasalahan yang sensitif dan urgensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan daerah terutama terkait dengan paham radikal dan teroris, aksi demo, unjuk rasa yang anarkis, aliran sesat, keagamaan, dan pertikaian antar kelompok masyarakat yang terus dilakukan seperti melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Memasuki tahun 2024, penyelenggaraan Pilkada serentak akan dilaksanakan yang meliputi pemilihan umum legislatif, pemilihan umum kepala negara (Presiden) serta pemilihan umum kepala daerah (Bupati/Walikota) secara keseluruhan di Indonesia, hal ini memberikan warna tersendiri dalam pesta demokrasi di Indonesia. Pemerintah Kota Langsa perlu melakukan upaya-upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu dan Pilkada serta meningkatkan partisipasi perempuan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Isu lainnya yang berhubungan dengan keamanan adalah keberlangsungan perdamaian. Proses penguatan perdamaian masih dan akan terus dilakukan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi seluruh masyarakat sehingga terwujudnya perdamaian secara berkelanjutan (*sustainable peace*) dan hal ini juga menjadi fokus utama dalam melaksanakan amanah UUPA. Salah satu upaya penguatan perdamaian yang

dilakukan adalah dengan melaksanakan pemberdayaan ekonomi terhadap mantan kombatan, tapol/napol dan korban konflik.

Selanjutnya, penanganan bencana alam maupun non alam harus dilakukan secara komprehensif mengingat dampaknya yang buruk bagi aktivitas sosial, kesehatan, ekonomi serta infrastruktur daerah. Kejadian bencana angin kencang dan pohon tumbang, banjir serta kebakaran merupakan hal yang terjadi setiap tahunnya di Kota Langsa. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan bencana karena masyarakat menjadi pihak pertama yang terkena dampak dan juga pihak yang pertama kali memberikan respon terhadap bencana yang mereka hadapi sehingga diperlukan upaya membangun kapabilitas masyarakat itu sendiri untuk mencegah dan menanggulangi bencana.

5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi covid-19 terus dilakukan baik melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat serta optimalisasi sumber-sumber daya potensial ekonomi daerah. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan-kawasan wisata perlu dikembangkan pusat-pusat pengembangan ekonomi baru dan juga pusat-pusat perdagangan. Saat ini Pemerintah Kota Langsa mencoba menjadikan sektor wisata sebagai sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi selain sektor perdagangan dan jasa. Kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah kunjungan wisatawan yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Sektor wisata juga dianggap mampu untuk mendorong sektor-sektor lain untuk tumbuh dengan cepat. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Langsa terus berupaya meningkatkan daya tarik objek-objek wisata alam maupun objek wisata buatan melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepariwisataan.

Masih terkait dengan perkembangan aktivitas perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan akan mampu mengurangi gap ketimpangan pendapatan masyarakat. Di tengah tren kenaikan harga bahan pangan dan energi, daya beli dari masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas tidak akan terganggu. Namun, masyarakat golongan menengah ke bawah akan berdampak terhadap kondisi tersebut. Masyarakat miskin akan semakin terpuruk dan rentan dengan mudahnya jatuh ke dalam kemiskinan. Indeks rasio gini Kota Langsa berfluktuasi dari tahun ke tahun meski cenderung

menurun, angkanya dapat meningkat sewaktu-waktu ketika Kota Langsa tidak siap menerima guncangan seperti ketika pandemi Covid-19. Ketiadaan jaringan pengaman sosial saat terjadi guncangan, atau ketiadaan jaminan sosial akan mudah menjadikan penduduk berada dalam kemiskinan.

Tersedianya lapangan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan pengangguran dan ketika pengangguran tidak dikelola secara baik akan menjadi beban bagi penduduk usia produktif yang bekerja. Upaya peningkatan kesempatan kerja tidak terlepas dari kemampuan lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja, seperti kegiatan investasi penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun modal asing. Di Kota Langsa, hingga saat ini terdapat 85 investor berskala nasional dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 11 orang per investor.

Isu strategis lain terkait dengan kesejahteraan adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kota Langsa sebesar 10,96 persen, angka ini lebih tinggi dari angka nasional yang berada pada level 9,71 persen namun masih jauh dengan Aceh yang mencapai angka 15,53 persen. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang kompleks dan multidemensi sehingga untuk mengatasinya diperlukan upaya kolektif dari pemerintah dan masyarakat dalam menyusun dan menerapkan strategi yang komprehensif, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Keberadaan kawasan industri sebagai penopang ekonomi daerah diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja baru dan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Langsa. Dengan bertambahnya lapangan kerja, maka pendapatan masyarakat akan ikut meningkat dan berdampak positif pada peningkatan pendapatan ekonomi daerah. Terdapat beberapa wilayah di Kota Langsa yang direncanakan menjadi kawasan industri yaitu kawasan industri besar seluas 1.016,35 ha, kawasan industri menengah seluas 208,92 ha dan kawasan industri rumah tangga yang tersebar diseluruh Gampong dalam wilayah Kota Langsa. Selain itu, perlu dibangun proyek-proyek fisik yang mampu menciptakan keunggulan bersaing melalui pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) yang berbasis sumber daya lokal. Dalam pengembangannya SIKM lebih diutamakan untuk industri yang berpotensi tidak mencemari lingkungan di perkotaan.

Ketersediaan pangan berkelanjutan merupakan hal penting yang harus tetap dipenuhi meskipun kondisi dan situasi daerah yang sulit sekalipun, apalagi untuk menanggulangi kenaikan harga pangan pokok yang tidak dapat diprediksi. Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menjaga ketahanan pangan melalui berbagai strategi seperti mendorong pemanfaatan lahan dan mencegah alih fungsi lahan produktif. Tanaman padi sebagai sumber pangan utama penduduk Kota Langsa masih tetap diupayakan untuk dibudidaya di lahan pertanian. Hingga saat ini, luas area panen padi mencapai 1.689 ha dengan produktivitas padi mencapai 5,85 ton/ha. Sehingga dalam memenuhi kekurangan kebutuhan pangan, Kota Langsa dapat memperolehnya dari wilayah lain.

Selanjutnya, guna memenuhi sumber pangan dan juga untuk meningkatkan pendapatan penduduk, perlu juga dilakukan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara maksimal. Dengan sumber daya yang tersedia, pada tahun 2021 jumlah produksi ikan keseluruhan di Kota Langsa mencapai 90.731 ton. Meskipun jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, namun optimalisasi pemanfaatan hasil laut dan perikanan akan tetap terus dilakukan agar pendapatan nelayan meningkat dan juga kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dapat terpenuhi.

Meskipun bukan sektor unggulan perekonomian daerah, sektor pertanian memiliki peran terhadap PDRB ADHB yang mencapai 8,65 persen pada tahun 2021. Penyebab rendahnya kontribusi tersebut dikarenakan berkurangnya lahan pertanian dan bibit unggul yang juga ikut mengakibatkan berkurangnya kegiatan di sektor pertanian. Untuk mengantisipasinya, perlu dilakukan percepatan waktu dan jarak tanam serta menyediakan bibit-bibit varietas unggul sehingga produktivitas di sektor pertanian kembali meningkat.

Sebagai sektor unggulan daerah, sektor perdagangan dan jasa memiliki peran penting dalam memajukan daerah. Sektor perdagangan dan jasa memiliki kontribusi yang paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang mencapai 28,21 persen sehingga sangat potensial untuk terus dikembangkan. Disisi lain Kota Langsa yang relatif dekat dengan perbatasan wilayah Sumatera Utara berpeluang besar untuk kemitraan lintas daerah dalam menjalin transaksi perdagangan dan jasa.

Di sektor koperasi dan UMKM, tantangan koperasi dimasa pandemi dan pasca pandemi Covid-19 justru harus dijadikan momentum untuk mengubah cara kerja koperasi menjadi lebih efisien yaitu dengan gerakan koperasi untuk memanfaatkan dampak positif revolusi industri 4.0, diantaranya adalah koperasi harus menjadi mesin penggerak UMKM, petani, peternak, petambak, pengrajin, pedagang kecil, dan nelayan di daerah untuk bangkit dan terus bergerak maju. Sampai dengan saat ini, persentase koperasi aktif mencapai 73,80 persen, angka ini diharapkan dapat terus meningkat.

Di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan struktural UMKM yang perlu diselesaikan sehingga UMKM dapat berperan lebih dalam perekonomian daerah. Permasalahan tersebut antara lain kualitas dan keberlangsungan produksi, akses pemasaran, *packaging product*, kualitas SDM/pelaku UMKM di bidang manajerial, keuangan dan produksi. Dalam menyelesaikan permasalahan ini dibutuhkan kerjasama yang baik dengan lembaga terkait, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, Bank Indonesia dan lembaga lainnya.

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Pemukiman Penduduk yang Berkualitas

Pertumbuhan penduduk harusnya berbanding lurus dengan adanya daya tampung pemukiman. Tetapi fakta mengatakan, masih banyak warga yang tidak mendapatkan perumahan atau pemukiman dengan fasilitas yang memadai dan layak. Kawasan pemukiman kumuh dianggap sebagai isu penting dan mendesak yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong berkembangnya pemukiman kumuh. Terkait rumah layak huni, Pemerintah Kota Langsa terus berusaha untuk menambah jumlah rumah dengan cara membangun dan melakukan rehab bagi para penduduk yang dikategorikan tidak mampu. Hingga saat ini terdapat rumah layak huni sebanyak 35.332 rumah dari total keseluruhan bangunan rumah 42.314 unit. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelolaan kota juga akan menentukan kualitas pemukiman penduduk.

Ketersediaan sumber air minum layak sangatlah penting untuk memastikan kualitas air yang dikonsumsi. Tantangan untuk menyediakan air layak minum diperkotaan salah satunya adalah distribusi air minum bersih yang belum merata, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Kelompok

ini juga dipersulit dengan biaya "sambung baru" PDAM sehingga diperlukan opsi layanan akses air minum dan terjangkau seperti SPAM komunal.

Jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih di Kota Langsa sudah mencapai 15.924 rumah tangga atau sebesar 37,92 persen. Angka ini masih sangat jauh dari yang diharapkan sehingga perlu adanya kerja sama dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun dunia usaha untuk menjaga pemenuhan akan kebutuhan air minum yang layak di Kota Langsa.

Ketersediaan infrastruktur wajib dipenuhi seiring pertumbuhan ekonomi karena merupakan salah satu elemen krusial dalam mengurai masalah logistik. Salah satu infrastruktur yang terpenting pada suatu lokasi adalah memiliki jaringan jalan yang terhubung dengan kondisi baik. Sejalan dengan semakin banyaknya penduduk berkendaraan, maka intensitas lalulintas jalan juga semakin tinggi. Panjang jalan Kota Langsa keseluruhan mencapai 661,770 km dengan panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 525,21 km dimana proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik baru mencapai 79,36 persen. Infrastruktur jalan yang sudah ada masih membutuhkan peningkatan, perbaikan dan pembangunan baru.

Kemampuan kendaraan melaju di jalan dalam wilayah Kota Langsa dengan kecepatan km/jam yang diinginkan penting juga untuk disiasati, dimana jalan Kota Langsa dalam kondisi baik (>40 Km/jam) perlu ditingkatkan mengingat saat ini banyak penduduk yang menggunakan kendaraan sehingga lalu lintas jalan juga semakin tinggi terlebih saat terjadi kepadatan/macet pada daerah rawan seperti di zona sekolah yang padat pada jam tertentu.

Dalam hal tata ruang dan lingkungan hidup, keberadaan ruang yang tertata bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tingkat ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kota Langsa yang mencapai 76,51 persen perlu terus ditingkatkan. Ketidaksesuaian penggunaan tata ruang seperti tidak optimalnya penggunaan tanah, timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan utilitas, timbulnya masalah pencemaran lingkungan dan sebagainya merupakan tantangan permasalahan yang harus ditanggulangi.

Isu lainnya terkait infrastruktur perhubungan adalah optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan Kuala Langsa. Kawasan Pelabuhan Kuala Langsa yang terletak di bagian barat Kota Langsa Provinsi Aceh, juga memiliki sejumlah

destinasi wisata seperti hutan mangrove, jembatan hijau, dan menara pantau hutan mangrove. Pelabuhan Kuala Langsa merupakan sebagai salah satu prasarana transportasi laut yang menghubungkan Kota Langsa dengan wilayah lainnya bahkan luar negeri dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam era digitalisasi 4.0 adalah merupakan hal penting yang harus dilakukan pada saat ini. Tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat cepat perlu diimbangi dengan kemampuan daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika. Semakin siap daerah dalam menyiapkan infrastruktur jaringan teknologi informasi maka akan semakin tinggi pula daya saing daerah, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jaringan *Base Transcerver Station* (BTS). Saat ini, hampir seluruh wilayah di Kota Langsa ter*coverage* jaringan telekomunikasi yaitu mencapai 99,10 persen.

7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan melalui semangat reformasi birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa. Kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada 3 (tiga) agenda utama, yakni peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pemberdayaan aparatur. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat dalam melayani, dan tepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah mulai dilakukan perampingan kelembagaan dan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya pemerintah melakukan pemantapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit serta penggunaan satu data yang terintegrasi. Untuk itu perlu diikuti dan diperkuat dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM aparatur.

Untuk memastikan program pembangunan yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan *outcome* dan *impact* yang telah ditentukan dalam IKD, IKU dan *key performance* lainnya, maka perlu penguatan pada sistem perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran, pemantauan dan evaluasi pembangunan. Sistem ini harus menggunakan pendekatan *performance cascading* agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat dipastikan

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang sesuai dengan indikator kinerja mikro dan makro.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai, sementara itu sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah, hal tersebut sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 diintruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Adapun terkait dengan penyusunan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri tersebut memperhatikan penyelasaran target indikator makro dan program prioritas nasional RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 2023-2026, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran pembangunan Kota Langsa dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Langsa Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
					TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Implementasi Syariat Islam serta Lestarinya Adat dan Budaya	1. Tingkat Kelestarian Budaya	Persen	60	60	70	80	90	90
		2. Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	60	60	67	69	71	71
	1. 1. Meningkatnya Kelestarian Nilai-nilai Budaya	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	3	3	3	3	3	3
		2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit/Objek	1	1	1	1	1	1
		3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit/Objek	1	1	1	1	1	1
		4. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	1	1	1	1	1	1
	1. 2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Islami	1. Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	60	60	67	69	71	71
2.	Meningkatnya Mutu Pendidikan Daerah	1. Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,68	15,73	15,78	15,83	15,88	15,88
	2. 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Peserta Didik	1. Angka Kelulusan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	Tahun	69,52	69,62	69,71	69,8	69,89	69,89
	3. 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan	Per 100.000 Kelahiran Hidup	250	200	175	150	125	125
		2. Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8	7	6	5	4	4
		3. Persentase Balita Gizi Buruk yang Ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Menurunnya Angka Kemiskinan Melalui Peningkatan Infrastuktur dan Potensi Daerah	1. Pertumbuhan PDRB	Persen	4,21	4,34	4,38	4,47	4,53	4,53
		2. Tingkat Kemiskinan	Persen	10	9,5	9	8,5	8,5	8,5
		3. Indeks Gini	Indeks	0,338	0,335	0,334	0,333	0,332	0,332

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
					TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Rasio	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84	0,84
	4. 2. Meningkatnya Kualitas Prasarana Perhubungan	1. Persentase Prasarana Transportasi Dalam Kondisi Baik	Persen	58	60	65	70	75	75
	4. 3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	1. Persentase Rumah Layak Huni	Persen	74	79	84	89	94	94
	4. 4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bangunan Gedung	1. Persentase Infrastuktur Bangunan Gedung Pelayanan Publik Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	80	85	90	90
	4. 5. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	1. Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	95	96	97	98	99	99
	4. 6. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	1. Persentase Pelayanan Akses Air Bersih	Persen	55	55	60	65	70	70
		2. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	60	60	61	62	63	63
		3. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	50	50	53	55	57	57
		4. Persentase Titik Rawan Banjir	Persen	45	45	40	35	30	30
	4. 7. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	7,99	7,49	7,02	6,58	6,18	6,18
		2. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	4,2	7,84	7,18	5,13	8,05	8,05
	4. 8. Meningkatnya Produksi Pertanian	1. Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Holtikulura	Persen	25	29	32	36	37	37
		2. Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Palawija	Persen	30	32	35	38	41	41
		3. Persentase Pertumbuhan Produksi Padi	Persen	2,65	1,75	1,73	1,7	1,66	1,66
	4. 9. Meningkatnya Kualitas Pangan di Daerah	1. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	95	95	95	95	95	95
	4. 10. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	1. Kontribusi Katagori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	Persen	2,87	3,02	3,2	3,38	3,58	3,58
	4. 11. Menurunnnya Disparitas Kemiskinan	1. Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,5	1,47	1,44	1,38	1,35	1,35
	4. 12. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	1. Nilai Investasi Daerah	Rp. Milyar	265	270	280	290	300	300

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
					TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Terjaganya Perdamaian Serta Meningkatnya Kewaspadaan, Keamanan dan Ketertiban Umum	1. Persentase Konflik Keamanan/Ketertiban yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100
	5. 1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Persen	100	100	100	100	100	100
		2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100
		3. Persentase Penegakan Qanun	Persen	100	100	100	100	100	100
	5. 2. Meningkatnya Nilai Demokrasi, Keutuhan Berbangsa dan Bernegara	1. Partisipasi Masyarakat Dalam Berdemokrasi, Berbangsa dan Bernegara	Gampong	66	66	66	66	66	66
	5. 3. Meningkatnya Penanggulangan Bencana	1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase Korban Bencana yang di Evakuasi	Persen	100	100	100	100	100	100
		3. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100
6.	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	1. Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	77	77,8	77,9	78	78,1	78,1
	6. 1. Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Daerah	1. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Persen	50	50	55	60	65	65
	6. 2. Meningkatnya Pembinaan Olahraga Daerah	1. Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	75	77,5	80	85	90	90
7.	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67	68	68,5	69	69,5	69,5
	7. 1. Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau	1. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	3	3	4	5	6	6
	7. 2. Meningkatnya Penanganan Sampah	1. Persentase Sampah yang Tertangani	Persen	80	81	82	83	84	84

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
					TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana	1. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95	95,7	95,8	95,9	96	96
	8. 1. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	67	68	69	70	71	71
		2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	8. 2. Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	1. Rasio Akseptor KB	Rasio	0,679	0,654	0,672	0,695	0,725	0,725
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1. Nilai LPPD	Nilai (1 = Rendah, 2 = Sedang, 3 = Tinggi)	2	2	2	2	2	2
	9. 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	3	4	4	4	4	4
	9. 2. Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	1. Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3
	9. 3. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	1. Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100
	9. 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah	1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK (1=WTP, 2=WDP, 3=Tidak Wajar, 4=Menolak)	1	1	1	1	1	1
	9. 5. Meningkatnya Kemandirian Desa	1. Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa Mandiri	5	7	9	11	15	15

Tabel 5.2.
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027

URAIAN	RPJP KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027	RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026
1	2	3
VISI	Terwjudnya Kota Langsa sebagai Pusat Perdagangan dan Industri, disertai Masyarakat yang Maju dan Islami	Terwjudnya Kota Langsa sebagai Daerah Perdagangan dan Industri, disertai Masyarakat yang Maju dan Islami
MISI	1. Mengembangkan sektor pertanian, khususnya perkebunan dan perikanan, dan industri berdasarkan kawasan yang ditetapkan dalam tata ruang wilayah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor 2. Memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja pada sektor pertanian dan industri 3. Mengembangkan pelabuhan Kuala Langsa menjadi pelabuhan ekspor bertaraf internasional 4. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana sektor pertanian (perkebunan dan perikanan), industri, dan perdagangan; dan 5. Meningkatkan kualitas SDM pelaku usahatani	1. Optimalisasi Sumber Daya untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah
	6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan di semua jenjang pendidikan umum dan agama 7. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan umum dan agama 8. Mengembangkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan 9. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan 10. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan baik di Rumah Sakit Umum maupun di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu	2. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas
	11. Menyediakan prasarana dan sarana sosial yang memadai 12. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga legislatif dalam mengawasi jalannya pembangunan sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat 13. Meningkatkan peranan dan kualitas aparatur penegak hukum 14. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa; dan 15. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan	3. Mewujudkan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan serta Birokrasi yang Bersih
	16. Meningkatkan fungsi sarana peribadatan dan lembagalembaga keagamaan sebagai pusat pengamalan pengembangan nilai-nilai islami 17. Melaksanakan syariat Islam yang kaffah dalam aspek kehidupan 18. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 19. Menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi; dan 20. Meningkatkan peran fungsi lembaga peradilan agama	4. Melaksanakan Syariat Islam Secara Kaffah dan Melestarikan Adat dan Budaya Daerah

URAIAN	RPJP KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027	RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026
1	2	3
TUJUAN	1. Mewujudkan Kota Langsa sebagai pusat pengembangan syariat islam 2. Mewujudkan masyarakat Kota Langsa yang muslim secara kaffah 3. Mengembangkan informasi teknologi yang bernuansa islami 4. Mewujudkan kota langsa yang Baldatun Thaibah	1. Implementasi Syariat Islam serta Lestarinya Adat dan Budaya
	3. Mewujudkan ekonomi Kota Langsa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang strategis 4. Memantapkan ketahanan pangan 5. Mewujudkan petani modern dan tangguh 6. Menjamin kesejahteraan masyarakat miskin 7. Memajukan industri modern yang berbasis sumberdaya lokal dan berorientasi ekspor 8. Memantapkan eksistensi kawasan-kawasan sentra produksi 9. Mengoptimalkan intensifikasi dan pembaharuan sumber daya alam 10. Memantapkan pelabuhan kuala langsa sebagai pelabuhan internasional 11. Meningkatkan kualitas produksi yang berorientasi ekspor 12. Mewujudkan peningkatan dan pengembangan tekhnologi modern 13. Menjamin ketersediaan prasarana (infrastruktur) yang memadai dan berdaya saing 14. Menyertakan keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana 15. Membina dan mensejahterakan masyarakat penyandang masalah sosial	2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Menurunnya Angka Kemiskinan Melalui Peningkatan Infrastuktur dan Potensi Daerah
	16. Memantapkan kualitas kelembagaan pendidikan	3. Meningkatnya Mutu Pendidikan Daerah
	17. Memelihara kualitas derajat kesehatan masyarakat	4. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
	18. Memantapkan stabilitas politik dan keamanan 19. Melaksanakan penegakan hukum tanpa diskriminasi 20. Menumbuhkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat	5. Terjaganya Perdamaian Serta Meningkatnya Kewaspadaan, Keamanan dan Ketertiban Umum
	21. Memelihara pemerintahan yang bersih, amanah dan berwibawa (good governance) 22. Meningkatkan kualitas SDM aparatur 23. Menjamin kualitas pelayanan publik 24. Mengefektifkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar lembaga pemerintahan 25. Menjamin ketersediaan anggaran/biaya pembangunan sarana dan prasarana 26. Menjamin ketersediaan anggaran biaya pembangunan daerah yang memadai 27. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan sarana 28. Melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang positif bagi pembangunan daerah	6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 7. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga 8. Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup 9. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana
SASARAN	1. Meningkatkan fungsi masjid-masjid dan meunasah-meunasah sebagai pusat pengembangan syariat islam 2. Menyemarakkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan hari-hari besar islam 3. Mewujudkan suasana kehidupan kota yang bernuansa islami	1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Islami

URAIAN	RPJP KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027	RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026
1	2	3
	4. Memelihara kualitas sarana perpustakaan dan materinya, baik pengetahuan umum (duniawi) maupun pengetahuan agama (ukhrawi) 5. Mewujudkan kehidupan keseharian masyarakat atas dasar ridha Allah (Minallahi Ridhwana)	
	6. Memelihara nilai tambah produksi sektor sekunder, tersier dan primer Menumbuhkembangkan usaha wiraswasta 7. Mengintensifkan usaha perkebunan, tanaman pangan dan perkebunan 8. Meningkatkan kemampuan petani untuk berinovasi dan bermitra dengan usaha-usaha besar yang ada 9. Memajukan industri-industri pengolahan dengan penerapan tekhnologi modern 10. Menjalin kerjasama luar negeri dibidang industri modern 11. Memprioritaskan pengembangan dan pembangunan kawasan cepat tumbuh 12. Meningkatkan kemampuan keuangan, kualitas pelaku usaha ekonomi daerah dan koperasi 13. Menjalin hubungan kerjasama internasional, bidang perdagangan dan jasa bagi pengembangan pelabuhan kuala langsa 14. Penggunaan tekhnologi modern di bidang pertanian dan industri 15. Menjalin kerjasama universitas-universitas luar negeri terutama di bidang pertanian dan industri 16. Memperkuat hubungan kerjasama dengan para pengusaha/investor asing dalam pembangunan prasarana dan sarana 17. Mengalokasikan anggaran/biaya yang memadai untuk pengembangan prasarana dan sarana 18. Memelihara kualitas sarana dan prasarana 19. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana	2. Meningkatnya Produksi Perikanan 3. Meningkatnya Produksi Pertanian 4. Meningkatnya Kualitas Pangan di Daerah 5. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan 6. Menurunnnya Disparitas Kemiskinan 7. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah 8. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan 9. Meningkatnya Kualitas Prasarana Perhubungan 10. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bangunan Gedung 11. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang 12. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air 13. Meningkatnya Pembinaan Olahraga Daerah 14. Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau 15. Meningkatnya Penanganan Sampah
	20. Menggunakan teknologi moderen dalam pelayanan kesehatan 21. Meningkatkan kuantitas tenaga dokter dan tenaga medis yang menguasai teknologi bidang kesehatan	16. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
	22. Memantapkan kesadaran dan kepedulian sosial 23. Meningkatkan kemandirian penyandang masalah sosial 24. Membina dan memberdayakan anak-anak yatim dan para janda 25. Meningkatkan kepedulian sosial bagi seluruh masyarakat 26. Memanfaatkan sumberdaya perempuan sesuai dengan fitrah dan kodratnya dalam pembangunan masyarakat dan daerah	17. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Peserta Didik 18. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman 19. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 20. Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana
	27. Melestarikan nilai-nilai budaya asli daerah dan membatasi nilai-nilai budaya asing yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat	21. Meningkatnya Kelestarian Nilai-nilai Budaya
	28. Memantapkan pengetahuan dan pemahaman politik seluruh lapisan masyarakat 29. Memelihara perdamaian yang abadi 30. Memelihara kesatuan dan persatuan 31. Memelihara keamanan dan ketertiban	22. Meningkatnya Nilai Demokrasi, Keutuhan Berbangsa dan Bernegara 23. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 24. Meningkatnya Penanggulangan Bencana 25. Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Daerah

URAIAN	RPJP KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027	RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026
1	2	3
	32. Melaksanakan hukum yang adil 33. Membudayakan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan	
	35. Mewujudkan aparatur penegak hukum yang profesional, jujur dan disiplin 36. Meningkatkan pemantapan disiplin kinerja aparatur pemerintah 37. Memberikan peluang untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan serta bantuan-bantuan lainnya 38. Memelihara kualitas infrastruktur pemerintah 39. Memantapkan pengawasan dan evaluasi 40. Memantapkan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah 34. Memantapkan pemahaman masyarakat tentang hukum (produk-produknya)	26. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 27. Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP 28. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah 29. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah 30. Meningkatnya Kemandirian Desa
ISU STRATEGIS	1. Agama 2. Sosial Budaya 3. Demografis 4. Produk Domestik Regional Bruto 5. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1. Peningkatan Syiar Islam dan Pelestarian Seni serta adat Budaya Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah 3. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Kesehatan 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
	6. Geografis 7. Prasarana dan Sarana	5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Pemukiman Penduduk yang Berkualitas
	8. Politik, Hukum, dan Keamanan	6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Serta Keberlangsungan Perdamaian
	9. Pemerintahan	7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

KETERANGAN :
- RPJPD Kota Langsa Tahun 2007-2027 yang ditetapkan melalui Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 membutuhkan Perubahan Dalam Rangka Penyesuaian Terhadap Regulasi Penyelenggaraan dan Kewenangan serta Kondisi Daerah

Tabel 5.3.
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh	Indeks	74,20	74,22	74,24	74,26								
1. 1. Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi	1. Skor aspek hak-hak politik	Skor	65,94	66,94	67,94	68,94								
	1. Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	75,91	76,91	77,91	78,91								
							1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
							1. 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Pengamalan Pancasila dalam Masyarakat	Gampong	66	66	66	66	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
							1. 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA	Persen	80	80	80	80	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
							1. 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	Persen	50	55	60	65	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	1. Indeks reformasi birokrasi	Indeks	65	66	67	68								
2. 1. Opini audit BPK atas laporan keuangan	1. Opini BKP	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP								
							1. KEUANGAN							
							1. 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Daya Serap APBD	Persen	99	99	99	99	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
							1. 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Tingkat Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persen	95	95	95	95	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
2. 2. Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP	1. Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3								
							1. INSPEKTORAT DAERAH							
							1. 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Capaian Program Pengawasan	Persen	100	100	100	100	Inspektorat Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Fasilitasi Desain Kebijakan, Pendampinan dan Asistensi Pengawasan	Persen	100	100	100	100	Inspektorat Kota Langsa
2. 3. Meningkatkan profesionalitas ASN	1. Indeks profesionalitas ASN	Indeks	77,57	79,8	82,6	84,55								
							1. KEPEGAWAIAN							
							1. 1. Program Kepegawaian Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan ASN Daerah	Nilai Indeks	85	90	95	98	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
							2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
							2. 1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	50	60	70	80	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
2. 4. Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	2,7785/ tinggi	2,78/ tinggi	2,80/ tinggi	2,85/ tinggi								
2. 5. Meningkatnya Nilai SAKIP	1. Nilai SAKIP	Nilai	65	66	67,5	71								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
							1. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	3	3	4	4	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa
							1. 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
							2. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Kesehatan Kota Langsa
							3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
							4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
							4. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
							4. 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa
							5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
							5. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5	5	Dinas Sosial Kota Langsa
							6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
							6. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa
							7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
							7. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	5	5	5	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
							8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
							8. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
							9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							9. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Pertanahan Kota Langsa
							10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
							10. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
							11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
							11. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
							12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
							12. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
							13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
							13. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Perhubungan Kota Langsa
							14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
							14. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
							15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
							15. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
							16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							16. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
							17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
							17. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
							18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
							18. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa
							19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
							19. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
							20. SEKRETARIAT DAERAH							
							20. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Sekretariat Daerah Kota Langsa
							21. SEKRETARIAT DPRD							
							21. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Sekretariat DPR Kota Langsa
							21. 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100	Sekretariat DPR Kota Langsa
							22. PERENCANAAN							
							22. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	5	5	5	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
							23. KEUANGAN							
							23. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5	5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
							24. KEPEGAWAIAN							

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							24. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
							25. INSPEKTORAT DAERAH							
							25. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5	5	Inspektorat Kota Langsa
							26. KECAMATAN							
							26. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Kecamatan Langsa Kota
							26. 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Kecamatan Langsa Barat
							26. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Kecamatan Langsa Timur
							26. 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Kecamatan Langsa Lama
							26. 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Kecamatan Langsa Baro
							27. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
							27. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
							28. KEKHUSUSAN ACEH							
							28. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa
							28. 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa
							28. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. 6. Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,32	3,40	3,50	3,55								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
							1. 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik	1. Akses Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
							1. 2. Program Aplikasi Informatika	1. Implementasi E-Government	Persen	50	55	60	65	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
							2. 1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Jaminan Keamanan Informasi Berklasifikasi	Persen	77	79	81	83	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
							3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
							3. 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data Statistik Sektoral Daerah yang Dapat Diakses	Persen	5	7	10	17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
							4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
							4. 1. Program Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Persen	25	27	30	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
							5. PERENCANAAN							
							5. 1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
							5. 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Implementasi Program Prioritas Pembangunan	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
							6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
							6. 1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan	Persen	78	81	83	85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
							7. 1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Menurunnya Tingkat Sengketa Tanah Garapan	Persen	10	10	10	10	Dinas Pertanahan Kota Langsa
							7. 2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Persen	60	65	70	75	Dinas Pertanahan Kota Langsa
							7. 3. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	1. Terselesainya Kesediaan Lahan, Ganti Kerugian dan Tanah Absentee	Persen	66	69	72	75	Dinas Pertanahan Kota Langsa
							7. 4. Program Penatagunaan Tanah	1. Cakupan Penatagunaan Tanah	Persen	56	60	64	69	Dinas Pertanahan Kota Langsa
							8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
							8. 1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Pencatatan Biodata Penduduk Dalam Register Pencatatan Sipil yang Didaftarkan	Persen	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
							8. 2. Program Pencatatan Sipil	1. Pencatatan Peristiwa Penting yang Dialami Penduduk Dalam Register Pencatatan Sipil yang Dilaporkan	Persen	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
							8. 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Tingkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
							8. 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Pemutakhiran Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
3. Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah	1. Indeks pembangunan Syariat Islam	Indeks	83	85	87	89								
3. 1. Menguatnya Kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran (DSI)	1. Angka Melek Alqur'an	%	83	85	88	90								
							1. KEKHUSUSAN ACEH							
							1. 1. Program Syariat Islam Aceh	1. Persentase pelanggaran Qanun Syariat Islam yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah (DPDA)	1. Indeks Standarisasi Dayah Aceh (ISDA)/ persentase dayah yang mandiri	%	38	41	44	47								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
							1. 1. Program Pendidikan Dayah	1. Peran Serta Dayah Dalam Pendidikan Islam	Dayah	100	100	100	100	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa
3. 3. Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan (MPU)	1. Rasio fatwa dan tausiah yang diberikan untuk pembangunan Syariat Islam	Ratio	14	14	14	14								
							1. KEKHUSUSAN ACEH							
							1. 1. Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	1. Eksistensi Peran Ulama Dalam Pembangunan Daerah	Gampong	66	66	66	66	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa
3. 4. ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan (BMA)	1. Rasio Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	%	75	80	85	90								
							1. KEKHUSUSAN ACEH							
							1. 1. Program Baitul Mal	1. Tingkat Capaian Penvaluran Zakat	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,14	72,15	72,15	72,16								
4. 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,49	14,52	14,54	14,57								
4. 2. Meningkatnya Sekolah yang terakreditasi	1. Meningkatnya Rasio Sekolah dengan Akreditasi A	%	95,62	95,81	96	96,2								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
							1. 1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,32	11,42	11,52	11,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. 2. Program Pengembangan Kurikulum	1. Tingkat Implementasi Kurikulum Dalam Sistem Belajar Mengajar Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
							1. 3. Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	1. Saran MPD yang dijadikan Kebijakan daerah	Persen	15	15	20	20	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
							2. 1. Program Pembinaan Perpustakaan	1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Kunjungan	11500	13000	14500	16000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
4. 3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,67	92,98	93,28	93,58								
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,48	66,49	67,5	68,51								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
							1. 1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Sudah(1)/ Belum(0)	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
							1. 2. Program Perlindungan Perempuan	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Rasio	0,048	0,046	0,045	0,044	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
							1. 4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nilai	650	650	750	750	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
							1. 5. Program Perlindungan Khusus Anak	1. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Persen	3,52	3,5	3	2,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
							2. 1. Program Pengendalian Penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,39	1,4	1,4	1,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
							2. 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	69	70	72	78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
							2. 3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
4. 4. Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	1. Persentase pemuda berpretasi	%	3,92	4,17	4,41	4,66								
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2. 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persen	60	65	70	75	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
							2. 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	14	15	17	19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
							2. 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1. Aktualisasi Program Kerja Organisasi Kepramukaan dalam Masyarakat	Persen	30	35	40	45	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
4. 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Usia Harapan Hidup	tahun	70	70,02	70,05	70,1	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
	2. Persentase Balita Stunting	%	25	14	13	12	1. 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan Wilayah Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
	3. Persentase kematian akibat covid-19	%	3	2	0	0	1. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. SDM Kesehatan yang Tersertifikasi	Persen	94	95	96	97	Dinas Kesehatan Kota Langsa
							1. 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Tingkat Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar Kesehatan	Persen	95	96	97	98	Dinas Kesehatan Kota Langsa
4. 6. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rumah sakit	Rerata Indeks	57,57	60,21	61,6	62,95	1. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Cakupan Pelaksanaan Germas	Persen	60	70	80	90	Dinas Kesehatan Kota Langsa
5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	1. Persentase Penduduk Miskin	%	13,09	12,75	12,41	12,07								
	2. Pertumbuhan PDRB	%	3,5-3,7	3,7-3,8	3,8-3,9	4,0-4,5								
	3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,48	5,36	5,24	5,12								
5. 1. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	1. Nilai Tukar Petani (NTP)	%	101,34	101,49	101,65	101,8								

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	102,5	103	103,5	104								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
							1. 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	61264	65567	69885	74207	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
							1. 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	29655	31784	33413	36103	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
							2. 1. Program Penyuluhan Pertanian	1. Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kuhatanan dan Perikanan	Persen	4,1	4,1	4,1	4,1	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
5. 2. Menurunkan Beban Penduduk Miskin	1. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	70,75	76,1	81,74	87,68								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
							1. 1. Program Pemberdayaan Sosial	1. Pengawasan Dukungan Penanganan PMKS	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial Kota Langsa
							1. 2. Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase PMKS Yang Tertangani	Persentase	86	87	88	89	Dinas Sosial Kota Langsa
							1. 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Meningkatnya Kemandirian Keluarga Miskin dan Rentan dalam Mengakses Kebutuhan Dasar	Persen	25	30	35	40	Dinas Sosial Kota Langsa
							2. SEKRETARIAT DAERAH							
							2. 1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pemenuhan Kebutuhan Publik dan Sosial Masyarakat	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Langsa
5. 3. Pengendalian Inflasi	1. Laju inflasi	%	2,46	2,43	2,4	2,37	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. 1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Laju Indeks Implisit PDRB	Persen	2,95	2,8	2,85	2,75	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
5. 4. Meningkatkan Kemandirian Desa	1. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,64	0,65	0,66	0,68								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
							1. 1. Program Penataan Desa	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Efektif	Gampong	66	66	66	66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
							1. 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
							1. 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1. Partisipasi dan Pelayanan Penyelenggaraan Masyarakat Desa	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
							2. KECAMATAN							
							2. 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Kota
							2. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Barat
							2. 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Timur
							2. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Lama
							2. 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Baro

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. 5. Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19	1. Rasio UMKM yang diberdayakan	%	0,01	0,015	0,017	0,019								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
							1. 1. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1. Persentase Koperasi Aktif	Persen	46	47	48	49	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
							1. 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	85	85	85	85	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
5. 6. Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	1. Persentase kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	%	31,13	31,23	31,32	31,48								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
							1. 1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	23	23,5	24	24,5	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
							2. 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Produktivitas Pertanian/Perkebunan	Ton/Ha	2,9	2,91	2,92	2,93	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
							2. 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan	Persen	0,35	0,34	0,34	0,34	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
							2. 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Perlindungan Hewan dari Penyakit yang Mengancam Kelestarian Sumberdaya Hewan dan Lingkungan	Persen	30	40	45	50	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5. 7. Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian	1. Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	4	4,3	4,6	4,6								
							1. SEKRETARIAT DAERAH							
							1. 1. Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Terkendalinya Aktivitas Perekonomian Daerah	Persen	91	92	94	96	Sekretariat Daerah Kota Langsa
5. 8. Meningkatnya peran industri dan dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian aceh	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non Migas	%	4,53	5	5,3	6								
	2. Pertumbuhan ekspor non migas	Ratio	2,95	3,05	3,15	3,25								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
							1. 1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,38	4,39	4,51	4,63	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
							2. 1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	4,21	4,34	4,38	4,47	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
							2. 2. Program Pengembangan Ekspor	1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	Persen	5	5	5	5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
							2. 3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1. Persentase Masyarakat/Penduduk yang Terlindungi dari Dampak Negatif Pemakaian Barang dan Jasa	Persen	95,15	95,25	95,35	95,5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2. 4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1. Penggunaan dan Kontribusi Produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional	Persen	94	94	94	94	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
5. 9. Meningkatnya realisasi penanaman modal di Aceh	1. Nilai realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Rp.Miliar	10,5	11,13	11,91	12,86								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
							1. 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase Pertumbuhan Investasi	Persen	1,12	3,7	3,57	3,45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
							1. 2. Program Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah Perizinan Berusaha dengan Investasi di atas 5 Milyar	Investor	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
							1. 3. Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks	84,5	85	85,5	86	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
							1. 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Persen	1,12	3,7	3,57	3,45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
							1. 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Tingkat Implementasi Informasi Penanaman Modal Melalui Sistem Informasi	Persen	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
5. 10. Meningkatnya sub kontribusi pariwisata	1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,29	1,80	1,90	2,00								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
							1. 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Rata-Rata Lamanya Tamu Menginap	Hari	2	3	3	3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
							1. 2. Program Pemasaran Pariwisata	1. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	Persen	1,75	1,72	1,69	1,66	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1. Pertumbuhan sektor wisata	Persen	2	2	2	2	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
							2. 1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1. Meningkatnya Nilai-nilai Patriotisme Masyarakat	Persen	75	80	85	90	Dinas Sosial Kota Langsa
							3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
							3. 1. Program Pengembangan Kebudayaan	1. Meningkatnya Aktivitas dan Kreativitas Masyarakat Dalam Pengembangan Adat dan Budaya	Aktivitas	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
							3. 2. Program Pembinaan Sejarah	1. Tingkat Pemahaman Sejarah Masyarakat	Persen	30	35	40	45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
							3. 3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Terkelolanya Cagar Budaya di Daerah	Persen	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
							3. 4. Program Pengelolaan Permuseuman	1. Jumlah Kunjungan Museum	Kunjungan	5000	6000	7000	8000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
							3. 5. Program Majelis Adat Aceh (MAA)	1. Implementasi Penyelenggaraan Adat Istiadat Daerah	Persen	30	35	40	45	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa
5. 11. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	1. Pertumbuhan 10 % per tahun (APBA, PAA, CSR dan Dana LSM)	%	10	10	10	10								
							1. KEUANGAN							
							1. 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persen	5	5	5	5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
5. 12. Menigkatnya Kemandirian dan keragamaman Pangan	1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,27	75,59	76,91	78,23								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1. Desa Mandiri Pangan	Gampong	1	1	1	1	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
							1. 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,5	88	88,5	90,5	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
							1. 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Cakupan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	100	100	100	100	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
5. 13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan Pasar	1. Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	64,43	64,55	64,67	64,79								
	2. Rasio penduduk yang bekerja	%	97,18	98,98	98,78	98,79								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
							1. 1. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	5,18	7,77	9,33	10,36	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa
							1. 2. Program Hubungan Industrial	1. Menurunnya Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	28	25	20	18	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa
6. Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana	1. Rasio konektivitas Daerah	Rasio	0,73	0,73	0,77	0,77								
6. 1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	1. Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	%	86,12	89,16	92,22	95,3								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
							1. 1. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	535	542	551	559	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2. 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Angka Kecelakaan Lalu Lintas	LAKA	95	90	85	80	Dinas Perhubungan Kota Langsa
							2. 2. Program Pengelolaan Pelayaran	1. Tertibnya Arus Lalu Lintas Pelayaran	Persen	100	100	100	100	Dinas Perhubungan Kota Langsa
6. 2. Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	1. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	%	70	80	88	95								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
							1. 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Tingkat Kepatuhan IMB	Persen	99	99	99	99	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
6. 3. Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	1. Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	56,32	58,23	60,21	62,26								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
							1. 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	Persen	50	51	52	53	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
6. 4. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar	1. Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan pelayanan dasar	%	47,49	52,45	55,76	61,65								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
							1. 1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Persen	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	71,97	76,97	81,97	86,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
							1. 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Lancarnya Sistem Drainase Perkotaan	Persen	82,24	87,24	92,24	97,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
							1. 4. Program Pengembangan Permukiman	1. Permukiman Perkotaan yang Layak Huni	Persen	83	88	93	98	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
							1. 5. Program Penataan Bangunan Gedung	1. Persentase Penyelenggaraan Kualitas Bangunan Gedung	Persen	40	45	50	55	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
							1. 6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1. Persentase Terkendalinya Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persen	60	62	65	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
							2. 1. Program Pengembangan Perumahan	1. Persentase Rumah Layak Huni	Persen	85,3	85,5	85,8	86	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
							2. 2. Program Kawasan Permukiman	1. Persentase Lingkungan Kumuh	Persen	11	10,5	10	9,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
							2. 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Persentase Permukiman yang Mendapat Dukungan PSU	Persen	55	52	54	56	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
6. 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	76,07	76,48	76,52	76,91								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
							1. 1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1. Cakupan Pengelolaan Sampah	Persen	81	82	83	84	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
							2. 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73	75	77	79	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2. 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Penurunan Beban Pencemaran	Persen	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
							2. 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Tingkat Kepedulian Stakeholder dalam Upaya Pelestarian Kehati	Persen	26	26	26	26	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
							2. 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Penanggulangan Pencemaran B3	Persen	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
							2. 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Tingkat Ketaatan Kegiatan Usaha Terhadap Regulasi	Persen	26	27	27,5	28	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
							2. 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Desa Berbudaya Lingkungan Hidup	Gampong	13	13	13	14	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
							2. 7. Program Pengelolaan Persampahan	1. Persentase Penanganan Sampah	Persen	81	82	83	84	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
6. 6. Meningkatkan Kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	1. Indeks Resiko Pengurangan Bencana Aceh	Indeks	145/ tinggi	143/ sedang	141/ sedang	139/ sedang								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
							1. 1. Program Penanggulangan Bencana	1. Cakupan Penanggulangan Kejadian Bencana Alam	Persen	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
							1. 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Cakupan Penanggulangan Kejadian Bencana Kebakatan dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
							2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
							2. 1. Program Penanganan Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar	Persen	75	80	85	90	Dinas Sosial Kota Langsa

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7. Meningkatkan Penguatan Perdamaian	1. Persentase kesejahteraan korban konflik	%												
7. 1. Memitigasi munculnya potensi konflik horizontal	Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rahabilitasi sosial	Rasio	0,16	0,23	0,3	0,37								
							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
							1. 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Pelanggaran	100	150	200	250	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa
							2. KECAMATAN							
							2. 1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Kota
							2. 2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Barat
							2. 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Timur
							2. 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Lama

RPD PROVINSI ACEH TAHUN 2023-2026							RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2. 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Baro
							3. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
							3. 1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
							3. 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1. Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah	Persen	85	85	85	85	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa

Tabel V.4.
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023-2026

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	PN	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	1. Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	Persen	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	1. SEKRETARIAT DAERAH							
			2. Indeks Ketahanan Energi	Indeks	68,0	68,0	68,8	69,2	70,3	1. 1. Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Terkendalinya Aktivitas Perekonomian Daerah	Persen	91	92	94	96	Sekretariat Daerah Kota Langsa
2.	PN	Energi Dan Ketenagalistrikan	1. Rasio elektrifikasi	Persen	100	100	100	100	100	2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
			2. Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik	kWh	1.142	1.203	1.268	1.336	1.408	2. 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	Persen	50	51	52	53	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
			3. Penurunan Emisi CO2 Pembangkit	juta ton	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07	2. 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Persen	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
										2. 3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1. Cakupan Pengelolaan Sampah	Persen	81	82	83	84	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
3.	PN	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Produktivitas air (water productivity)	US$/m³	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	2. 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	71,97	76,97	81,97	86,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
										2. 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Lancarnya Sistem Drainase Perkotaan	Persen	82,24	87,24	92,24	97,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
4.	PN	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita	Persen	92,84	93,44	94,00	94,63	95,00	2. 6. Program Pengembangan Permukiman	1. Permukiman Perkotaan yang Layak Huni	Persen	83	88	93	98	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
			2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	Persen	82,35	83,50	84,80	86,00	87,00	2. 7. Program Penataan Bangunan Gedung	1. Persentase Penyelenggaraan Kualitas Bangunan Gedung	Persen	40	45	50	55	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan	Persen	55,46	56,85	58,23	59,62	60,00	2. 8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1. Persentase Terkendalinya Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persen	60	62	65	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
			4. Rasio outstanding KPR terhadap PDB	Persen	3,05	3,10	3,30	3,60	4,00	2. 9. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	535	542	551	559	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
			5. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	Persen	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	2. 10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Tingkat Kepatuhan IMB	Persen	99	99	99	99	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
			6. Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan	Persen	5,95	4,46	2,98	1,49	-								
			7. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik	Persen	72.92% penanganan ; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan ; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan ; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan ; 14.57% pengurangan	80% penanganan ; 20% pengurangan	3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
			8. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persen	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	3. 1. Program Pengembangan Perumahan	1. Persentase Rumah Layak Huni	Persen	85,3	85,5	85,8	86	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
			9. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persen	7,3	8,4	10,0	12,2	15,0	3. 2. Program Kawasan Permukiman	1. Persentase Lingkungan Kumuh	Persen	11	10,5	10	9,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
			10. Volume tampungan air per kapita	m3/kapita	52,50189621	55,18146289	57,05999842	58,10498273	58,49863205	3. 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Persentase Permukiman yang Mendapat Dukungan PSU	Persen	55	52	54	56	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
			11. Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	DI	1	2	3	2	1								
			12. Luas lahan pertanian padi dan nonpadi yang beririgasi meningkat	Ha	45.229,16667	115.942,70830	116.142,70830	116.342,70830	116.342,70830	4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			13. Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	Provinsi	20	20	20	20	20	4. 1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Menurunnya Tingkat Sengketa Tanah Garapan	Persen	10	10	10	10	Dinas Pertanahan Kota Langsa
			14. Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan	m3/detik	4,2700	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325	4. 2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Persen	60	65	70	75	Dinas Pertanahan Kota Langsa
			15. Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010)	Persen	53	55	57	60	65	4. 3. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	1. Terselesainya Kesediaan Lahan, Ganti Kerugian dan Tanah Absentee	Persen	66	69	72	75	Dinas Pertanahan Kota Langsa
										4. 4. Program Penatagunaan Tanah	1. Cakupan Penatagunaan Tanah	Persen	56	60	64	69	Dinas Pertanahan Kota Langsa
5.	PN	Infrastruktur Ekonomi	1. Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A								
			2. Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
			3. Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	5. 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Angka Kecelakaan Lalu Lintas	LAKA	95	90	85	80	Dinas Perhubungan Kota Langsa
			4. Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	5. 2. Program Pengelolaan Pelayaran	1. Tertibnya Arus Lalu Lintas Pelayaran	Persen	100	100	100	100	Dinas Perhubungan Kota Langsa
6.	PN	Infrastruktur Perkotaan	1. Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A								
7.	PN	Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	1. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	Persen	78,7	N.A	N.A	N.A	98,0	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
			2. Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	Niai	2,26	2,24	2,21	2,19	2,10	1. 1. Program Pemberdayaan Sosial	1. Pengawasan Dukungan Penanganan PMKS	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial Kota Langsa

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	Persen	65,2	N.A	N.A	N.A	80,0	1. 2. Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase PMKS Yang Tertangani	Persentase	86	87	88	89	Dinas Sosial Kota Langsa
										1. 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Meningkatnya Kemandirian Keluarga Miskin dan Rentan dalam Mengakses Kebutuhan Dasar	Persen	25	30	35	40	Dinas Sosial Kota Langsa
8.	PN	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	Persen	78,7	N.A	N.A	N.A	98,0								
			2. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	Persen	65,2	N.A	N.A	N.A	80,0	2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
										2. 1. Program Pendaftaran Penduduk	1. Pencatatan Biodata Penduduk Dalam Register Pencatatan Sipil yang Didaftarkan	Persen	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
										2. 2. Program Pencatatan Sipil	1. Pencatatan Peristiwa Penting yang Dialami Penduduk Dalam Register Pencatatan Sipil yang Dilaporkan	Persen	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
										2. 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Tingkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
										2. 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Pemutakhiran Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
										3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										3. 1. Program Pengendalian Penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,39	1,4	1,4	1,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
										3. 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	69	70	72	78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
										3. 3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
9.	PN	Pengentasan Kemiskinan	1. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	Persen	27,9	N.A	N.A	N.A	40	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
			2. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	Persen	25,6	N.A	N.A	N.A	50	1. 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1. Desa Mandiri Pangan	Gampong	1	1	1	1	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
			3. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA	Ha	630.000	1.600.000	1.850.000	1.350.000	1.100.000	1. 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,5	88	88,5	90,5	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
			4. Bidang tanah yang diredistribusi	Ha	750.000	N.A	N.A	N.A	7.750.000	1. 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Cakupan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	100	100	100	100	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
			5. Bidang tanah yang dilegalisasi	Ha	6.286.087	N.A	N.A	N.A	56.286.087								

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
										2. 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	61264	65567	69885	74207	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
10.	PN	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2	2. 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	29655	31784	33413	36103	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
			2. Angka Kecukupan Energi (AKE)	kkal/hari	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2. 3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	23	23,5	24	24,5	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
			3. Angka Kecukupan Protein	gram/ kapita/hari	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0								
			4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Undernourishment/ PoU)	Persen	6,2	5,8	5,5	5,2	5,0	3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
			5. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	Persen	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0	3. 1. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1. Persentase Koperasi Aktif	Persen	46	47	48	49	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
										3. 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	85	85	85	85	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
11.	PN	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	1. Konservasi kawasan kelautan	Juta ha	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9								
			2. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	<64	<67	<72	<76	≤80	4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
										4. 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Produktivitas Pertanian/Perkebunan	Ton/Ha	2,9	2,91	2,92	2,93	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	PN	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	1. Rasio kewirausahaan nasional	Persen	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4. 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan	Persen	0,3460208	0,3448276	0,3436426	0,3424658	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
			2. Kontribusi UMKM terhadap PDB	Persen	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	4. 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Perlindungan Hewan dari Penyakit yang Mengancam Kelestarian Sumberdaya Hewan dan Lingkungan	Persen	30	40	45	50	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
			3. Kontribusi koperasi terhadap PDB	Persen	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	4. 4. Program Penyuluhan Pertanian	1. Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kuhatanan dan Perikanan	Persen	4,1	4,1	4,1	4,1	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
13.	PN	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	1. Pertumbuhan PDB pertanian	Persen	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1	5. SEKRETARIAT DAERAH							
			2. Kontribusi PDB kemaritiman	Persen	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	5. 1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pemenuhan Kebutuhan Publik dan Sosial Masyarakat	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Daerah Kota Langsa
			3. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	Persen	5,0	5,5	6,5	7,5	8,1								
			4. Kontribusi PDB pariwisata	Persen	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5	6. KEKHUSUSAN ACEH							
			5. Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp Triliun	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689	6. 1. Program Baitul Mal	1. Tingkat Capaian Penyaluran Zakat	Persen	100	100	100	100	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa
			6. Pertumbuhan investasi (PMTB)	Persen	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4								
			7. Penyediaan lapangan kerja per tahun	Juta Orang	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
			8. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persen	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	7. 1. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	5,1813472	7,7720207	9,3264249	10,362694	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa
			9. Kontribusi tenaga kerja industri	Persen	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7	7. 2. Program Hubungan Industrial	1. Menurunnya Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	28	25	20	18	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa
			10. Jumlah tenaga kerja industri	Juta Orang	19,7	20,3	20,9	21,4	22,0								
			11. Jumlah tenaga kerja pariwisata	Juta Orang	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			12. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	Juta Orang	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0	8. 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Rata-Rata Lamanya Tamu Menginap	Hari	2	3	3	3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
										8. 2. Program Pemasaran Pariwisata	1. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	Persen	1,75	1,72	1,69	1,66	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
14.	PN	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	1. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa	Persen	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	8. 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1. Pertumbuhan sektor wisata	Persen	2	2	2	2	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
			2. Neraca perdagangan barang	USD miliar	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0								
			3. Nilai devisa pariwisata	USD miliar	21,0	23,0	25,0	27,5	30,0	9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
										9. 1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,38	4,39	4,51	4,63	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
15.	PN	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	Persen	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4								
			2. Biaya logistik terhadap PDB	Persen	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0	10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
			3. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)	Peringkat	N.A	34-39	N.A	29-34	N.A	10. 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase Pertumbuhan Investasi	Persen	1,12	3,7	3,57	3,45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
										10. 2. Program Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah Perizinan Berusaha dengan Investasi di atas 5 Milyar	Investor	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
16.	PN	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	1. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	Persen	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	10. 3. Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks	84,5	85	85,5	86	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
			2. Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University							10. 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Persen	1,12	3,7	3,57	3,45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a. Top 200	PT	-	-	-	-	1	10. 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Tingkat Implementasi Informasi Penanaman Modal Melalui Sistem	Persen	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
			b. Top 300	PT	1	1	1	1	2								
			c. Top 500	PT	2	2	2	2	3	11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
			3. Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi	Persen	43,0	45,0	47,0	48,0	50,0	11. 1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	4,21	4,34	4,38	4,47	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
										11. 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Laju Indeks Implisit PDRB	Persen	2,95	2,8	2,85	2,75	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
										11. 3. Program Pengembangan Ekspor	1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	Persen	5	5	5	5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
										11. 4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1. Persentase Masyarakat/Penduduk yang Terlindungi dari Dampak Negatif Pemakaian Barang dan Jasa	Persen	95,15	95,25	95,35	95,5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
										11. 5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1. Penggunaan dan Kontribusi Produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional	Persen	94	94	94	94	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
17.	PN	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	230,0	217,0	205,0	194,0	183,0	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
			2. Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	20,6	19,5	18,6	17,6	16,0	1. 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan Wilayah Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Angka kematian neonatal	per 1.000 kelahiran hidup	12,9	12,2	11,6	11,0	10,0	1. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. SDM Kesehatan yang Tersertifikasi	Persen	94	95	96	97	Dinas Kesehatan Kota Langsa
			4. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	Nilai	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	1. 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Tingkat Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai	Persen	95	96	97	98	Dinas Kesehatan Kota Langsa
			5. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	1. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Cakupan Pelaksanaan Germas	Persen	60	70	80	90	Dinas Kesehatan Kota Langsa
			6. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	kelahiran hidup per 1.000 perempuan	25,0	24,0	21,0	20,0	18,0								
			7. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0								
			8. Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Persen	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0								
			9. Insidensi HIV	per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2								
			10. Insidensi tuberkulosis	per 100.000 penduduk	272,0	252,0	231,0	211,0	190,0								
			11. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kab/Kota	325,0	345,0	365,0	385,0	405,0								
			12. Insidensi hepatitis B	Persen	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09								
			13. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Persen	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7								
			14. Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Persen	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8								
			15. Persentase tekanan darah tinggi	Persen	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1								
			16. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Persen	65,0	70,0	80,0	90,0	100,0								

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			17. Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0								
18.	PN	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1. Nilai rata-rata hasil PISA							1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
			a. Membaca	Nilai	N.A	399,1	N.A	N.A	399,7	1. 1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,32	11,42	11,52	11,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
			b. Matematika	Nilai	N.A	388,7	N.A	N.A	392,3	1. 2. Program Pengembangan Kurikulum	1. Tingkat Implementasi Kurikulum Dalam Sistem Belajar	Persen	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
			c. Sains	Nilai	N.A	400,4	N.A	N.A	406,2	1. 3. Program Pendidikan Dayah	1. Peran Serta Dayah Dalam Pendidikan Islam	Dayah	100	100	100	100	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa
			2. Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA							1. 4. Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	1. Saran MPD yang dijadikan Kebijakan daerah	Persen	15	15	20	20	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa
			a. Membaca	Persen	N.A	34,4	N.A	N.A	35,6								
			b. Matematika	Persen	N.A	46,6	N.A	N.A	47,4								
			c. Sains	Persen	N.A	49	N.A	N.A	51								
			3. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Tahun	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16								
			3. Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas	Tahun	13,41	13,60	13,79	13,97	14,16								
19.	PN	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda	1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,34	68,10	69,87	71,66	73,49	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
			2. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Persen	Laki-laki : 61,7 ; Perempuan : 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	1. 1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Sudah(1)/ Belum(0)	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,21165	91,27794	91,27896	91,33470	91,38627	1. 2. Program Perlindungan Perempuan	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Rasio	0,048	0,046	0,045	0,044	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
			4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,24481017	73,50050042	73,74051922	73,96592027	74,17747551	1. 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
			5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	52,512	53,134	53,756	54,378	55,000	1. 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	Persen	55	55	65	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
			6. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Persen	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	1. 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nilai	650	650	750	750	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
			7. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	55,33	56,50	56,50	58,17	57,67	1. 6. Program Perlindungan Khusus Anak	1. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Persen	3,52	3,5	3	2,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
										2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
										2. 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persen	60	65	70	75	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
										2. 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	14	15	17	19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										2. 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1. Aktualisasi Program Kerja Organisasi Kepramukaan	Persen	30	35	40	45	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
20.	PN	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	1. N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
										1. 1. Program Penataan Desa	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Efektif	Gampong	66	66	66	66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
21.	PN	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	1. N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	1. 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
										1. 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1. Partisipasi dan Pelayanan Penyelenggaraan Masyarakat Desa	Persen	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
22.	PN	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A								
										2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
23.	PN	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	1. N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	2. 1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1. Meningkatnya Nilai-nilai Patriotisme Masyarakat	Persen	75	80	85	90	Dinas Sosial Kota Langsa
										3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										3. 1. Program Majelis Adat Aceh (MAA)	1. Implementasi Penyelenggaraan Adat Istiadat	Persen	30	35	40	45	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa
										3. 2. Program Pengembangan Kebudayaan	1. Meningkatnya Aktivitas dan Kreativitas Masyarakat Dalam Pengembangan Adat dan Budaya	Aktivitas	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
										3. 3. Program Pembinaan Sejarah	1. Tingkat Pemahaman Sejarah	Persen	30	35	40	45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
										3. 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Terkelolanya Cagar Budaya di Daerah	Persen	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
										3. 5. Program Pengelolaan Permuseuman	1. Jumlah Kunjungan Museum	Kunjungan	5000	6000	7000	8000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
										4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
										4. 1. Program Pembinaan Perpustakaan	1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Kunjungan	11500	13000	14500	16000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
										5. KECAMATAN							
										5. 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Kota
										5. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Barat
										5. 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Timur
										5. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Lama
										5. 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Baro

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										6. KEKHUSUSAN ACEH							
										6. 1. Program Syariat Islam Aceh	1. Persentase pelanggaran Qanun Syariat Islam yang	Persen	100	100	100	100	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa
										6. 2. Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	1. Eksistensi Peran Ulama Dalam Pembangunan Daerah	Gampong	66	66	66	66	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa
										7. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
										7. 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1. Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	85	85	85	85	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
24.	PN	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Global Fire Power Index	Indeks	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
			2. Global Terorism Index	Indeks	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24	1. 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Pelanggaran	100	150	200	250	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa
			3. Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	Persen	>55	>55	>55	>60	>60								
			4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	Indeks	3,10	3,20	3,20	3,30	3,40	2. KECAMATAN							
										2. 1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Kota
25.	PN	Konsolidasi Demokrasi	1. N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	2. 2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Barat
										2. 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Timur

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26.	PN	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	Indeks	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67	2. 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilavah	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Lama
										2. 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah	Persen	100	100	100	100	Kecamatan Langsa Baro
27.	PN	Penegakan Hukum Nasional	1. Indeks Pembangunan Hukum	Indeks	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73								
										3. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
										3. 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Pengamalan Pancasila dalam Masyarakat	Gampong	66	66	66	66	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
										3. 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA	Persen	80	80	80	80	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
										3. 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	Persen	50	55	60	65	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
										3. 4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
28.	PN	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
			2. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	1. 1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1. Cakupan Pengelolaan Sampah	Persen	81	82	83	84	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
			3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50								

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	Indeks	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50	2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
										2. 1. Program Penanggulangan Bencana	1. Cakupan Penanggulangan Kejadian Bencana Alam	Persen	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
29.	PN	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	1. Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	Persen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	2. 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Cakupan Penanggulangan Kejadian Bencana Kebakatan dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
			2. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Persen	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15								
			3. Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	Menit	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
										3. 1. Program Penanganan Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang	Persen	75	80	85	90	Dinas Sosial Kota Langsa
30.	PN	Pembangunan Rendah Karbon	1. Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi	Persen	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2								
			2. Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan	Persen	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
			3. Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah	Persen	8,5	9,0	9,3	9,4	9,4	4. 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	73	75	77	79	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
			4. Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU	Persen	2,0	2,3	2,5	2,6	2,9	4. 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Penurunan Beban Pencemaran	Persen	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			5. Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan	Persen	6,5	6,6	6,8	7,0	7,3	4. 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Tingkat Kepedulian Stakeholder dalam Upaya Pelestarian Kehati	Persen	26	26	26	26	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
										4. 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Penanggulangan Pencemaran B3	Persen	30	30	30	30	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
										4. 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Tingkat Ketaatan Kegiatan Usaha Terhadap Regulasi	Persen	26	27	27,5	28	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
										4. 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Desa Berbudaya Lingkungan Hidup	Gampong	13	13	13	14	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
										4. 7. Program Pengelolaan Persampahan	1. Persentase Penanganan Sampah	Persen	81	82	83	84	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
31.	PN	Transformasi Digital	1. Persentase pertumbuhan sektor TIK	Persen	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
			2. Persentase pengguna internet	Persen	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3	1. 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik	1. Akses Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
			3. Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	Persen	97,5	98,0	98,5	99,0	100,0	1. 2. Program Aplikasi Informatika	1. Implementasi E-Government	Persen	50	55	60	65	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
			4. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen	70,0	72,0	73,0	74,0	75,7								
										2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
										2. 1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Jaminan Keamanan Informasi Berklasifikasi	Persen	77	79	81	83	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32.	PN	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	1. Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas	Persen	70	75	80	85	85	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
			2. PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas	Persen	50	60	70	80	85	1. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	3	3	4	4	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa
			3. Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas	Persen	30	35	45	55	70	1. 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
										2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
										2. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Kesehatan Kota Langsa
										3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
										3. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
										4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
										4. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
										4. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
										5. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5	5	Dinas Sosial Kota Langsa
										6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
										6. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa
										7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
										7. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	5	5	5	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
										8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
										8. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
										9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
										9. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Pertanahan Kota Langsa
										10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										10. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
										11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
										11. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
										12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
										12. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
										13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
										13. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Perhubungan Kota Langsa
										14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
										14. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
										15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										15. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
										16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
										16. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
										17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
										17. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
										18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
										18. 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data Statistik Sektoral Daerah yang Dapat Diakses	Persen	5	7	10	17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
										19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
										19. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa
										20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
										20. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
										21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										21. 1. Program Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Persen	25	27	30	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
										22. SEKRETARIAT DAERAH							
										22. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Sekretariat Daerah Kota Langsa
										23. SEKRETARIAT DPRD							
										23. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Sekretariat DPR Kota Langsa
										23. 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100	Sekretariat DPR Kota Langsa
										24. PERENCANAAN							
										24. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	5	5	5	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
										24. 2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
										24. 3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Implementasi Program Prioritas Pembangunan	Persen	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
										25. KEUANGAN							
										25. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5	5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
										25. 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Daya Serap APBD	Persen	99	99	99	99	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
										25. 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Tingkat Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persen	95	95	95	95	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
										25. 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persen	5	5	5	5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										26. KEPEGAWAIAN							
										26. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5	5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
										26. 2. Program Kepegawaian Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan ASN Daerah	Nilai Indeks	85	90	95	98	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
										27. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
										27. 1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	50	60	70	80	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
										28. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
										28. 1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan	Persen	78	81	83	85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
										29. INSPEKTORAT DAERAH							
										29. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5	5	Inspektorat Kota Langsa
										29. 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Capaian Program Pengawasan	Persen	100	100	100	100	Inspektorat Kota Langsa
										29. 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Fasilitasi Desain Kebijakan, Pendampinan dan Asistensi Pengawasan	Persen	100	100	100	100	Inspektorat Kota Langsa
										30. KECAMATAN							
										30. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Kecamatan Langsa Kota
										30. 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Kecamatan Langsa Barat

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024									RPD KOTA LANGSA TAHUN 2023-2026							
	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				OPD
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										30. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Kecamatan Langsa Timur
										30. 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Kecamatan Langsa Lama
										30. 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Kecamatan Langsa Baro
										31. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
										31. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
										32. KEKHUSUSAN ACEH							
										32. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa
										32. 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa
										32. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4	4	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan pendekatan komprehensif dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan perumusan strategi dan arah kebijakan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Gambar 6.1.
Proses Perumusan Strategi dan Kebijakan Pembangunan

Tabel VI.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Langsa Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Implementasi Syariat Islam serta Lestarinya Adat dan Budaya	1. 1. Meningkatnya Kelestarian Nilai-nilai Budaya	1. 1. 1. Menjaga dan Menumbuh kembangkan Identitas Adat Istiadat Daerah	1. 1. 1. 1. Penyediaan Perlengkapan serta Pelestarian Adat dan Istiadat Daerah
		1. 1. 2. Mengidentifikasi dan Analisis Budaya Asli Daerah	1. 1. 2. 1. Perlindungan dan Penerapan Budaya Aslli Daerah
		1. 1. 3. Mengidentifikasi dan Analisis Sejarah Daerah	1. 1. 3. 1. Perlindungan dan Penyebarluasan Sejarah Daerah
		1. 1. 4. Mengidentifikasi dan Analisis Situs Cagar Budaya Daerah	1. 1. 4. 1. Pelestarian dan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Daerah
		1. 1. 5. Mengidentifikasi dan Analisis Benda-Benda Bersejarah Daerah	1. 1. 5. 1. Pelestarian dan Pengelolaan Benda-Benda Bersejarah Daerah
	1. 2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Islami	1. 2. 1. Melibatkan Partisipasi Dayah Dalam Pembangunan	1. 2. 1. 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah
		1. 2. 2. Menumbuhkembangkan Kesadaran Dalam Pelaksanaan Syariat Islam	1. 2. 2. 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah Serta Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Syariat
		1. 2. 3. Melibatkan Partisipasi Ulama Dalam Pembangunan	1. 2. 3. 1. Dukungan Peningkatan Sumberdaya Ulama
2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Daerah	2. 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Peserta Didik	2. 1. 1. Mempermudah Akses Pendidikan Bagi Masyarakat	2. 1. 1. 1. Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Operasional Pendidikan
		2. 1. 2. Meningkatkan Pemahaman Materi Pendidikan	2. 1. 2. 1. Penyusunan Kompetensi Pendidikan
		2. 1. 3. Meningkatkan Koordinasi Dewan Pendidikan	2. 1. 3. 1. Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	3. 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	3. 1. 1. Mempermudah Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat	3. 1. 1. 1. Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Operasional Kesehatan
		3. 1. 2. Membentuk Profesionalisme Pelayanan Kesehatan	3. 1. 2. 1. Peningkatan SDM Pelayanan Kesehatan
		3. 1. 3. Menjamin Kualitas Farmasi, Alat Kesehatan dan Konsumsi Masyarakat	3. 1. 3. 1. Penerbitan Izin dan Pengawasan Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Konsumsi Masyarakat
		3. 1. 4. Menyebarluaskan Informasi Pola Hidup Sehat	3. 1. 4. 1. Peningkatan Upaya dan Promosi Kesehatan Masyarakat
4. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Menurunnya Angka Kemiskinan Melalui Peningkatan Infrastuktur dan Potensi Daerah	4. 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	4. 1. 1. Meminimalisir Hambatan Transportasi Darat	4. 1. 1. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	4. 2. Meningkatnya Kualitas Prasarana Perhubungan	4. 2. 1. Meningkatkan Keamanaan dan Kedisiplinan Pengguna Transportasi Darat	4. 2. 1. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
		4. 2. 2. Meminimalisir Hambatan Transportasi Laut	4. 2. 2. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perhubungan Laut
	4. 3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	4. 3. 1. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Air Limbah Perumahan dan Permukiman	4. 3. 1. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Sistem Air Limbah
		4. 3. 2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman	4. 3. 2. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Permukiman
		4. 3. 3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahaan	4. 3. 3. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perumahan
		4. 3. 4. Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana Fasilitas Umum Perumahan dan Permukiman	4. 3. 4. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Fasilitas Umum

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
	4. 4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bangunan Gedung	4. 4. 1. Meningkatkan Pengawasan Bangunan Gedung	4. 4. 1. 1. Pendataan dan Penerbitan Izin Bangunan Gedung
		4. 4. 2. Meningkatkan Kualitas Gedung Lembaga Pelayanan Publik	4. 4. 2. 1. Dukungan Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Lembaga Pelayanan Publik
	4. 5. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	4. 5. 1. Meningkatkan Harmonisasi Pemanfaatan Ruang	4. 5. 1. 1. Penyusunan Rencana Penataan Ruang
		4. 5. 2. Meningkatkan Ketersediaan Tanah Untuk Kegiatan Pembangunan	4. 5. 2. 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
	4. 6. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	4. 6. 1. Meningkatkan Ketersediaan dan Pengendalian Air Baku	4. 6. 1. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air
		4. 6. 2. Meningkatkan Kualitas serta Ketersediaan Air Bersih dan Air Minum	4. 6. 2. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum
		4. 6. 3. Meningkatkan Pengendalian Massa Air Berlebih	4. 6. 3. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Drainase
	4. 7. Meningkatnya Produksi Perikanan	4. 7. 1. Meningkatkan Kapasitas Produksi Perikanan Tangkap	4. 7. 1. 1. Penyediaan Dukungan Sumber Daya Perikanan Tangkap
		4. 7. 2. Meningkatkan Kapasitas Produksi Perikanan Budidaya	4. 7. 2. 1. Penyediaan Dukungan Sumber Daya Perikanan Budidaya
		4. 7. 3. Meningkatkan Minat Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4. 7. 3. 1. Sosialisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	4. 8. Meningkatnya Produksi Pertanian	4. 8. 1. Meningkatkan Kapasitas Produksi Pertanian	4. 8. 1. 1. Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pertanian
		4. 8. 2. Menjamin Kesehatan Hewan Peliharaan dan Konsumsi	4. 8. 1. 2. Pengawasan Hewan Peliharaan dan Konsumsi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
	4. 9. Meningkatnya Kualitas Pangan di Daerah	4. 9. 1. Meningkatkan Subtitusi Kebutuhaan Pangan	4. 9. 1. 1. Penyediaan Dukungan Sumber Daya Kemandirian Pangan
		4. 9. 2. Menyebarluaskan Informasi Harga dan Neraca Bahan Pangan	4. 9. 2. 1. Penyusunan Informasi Harga dan Neraca Bahan Pangan
		4. 9. 3. Peninjauan dan Analisis Ketahanan Pangan	4. 9. 3. 1. Penyediaan Analisis Ketahanan Pangan
	4. 10. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	4. 10. 1. Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata	4. 10. 1. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Destinasi Wisata
		4. 10. 2. Melibatkan Partisipasi Media dan Influencer Daerah	4. 10. 2. 1. Penyebarluasan Informasi Pariwisata Daerah
		4. 10. 3. Peninjauan dan Analisis Potensi Wisata dan Ekonomi Kreatif	4. 10. 3. 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	4. 11. Menurunnnya Disparitas Kemiskinan	4. 11. 1. Meningkatkan Keterlibatan dan Kualitas Pekerja serta Lembaga Sosial	4. 11. 1. 1. Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
		4. 11. 2. Memulihkan Harkat dan Martabat Penyandang Masalah Sosial	4. 11. 2. 1. Penyediaan Dukungan Rehabilitasi Sosial
		4. 11. 3. Meminimalisir Kerentanan Permasalahan Sosial	4. 11. 3. 1. Penyediaan Perlindungan dan Jaminan Sosial
		4. 11. 4. Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja	4. 11. 4. 1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
		4. 11. 5. Meminimalisir Potensi Permasalahan Ketenagakerjaan	4. 11. 5. 1. Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja
		4. 11. 6. Meningkatkan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	4. 11. 6. 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		4. 11. 7. Meningkatkan Kontribusi Koperasi	4. 11. 7. 1. Pengembangan Potensi Koperasi
		4. 11. 8. Meningkatkan Kontribusi Usaha Mikro	4. 11. 8. 1. Pengembangan Usaha Mikro
		4. 11. 9. Meningkatkan Kontribusi Industri	4. 11. 9. 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Industri

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
		4. 11. 10. Meminimalisir Potensi Permasalahan dan Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat	4. 11. 10. 1. Penyelenggaraan Koordinasi Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
		4. 11. 11. Mengoptimalkan Pengelolaaan Potensi Sumber Daya Daerah	4. 11. 11. 1. Penyelengaraan Koordinasi Badan Usaha Pemerintah, Swasta dan Desa
		4. 11. 12. Menghimpun Zakat, Infaq dan Sedekah	4. 11. 12. 1. Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah
	4. 12. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	4. 12. 1. Menyederhanakan Birokrasi dan Meningkatkan kenyamanan dalam Proses Perizinan	4. 12. 1. 1. Penyediaan Regulasi Penanaman Modal Daerah
		4. 12. 2. Mendorong Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4. 12. 2. 1. Penyediaan Informasi Potensi Usaha Dalam Daerah
			4. 12. 2. 2. Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Perizinan
		4. 12. 3. Menjaga Keselarasan antara Kebijakan Dengan Pelaksanaan Penanaman Modal	4. 12. 3. 1. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
		4. 12. 4. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Penanaman Modal	4. 12. 4. 1. Penyediaan Database Informasi Penanaman Modal
		4. 12. 5. Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	4. 12. 5. 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
		4. 12. 6. Meningkatkan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Ketersediaan Barang Bersubsidi	4. 12. 6. 1. Pemantauan Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok serta Barang Bersubsidi
		4. 12. 7. Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk Unggulan Daerah yang Berorientasi Ekspor	4. 12. 7. 1. Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah
		4. 12. 8. Meningkatkan Pengendalian Kualitas Transaksi Jual Beli	4. 12. 8. 1. Penyediaan Alat Ukur dan Tera Ulang yang berkualitas
		4. 12. 9. Meningkatkan Konsumsi Produk Dalam Daerah	4. 12. 9. 1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
5. Terjaganya Perdamaian Serta Meningkatnya Kewaspadaan, Keamanan dan Ketertiban Umum	5. 1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5. 1. 1. Mewujudkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum	5. 1. 1. 1. Penegakan Regulasi dan Qanun Daerah
			5. 1. 1. 2. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
		5. 1. 2. Penyelesaian Isu-Isu Strategis Tingkat Kecamatan	5. 1. 2. 1. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan
		5. 1. 3. Meningkatkan Kesadaran Dalam Rangka Memelihara dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5. 1. 3. 1. Pelestarian Taman Makam Pahlawan Daerah
	5. 2. Meningkatnya Nilai Demokrasi, Keutuhan Berbangsa dan Bernegara	5. 2. 1. Penyelesaian Isu-Isu Strategis Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	5. 2. 1. 1. Fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		5. 2. 2. Penyelesaian Isu-Isu Strategis Demokrasi dan Politik	5. 2. 2. 1. Fasilitasi Penguatan Demokrasi dan Etika Berpolitik
		5. 2. 3. Membentuk Profesionalisme Organisasi Masyarakat	5. 2. 3. 1. Penatalaksanaan Organisasi Masyarakat
		5. 2. 4. Penyelesaian Isu-Isu Strategis Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	5. 2. 4. 1. Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		5. 2. 5. Penyelesaian Isu-Isu Strategis Ancaman Nasionalisme dan Konflik Sosial	5. 2. 5. 1. Fasilitasi Penguatan Kewaspadaan dan Penanganan Konfilik Sosial
	5. 3. Meningkatnya Penanggulangan Bencana	5. 3. 1. Meningkatkan Kualitas Penanganan dan Penanggulangan Bencana	5. 3. 1. 1. Penyediaan Sumber Daya Penanganan dan Penanggulangan Bencana
6. Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	6. 1. Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Daerah	6. 1. 1. Mendorong Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan	6. 1. 1. 1. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kepemudaan
	6. 2. Meningkatnya Pembinaan Olahraga Daerah	6. 2. 1. Memperkuat Potensi Olahraga	6. 2. 1. 1. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Keolahragaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
7. Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	7. 1. Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau	7. 1. 1. Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup	7. 1. 1. 1. Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungaan Hidup
			7. 1. 1. 2. Evaluasi dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup
			7. 1. 1. 3. Pengendaliaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
			7. 1. 1. 4. Evaluasi dan Pengendalian Bahan Berbahaya
			7. 1. 1. 5. Evaluasi dan Pengendalian Perizinan Lingkungan Hidup
			7. 1. 1. 6. Pendampingan Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup
	7. 2. Meningkatnya Penanganan Sampah	7. 2. 1. Optimalisasi Pengawasan Produksi Sampah	7. 2. 1. 1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
8. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana	8. 1. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	8. 1. 1. Optimalisasi Potensi dan Komunikasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	8. 1. 1. 1. Sosialisasi dan Advokasi Partisipasi Pemerempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		8. 1. 2. Optimalisasi Pengawasan Tindak Kekerasaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan	8. 1. 2. 1. Aksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
		8. 1. 3. Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Keluarga	8. 1. 3. 1. Fasillitasi Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga
		8. 1. 4. Optimalisasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak	8. 1. 4. 1. Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak
		8. 1. 5. Optimalisasi Sumber Daya Lembaga Pemberdayaan Perempuan, anak dan Keluarga	8. 1. 5. 1. Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan, anak dann Keluarga
		8. 1. 6. Optimalisasi Pengawasan Tindak Kekerasaan dan Perlindungan Terhadap Anak	8. 1. 6. 1. Aksi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
	8. 2. Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	8. 2. 1. Optimalisasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana	8. 2. 1. 1. Upaya Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Berencana
		8. 2. 2. Penyelesaian Isu-Isu Strategis Kependudukan dan Keluarga Berencanaa	8. 2. 2. 1. Upaya Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Berencana
9. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	9. 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. 1. 1. Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	9. 1. 1. 1. Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
		9. 1. 2. Penatalaksanaan Pendaftaran Penduduk yang Berkualitas	9. 1. 2. 1. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		9. 1. 3. Penatalaksanaan Pencatatan Sipil yang Berkualitas	9. 1. 3. 1. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Pencatatan Sipil
		9. 1. 4. Penatalaksanaan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	9. 1. 4. 1. Penyediaan Sumber Daya Administrasi Kependudukan 9. 1. 4. 2. Penyediaan Informasi Profil Kependudukaan
		9. 1. 5. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Organisasi Perangkaat Daerah serta menjalin kemitraaan media massa	9. 1. 5. 1. Pelayanan Informasi Publik
		9. 1. 6. Penatalaksanaan Tekhnologi Informatika yang Berkualitas	9. 1. 6. 1. Penyediaan Dukungan Sumber Daya Teknologi Informatika
		9. 1. 7. Penatalaksanaan Informasi Data Statistik yang Berkualitas	9. 1. 7. 1. Penyediaan Informasi Data Statistik
		9. 1. 8. Penatalaksanaan Pengamananan Komunikasi Data dan Informasi yang Berkualitas	9. 1. 8. 1. Penyediaan Sumber Daya Pengamanan Komunikasi Data dan Informasi
		9. 1. 9. Meningkatkan Minat Budaya Baca	9. 1. 9. 1. Penyediaan Sarana, Prasarana Perpustakaan
		9. 1. 10. Penatalaksanaan Arsip Daerah yang Berkualitas	9. 1. 10. 1. Penyediaan Sumber Daya Arsip Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
		9. 1. 11. Peninjauan Sumber Daya dan Isu Strategis Kebijakan Pembangunanan Daerah	9. 1. 11. 1. Analisis Kebijakan dan Potensi Pembangunan Daerah
		9. 1. 12. Penatalaksanaan Kepegawaian Daerah	9. 1. 12. 1. Penyediaan Sumber Daya Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Kepegawaian Daerah
		9. 1. 13. Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	9. 1. 13. 1. Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan Kecamataan
	9. 2. Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	9. 2. 1. Optimalisasi pengawasan internal Pemerintahan Daerah	9. 2. 1. 1. Pelaksanaan Review dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			9. 2. 1. 2. Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	9. 3. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	9. 3. 1. Penatalaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	9. 3. 1. 1. Penyediaan Sumber Daya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peembangunan Daerah
		9. 3. 2. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Organisasi Perangkat Daerah	9. 3. 2. 1. Evaluasi dan Pengendalian Target Perencanaan Pembangunan Daerah
	9. 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah	9. 4. 1. Penatalaksanaan Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Daerah yang Berkualitas	9. 4. 1. 1. Penyediaan Sumber Daya Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Daerah
		9. 4. 2. Penatalaksanaan Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Barang Milik Daerah yang Berkualitas	9. 4. 2. 1. Penyediaan Sumber Daya Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Barang Milik Daerah
		9. 4. 3. Penatalaksanaan Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang Berkualitas	9. 4. 3. 1. Penyediaan Sumber Daya Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	9. 5. Meningkatnya Kemandirian Desa	9. 5. 1. Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Desa	9. 5. 1. 1. Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan Desa

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan periode 2023-2026, serta sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan yang nantinya akan diselaraskan terhadap prioritas pembangunan tingkat provinsi maupun nasional.

Gambar 6.2.
Proses Perumusan Arah Kebijakan/Tema Pembangunan serta Prioritas Pembangunan

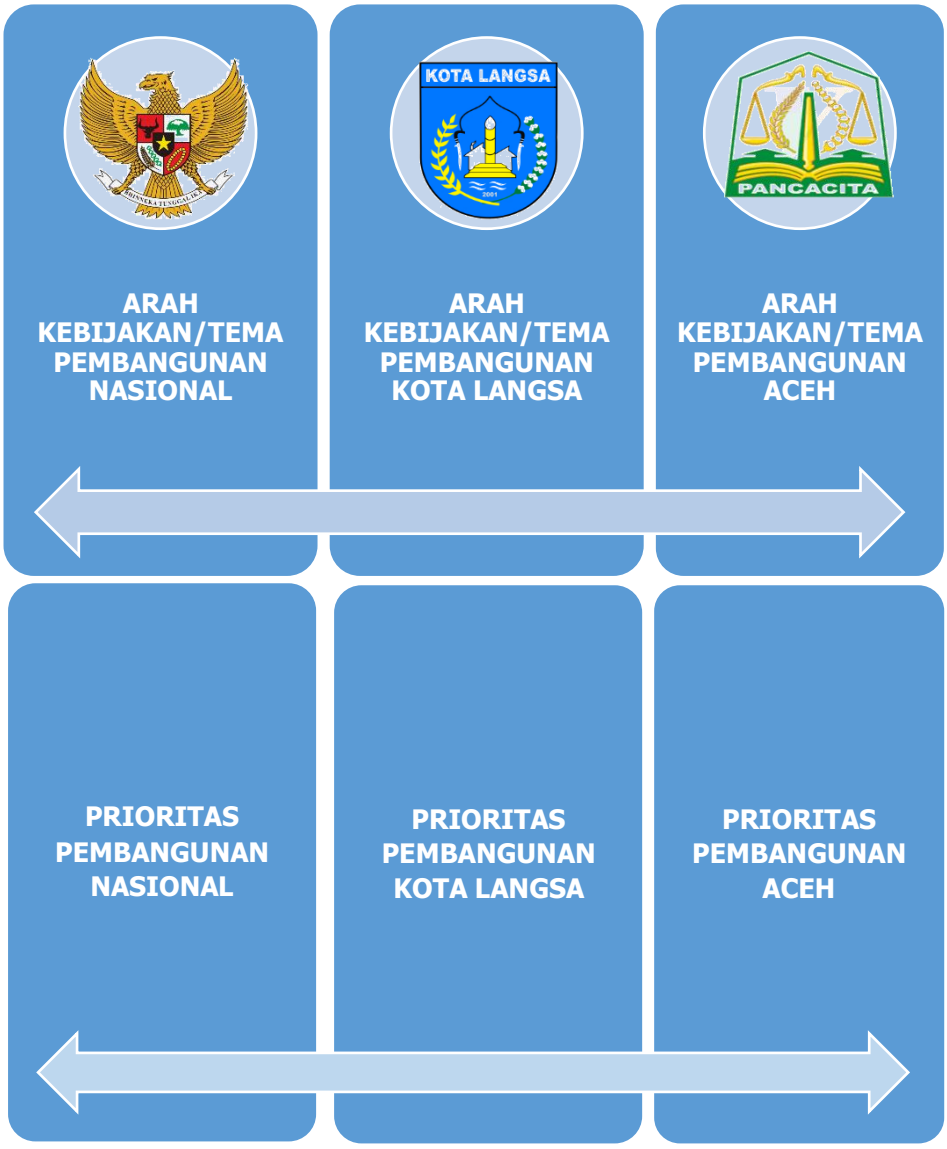

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Langsa Tahun 2023-2026

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4	5
ARAH KEBIJAKAN/ TEMA PEMBANGUNAN	**OPTIMALISASI POTENSI SUMBER DAYA DAERAH DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI**	**MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN MENYUKSESKAN AGENDA POLITIK**	**MEWUJUDKAN KOTA LANGSA SEBAGAI KOTA MANDIRI MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK UNGGULAN DAERAH**	**MENGURANGI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH MELALUI PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI**
PRIORITAS PEMBANGUNAN	1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Daerah 2. Sumberdaya Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Pembangunan Mental Berwawasan Kultural 4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan 5. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana	1. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan 2. Pembangunan Mental Berwawasan Kultural 3. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Daerah 4. Sumberdaya Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berdaya Saing 5. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana	1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Daerah 2. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan 3. Sumberdaya Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Pembangunan Mental Berwawasan Kultural 5. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana	1. Sumberdaya Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Daerah 3. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana 4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Keamanan 5. Pembangunan Mental Berwawasan Kultural

Lebih lanjut, untuk melihat keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program prioritas pembangunan Kota Langsa tahun 2023-2026, dapat disajikan sebagai berikut.

Gambar 6.3.
Proses Pemetaan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Serta Program Prioritas Pembangunan Kota Langsa Tahun 2023-2026

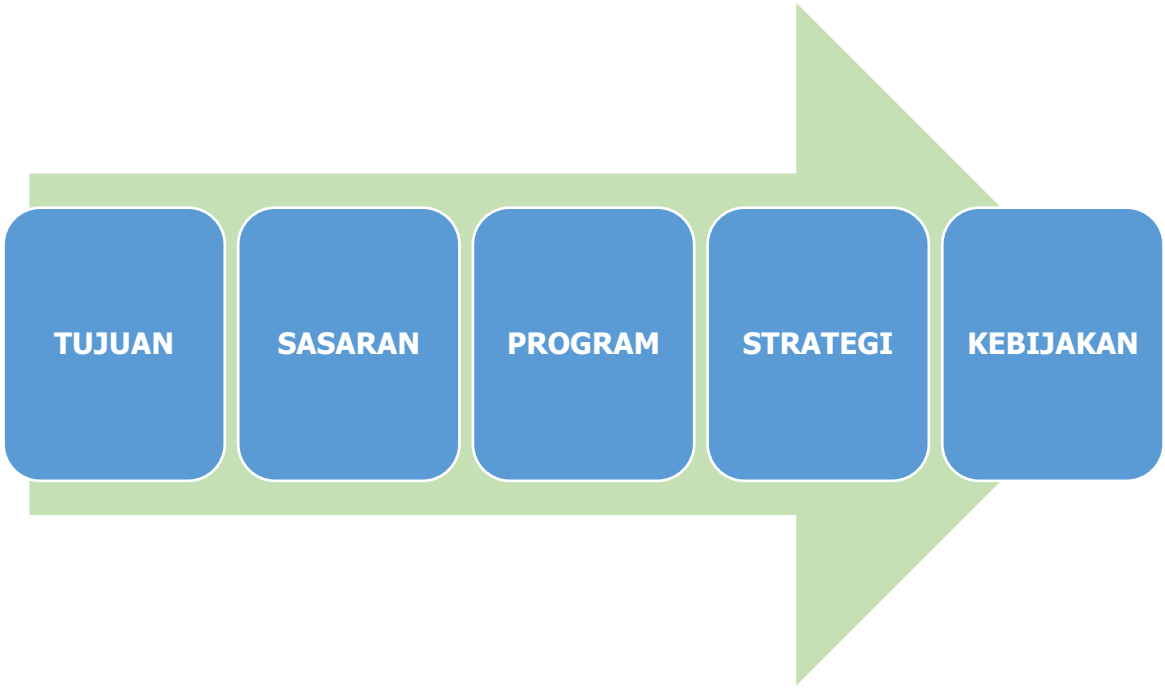

Tabel VI.3.
Program Pembangunan Kota Langsa yang Disertai Dengan Pagu Indikatif Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Implementasi Syariat Islam serta Lestarinya Adat dan Budaya**	**1. Tingkat Kelestarian Budaya**	**Persen**	**60,00**	**60,00**	**10.932.500.000**	**70,00**	**10.955.000.000**	**80,00**	**10.967.000.000**	**90,00**	**10.978.000.000**	**90,00**	**43.832.500.000**			
		2. Indeks Pembangunan Syariat Islam	**Indeks**	**60,00**	**60,00**		**67,00**		**69,00**		**71,00**		**71,00**				
	1. 1. Meningkatnya Kelestarian Nilai-nilai Budaya	**1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**	**Event**	**3**	**3**	**1.515.000.000**	**3**	**1.526.000.000**	**3**	**1.530.000.000**	**3**	**1.533.000.000**	**3**	**6.104.000.000**			
		2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	**Unit/ Objek**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**				
		3. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	**Unit/ Objek**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**				
		4. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	**Jumlah**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**				
	1. 1. 1. Program Majelis Adat Aceh (MAA)	1. Implementasi Penyelenggaraan Adat Istiadat Daerah	Persen	28,00	30,00	300.000.000	35,00	301.000.000	40,00	302.000.000	45,00	303.000.000	45,00	1.206.000.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	Menjaga dan Menumbuh kembangkan Identitas Adat Istiadat Daerah	Penyediaan Perlengkapan serta Pelestarian Adat dan Istiadat Daerah
	1. 1. 2. Program Pengembangan Kebudayaan	1. Meningkatnya Aktivitas dan Kreativitas Masyarakat Dalam Pengembangan Adat dan Budaya	Aktivitas	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	Mengidentifikasi dan Analisis Budaya Asli Daerah	Perlindungan dan Penerapan Budaya Aslli Daerah
	1. 1. 3. Program Pembinaan Sejarah	1. Tingkat Pemahaman Sejarah Masyarakat	Persen	25,00	30,00	65.000.000	35,00	65.000.000	40,00	65.000.000	45,00	65.000.000	45,00	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	Mengidentifikasi dan Analisis Sejarah Daerah	Perlindungan dan Penyebarluasan Sejarah Daerah
	1. 1. 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Terkelolanya Cagar Budaya di Daerah	Persen	100,00	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	Mengidentifikasi dan Analisis Situs Cagar Budaya Daerah	Pelestarian dan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Daerah
	1. 1. 5. Program Pengelolaan Permuseuman	1. Jumlah Kunjungan Museum	Kunjungan	4.800	5.000	700.000.000	6.000	710.000.000	7.000	713.000.000	8.000	715.000.000	26.000	2.838.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	Mengidentifikasi dan Analisis Benda-Benda Bersejarah Daerah	Pelestarian dan Pengelolaan Benda-Benda Bersejarah Daerah
	1. 2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Islami	**1. Indeks Pembangunan Syariat Islam**	**Indeks**	**60,00**	**60,00**	**9.417.500.000**	**67,00**	**9.429.000.000**	**69,00**	**9.437.000.000**	**71,00**	**9.445.000.000**	**71,00**	**37.728.500.000**			
	1. 2. 1. Program Pendidikan Dayah	1. Peran Serta Dayah Dalam Pendidikan Islam	Dayah	100	100	2.250.000.000	100	2.250.000.000	100	2.250.000.000	100	2.250.000.000	100	9.000.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	Melibatkan Partisipasi Dayah Dalam Pembangunan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah
	1. 2. 2. Program Syariat Islam Aceh	1. Persentase pelanggaran Qanun Syariat Islam yang diselesaikan	Persen	100	100	6.920.000.000	100	6.923.000.000	100	6.926.000.000	100	6.929.000.000	100	27.698.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	Menumbuhkembangkan Kesadaran Dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah Serta Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Syariat

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1. 2. 3. Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	1. Eksistensi Peran Ulama Dalam Pembangunan Daerah	Gampong	66	66	247.500.000	66	256.000.000	66	261.000.000	66	266.000.000	66	1.030.500.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	Melibatkan Partisipasi Ulama Dalam Pembangunan	Dukungan Peningkatan Sumberdaya Ulama
2.	**Meningkatnya Mutu Pendidikan Daerah**	**1. Harapan Lama Sekolah**	**Tahun**	**15,68**	**15,73**	**53.695.237.332**	**15,78**	**57.698.455.000**	**15,83**	**61.791.455.000**	**15,88**	**67.195.005.000**	**15,88**	**240.380.152.332**			
	2. 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Peserta Didik	**1. Angka Kelulusan Sekolah**	**Persen**	**100**	**100**	**53.695.237.332**	**100**	**57.698.455.000**	**100**	**61.791.455.000**	**100**	**67.195.005.000**	**100**	**240.380.152.332**			
	2. 1. 1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,22	11,32	53.545.237.332	11,42	57.547.455.000	11,52	61.639.455.000	11,62	67.042.005.000	11,62	239.774.152.332	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	Mempermudah Akses Pendidikan Bagi Masyarakat	Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Operasional Pendidikan
	2. 1. 2. Program Pengembangan Kurikulum	1. Tingkat Implementasi Kurikulum Dalam Sistem Belajar Mengajar Sesuai Standar	Persen	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	Meningkatkan Pemahaman Materi Pendidikan	Penyusunan Kompetensi Pendidikan
	2. 1. 3. Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	1. Saran MPD yang dijadikan Kebijakan daerah	Persen	10,00	15,00	50.000.000	15,00	51.000.000	20,00	52.000.000	20,00	53.000.000	20,00	206.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	Meningkatkan Koordinasi Dewan Pendidikan	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan
3.	**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**	**1. Usia Harapan Hidup**	**Tahun**	**69,52**	**69,62**	**125.646.961.703**	**69,71**	**127.689.298.735**	**69,8**	**130.694.298.735**	**69,89**	**133.894.298.735**	**69,89**	**517.924.857.908**			
	3. 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	**1. Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan**	**Per 100.000 Kelahiran Hidup**	**250**	**200**	**125.646.961.703**	**175**	**127.689.298.735**	**150**	**130.694.298.735**	**125**	**133.894.298.735**	**125**	**517.924.857.908**			
		2. Angka Kematian Bayi	**Per 1.000 Kelahiran Hidup**	**8**	**7**		**6**		**5**		**4**		**4**					
		3. Persentase Balita Gizi Buruk yang Ditangani	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**					
	3. 1. 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan Wilayah Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	124.734.551.803	100	126.773.298.735	100	129.775.298.735	100	132.973.298.735	100	514.256.448.008	Dinas Kesehatan Kota Langsa	Mempermudah Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Operasional Kesehatan
	3. 1. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. SDM Kesehatan yang Tersertifikasi	Persen	93,00	94,00	350.000.000	95,00	350.000.000	96,00	350.000.000	97,00	350.000.000	97,00	1.400.000.000	Dinas Kesehatan Kota Langsa	Membentuk Profesionalisme Pelayanan Kesehatan	Peningkatan SDM Pelayanan Kesehatan
	3. 1. 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Tingkat Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar Kesehatan	Persen	95,00	95,00	456.876.000	96,00	460.000.000	97,00	463.000.000	98,00	465.000.000	98,00	1.844.876.000	Dinas Kesehatan Kota Langsa	Menjamin Kualitas Farmasi, Alat Kesehatan dan Konsumsi Masyarakat	Penerbitan Izin dan Pengawasan Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Konsumsi Masyarakat
	3. 1. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Cakupan Pelaksanaan Germas	Persen	59,00	60,00	105.533.900	70,00	106.000.000	80,00	106.000.000	90,00	106.000.000	90,00	423.533.900	Dinas Kesehatan Kota Langsa	Menyebarluaskan Informasi Pola Hidup Sehat	Peningkatan Upaya dan Promosi Kesehatan Masyarakat

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Menurunnya Angka Kemiskinan Melalui Peningkatan Infrastuktur dan Potensi Daerah**	**1. Pertumbuhan PDRB**	**Persen**	**4,21**	**4,34**	**65.666.884.767**	**4,38**	**69.502.071.907**	**4,47**	**70.791.147.432**	**4,53**	**71.238.002.685**	**4,53**	**277.198.106.791**			
		2. Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**10,00**	**9,50**		**9,00**		**8,50**		**8,50**		**8,50**				
		3. Indeks Gini	**Indeks**	**0,338**	**0,335**		**0,334**		**0,333**		**0,332**		**0,332**				
		4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**Indeks**	**77,50**	**77,60**		**77,72**		**77,84**		**77,90**		**77,90**				
	4. 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	**1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**	**Rasio**	**0,80**	**0,81**	**12.275.000.000**	**0,82**	**13.057.371.907**	**0,83**	**13.031.447.432**	**0,84**	**12.775.000.000**	**0,84**	**51.138.819.339**			
	4. 1. 1. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	527	535	12.275.000.000	542	13.057.371.907	551	13.031.447.432	559	12.775.000.000	559	51.138.819.339	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meminimalisir Hambatan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	4. 2. Meningkatnya Kualitas Prasarana Perhubungan	**1. Persentase Prasarana Transportasi Dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**58,00**	**60,00**	**1.100.000.000**	**65,00**	**1.102.000.000**	**70,00**	**1.104.000.000**	**75,00**	**1.106.000.000**	**75,00**	**4.412.000.000**			
	4. 2. 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Angka Kecelakaan Lalu Lintas	LAKA	100	95	550.000.000	90	551.000.000	85	552.000.000	80	553.000.000	80	2.206.000.000	Dinas Perhubungan Kota Langsa	Meningkatkan Keamanaan dan Kedisiplinan Pengguna Transportasi Darat	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
	4. 2. 2. Program Pengelolaan Pelayaran	1. Tertibnya Arus Lalu Lintas Pelayaran	Persen	100	100	550.000.000	100	551.000.000	100	552.000.000	100	553.000.000	100	2.206.000.000	Dinas Perhubungan Kota Langsa	Meminimalisir Hambatan Transportasi Laut	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perhubungan Laut
	4. 3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	**1. Persentase Rumah Layak Huni**	**Persen**	**74,00**	**79,00**	**9.990.000.000**	**84,00**	**10.125.000.000**	**89,00**	**10.125.000.000**	**94,00**	**10.125.000.000**	**94,00**	**40.365.000.000**			
	4. 3. 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	66,97	71,97	2.050.000.000	76,97	2.050.000.000	81,97	2.050.000.000	86,97	2.050.000.000	86,97	8.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Air Limbah Perumahan dan Permukiman	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Sistem Air Limbah
	4. 3. 2. Program Pengembangan Permukiman	1. Permukiman Perkotaan yang Layak Huni	Persen	78,00	83,00	2.030.000.000	88,00	2.030.000.000	93,00	2.030.000.000	98,00	2.030.000.000	98,00	8.120.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Permukiman
	4. 3. 3. Program Pengembangan Perumahan	1. Persentase Rumah Layak Huni	Persen	85,01	85,30	2.275.000.000	85,50	2.410.000.000	85,80	2.410.000.000	86,00	2.410.000.000	86,00	9.505.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perumahaan	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perumahan

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4. 3. 4. Program Kawasan Permukiman	1. Persentase Lingkungan Kumuh	Persen	11,64	11,00	2.550.000.000	10,50	2.550.000.000	10,00	2.550.000.000	9,50	2.550.000.000	9,50	10.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Permukiman
	4. 3. 5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Persentase Permukiman yang Mendapat Dukungan PSU	Persen	50,00	55,00	1.085.000.000	52,00	1.085.000.000	54,00	1.085.000.000	56,00	1.085.000.000	56,00	4.340.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana Fasilitas Umum Perumahan dan Permukiman	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Fasilitas Umum
	4. 4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Bangunan Gedung	**1. Persentase Infrastuktur Bangunan Gedung Pelayanan Publik Dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**75,00**	**75,00**	**1.585.000.000**	**80,00**	**1.585.000.000**	**85,00**	**1.585.000.000**	**90,00**	**1.585.000.000**	**90,00**	**6.340.000.000**			
	4. 4. 1. Program Penataan Bangunan Gedung	1. Persentase Penyelenggaraan Kualitas Bangunan Gedung	Persen	37,00	40,00	35.000.000	45,00	35.000.000	50,00	35.000.000	55,00	35.000.000	55,00	140.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meningkatkan Pengawasan Bangunan Gedung	Pendataan dan Penerbitan Izin Bangunan Gedung
	4. 4. 2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1. Persentase Terkendalinya Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persen	56,00	60,00	1.550.000.000	62,00	1.550.000.000	65,00	1.550.000.000	68,00	1.550.000.000	68,00	6.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas Gedung Lembaga Pelayanan Publik	Dukungan Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Lembaga Pelayanan Publik
	4. 5. Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	**1. Ketaatan Terhadap RTRW**	**Persen**	**95,00**	**96,00**	**275.000.000**	**97,00**	**275.000.000**	**98,00**	**275.000.000**	**99,00**	**275.000.000**	**99,00**	**1.100.000.000**			
	4. 5. 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Tingkat Kepatuhan IMB	Persen	99,00	99,00	225.000.000	99,00	225.000.000	99,00	225.000.000	99,00	225.000.000	99,00	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meningkatkan Harmonisasi Pemanfaatan Ruang	Penyusunan Rencana Penataan Ruang
	4. 5. 1. Program Penatagunaan Tanah	1. Cakupan Penatagunaan Tanah	Persen	55,00	56,00	50.000.000	60,00	50.000.000	64,00	50.000.000	69,00	50.000.000	69,00	200.000.000	Dinas Pertanahan Kota Langsa	Meningkatkan Ketersediaan Tanah Untuk Kegiatan Pembangunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
	4. 6. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	**1. Persentase Pelayanan Akses Air Bersih**	**Persen**	**55,00**	**55,00**	**14.550.000.000**	**60,00**	**17.050.000.000**	**65,00**	**18.050.000.000**	**70,00**	**18.272.302.685**	**70,00**	**67.922.302.685**			
		2. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	**Persen**	**60,00**	**60,00**		**61,00**		**62,00**		**63,00**		**63,00**				
		3. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	**Persen**	**50,00**	**50,00**		**53,00**		**55,00**		**57,00**		**57,00**				
		4. Persentase Titik Rawan Banjir	**Persen**	**45,00**	**45,00**		**40,00**		**35,00**		**30,00**		**30,00**				
	4. 6. 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	Persen	45,00	50,00	9.950.000.000	51,00	10.450.000.000	52,00	10.450.000.000	53,00	10.450.000.000	53,00	41.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meningkatkan Ketersediaan dan Pengendalian Air Baku	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4. 6. 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Persen	40,00	100	1.550.000.000	100	2.050.000.000	100	2.550.000.000	100	2.772.302.685	100	8.922.302.685	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas serta Ketersediaan Air Bersih dan Air Minum	Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum
	4. 6. 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Lancarnya Sistem Drainase Perkotaan	Persen	77,24	82,24	3.050.000.000	87,24	4.550.000.000	92,24	5.050.000.000	97,24	5.050.000.000	97,24	17.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Meningkatkan Pengendalian Massa Air Berlebih	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Drainase
	4. 7. Meningkatnya Produksi Perikanan	**1. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap**	**Persen**	**7,99**	**7,49**	**1.745.000.000**	**7,02**	**1.749.000.000**	**6,58**	**1.753.000.000**	**6,18**	**1.755.000.000**	**6,18**	**7.002.000.000**			
		2. Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	**Persen**	**4,20**	**7,84**		**7,18**		**5,13**		**8,05**		**8,05**				
	4. 7. 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	56.997	61.264	1.550.000.000	65.567	1.551.000.000	69.885	1.552.000.000	74.207	1.552.000.000	74.207	6.205.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Meningkatkan Kapasitas Produksi Perikanan Tangkap	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Perikanan Tangkap
	4. 7. 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	27.499	29.655	110.000.000	31.784	112.000.000	33.413	114.000.000	36.103	115.000.000	36.103	451.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Meningkatkan Kapasitas Produksi Perikanan Budidaya	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Perikanan Budidaya
	4. 7. 3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	22	23	85.000.000	23,5	86.000.000	24	87.000.000	24,5	88.000.000	24,5	346.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Meningkatkan Minat Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Sosialisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	4. 8. Meningkatnya Produksi Pertanian	**1. Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Holtikulura**	**Persen**	**25,00**	**29,00**	**1.758.448.000**	**32,00**	**1.762.000.000**	**36,00**	**1.766.000.000**	**37,00**	**1.770.000.000**	**37,00**	**7.056.448.000**			
		2. Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Palawija	**Persen**	**30,00**	**32,00**		**35,00**		**38,00**		**41,00**		**41,00**				
		3. Persentase Pertumbuhan Produksi Padi	**Persen**	**2,65**	**1,75**		**1,73**		**1,70**		**1,66**		**1,66**				
	4. 8. 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Produktivitas Pertanian/Perkebunan	Ton/Ha	2,89	2,9	734.950.000	2,91	737.000.000	2,92	739.000.000	2,93	741.000.000	2,93	2.951.950.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Meningkatkan Kapasitas Produksi Pertanian	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pertanian
	4. 8. 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan	Persen	0,35	0,35	888.498.000	0,34	889.000.000	0,34	890.000.000	0,34	891.000.000	0,34	3.558.498.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Meningkatkan Kapasitas Produksi Pertanian	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pertanian

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4. 8. 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Perlindungan Hewan dari Penyakit yang Mengancam Kelestarian Sumberdaya Hewan dan Lingkungan	Persen	20,00	30,00	100.000.000	40,00	100.000.000	45,00	100.000.000	50,00	100.000.000	50,00	400.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Menjamin Kesehatan Hewan Peliharaan dan Konsumsi	Pengawasan Hewan Peliharaan dan Konsumsi
	4. 8. 4. Program Penyuluhan Pertanian	1. Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kuhatanan dan Perikanan	Persen	4,10	4,10	35.000.000	4,10	36.000.000	4,10	37.000.000	4,10	38.000.000	4,10	146.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Meningkatkan Kapasitas Produksi Pertanian	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pertanian
	4. 9. Meningkatnya Kualitas Pangan di Daerah	**1. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	**Persen**	**95,00**	**95,00**	**996.300.000**	**95,00**	**1.001.700.000**	**95,00**	**1.007.700.000**	**95,00**	**1.013.700.000**	**95,00**	**4.019.400.000**			
	4. 9. 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1. Desa Mandiri Pangan	Gampong	5	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Meningkatkan Subtitusi Kebutuhaan Pangan	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Kemandirian Pangan
	4. 9. 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	84,4	86,5	746.300.000	88	751.000.000	88,5	756.000.000	90,5	761.000.000	90,5	3.014.300.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Menyebarluaskan Informasi Harga dan Neraca Bahan Pangan	Penyusunan Informasi Harga dan Neraca Bahan Pangan
	4. 9. 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Cakupan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	100	100	50.000.000	100	50.700.000	100	51.700.000	100	52.700.000	100	205.100.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Peninjauan dan Analisis Ketahanan Pangan	Penyediaan Analisis Ketahanan Pangan
	4. 10. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	**1. Kontribusi Katagori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB**	**Persen**	**2,87**	**3,02**	**2.250.000.000**	**3,20**	**2.253.000.000**	**3,38**	**2.256.000.000**	**3,58**	**2.256.000.000**	**3,58**	**9.015.000.000**			
	4. 10. 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Rata-Rata Lamanya Tamu Menginap	Hari	2	2	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	8.000.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Destinasi Wisata
	4. 10. 2. Program Pemasaran Pariwisata	1. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	Persen	0,64	1,75	150.000.000	1,72	151.000.000	1,69	152.000.000	1,66	152.000.000	1,66	605.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	Melibatkan Partisipasi Media dan Influencer Daerah	Penyebarluasan Informasi Pariwisata Daerah
	4. 10. 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1. Pertumbuhan sektor wisata	Persen	1,70	2,00	100.000.000	2,00	102.000.000	2,00	104.000.000	2,00	104.000.000	2,00	410.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	Peninjauan dan Analisis Potensi Wisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	4. 11. Menurunnnya Disparitas Kemiskinan	**1. Indeks Kedalaman Kemiskinan**	**Indeks**	**1,50**	**1,47**	**16.404.441.767**	**1,44**	**16.771.000.000**	**1,38**	**17.067.000.000**	**1,35**	**17.518.000.000**	**1,35**	**67.760.441.767**			
	4. 11. 1. Program Pemberdayaan Sosial	1. Pengawasan Dukungan Penanganan PMKS	Persen	100	100	95.000.000	100	98.000.000	100	101.000.000	100	104.000.000	100	398.000.000	Dinas Sosial Kota Langsa	Meningkatkan Keterlibatan dan Kualitas Pekerja serta Lembaga Sosial	Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4. 11. 2. Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase PMKS Yang Tertangani	Persentase	85,00	86,00	320.000.000	87,00	328.000.000	88,00	336.000.000	89,00	344.000.000	89,00	1.328.000.000	Dinas Sosial Kota Langsa	Memulihkan Harkat dan Martabat Penyandang Masalah Sosial	Penyediaan Dukungan Rehabilitasi Sosial
	4. 11. 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Meningkatnya Kemandirian Keluarga Miskin dan Rentan dalam Mengakses Kebutuhan Dasar	Persen	20,00	25,00	1.893.524.492	30,00	1.898.000.000	35,00	1.904.000.000	40,00	1.910.000.000	40,00	7.605.524.492	Dinas Sosial Kota Langsa	Meminimalisir Kerentanan Permasalahan Sosial	Penyediaan Perlindungan dan Jaminan Sosial
	4. 11. 4. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	3,83	5,18	85.000.000	7,77	85.000.000	9,33	85.000.000	10,36	85.000.000	10,36	340.000.000	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa	Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
	4. 11. 5. Program Hubungan Industrial	1. Menurunnya Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	30,00	28,00	50.000.000	25,00	50.000.000	20,00	50.000.000	18,00	50.000.000	18,00	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa	Meminimalisir Potensi Permasalahan Ketenagakerjaan	Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja
	4. 11. 6. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	870.940.000	100	872.000.000	100	874.000.000	100	876.000.000	100	3.492.940.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	Meningkatkan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	4. 11. 7. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1. Persentase Koperasi Aktif	Persen	45,00	46,00	500.000.000	47,00	500.000.000	48,00	500.000.000	49,00	500.000.000	49,00	2.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	Meningkatkan Kontribusi Koperasi	Pengembangan Potensi Koperasi
	4. 11. 8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	85,00	85,00	5.000.000.000	85,00	5.000.000.000	85,00	5.000.000.000	85,00	5.000.000.000	85,00	20.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	Meningkatkan Kontribusi Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro
	4. 11. 9. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,37	4,38	1.060.000.000	4,39	1.062.000.000	4,51	1.064.000.000	4,63	1.066.000.000	4,63	4.252.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	Meningkatkan Kontribusi Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Industri
	4. 11. 10. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pemenuhan Kebutuhan Publik dan Sosial Masyarakat	Persen	100	100	1.674.963.875	100	1.684.000.000	100	1.696.000.000	100	1.705.000.000	100	6.759.963.875	Sekretariat Daerah Kota Langsa	Meminimalisir Potensi Permasalahan dan Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat	Penyelenggaraan Koordinasi Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
	4. 11. 11. Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Terkendalinya Aktivitas Perekonomian Daerah	Persen	90,00	91,00	730.013.400	92,00	744.000.000	94,00	758.000.000	96,00	772.000.000	96,00	3.004.013.400	Sekretariat Daerah Kota Langsa	Mengoptimalkan Pengelolaaan Potensi Sumber Daya Daerah	Penyelengaraan Koordinasi Badan Usaha Pemerintah, Swasta dan Desa
	4. 11. 12. Program Baitul Mal	1. Tingkat Capaian Penyaluran Zakat	Persen	100	100	4.125.000.000	100	4.450.000.000	100	4.699.000.000	100	5.106.000.000	100	18.380.000.000	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	Menghimpun Zakat, Infaq dan Sedekah	Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4. 12. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	**1. Nilai Investasi Daerah**	**Rp. Milyar**	**265**	**270**	**2.737.695.000**	**280**	**2.771.000.000**	**290**	**2.771.000.000**	**300**	**2.787.000.000**	**300**	**11.066.695.000**			
	4. 12. 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase Pertumbuhan Investasi	Persen	0,63	1,12	80.000.000	3,7	92.000.000	3,57	84.000.000	3,45	86.000.000	3,45	342.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	Menyederhanakan Birokrasi dan Meningkatkan kenyamanan dalam Proses Perizinan	Penyediaan Regulasi Penanaman Modal Daerah
	4. 12. 2. Program Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah Perizinan Berusaha dengan Investasi di atas 5 Milyar	Investor	1	1	50.000.000	1	61.000.000	1	52.000.000	1	53.000.000	4	216.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	Mendorong Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Penyediaan Informasi Potensi Usaha Dalam Daerah
	4. 12. 3. Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks	84	84,5	60.000.000	85	62.000.000	85,5	64.000.000	86	66.000.000	86	252.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	Mendorong Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Perizinan
	4. 12. 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Persen	0,63	1,12	469.695.000	3,70	472.000.000	3,57	481.000.000	3,45	486.000.000	3,45	1.908.695.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	Menjaga Keselarasan antara Kebijakan Dengan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
	4. 12. 5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Tingkat Implementasi Informasi Penanaman Modal Melalui Sistem Informasi	Persen	100	100	30.000.000	100	31.000.000	100	32.000.000	100	33.000.000	100	126.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Penanaman Modal	Penyediaan Database Informasi Penanaman Modal
	4. 12. 6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	4,40	4,21	1.035.000.000	4,34	1.036.000.000	4,38	1.037.000.000	4,47	1.038.000.000	4,53	4.146.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
	4. 12. 7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Laju Indeks Implisit PDRB	Persen	2,98	2,95	583.000.000	2,80	585.000.000	2,85	587.000.000	2,75	589.000.000	2,75	2.344.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	Meningkatkan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Ketersediaan Barang Bersubsidi	Pemantauan Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok serta Barang Bersubsidi
	4. 12. 8. Program Pengembangan Ekspor	1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	Persen	5,00	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000	5,00	1.400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	Meningkatkan Nilai Ekonomi Produk Unggulan Daerah yang Berorientasi Ekspor	Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah
	4. 12. 9. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1. Persentase Masyarakat/Penduduk yang Terlindungi dari Dampak Negatif Pemakaian Barang dan Jasa	Persen	95,00	95,15	30.000.000	95,25	31.000.000	95,35	32.000.000	95,50	33.000.000	95,50	126.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	Meningkatkan Pengendalian Kualitas Transaksi Jual Beli	Penyediaan Alat Ukur dan Tera Ulang yang berkualitas

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4. 12. 10. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1. Penggunaan dan Kontribusi Produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional	Persen	94,00	94,00	50.000.000	94,00	51.000.000	94,00	52.000.000	94,00	53.000.000	94,00	206.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	Meningkatkan Konsumsi Produk Dalam Daerah	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Daerah
5.	**Terjaganya Perdamaian Serta Meningkatnya Kewaspadaan, Keamanan dan Ketertiban Umum**	**1. Persentase Konflik Keamanan/Ketertiban yang Tertangani**	**Persen**	**100**	**100**	**7.210.151.163**	**100**	**16.263.000.000**	**100**	**6.311.000.000**	**100**	**6.364.000.000**	**100**	**36.148.151.163**			
	5. 1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	**1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
		2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
		3. Persentase Penegakan Qanun	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
	5. 1. 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Pelanggaran	400	100	1.029.248.940	150	1.035.000.000	200	1.035.000.000	250	1.035.000.000	250	4.134.248.940	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa	Mewujudkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum	Penegakan Regulasi dan Qanun Daerah
	5. 1. 2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Menurunnya Tingkat Sengketa Tanah Garapan	Persen	8,00	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	40,00	200.000.000	Dinas Pertanahan Kota Langsa	Mewujudkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
	5. 1. 3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Persen	50,00	60,00	50.000.000	65,00	50.000.000	70,00	50.000.000	75,00	50.000.000	75,00	200.000.000	Dinas Pertanahan Kota Langsa	Mewujudkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
	5. 1. 4. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	1. Terselesainya Kesediaan Lahan, Ganti Kerugian dan Tanah Absentee	Persen	60,00	66,00	100.000.000	69,00	100.000.000	72,00	100.000.000	75,00	100.000.000	75,00	400.000.000	Dinas Pertanahan Kota Langsa	Mewujudkan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
	5. 1. 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Kecamatan Langsa Kota	Penyelesaian Isu-Isu Strategis Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan
	5. 1. 6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Kecamatan Langsa Barat	Penyelesaian Isu-Isu Strategis Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5. 1. 7. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Kecamatan Langsa Timur	Penyelesaian Isu-Isu Strategis Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan
	5. 1. 8. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Kecamatan Langsa Lama	Penyelesaian Isu-Isu Strategis Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan
	5. 1. 9. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Kecamatan Langsa Baro	Penyelesaian Isu-Isu Strategis Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan
	5. 1. 10. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1. Meningkatnya Nilai-nilai Patriotisme Masyarakat	Persen	70,00	75,00	100.000.000	80,00	100.000.000	85,00	100.000.000	90,00	100.000.000	90,00	400.000.000	Dinas Sosial Kota Langsa	Meningkatkan Kesadaran Dalam Rangka Memelihara dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelestarian Taman Makam Pahlawan Daerah
	5. 2. Meningkatnya Nilai Demokrasi, Keutuhan Berbangsa dan Bernegara	**1. Partisipasi Masyarakat Dalam Berdemokrasi, Berbangsa dan Bernegara**	**Gampong**	**66**	**66**	**2.966.500.000**	**66**	**11.990.000.000**	**66**	**2.015.000.000**	**66**	**2.045.000.000**	**66**	**19.016.500.000**			
	5. 2. 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Pengamalan Pancasila dalam Masyarakat	Gampong	66	66	250.000.000	66	255.000.000	66	260.000.000	66	270.000.000	66	1.035.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	Penyelesaian Isu-Isu Strategis Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	Fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	5. 2. 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA	Persen	80,00	80,00	1.775.500.000	80,00	10.780.000.000	80,00	785.000.000	80,00	790.000.000	80,00	14.130.500.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	Penyelesaian Isu-Isu Strategis Demokrasi dan Politik	Fasilitasi Penguatan Demokrasi dan Etika Berpolitik
	5. 2. 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	Persen	50,00	50,00	250.000.000	55,00	255.000.000	60,00	260.000.000	65,00	265.000.000	65,00	1.030.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	Membentuk Profesionalisme Organisasi Masyarakat	Penatalaksanaan Organisasi Masyarakat
	5. 2. 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1. Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah	Persen	70,00	85,00	250.000.000	85,00	255.000.000	85,00	260.000.000	85,00	265.000.000	85,00	1.030.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	Penyelesaian Isu-Isu Strategis Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5. 2. 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	Persen	100	100	441.000.000	100	445.000.000	100	450.000.000	100	455.000.000	100	1.791.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	Penyelesaian Isu-Isu Strategis Ancaman Nasionalisme dan Konflik Sosial	Fasilitasi Penguatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial
	5. 3. Meningkatnya Penanggulangan Bencana	**1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**	**Persen**	**100**	**100**	**2.414.402.223**	**100**	**2.428.000.000**	**100**	**2.441.000.000**	**100**	**2.454.000.000**	**100**	**9.737.402.223**			
		2. Persentase Korban Bencana yang di Evakuasi	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
		3. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**				
	5. 3. 1. Program Penanggulangan Bencana	1. Cakupan Penanggulangan Kejadian Bencana Alam	Persen	100	100	920.000.000	100	929.000.000	100	938.000.000	100	947.000.000	100	3.734.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Penyediaan Sumber Daya Penanganan dan Penanggulangan Bencana
	5. 3. 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Cakupan Penanggulangan Kejadian Bencana Kebakatan dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	1.419.402.223	100	1.422.000.000	100	1.424.000.000	100	1.426.000.000	100	5.691.402.223	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Penyediaan Sumber Daya Penanganan dan Penanggulangan Bencana
	5. 3. 3. Program Penanganan Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar	Persen	75,00	75,00	75.000.000	80,00	77.000.000	85,00	79.000.000	90,00	81.000.000	90,00	312.000.000	Dinas Sosial Kota Langsa	Meningkatkan Kualitas Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Penyediaan Sumber Daya Penanganan dan Penanggulangan Bencana
6.	**Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga**	**1. Indeks Pembangunan Pemuda**	**Indeks**	**77,00**	**77,80**	**7.020.000.000**	**77,90**	**7.026.000.000**	**78,00**	**7.032.000.000**	**78,10**	**7.038.000.000**	**78,10**	**28.116.000.000**			
	6. 1. Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Daerah	**1. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif**	**Persen**	**50,00**	**50,00**	**1.155.000.000**	**55,00**	**1.159.000.000**	**60,00**	**1.163.000.000**	**65,00**	**1.167.000.000**	**65,00**	**4.644.000.000**			
	6. 1. 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persen	55,00	60,00	455.000.000	65,00	459.000.000	70,00	463.000.000	75,00	467.000.000	75,00	1.844.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	Mendorong Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kepemudaan
	6. 1. 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1. Aktualisasi Program Kerja Organisasi Kepramukaan dalam Masyarakat	Persen	30,00	30,00	700.000.000	35,00	700.000.000	40,00	700.000.000	45,00	700.000.000	45,00	2.800.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	Mendorong Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kepemudaan
	6. 2. Meningkatnya Pembinaan Olahraga Daerah	**1. Cakupan Pembinaan Olahraga**	**Persen**	**75,00**	**77,50**	**5.865.000.000**	**80,00**	**5.867.000.000**	**85,00**	**5.869.000.000**	**90,00**	**5.871.000.000**	**90,00**	**23.472.000.000**			

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6. 2. 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	12	14	5.865.000.000	15	5.867.000.000	17	5.869.000.000	19	5.871.000.000	19	23.472.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	Memperkuat Potensi Olahraga	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Keolahragaan
7.	**Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup**	**1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**67,00**	**68,00**	**5.620.000.000**	**68,50**	**5.627.000.000**	**69,00**	**5.634.000.000**	**69,50**	**5.641.000.000**	**69,50**	**22.522.000.000**			
	7. 1. Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau	**1. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Persen**	**3,00**	**3,00**	**2.770.000.000**	**4,00**	**2.776.000.000**	**5,00**	**2.782.000.000**	**6,00**	**2.788.000.000**	**6,00**	**11.116.000.000**			
	7. 1. 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	70,00	73,00	200.000.000	75,00	201.000.000	77,00	202.000.000	79,00	203.000.000	79,00	806.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup	Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungaan Hidup
	7. 1. 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Penurunan Beban Pencemaran	Persen	5,00	5,00	400.000.000	5,00	401.000.000	5,00	402.000.000	5,00	403.000.000	5,00	1.606.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup	Evaluasi dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup
	7. 1. 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Tingkat Kepedulian Stakeholder dalam Upaya Pelestarian Kehati	Persen	26,00	26,00	2.000.000.000	26,00	2.000.000.000	26,00	2.000.000.000	26,00	2.000.000.000	26,00	8.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup	Pengendaliaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
	7. 1. 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Penanggulangan Pencemaran B3	Persen	30,00	30,00	70.000.000	30,00	72.000.000	30,00	74.000.000	30,00	76.000.000	30,00	292.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup	Evaluasi dan Pengendalian Bahan Berbahaya
	7. 1. 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Tingkat Ketaatan Kegiatan Usaha Terhadap Regulasi	Persen	26,00	26,00	50.000.000	27,00	51.000.000	27,50	52.000.000	28,00	53.000.000	28,00	206.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup	Evaluasi dan Pengendalian Perizinan Lingkungan Hidup
	7. 1. 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Desa Berbudaya Lingkungan Hidup	Gampong	13	13	50.000.000	13	51.000.000	13	52.000.000	14	53.000.000	53	206.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	Optimalisasi Pengawasan Lingkungan Hidup	Pendampingan Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup
	7. 2. Meningkatnya Penanganan Sampah	**1. Persentase Sampah yang Tertangani**	**Persen**	**80,00**	**81,00**	**2.850.000.000**	**82,00**	**2.851.000.000**	**83,00**	**2.852.000.000**	**84,00**	**2.853.000.000**	**84,00**	**11.406.000.000**			
	7. 2. 1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1. Cakupan Pengelolaan Sampah	Persen	80,00	81,00	1.000.000.000	82,00	1.000.000.000	83,00	1.000.000.000	84,00	1.000.000.000	84,00	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Optimalisasi Pengawasan Produksi Sampah	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
	7. 2. 2. Program Pengelolaan Persampahan	1. Persentase Penanganan Sampah	Persen	80,00	81,00	1.850.000.000	82,00	1.851.000.000	83,00	1.852.000.000	84,00	1.853.000.000	84,00	7.406.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	Optimalisasi Pengawasan Produksi Sampah	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	**Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana**	**1. Indeks Pembangunan Gender**	**Indeks**	**95,00**	**95,70**	**3.366.750.500**	**95,80**	**3.386.000.000**	**95,90**	**3.410.000.000**	**96,00**	**3.434.000.000**	**96,00**	**13.596.750.500**			
	8. 1. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	**1. Indeks Pemberdayaan Gender**	**Indeks**	**67,00**	**68,00**		**69,00**		**70,00**		**71,00**		**71,00**				
		1. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	**Rasio**	**0,01**	**0,01**		**0,01**		**0,01**		**0,01**		**0,01**				
	8. 1. 1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Sudah(1)/ Belum(0)	0	1	200.000.000	1	202.000.000	1	204.000.000	1	206.000.000	1	812.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	Optimalisasi Potensi dan Komunikasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi dan Advokasi Partisipasi Pemerempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	8. 1. 2. Program Perlindungan Perempuan	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Rasio	0,047	0,048	184.015.000	0,046	186.000.000	0,045	189.000.000	0,044	192.000.000	0,044	751.015.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	Optimalisasi Pengawasan Tindak Kekerasaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan	Aksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	8. 1. 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	Persen	100	100	135.000.000	100	138.000.000	100	141.000.000	100	144.000.000	100	558.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Keluarga	Fasillitasi Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga
	8. 1. 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	Persen	51,00	55,00	50.000.000	55,00	51.000.000	65,00	52.000.000	75,00	53.000.000	75,00	206.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	Optimalisasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak
	8. 1. 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nilai	600	650	50.000.000	650	51.000.000	750	52.000.000	750	53.000.000	750	206.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	Optimalisasi Sumber Daya Lembaga Pemberdayaan Perempuan, anak dan Keluarga	Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan, anak dann Keluarga

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8. 1. 6. Program Perlindungan Khusus Anak	1. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Persen	3,55	3,52	302.785.000	3,50	304.000.000	3,00	307.000.000	2,50	310.000.000	2,50	1.223.785.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	Optimalisasi Pengawasan Tindak Kekerasaan dan Perlindungan Terhadap Anak	Aksi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
	8. 2. Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	**1. Rasio Akseptor KB**	**Rasio**	**0,679**	**0,654**	**2.444.950.500**	**0,672**	**2.454.000.000**	**0,695**	**2.465.000.000**	**0,725**	**2.476.000.000**	**0,725**	**9.839.950.500**			
	8. 2. 1. Program Pengendalian Penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,39	1,39	25.000.000	1,40	26.000.000	1,40	27.000.000	1,40	28.000.000	1,40	106.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	Optimalisasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Upaya Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Berencana
	8. 2. 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67,90	69,00	2.419.950.500	70,00	2.428.000.000	72,00	2.438.000.000	78,00	2.448.000.000	78,00	9.733.950.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	Penyelesaian Isu-Isu Strategis Kependudukan dan Keluarga Berencanaa	Upaya Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Berencana
9.	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah**	**1. Nilai LPPD**	**Nilai (1 = Rendah, 2 = Sedang, 3 = Tinggi)**	**2**	**2**	**542.598.941.593**	**2**	**546.071.660.856**	**2**	**550.376.785.331**	**2**	**555.336.580.078**	**2**	**2.194.383.967.858**			
	9. 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah**	**Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)**	**3**	**4**	**434.523.841.116**	**4**	**436.393.780.856**	**4**	**438.595.335.331**	**4**	**440.431.260.078**	**4**	**1.749.944.217.381**			
	9. 1. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	3	3	1.241.390.406	3	1.272.064.654	4	1.286.171.356	4	1.302.890.342	4	5.102.516.759	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	118.291.921.340	4	118.681.764.725	4	119.076.927.273	4	119.474.027.883	4	475.524.641.222	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	83.613.551.441	4	83.968.164.325	4	84.325.141.979	4	84.683.876.272	4	336.590.734.017	Dinas Kesehatan Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	9.503.485.320	4	9.532.511.124	4	9.568.117.633	4	9.604.734.175	4	38.208.848.252	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9. 1. 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	6.529.314.931	4	6.545.669.302	4	6.567.378.910	4	6.589.130.817	4	26.231.493.959	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	12.266.632.074	4	12.288.855.076	4	12.314.667.935	4	12.340.563.609	4	49.210.718.693	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4.351.052.145	4	4.366.358.296	5	4.384.995.111	5	4.403.678.859	5	17.506.084.411	Dinas Sosial Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	NA	4	900.120.174	4	918.810.404	4	924.008.585	4	929.714.757	4	3.672.653.921	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	5	5	3.551.466.213	5	3.569.221.549	5	3.592.307.465	5	3.615.443.310	5	14.328.438.537	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	9.709.868.797	4	9.747.064.955	4	9.785.579.586	4	9.824.236.791	4	39.066.750.129	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	NA	4	829.420.174	4	835.610.404	4	841.808.585	4	848.014.757	4	3.354.853.921	Dinas Pertanahan Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	20.341.681.402	4	20.379.119.845	4	20.414.758.404	4	20.450.532.155	4	81.586.091.806	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.116.119.912	4	3.288.293.161	4	3.305.504.941	4	3.322.759.779	4	13.032.677.792	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 14. Program Pendaftaran Penduduk	1. Pencatatan Biodata Penduduk Dalam Register Pencatatan Sipil yang Didaftarkan	Persen	97,00	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	Penatalaksanaan Pendaftaran Penduduk yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	9. 1. 15. Program Pencatatan Sipil	1. Pencatatan Peristiwa Penting yang Dialami Penduduk Dalam Register Pencatatan Sipil yang Dilaporkan	Persen	97,00	100	435.000.000	100	436.000.000	100	437.000.000	100	438.000.000	100	1.746.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	Penatalaksanaan Pencatatan Sipil yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Pencatatan Sipil
	9. 1. 16. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Tingkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	97,00	100	30.000.000	100	31.000.000	100	32.000.000	100	33.000.000	100	126.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	Penatalaksanaan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Administrasi Kependudukan

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9. 1. 17. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Pemutakhiran Data Kependudukan	Persen	95,00	100	30.000.000	100	31.000.000	100	32.000.000	100	33.000.000	100	126.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	Penatalaksanaan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	Penyediaan Informasi Profil Kependudukaan
	9. 1. 18. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	2.583.706.172	4	2.601.031.700	5	2.616.468.378	5	2.631.439.240	5	10.432.645.490	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 19. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.562.901.544	4	3.574.053.013	4	3.588.198.664	4	3.642.872.043	4	14.368.025.264	Dinas Perhubungan Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 20. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.284.489.276	4	3.298.631.514	4	3.318.218.564	4	3.337.840.549	4	13.239.179.903	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 21. Program Informasi dan Komunikasi Publik	1. Akses Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	2.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Organisasi Perangkaat Daerah serta	Pelayanan Informasi Publik
	9. 1. 22. Program Aplikasi Informatika	1. Implementasi E-Government	Persen	47,00	50,00	175.000.000	55,00	177.000.000	60,00	179.000.000	65,00	181.000.000	65,00	712.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	Penatalaksanaan Tekhnologi Informatika yang Berkualitas	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Teknologi Informatika
	9. 1. 23. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Data Statistik Sektoral Daerah yang Dapat Diakses	Persen	4,00	5,00	50.000.000	7,00	51.000.000	10,00	52.000.000	17,00	53.000.000	17,00	206.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	Penatalaksanaan Informasi Data Statistik yang Berkualitas	Penyediaan Informasi Data Statistik
	9. 1. 24. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Jaminan Keamanan Informasi Berklasifikasi	Persen	75,00	77,00	75.000.000	79,00	76.000.000	81,00	77.000.000	83,00	78.000.000	83,00	306.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	Penatalaksanaan Pengamananan Komunikasi Data dan Informasi yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Pengamanan Komunikasi Data dan Informasi
	9. 1. 25. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.960.181.360	4	3.981.938.162	4	4.001.848.232	4	4.021.814.853	4	15.965.782.607	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 26. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.486.863.260	4	3.507.303.721	4	3.530.323.495	4	3.553.392.867	4	14.077.883.343	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 27. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.701.114.296	4	3.718.155.170	4	3.736.584.948	4	3.755.063.875	4	14.910.918.289	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 28. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	1.114.658.379	4	1.126.835.936	4	1.137.624.381	4	1.148.423.769	4	4.527.542.465	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9. 1. 29. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	3	4	3.649.094.417	4	3.668.593.190	4	3.690.965.583	4	3.713.386.837	4	14.722.040.027	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 30. Program Pembinaan Perpustakaan	1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Kunjungan	10.000	11.500	265.000.000	13.000	267.000.000	14.500	269.000.000	16.000	271.000.000	16.000	1.072.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	Meningkatkan Minat Budaya Baca	Penyediaan Sarana, Prasarana Perpustakaan
	9. 1. 31. Program Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Persen	20,00	25,00	180.000.000	27,00	182.000.000	30,00	184.000.000	35,00	186.000.000	35,00	732.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	Penatalaksanaan Arsip Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Arsip Daerah
	9. 1. 32. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	32.818.257.178	4	32.886.575.352	4	33.405.712.897	4	33.487.115.630	4	132.597.661.058	Sekretariat Daerah Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 33. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	20.394.690.349	4	20.413.952.905	4	20.437.496.670	4	20.440.392.653	4	81.686.532.578	Sekretariat DPR Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 34. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	100	1.363.472.000	100	1.380.000.000	100	1.399.000.000	100	1.418.000.000	100	5.560.472.000	Sekretariat DPR Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 35. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	5	5	5.482.759.318	5	5.468.151.858	5	5.559.904.860	5	5.588.718.627	5	22.099.534.663	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 36. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan	Persen	74,00	78,00	321.300.000	81,00	326.000.000	83,00	332.000.000	85,00	338.000.000	85,00	1.317.300.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	Peninjauan Sumber Daya dan Isu Strategis Kebijakan Pembangunanan Daerah	Analisis Kebijakan dan Potensi Pembangunan Daerah
	9. 1. 37. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	24.627.631.555	4	24.715.020.756	5	24.801.766.403	5	24.888.870.278	5	99.033.288.992	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 38. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	11.714.401.431	4	11.769.591.577	5	11.825.718.174	5	11.882.082.403	5	47.191.793.585	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 39. Program Kepegawaian Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan ASN Daerah	Nilai Indeks	75,00	85,00	1.360.500.000	90,00	1.386.500.000	95,00	1.342.500.000	98,00	1.405.950.000	98,00	5.495.450.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	Penatalaksanaan Kepegawaian Daerah	Penyediaan Sumber Daya Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Kepegawaian Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9. 1. 40. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	50,00	50,00	912.000.000	60,00	1.014.000.000	70,00	1.116.000.000	80,00	1.218.000.000	80,00	4.260.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	Penatalaksanaan Kepegawaian Daerah	Penyediaan Sumber Daya Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Kepegawaian Daerah
	9. 1. 41. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5.881.926.170	4	5.904.774.346	5	5.931.502.763	5	5.958.311.823	5	23.676.515.102	Inspektorat Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 42. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.485.003.644	4	3.501.633.065	4	3.520.714.632	4	3.540.348.607	4	14.047.699.948	Kecamatan Langsa Kota	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 43. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	253.500.000	100	255.000.000	100	257.000.000	100	258.000.000	100	1.023.500.000	Kecamatan Langsa Kota	Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan Kecamataan
	9. 1. 44. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.272.612.811	4	3.296.306.694	4	3.315.453.047	4	3.334.652.131	4	13.219.024.684	Kecamatan Langsa Barat	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 45. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	259.000.000	100	261.000.000	100	263.000.000	100	265.000.000	100	1.048.000.000	Kecamatan Langsa Barat	Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan Kecamataan
	9. 1. 46. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	2.925.850.522	4	2.940.507.739	4	2.957.908.743	4	2.975.353.752	4	11.799.620.756	Kecamatan Langsa Timur	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 47. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	231.000.000	100	233.000.000	100	235.000.000	100	237.000.000	100	936.000.000	Kecamatan Langsa Timur	Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan Kecamataan
	9. 1. 48. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.527.704.674	4	3.550.729.006	4	3.571.008.960	4	3.591.344.814	4	14.240.787.455	Kecamatan Langsa Lama	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 49. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	220.000.000	100	222.000.000	100	224.000.000	100	226.000.000	100	892.000.000	Kecamatan Langsa Lama	Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan Kecamataan
	9. 1. 50. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	2.975.284.877	4	2.996.899.142	4	3.015.158.979	4	3.033.464.614	4	12.020.807.612	Kecamatan Langsa Baro	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 51. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	256.000.000	100	258.000.000	100	260.000.000	100	262.000.000	100	1.036.000.000	Kecamatan Langsa Baro	Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan Kecamataan

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9. 1. 52. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.136.797.128	4	3.154.829.304	4	3.172.004.141	4	3.188.721.852	4	12.652.352.426	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 53. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	1.995.125.844	4	2.013.938.425	4	2.025.767.069	4	2.038.111.857	4	8.072.943.196	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 54. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	1.470.104.246	4	1.482.766.408	4	1.494.242.881	4	1.505.733.736	4	5.952.847.272	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 1. 55. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4.159.886.336	4	4.189.554.050	4	4.208.875.102	4	4.227.249.760	4	16.785.565.249	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	Penatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	9. 2. Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP	**1. Maturitas SPIP**	**Level**	**3**	**3**	**780.000.000**	**3**	**793.000.000**	**3**	**806.000.000**	**3**	**818.000.000**	**3**	**3.197.000.000**			
	9. 2. 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Capaian Program Pengawasan	Persen	100	100	660.000.000	100	669.000.000	100	678.000.000	100	687.000.000	100	2.694.000.000	Inspektorat Kota Langsa	Optimalisasi pengawasan internal Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Review dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	9. 2. 1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Fasilitasi Desain Kebijakan, Pendampinan dan Asistensi Pengawasan	Persen	100	100	120.000.000	100	124.000.000	100	128.000.000	100	131.000.000	100	503.000.000	Inspektorat Kota Langsa	Optimalisasi pengawasan internal Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	9. 3. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah	**1. Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan**	**Persen**	**100**	**100**	**1.364.300.000**	**100**	**1.379.000.000**	**100**	**1.392.000.000**	**100**	**1.409.000.000**	**100**	**5.544.300.000**			
	9. 3. 1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan	Persen	100	100	1.060.300.000	100	1.068.000.000	100	1.078.000.000	100	1.088.000.000	100	4.294.300.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	Penatalaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang	Penyediaan Sumber Daya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peembangunan
	9. 3. 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Implementasi Program Prioritas Pembangunan	Persen	100	100	304.000.000	100	311.000.000	100	314.000.000	100	321.000.000	100	1.250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Organisasi Perangkat Daerah	Evaluasi dan Pengendalian Target Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN								KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
					TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9. 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah	**1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**Opini BPK (1=WTP, 2=WDP, 3=Tidak Wajar, 4=Menolak)**	**1**	**1**	**104.469.720.090**	**1**	**106.031.880.000**	**1**	**108.096.450.000**	**1**	**111.178.320.000**	**1**	**429.776.370.090**			
	9. 4. 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Daya Serap APBD	Persen	99,00	99,00	102.834.420.090	99,00	104.376.880.000	99,00	106.418.450.000	99,00	109.478.320.000	99,00	423.108.070.090	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	Penatalaksanaan Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Daerah yang	Penyediaan Sumber Daya Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Daerah
	9. 4. 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Tingkat Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persen	95,00	95,00	689.600.000	95,00	698.000.000	95,00	708.000.000	95,00	718.000.000	95,00	2.813.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	Penatalaksanaan Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Barang Milik Daerah
	9. 4. 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persen	4,00	5,00	945.700.000	5,00	957.000.000	5,00	970.000.000	5,00	982.000.000	5,00	3.854.700.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	Penatalaksanaan Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang Berkualitas	Penyediaan Sumber Daya Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	9. 5. Meningkatnya Kemandirian Desa	**1. Indeks Desa Membangun**	**Jumlah Desa Mandiri**	**5**	**7**	**1.461.080.387**	**9**	**1.474.000.000**	**11**	**1.487.000.000**	**15**	**1.500.000.000**	**15**	**5.922.080.387**			
	9. 5. 1. Program Penataan Desa	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Efektif	Gampong	66	66	500.000.000	66	500.000.000	66	500.000.000	66	500.000.000	66	2.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Desa	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan Desa
	9. 5. 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100	416.080.387	100	424.000.000	100	432.000.000	100	440.000.000	100	1.712.080.387	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Desa	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan Desa
	9. 5. 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum	1. Partisipasi dan Pelayanan Penyelenggaraan Masyarakat Desa	Persen	100	100	545.000.000	100	550.000.000	100	555.000.000	100	560.000.000	100	2.210.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Desa	Penyediaan Dukungan Sumber Daya Pemerintahan Desa
JUMLAH						**821.757.427.058**		**844.218.486.498**		**847.007.686.498**		**861.118.886.498**		**3.374.102.486.552**			

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan Kota Langsa terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta selisih lebih penerimaan terhadap pengeluaran rencana pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan tersebut diperoleh melalui serangkaian hasil analisis terhadap gambaran realisasi pelaksanaan tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022 yang tentunya dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika yang terjadi didaerah maupun kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Sementara itu program perangkat daerah merupakan rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang diwujudkan dalam rencana belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana yang ditetapkan melalui Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa. Sebagaimana kerangka pendanaan, alokasi pagu rencana program perangkat daerah bersifat indikatif dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kemampuan keuangan serta kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Rencana program perangkat daerah yang disusun berlaku efektif dimulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana yang ditetapkan melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan menjadi pedoman Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Serta mengacu kepada kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk lebih jelasnya kerangka pendanaan dan program pembangunan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut.

VII.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan serangkaian analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Kerangka pendanan dibangun melalui berbagai pendekatan seperti realisasi penerimaan dan pengeluaran tahun sebelumnya, potensi serta isu yang terbentuk sesuai dengan dinamika politik, pemerintahan serta sosial budaya masyarakat. Adapun kerangka pendanaan dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

VII.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Langsa pada pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 820.257.427.058,- mengalami penurunan sebesar Rp. 21.112.091.654,- atau sebesar 2,51% terhadap tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 841.369.518.712,-. Penurunan pendapatan tersebut terutama diakibatkan oleh menurunnya penerimaan yang berasal dari pos pendapatan transfer pada komponen pendapatan transfer antar daerah yaitu pada kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 183 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Aceh serta dipertegas kembali dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Berdasarkan kedua regulasi dimaksud Pemerintah Aceh mendapatkan dana otonomi khusus setara 2% terhadap pagu Dana Alokasi Umum Nasional pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022, sementara itu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 Pemerintah Aceh hanya mendapatkan 1%, dengan demikian maka dapat dipastikan penerimaan yang berasal dari kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 mengalami penurunan sebesar 50% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 pendapatan daerah Kota Langsa direncanakan sebesar Rp. 842.718.486.498,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 22.461.059.440,- atau sebesar 2,74% terhadap tahun perencanaan 2023. Peningkatan tersebut diantaranya diperoleh melalui pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pada

komponen pendapatan hibah pada kelompok pendapatan hibah dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat yang setidaknya diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,-.

Selanjutnya, pada tahun 2025 pendapatan daerah Kota Langsa direncanakan sebesar Rp. 845.507.686.498,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.789.200.000,- atau sebesar 0,33% terhadap tahun perencanaan 2024. Sementara itu pada tahun 2026 pendapatan daerah kota langsa direncanakan sebesar Rp. 859.618.886.498,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.111.200.000,- atau sebesar 1,67% terhadap tahun perencanaan 2025.

Grafik 7.1.
Target Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026

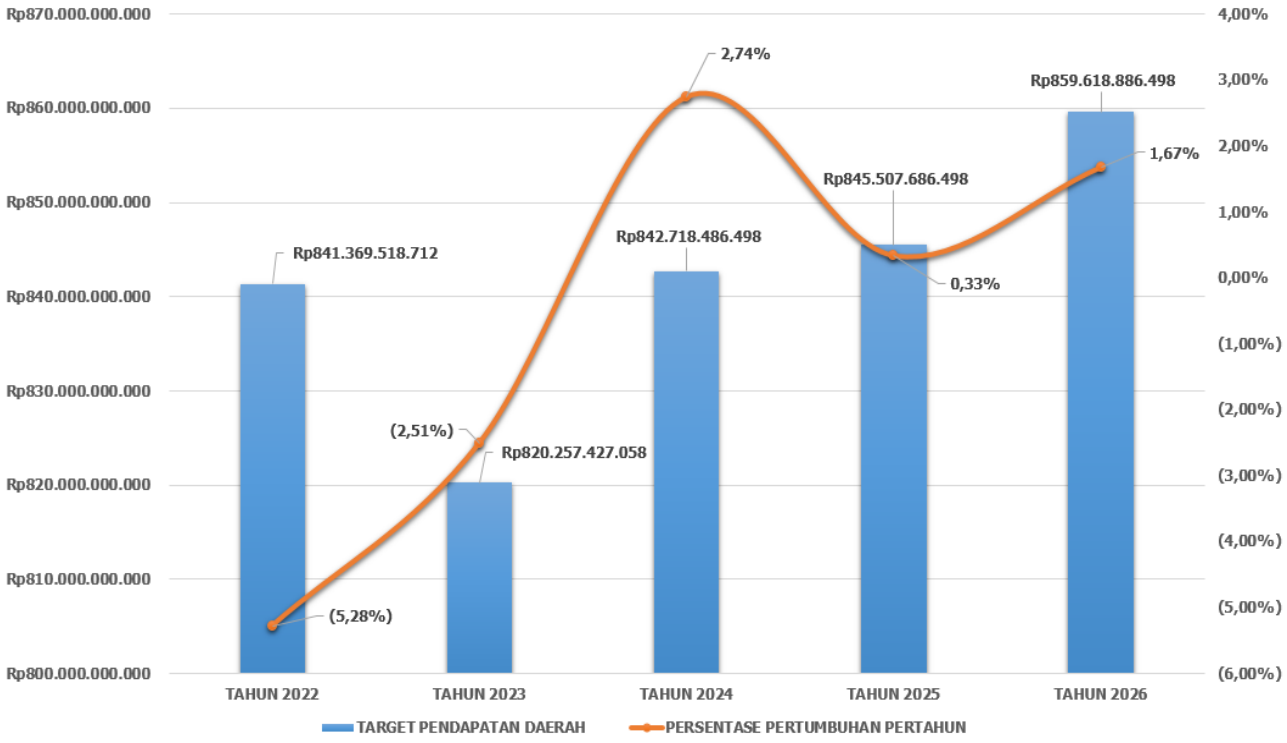

Sumber : Data Diolah

Tabel 7.1.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026

NO	PENDAPATAN DAERAH	TAHUN DASAR	PROYEKSI				RATA-RATA PERTUMBUHAN
		TAHUN 2022 (Rp.)	TAHUN 2023 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 20226 (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**141.963.940.069,00**	**141.753.740.069,00**	**142.288.756.498,00**	**142.665.956.498,00**	**143.381.156.498,00**	**0,25**
1. 1.	Pajak Daerah	16.915.000.000,00	16.955.000.000,00	17.015.000.000,00	17.065.000.000,00	17.115.000.000,00	0,29
1. 2.	Retribusi Daerah	5.367.100.900,00	5.390.900.900,00	5.453.100.000,00	5.502.300.000,00	5.735.500.000,00	1,68
1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	1.300.000.000,00	1.310.000.000,00	1.320.000.000,00	0,58
1. 4.	Lain-lain PAD yang Sah	118.391.839.169,00	118.117.839.169,00	118.520.656.498,00	118.788.656.498,00	119.210.656.498,00	0,17
2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**678.691.278.643,00**	**657.789.386.989,00**	**669.629.730.000,00**	**681.991.730.000,00**	**695.337.730.000,00**	**0,63**
2. 1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	580.004.620.000,00	594.072.422.000,00	604.829.730.000,00	616.078.730.000,00	628.332.730.000,00	2,02
2. 1. 1.	Dana Perimbangan	526.848.484.000,00	540.572.422.000,00	550.829.730.000,00	561.078.730.000,00	571.332.730.000,00	2,05
2. 1. 1. 1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.447.185.000,00	14.567.300.000,00	14.590.700.000,00	14.607.200.000,00	14.622.700.000,00	0,30
2. 1. 1. 2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	407.519.092.000,00	415.000.000.000,00	425.000.000.000,00	435.000.000.000,00	445.000.000.000,00	2,22
2. 1. 1. 3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.737.085.000,00	62.860.000.000,00	63.062.000.000,00	63.241.500.000,00	63.426.000.000,00	2,92
2. 1. 1. 4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.145.122.000,00	48.145.122.000,00	48.177.030.000,00	48.230.030.000,00	48.284.030.000,00	0,07
2. 1. 2.	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-	0,00
2. 1. 2. 1.	DID	-	-	-	-	-	0,00
2. 1. 3.	Dana Desa	53.156.136.000,00	53.500.000.000,00	54.000.000.000,00	55.000.000.000,00	57.000.000.000,00	1,77
2. 1. 3. 1.	Dana Desa	53.156.136.000,00	53.500.000.000,00	54.000.000.000,00	55.000.000.000,00	57.000.000.000,00	1,77
2. 2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.686.658.643,00	63.716.964.989,00	64.800.000.000,00	65.913.000.000,00	67.005.000.000,00	(7,59)
2. 2. 1.	Pendapatan Bagi Hasil	20.508.728.665,00	24.628.000.000,00	24.800.000.000,00	24.913.000.000,00	25.005.000.000,00	5,40
2. 2. 1. 1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.508.728.665,00	24.628.000.000,00	24.800.000.000,00	24.913.000.000,00	25.005.000.000,00	5,40
2. 2. 2.	Bantuan Keuangan	78.177.929.978,00	39.088.964.989,00	40.000.000.000,00	41.000.000.000,00	42.000.000.000,00	(10,68)
2. 2. 2. 1.	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	78.177.929.978,00	39.088.964.989,00	40.000.000.000,00	41.000.000.000,00	42.000.000.000,00	(10,68)
3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**20.714.300.000,00**	**20.714.300.000,00**	**30.800.000.000,00**	**20.850.000.000,00**	**20.900.000.000,00**	**4,16**
3. 1.	Pendapatan Hibah	-	-	10.000.000.000,00	-	-	(25,00)
3. 1. 1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	10.000.000.000,00	-	-	(25,00)
3. 1. 1. 1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	10.000.000.000,00	-	-	(25,00)
3. 1.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.714.300.000,00	20.714.300.000,00	20.800.000.000,00	20.850.000.000,00	20.900.000.000,00	0,22
3. 1. 1.	Lain-lain Pendapatan	20.714.300.000,00	20.714.300.000,00	20.800.000.000,00	20.850.000.000,00	20.900.000.000,00	0,22
3. 1. 1. 1.	Pendapatan Hibah Dana BOS	20.714.300.000,00	20.714.300.000,00	20.800.000.000,00	20.850.000.000,00	20.900.000.000,00	0,22
JUMLAH		**841.369.518.712,00**	**820.257.427.058,00**	**842.718.486.498,00**	**845.507.686.498,00**	**859.618.886.498,00**	**0,56**
PERTUMBUHAN PERTAHUN (Rp.)		**(46.890.107.552,76)**	**(21.112.091.654,00)**	**22.461.059.440,00**	**2.789.200.000,00**	**14.111.200.000,00**	
(%)		**(5,28)**	**(2,51)**	**2,74**	**0,33**	**1,67**	

Sumber : Data Diolah

Dari sisi pembentuk pendapatan daerah Kota Langsa selama kurun waktu 2022 sampai dengan tahun 2026, pendapatan transfer menjadi komponen utama dengan rata-rata kontribusinya mencapai sebesar 80,37%, kemudian pendapatan asli daerah sebesar 16,92% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar 2,71%.

Grafik 7.2.
Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026

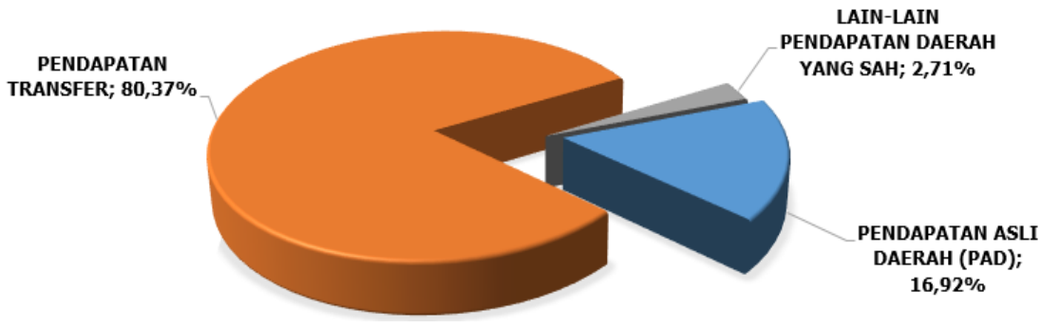

Sumber : Data Diolah

Tabel 7.2.
Proporsi Komponen Pembentuk Pendapatan Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026

NO	PENDAPATAN DAERAH	TAHUN PROYEKSI					RATA-RATA
		2022	2023	2024	2025	2026	
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16,87	17,28	16,88	16,87	16,68	**16,92**
2.	Pendapatan Transfer	80,67	80,19	79,46	80,66	80,89	**80,37**
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2,46	2,53	3,65	2,47	2,43	**2,71**
JUMLAH		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Data Diolah

Secara umum, rencana pendapatan daerah Kota Langsa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 0,56%. Peningkatan tersebut tentunya berdasarkan beberapa pertimbangan yang diantaranya adalah sektor PDRB yang belum dapat memberikan kontribusi secara optimal sebagai akibat dari wabah pandemi Covid-19 yang belum tuntas serta penurunan pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat dan provinsi. Pasar online secara tidak langsung juga turut mempengaruhi terutama bagi daerah konsumtif seperti Kota Langsa yang dikarenakan peralihan modal secara masif yang tidak dapat dibendung. Maka oleh karena ini dibutuhkan strategi dan kebijakan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Adapun strategi dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan event-event, menumbuh kembangkan kesadaran dan melibatkan influencer daerah dalam rangka memperkenalkan dan menggunakan produksi daerah.
2. Menggali dan merestorasi potensi daerah baik sumber daya alam maupun buatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia serta mendukung usaha ekonomi masyarakat.

Sementara itu, kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta koordinasi lintas sektoral instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme serta membangun sistem dan prosedur adminstrasi yang ramah, nyaman dan sederhana dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah.
3. Pengalokasian penyertaan modal kepada badan usaha yang potensial dalam rangka perolehan bagi hasil usaha.
4. Meningkatkan prestasi daerah dalam rangka peningkatan dana transfer baik dari pemerintah pusat dan provinsi

VII.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah Kota Langsa pada pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 821.757.427.058,- mengalami penurunan sebesar Rp. 22.072.520.478,- atau sebesar 2,62% terhadap tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 843.829.947.536,-. Penurunan pendapatan tersebut merupakan konsekuensi logis sejalan dengan menurunnya penerimaan yang berasal dari pos pendapatan transfer pada komponen pendapatan

transfer antar daerah yaitu pada kelompok bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya.

Pada tahun 2024 belanja daerah Kota Langsa direncanakan sebesar Rp. 844.218.486.498,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 22.461.059.440,- atau sebesar 2,73% terhadap tahun perencanaan 2023. Peningkatan tersebut terutama diakibatkan oleh pelaksanaan pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat yang diperkirakan membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang dianggarkan melalui belanja hibah.

Selanjutnya, pada tahun 2025 belanja daerah Kota Langsa direncanakan sebesar Rp. 847.007.686.498,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.789.200.000,- atau sebesar 0,33% terhadap tahun perencanaan 2024. Sementara itu pada tahun 2026 belanja daerah Kota Langsa direncanakan sebesar Rp. 861.118.886.498,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.111.200.000,- atau sebesar 1,67% terhadap tahun perencanaan 2025.

Grafik 7.3.
Target Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026

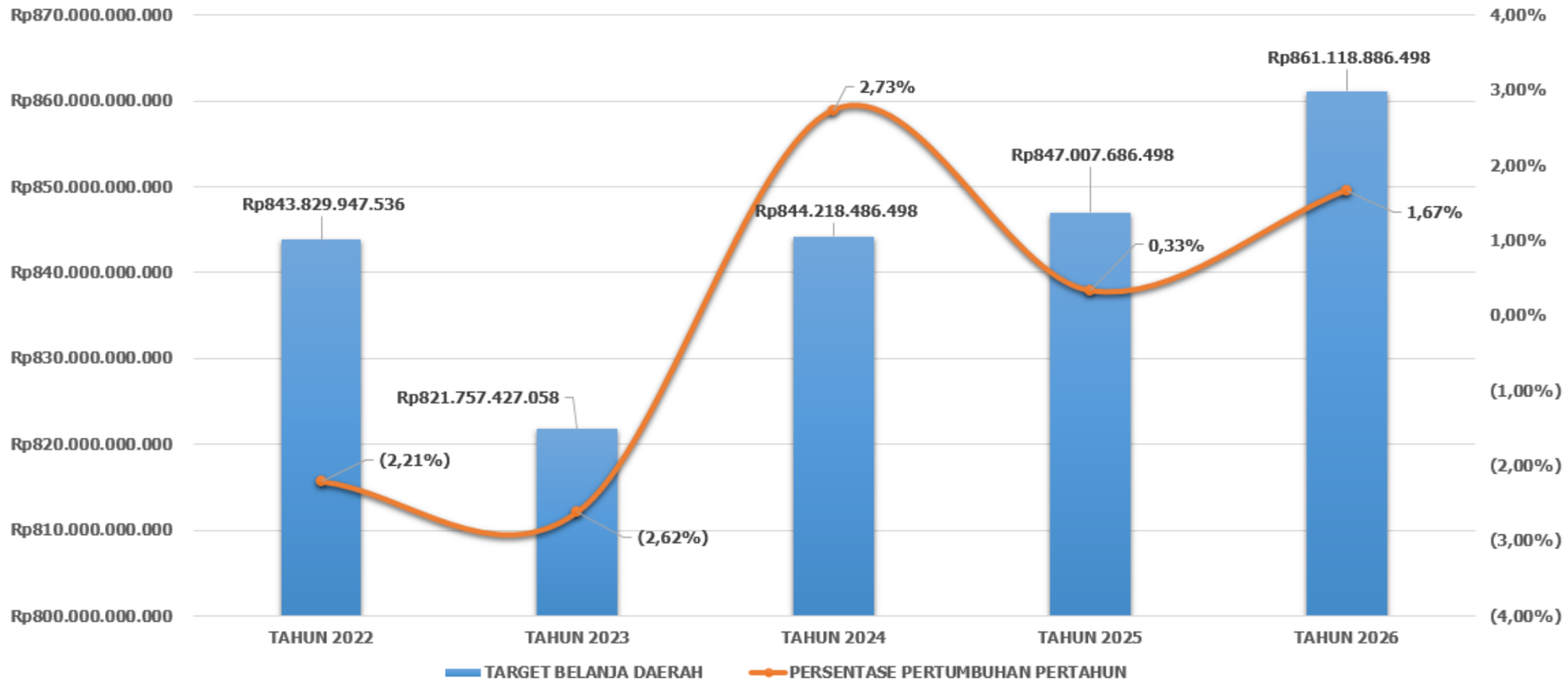

Sumber : Data Diolah

Tabel 7.3.
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026

NO	BELANJA DAERAH	TAHUN DASAR	PROYEKSI				RATA-RATA PERTUMBUHAN
		TAHUN 2022 (Rp.)	TAHUN 2023 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2026 (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**BELANJA OPERASI**	**625.647.403.344**	**606.999.540.212**	**626.201.634.200**	**625.261.769.264**	**634.577.207.491**	**0,38**
	1. 1. Belanja Pegawai	334.577.082.962	349.137.600.837	350.385.818.142	351.625.176.955	352.870.556.157	1,35
	1. 2. Belanja Barang dan Jasa	244.398.463.339	216.514.901.465	221.589.952.286	229.760.157.566	236.536.217.804	(0,61)
	1. 3. Belanja Hibah	24.517.035.022	21.719.872.333	33.232.138.588	23.048.581.209	23.728.327.325	3,47
	1. 4. Belanja Bantuan Sosial	22.154.822.021	19.627.165.578	20.993.725.184	20.827.853.534	21.442.106.204	(0,57)
2.	**BELANJA MODAL**	**118.601.570.402**	**115.066.566.756**	**116.810.972.298**	**118.528.467.234**	**120.294.359.007**	**0,37**
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**(12,50)**
	3. 1. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	(12,50)
4.	**BELANJA TRANSFER**	**97.580.973.790**	**98.691.320.090**	**100.205.880.000**	**102.217.450.000**	**105.247.320.000**	**1,91**
	4. 1. Belanja Bagi Hasil	2.228.210.090	2.234.590.090	2.246.810.000	2.256.730.000	2.285.050.000	0,63
	4. 1. Belanja Bantuan Keuangan	95.352.763.700	96.456.730.000	97.959.070.000	99.960.720.000	102.962.270.000	1,94
JUMLAH		**843.829.947.536**	**821.757.427.058**	**844.218.486.498**	**847.007.686.498**	**861.118.886.498**	**0,53**
PERTUMBUHAN PERTAHUN (Rp.)		**(19.068.785.419,19)**	**(22.072.520.478)**	**22.461.059.440**	**2.789.200.000**	**14.111.200.000**	
(%)		**(2,21)**	**(2,62)**	**2,73**	**0,33**	**1,67**	

Sumber : Data Diolah

Dari sisi pembentuk belanja daerah Kota Langsa selama kurun waktu 2022 sampai dengan tahun 2026, belanja operasi menjadi komponen utama dengan rata-rata kontribusinya mencapai sebesar 73,94%, kemudian belanja modal sebesar 13,97%, belanja transfer sebesar 11,95% dan belanja tidak terduga yaitu sebesar 0,14%.

Grafik 7.4.
Proporsi Rata-Rata Komponen Pembentuk Belanja Daerah
Kota Langsa Tahun 2022-2026

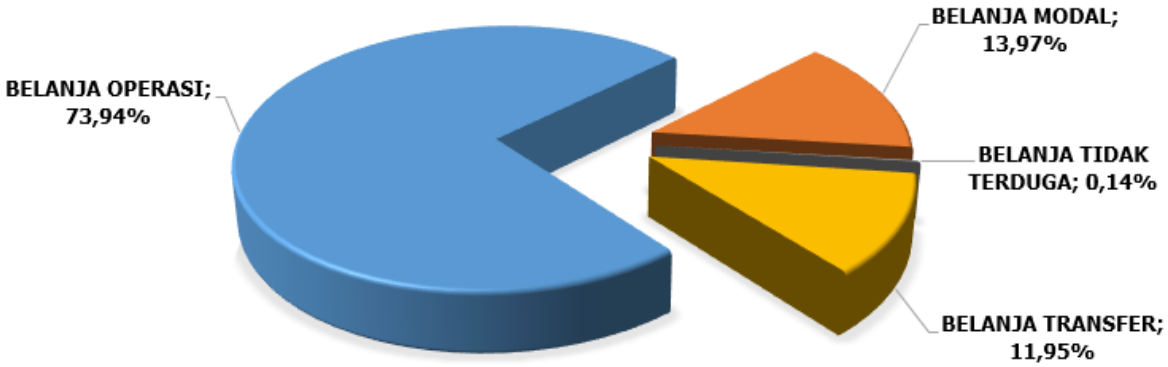

Sumber : Data Diolah

Tabel 7.4.
Proporsi Komponen Pembentuk Belanja Daerah Kota Langsa
Tahun 2022-2026

NO	BELANJA DAERAH	TAHUN PROYEKSI					RATA-RATA
		2022	2023	2024	2025	2026	
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Belanja Operasi	74,14	73,87	74,18	73,82	73,69	**73,94**
2.	Belanja Modal	14,06	14,00	13,84	13,99	13,97	**13,97**
3.	Belanja Tidak Terduga	0,24	0,12	0,12	0,12	0,12	**0,14**
4.	Belanja Transfer	11,56	12,01	11,87	12,07	12,22	**11,95**
JUMLAH		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Data Diolah

Secara umum, rencana belanja daerah Kota Langsa pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 0,53%. Peningkatan tersebut tentunya sejalan dengan rencana pendapatan daerah serta berdasarkan beberapa pertimbangan yang diantaranya adalah pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta reformasi birokrasi. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan strategi dan kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Adapun strategi dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutinitas.
3. Menumbuhkembangkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun.

Sementara itu, kebijakan yang dapat ditempuh untuk pengalokasian belanja daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mendahulukan pemenuhan belanja urusan wajib, mendukung prioritas daerah, provinsi dan nasional serta aktualisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Tanggap terhadap isu-isu strategis seperti penanggulangan bencana alam dan non alam serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan kerukunan masyarakat.
3. Pencapaian target dan mengejar ketertinggalan pembangunan daerah.

VII.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah Kota Langsa pada pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang diperoleh melalui selisih lebih pos penerimaan pembiayaan pada kelompok silpa yang diasumsikan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000.000,- terhadap pos pengeluaran pembiayaan pada kelompok penyertaan modal daerah yang diasumsikan rata-rata sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Sehingga dengan demikian pembiayaan daerah dimaksud

dapat menjadi penutup defisit atau selisih kurang pendapatan terhadap belanja daerah.

Grafik VII.5.
Target Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026

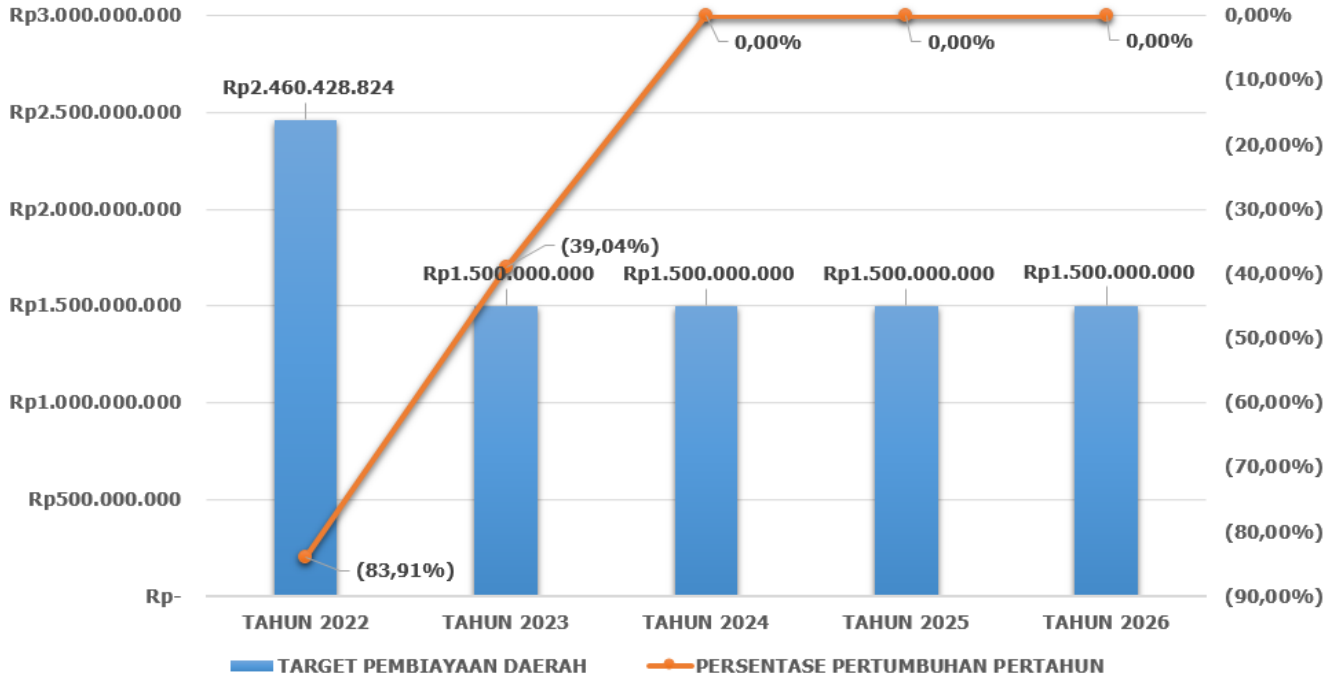

Sumber : Data Diolah

Tabel 7.5.
Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kota Langsa Tahun 2023-2026

NO	PEMBIAYAAN DAERAH	TAHUN DASAR	PROYEKSI				RATA-RATA PERTUMBUHAN
		TAHUN 2022 (Rp.)	TAHUN 2023 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2026 (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**2.960.428.824,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**(4,14)**
	1. 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.960.428.824,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	(4,14)
2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**25,99**
	2. 2. Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH		**2.460.428.824,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**(11,64)**
PERTUMBUHAN PERTAHUN (Rp.)		**(12.835.200.308,53)**	**(960.428.824,00)**	**-**	**-**	**-**	
(%)		**(83,91)**	**(39,04)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Sumber : Data Diolah

Secara umum pembiayaan digunakan untuk menutupi selisih lebih atau selisih kurang pendapatan terhadap belanja daerah. Bercermin melalui realisasi pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Langsa, komponen sisa lebih perhitungan anggaran pada pos penerimaan pembiayaan menjadi komponen utama dalam menutupi defisit pendapatan terhadap belanja daerah. Oleh karena itu potensi silpa dapat terus digali pada saat penyusunan perubahan APBD, selain itu penyertaan modal daerah pada pos pengeluaran pembiayaan harus mendapat pertimbangan dalam rangka perolehan bagi hasil untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan strategi dan kebijakan dalam mewujudkan alokasi pembiayaan daerah yang optimal. Adapun strategi dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedisiplinan penutupan transaksi pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah
2. Meningkatkan akurasi perhitungan terhadap hasil penghematan belanja atau kewajiban daerah yang belum dapat diselesaikan.

Sementara itu, kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pembiayaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengalokasian penyertaan modal dalam rangka perolehan bagi hasil untuk meningkatkan pendapatan daerah.
2. pembayaran pokok hutang dalam rangka penyelesaian kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi.

VII.1.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan Daerah

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menggambarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dimaksud merupakan gambaran kemampuan keuangan setelah dikurangi pengeluaran wajib dan mengikat yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai akibat dari pengalokasian beberapa jenis pendapatan yang harus dikeluarkan kembali dalam bentuk beban belanja yang sudah ditentukan peruntukannya seperti Pendapatan BLUD, Pendapatan Hibah Dana BOS,

Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf, pendapatan transfer dana desa, dan lain-lain.

2. Belanja Pegawai seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Daerah.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kota langsa pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 348.444.566.131,- mengalami penurunan sebesar Rp. 22.660.630.055,- atau sebesar 6,11% terhadap tahun perencanaan 2022 yaitu sebesar Rp. 371.105.196.186,-. Pada tahun 2024 sebesar Rp. 358.801.388.356,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.356.822.225,- atau sebesar 2,97% terhadap tahun perencanaan 2023.

Selanjutnya pada tahun 2025 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kota langsa direncanakan sebesar Rp. 368.081.059.543,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.279.671.188,- atau sebesar 2,59% terhadap tahun perencanaan 2024. Sementara itu pada tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 377.503.410.341,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.422.350.797,- atau sebesar 2,56% terhadap tahun perencanaan 2025.

Grafik 7.6.
Target Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Langsa Tahun 2022-2026

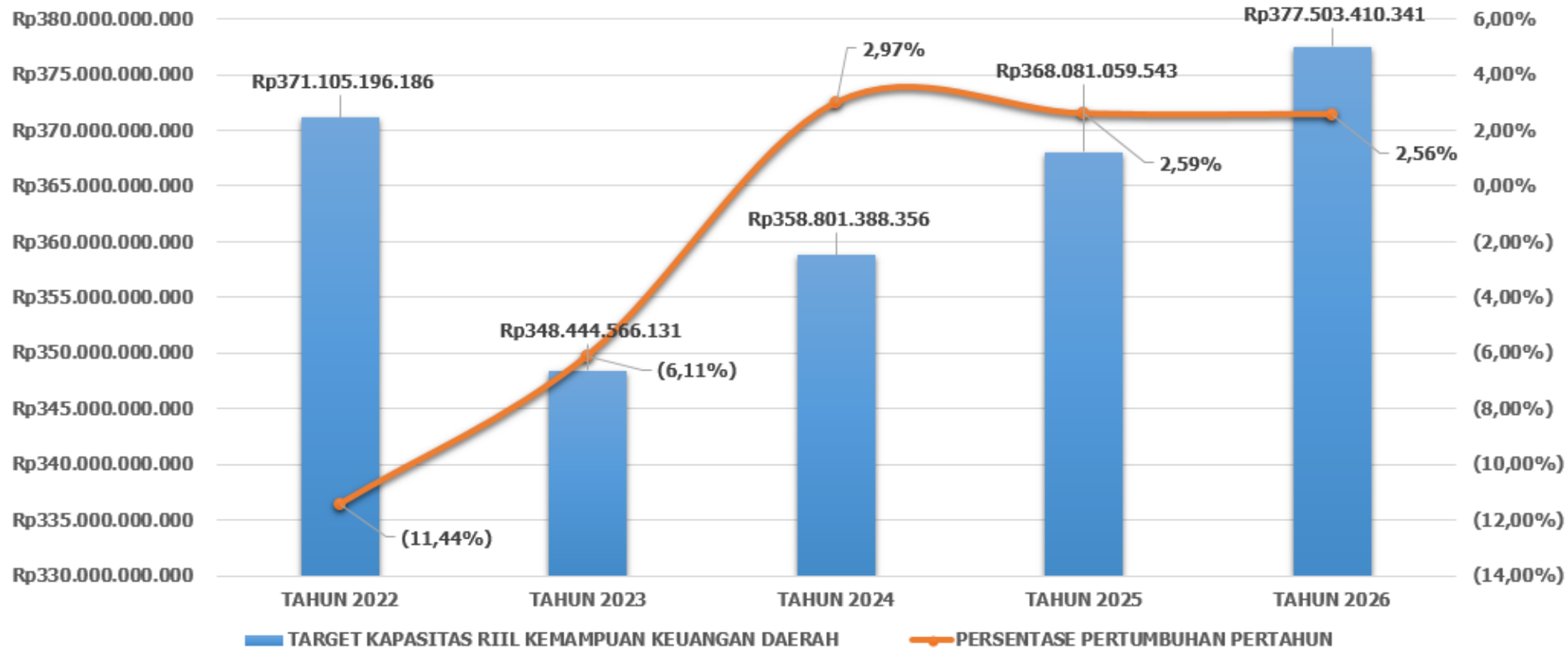

Sumber : Data Diolah

Tabel 7.6.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Langsa
Tahun 2023-2026

NO	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	TAHUN DASAR	PROYEKSI				RATA-RATA PERTUMBUHAN
		TAHUN 2022 (Rp.)	TAHUN 2023 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2026 (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**TOTAL PENERIMAAN**	**844.329.947.536**	**822.757.427.058**	**845.218.486.498**	**848.007.686.498**	**862.118.886.498**	**0,54**
	1. 1. Pendapatan	841.369.518.712,00	820.257.427.058	842.718.486.498	845.507.686.498	859.618.886.498	0,56
	1. 3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	2.960.428.824,00	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	(3,89)
2.	**TOTAL PENGELUARAN WAJIB**	**473.224.751.350**	**474.312.860.927**	**486.417.098.142**	**479.926.626.955**	**484.615.476.157**	**0,61**
	2. 1. Belanja Pegawai	347.928.860.348	349.137.600.837	350.385.818.142	351.625.176.955	352.870.556.157	0,35
	2. 2. Belanja Hibah	12.219.917.212	10.553.900.000	19.561.000.000	9.568.000.000	9.573.000.000	5,17
	2. 3. Belanja Bantuan Sosial	12.995.000.000	13.930.040.000	14.264.400.000	14.516.000.000	14.924.600.000	3,54
	2. 4. Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	(12,50)
	2. 5. Belanja Bagi Hasil	2.228.210.090	2.234.590.090	2.246.810.000	2.256.730.000	2.285.050.000	0,63
	2. 6. Belanja Bantuan Keuangan	95.352.763.700	96.456.730.000	97.959.070.000	99.960.720.000	102.962.270.000	1,94
	2. 6. Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	25,00
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN		**371.105.196.186**	**348.444.566.131**	**358.801.388.356**	**368.081.059.543**	**377.503.410.341**	**0,50**
PERTUMBUHAN PERTAHUN (Rp.)		**(47.960.484.604)**	**(22.660.630.055)**	**10.356.822.225**	**9.279.671.188**	**9.422.350.797**	
(%)		**(11,44)**	**(6,11)**	**2,97**	**2,59**	**2,56**	

Sumber : Data Diolah

VII.2. Program Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, rencana program perangkat daerah yang disusun berlaku efektif dimulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana yang ditetapkan melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan menjadi pedoman Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Serta mengacu kepada kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara itu, kerangka pendanaan merupakan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk pelaksanaan program, disusun dengan menggunakan pendekatan asumsi kemampuan keuangan daerah, yang tentunya pada saat pelaksanaan dapat berubah sesuai dengan dinamika perkembangan kemampuan sumber daya yang dimiliki baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Tabel 7.7.
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**462.866.722.346**		**473.222.513.144**		**482.192.601.365**		**491.667.508.378**		**1.909.949.345.233**	
1 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					**175.478.549.078**		**179.902.284.380**		**184.404.553.629**		**190.221.923.226**		**730.007.310.313**	
1 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	3	3	1.241.390.406	3	1.272.064.654	4	1.286.171.356	4	1.302.890.342	4	5.102.516.759	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa
1 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	118.291.921.340	4	118.681.764.725	4	119.076.927.273	4	119.474.027.883	4	475.524.641.222	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,22	11,32	53.545.237.332	11,42	57.547.455.000	11,52	61.639.455.000	11,62	67.042.005.000	11,62	239.774.152.332	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
1 01 03	Program Pengembangan Kurikulum	1. Tingkat Implementasi Kurikulum Dalam Sistem Belajar Mengajar Sesuai Standar	Persen	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
1 01 07	Program Pendidikan Dayah	1. Peran Serta Dayah Dalam Pendidikan Islam	Dayah	NA	100	2.250.000.000	100	2.250.000.000	100	2.250.000.000	100	2.250.000.000	100	9.000.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa
1 01 08	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	1. Saran MPD yang dijadikan Kebijakan daerah	Persen	10,00	15,00	50.000.000	15,00	51.000.000	20,00	52.000.000	20,00	53.000.000	20,00	206.000.000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**209.260.513.144**		**211.657.463.060**		**215.019.440.714**		**218.578.175.007**		**854.515.591.925**	
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	83.613.551.441	4	83.968.164.325	4	84.325.141.979	4	84.683.876.272	4	336.590.734.017	Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan Wilayah Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	124.734.551.803	100	126.773.298.735	100	129.775.298.735	100	132.973.298.735	100	514.256.448.008	Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. SDM Kesehatan yang Tersertifikasi	Persen	93,00	94,00	350.000.000	95,00	350.000.000	96,00	350.000.000	97,00	350.000.000	97,00	1.400.000.000	Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Tingkat Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar Kesehatan	Persen	95,00	95,00	456.876.000	96,00	460.000.000	97,00	463.000.000	98,00	465.000.000	98,00	1.844.876.000	Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Cakupan Pelaksanaan Germas	Persen	59,00	60,00	105.533.900	70,00	106.000.000	80,00	106.000.000	90,00	106.000.000	90,00	423.533.900	Dinas Kesehatan Kota Langsa
1 03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					**43.218.485.320**		**46.529.883.030**		**47.539.565.065**		**47.542.036.860**		**184.829.970.276**	
1 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	9.503.485.320	4	9.532.511.124	4	9.568.117.633	4	9.604.734.175	4	38.208.848.252	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	Persen	45,00	50,00	9.950.000.000	51,00	10.450.000.000	52,00	10.450.000.000	53,00	10.450.000.000	53,00	41.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 03 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Persen	40,00	100	1.550.000.000	100	2.050.000.000	100	2.550.000.000	100	2.772.302.685	100	8.922.302.685	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 03 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1. Cakupan Pengelolaan Sampah	Persen	80,00	81,00	1.000.000.000	82,00	1.000.000.000	83,00	1.000.000.000	84,00	1.000.000.000	84,00	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 03 05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	66,97	71,97	2.050.000.000	76,97	2.050.000.000	81,97	2.050.000.000	86,97	2.050.000.000	86,97	8.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 03 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Lancarnya Sistem Drainase Perkotaan	Persen	77,24	82,24	3.050.000.000	87,24	4.550.000.000	92,24	5.050.000.000	97,24	5.050.000.000	97,24	17.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 03 07	Program Pengembangan Permukiman	1. Permukiman Perkotaan yang Layak Huni	Persen	78,00	83,00	2.030.000.000	88,00	2.030.000.000	93,00	2.030.000.000	98,00	2.030.000.000	98,00	8.120.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	1. Persentase Penyelenggaraan Kualitas Bangunan Gedung	Persen	37,00	40,00	35.000.000	45,00	35.000.000	50,00	35.000.000	55,00	35.000.000	55,00	140.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 03 09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1. Persentase Terkendalinya Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persen	56,00	60,00	1.550.000.000	62,00	1.550.000.000	65,00	1.550.000.000	68,00	1.550.000.000	68,00	6.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	527	535	12.275.000.000	542	13.057.371.907	551	13.031.447.432	559	12.775.000.000	559	51.138.819.339	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Tingkat Kepatuhan IMB	Persen	99,00	99,00	225.000.000	99,00	225.000.000	99,00	225.000.000	99,00	225.000.000	99,00	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**5.910.000.000**		**6.045.000.000**		**6.045.000.000**		**6.045.000.000**		**24.045.000.000**	
1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	1. Persentase Rumah Layak Huni	Persen	85,01	85,30	2.275.000.000	85,50	2.410.000.000	85,80	2.410.000.000	86,00	2.410.000.000	86,00	9.505.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 04 03	Program Kawasan Permukiman	1. Persentase Lingkungan Kumuh	Persen	11,64	11,00	2.550.000.000	10,50	2.550.000.000	10,00	2.550.000.000	9,50	2.550.000.000	9,50	10.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1. Persentase Permukiman yang Mendapat Dukungan PSU	Persen	50,00	55,00	1.085.000.000	52,00	1.085.000.000	54,00	1.085.000.000	56,00	1.085.000.000	56,00	4.340.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**22.164.598.167**		**22.220.524.377**		**22.279.046.845**		**22.337.694.425**		**89.001.863.815**	
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	6.529.314.931	4	6.545.669.302	4	6.567.378.910	4	6.589.130.817	4	26.231.493.959	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	12.266.632.074	4	12.288.855.076	4	12.314.667.935	4	12.340.563.609	4	49.210.718.693	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa
1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Pelanggaran	400	100	1.029.248.940	150	1.035.000.000	200	1.035.000.000	250	1.035.000.000	250	4.134.248.940	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 05 03	Program Penanggulangan Bencana	1. Cakupan Penanggulangan Kejadian Bencana Alam	Persen	100	100	920.000.000	100	929.000.000	100	938.000.000	100	947.000.000	100	3.734.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Cakupan Penanggulangan Kejadian Bencana Kebakatan dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	1.419.402.223	100	1.422.000.000	100	1.424.000.000	100	1.426.000.000	100	5.691.402.223	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
1 06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					**6.834.576.637**		**6.867.358.296**		**6.904.995.111**		**6.942.678.859**		**27.549.608.903**	
1 06 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4.351.052.145	4	4.366.358.296	5	4.384.995.111	5	4.403.678.859	5	17.506.084.411	Dinas Sosial Kota Langsa
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	1. Pengawasan Dukungan Penanganan PMKS	Persen	100	100	95.000.000	100	98.000.000	100	101.000.000	100	104.000.000	100	398.000.000	Dinas Sosial Kota Langsa
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase PMKS Yang Tertangani	Persentase	85,00	86,00	320.000.000	87,00	328.000.000	88,00	336.000.000	89,00	344.000.000	89,00	1.328.000.000	Dinas Sosial Kota Langsa
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Meningkatnya Kemandirian Keluarga Miskin dan Rentan dalam Mengakses Kebutuhan Dasar	Persen	20,00	25,00	1.893.524.492	30,00	1.898.000.000	35,00	1.904.000.000	40,00	1.910.000.000	40,00	7.605.524.492	Dinas Sosial Kota Langsa
1 06 06	Program Penanganan Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar	Persen	75,00	75,00	75.000.000	80,00	77.000.000	85,00	79.000.000	90,00	81.000.000	90,00	312.000.000	Dinas Sosial Kota Langsa
1 06 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1. Meningkatnya Nilai-nilai Patriotisme Masyarakat	Persen	70,00	75,00	100.000.000	80,00	100.000.000	85,00	100.000.000	90,00	100.000.000	90,00	400.000.000	Dinas Sosial Kota Langsa
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**93.206.451.262**		**93.735.362.725**		**94.076.899.811**		**94.474.635.582**		**375.493.349.380**	
2 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**1.035.120.174**		**1.053.810.404**		**1.059.008.585**		**1.064.714.757**		**4.212.653.921**	
2 07 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	NA	4	900.120.174	4	918.810.404	4	924.008.585	4	929.714.757	4	3.672.653.921	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	3,83	5,18	85.000.000	7,77	85.000.000	9,33	85.000.000	10,36	85.000.000	10,36	340.000.000	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa
2 07 05	Program Hubungan Industrial	1. Menurunnya Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	30,00	28,00	50.000.000	25,00	50.000.000	20,00	50.000.000	18,00	50.000.000	18,00	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**4.473.266.213**		**4.501.221.549**		**4.537.307.465**		**4.573.443.310**		**18.085.238.537**	
2 08 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	5	5	3.551.466.213	5	3.569.221.549	5	3.592.307.465	5	3.615.443.310	5	14.328.438.537	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
2 08 02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Sudah(1)/ Belum(0)	0	1	200.000.000	1	202.000.000	1	204.000.000	1	206.000.000	1	812.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Rasio	0,047	0,048	184.015.000	0,046	186.000.000	0,045	189.000.000	0,044	192.000.000	0,044	751.015.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
2 08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	Persen	100	100	135.000.000	100	138.000.000	100	141.000.000	100	144.000.000	100	558.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	Persen	51,00	55,00	50.000.000	55,00	51.000.000	65,00	52.000.000	75,00	53.000.000	75,00	206.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nilai	600	650	50.000.000	650	51.000.000	750	52.000.000	750	53.000.000	750	206.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	1. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Persen	3,55	3,52	302.785.000	3,50	304.000.000	3,00	307.000.000	2,50	310.000.000	2,50	1.223.785.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
2 09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**					**10.706.168.797**		**10.748.764.955**		**10.793.279.586**		**10.837.936.791**		**43.086.150.129**	
2 09 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	9.709.868.797	4	9.747.064.955	4	9.785.579.586	4	9.824.236.791	4	39.066.750.129	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1. Desa Mandiri Pangan	Gampong	5	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	84,4	86,5	746.300.000	88	751.000.000	88,5	756.000.000	90,5	761.000.000	90,5	3.014.300.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Cakupan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	100	100	50.000.000	100	50.700.000	100	51.700.000	100	52.700.000	100	205.100.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					**1.079.420.174**		**1.085.610.404**		**1.091.808.585**		**1.098.014.757**		**4.354.853.921**	
2 10 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	NA	4	829.420.174	4	835.610.404	4	841.808.585	4	848.014.757	4	3.354.853.921	Dinas Pertanahan Kota Langsa
2 10 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Menurunnya Tingkat Sengketa Tanah Garapan	Persen	8,00	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	10,00	50.000.000	40,00	200.000.000	Dinas Pertanahan Kota Langsa
2 10 05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Persen	50,00	60,00	50.000.000	65,00	50.000.000	70,00	50.000.000	75,00	50.000.000	75,00	200.000.000	Dinas Pertanahan Kota Langsa
2 10 06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	1. Terselesainya Kesediaan Lahan, Ganti Kerugian dan Tanah Absentee	Persen	60,00	66,00	100.000.000	69,00	100.000.000	72,00	100.000.000	75,00	100.000.000	75,00	400.000.000	Dinas Pertanahan Kota Langsa
2 10 10	Program Penatagunaan Tanah	1. Cakupan Penatagunaan Tanah	Persen	55,00	56,00	50.000.000	60,00	50.000.000	64,00	50.000.000	69,00	50.000.000	69,00	200.000.000	Dinas Pertanahan Kota Langsa
2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**24.961.681.402**		**25.006.119.845**		**25.048.758.404**		**25.091.532.155**		**100.108.091.806**	
2 11 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	20.341.681.402	4	20.379.119.845	4	20.414.758.404	4	20.450.532.155	4	81.586.091.806	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Terkendalinya Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	70,00	73,00	200.000.000	75,00	201.000.000	77,00	202.000.000	79,00	203.000.000	79,00	806.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Penurunan Beban Pencemaran	Persen	5,00	5,00	400.000.000	5,00	401.000.000	5,00	402.000.000	5,00	403.000.000	5,00	1.606.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Tingkat Kepedulian Stakeholder dalam Upaya Pelestarian Kehati	Persen	26,00	26,00	2.000.000.000	26,00	2.000.000.000	26,00	2.000.000.000	26,00	2.000.000.000	26,00	8.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Penanggulangan Pencemaran B3	Persen	30,00	30,00	70.000.000	30,00	72.000.000	30,00	74.000.000	30,00	76.000.000	30,00	292.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
2 11 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Tingkat Ketaatan Kegiatan Usaha Terhadap Regulasi	Persen	26,00	26,00	50.000.000	27,00	51.000.000	27,50	52.000.000	28,00	53.000.000	28,00	206.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Desa Berbudaya Lingkungan Hidup	Gampong	13	13	50.000.000	13	51.000.000	13	52.000.000	14	53.000.000	53	206.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	1. Persentase Penanganan Sampah	Persen	80,00	81,00	1.850.000.000	82,00	1.851.000.000	83,00	1.852.000.000	84,00	1.853.000.000	84,00	7.406.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**3.711.119.912**		**3.888.293.161**		**3.910.504.941**		**3.932.759.779**		**15.442.677.792**	
2 12 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.116.119.912	4	3.288.293.161	4	3.305.504.941	4	3.322.759.779	4	13.032.677.792	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	1. Pencatatan Biodata Penduduk Dalam Register Pencatatan Sipil yang Didaftarkan	Persen	97,00	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
2 12 03	Program Pencatatan Sipil	1. Pencatatan Peristiwa Penting yang Dialami Penduduk Dalam Register Pencatatan Sipil yang Dilaporkan	Persen	97,00	100	435.000.000	100	436.000.000	100	437.000.000	100	438.000.000	100	1.746.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Tingkat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	97,00	100	30.000.000	100	31.000.000	100	32.000.000	100	33.000.000	100	126.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Pemutakhiran Data Kependudukan	Persen	95,00	100	30.000.000	100	31.000.000	100	32.000.000	100	33.000.000	100	126.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
2 13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					**4.044.786.559**		**4.075.031.700**		**4.103.468.378**		**4.131.439.240**		**16.354.725.877**	
2 13 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	2.583.706.172	4	2.601.031.700	5	2.616.468.378	5	2.631.439.240	5	10.432.645.490	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
2 13 02	Program Penataan Desa	1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Efektif	Gampong	66	66	500.000.000	66	500.000.000	66	500.000.000	66	500.000.000	66	2.000.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
2 13 04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100	416.080.387	100	424.000.000	100	432.000.000	100	440.000.000	100	1.712.080.387	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
2 13 05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1. Partisipasi dan Pelayanan Penyelenggaraan Masyarakat Desa	Persen	100	100	545.000.000	100	550.000.000	100	555.000.000	100	560.000.000	100	2.210.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**3.315.890.500**		**3.326.000.000**		**3.339.000.000**		**3.352.000.000**		**13.332.890.500**	
2 14 02	Program Pengendalian Penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,39	1,39	25.000.000	1,40	26.000.000	1,40	27.000.000	1,40	28.000.000	1,40	106.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67,90	69,00	2.419.950.500	70,00	2.428.000.000	72,00	2.438.000.000	78,00	2.448.000.000	78,00	9.733.950.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 14 04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	870.940.000	100	872.000.000	100	874.000.000	100	876.000.000	100	3.492.940.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					**4.662.901.544**		**4.676.053.013**		**4.692.198.664**		**4.748.872.043**		**18.780.025.264**	
2 15 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.562.901.544	4	3.574.053.013	4	3.588.198.664	4	3.642.872.043	4	14.368.025.264	Dinas Perhubungan Kota Langsa
2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Angka Kecelakaan Lalu Lintas	LAKA	100	95	550.000.000	90	551.000.000	85	552.000.000	80	553.000.000	80	2.206.000.000	Dinas Perhubungan Kota Langsa
2 15 03	Program Pengelolaan Pelayaran	1. Tertibnya Arus Lalu Lintas Pelayaran	Persen	100	100	550.000.000	100	551.000.000	100	552.000.000	100	553.000.000	100	2.206.000.000	Dinas Perhubungan Kota Langsa
2 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**4.009.489.276**		**4.025.631.514**		**4.047.218.564**		**4.068.840.549**		**16.151.179.903**	
2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.284.489.276	4	3.298.631.514	4	3.318.218.564	4	3.337.840.549	4	13.239.179.903	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
2 16 02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1. Akses Pelayanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	2.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
2 16 03	Program Aplikasi Informatika	1. Implementasi E-Government	Persen	47,00	50,00	175.000.000	55,00	177.000.000	60,00	179.000.000	65,00	181.000.000	65,00	712.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
2 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**					**9.460.181.360**		**9.481.938.162**		**9.501.848.232**		**9.521.814.853**		**37.965.782.607**	
2 17 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.960.181.360	4	3.981.938.162	4	4.001.848.232	4	4.021.814.853	4	15.965.782.607	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
2 17 05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1. Persentase Koperasi Aktif	Persen	45,00	46,00	500.000.000	47,00	500.000.000	48,00	500.000.000	49,00	500.000.000	49,00	2.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
2 17 07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Persentase Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	85,00	85,00	5.000.000.000	85,00	5.000.000.000	85,00	5.000.000.000	85,00	5.000.000.000	85,00	20.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**					**4.176.558.260**		**4.225.303.721**		**4.243.323.495**		**4.277.392.867**		**16.922.578.343**	
2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.486.863.260	4	3.507.303.721	4	3.530.323.495	4	3.553.392.867	4	14.077.883.343	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Persentase Pertumbuhan Investasi	Persen	0,63	1,12	80.000.000	3,70	92.000.000	3,57	84.000.000	3,45	86.000.000	3,45	342.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	1. Jumlah Perizinan Berusaha dengan Investasi di atas 5 Milyar	Investor	1	1	50.000.000	1	61.000.000	1	52.000.000	1	53.000.000	4	216.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks	84	84,5	60.000.000	85	62.000.000	85,5	64.000.000	86	66.000.000	86	252.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Persen	0,63	1,12	469.695.000	3,70	472.000.000	3,57	481.000.000	3,45	486.000.000	3,45	1.908.695.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
2 18 06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Tingkat Implementasi Informasi Penanaman Modal Melalui Sistem Informasi	Persen	100	100	30.000.000	100	31.000.000	100	32.000.000	100	33.000.000	100	126.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa
2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					**10.721.114.296**		**10.744.155.170**		**10.768.584.948**		**10.793.063.875**		**43.026.918.289**	
2 19 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.701.114.296	4	3.718.155.170	4	3.736.584.948	4	3.755.063.875	4	14.910.918.289	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persen	55,00	60,00	455.000.000	65,00	459.000.000	70,00	463.000.000	75,00	467.000.000	75,00	1.844.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	12	14	5.865.000.000	15	5.867.000.000	17	5.869.000.000	19	5.871.000.000	19	23.472.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
2 19 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1. Aktualisasi Program Kerja Organisasi Kepramukaan dalam Masyarakat	Persen	30,00	30,00	700.000.000	35,00	700.000.000	40,00	700.000.000	45,00	700.000.000	45,00	2.800.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**50.000.000**		**51.000.000**		**52.000.000**		**53.000.000**		**206.000.000**	
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Data Statistik Sektoral Daerah yang Dapat Diakses	Persen	4,00	5,00	50.000.000	7,00	51.000.000	10,00	52.000.000	17,00	53.000.000	17,00	206.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**75.000.000**		**76.000.000**		**77.000.000**		**78.000.000**		**306.000.000**	
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Jaminan Keamanan Informasi Berklasifikasi	Persen	75,00	77,00	75.000.000	79,00	76.000.000	81,00	77.000.000	83,00	78.000.000	83,00	306.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**2.629.658.379**		**2.652.835.936**		**2.667.624.381**		**2.681.423.769**		**10.631.542.465**	
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	1.114.658.379	4	1.126.835.936	4	1.137.624.381	4	1.148.423.769	4	4.527.542.465	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa
2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Meningkatnya Aktivitas dan Kreativitas Masyarakat Dalam Pengembangan Adat dan Budaya	Aktivitas	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	1. Tingkat Pemahaman Sejarah Masyarakat	Persen	25,00	30,00	65.000.000	35,00	65.000.000	40,00	65.000.000	45,00	65.000.000	45,00	260.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Terkelolanya Cagar Budaya di Daerah	Persen	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 22 06	Program Pengelolaan Permuseuman	1. Jumlah Kunjungan Museum	Kunjungan	4.800	5.000	700.000.000	6.000	710.000.000	7.000	713.000.000	8.000	715.000.000	26.000	2.838.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
2 22 07	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	1. Implementasi Penyelenggaraan Adat Istiadat Daerah	Persen	28,00	30,00	300.000.000	35,00	301.000.000	40,00	302.000.000	45,00	303.000.000	45,00	1.206.000.000	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa
2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					**3.914.094.417**		**3.935.593.190**		**3.959.965.583**		**3.984.386.837**		**15.794.040.027**	
2 23 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	3	4	3.649.094.417	4	3.668.593.190	4	3.690.965.583	4	3.713.386.837	4	14.722.040.027	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
2 23 02	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Kunjungan	10.000	11.500	265.000.000	13.000	267.000.000	14.500	269.000.000	16.000	271.000.000	16.000	1.072.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**					**180.000.000**		**182.000.000**		**184.000.000**		**186.000.000**		**732.000.000**	
2 24 02	Program Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Daerah Secara Baku	Persen	20,00	25,00	180.000.000	27,00	182.000.000	30,00	184.000.000	35,00	186.000.000	35,00	732.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					**8.861.448.000**		**8.879.000.000**		**8.897.000.000**		**8.910.000.000**		**35.547.448.000**	
3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**1.745.000.000**		**1.749.000.000**		**1.753.000.000**		**1.755.000.000**		**7.002.000.000**	
3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	56.997	61.264	1.550.000.000	65.567	1.551.000.000	69.885	1.552.000.000	74.207	1.552.000.000	74.207	6.205.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	27.499	29.655	110.000.000	31.784	112.000.000	33.413	114.000.000	36.103	115.000.000	36.103	451.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
3 25 06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	22	23	85.000.000	23,5	86.000.000	24	87.000.000	24,5	88.000.000	24,5	346.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**2.250.000.000**		**2.253.000.000**		**2.256.000.000**		**2.256.000.000**		**9.015.000.000**	
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Rata-Rata Lamanya Tamu Menginap	Hari	2	2	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	8.000.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	1. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata	Persen	0,64	1,75	150.000.000	1,72	151.000.000	1,69	152.000.000	1,66	152.000.000	1,66	605.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
3 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1. Pertumbuhan sektor wisata	Persen	1,70	2,00	100.000.000	2,00	102.000.000	2,00	104.000.000	2,00	104.000.000	2,00	410.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**1.758.448.000**		**1.762.000.000**		**1.766.000.000**		**1.770.000.000**		**7.056.448.000**	
3 27 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Produktivitas Pertanian/Perkebunan	Ton/Ha	2,89	2,90	734.950.000	2,91	737.000.000	2,92	739.000.000	2,93	741.000.000	2,93	2.951.950.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
3 27 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan	Persen	0,35	0,35	888.498.000	0,34	889.000.000	0,34	890.000.000	0,34	891.000.000	0,34	3.558.498.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Perlindungan Hewan dari Penyakit yang Mengancam Kelestarian Sumberdaya Hewan dan Lingkungan	Persen	20,00	30,00	100.000.000	40,00	100.000.000	45,00	100.000.000	50,00	100.000.000	50,00	400.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
3 27 07	Program Penyuluhan Pertanian	1. Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kuhatanan dan Perikanan	Persen	4,10	4,10	35.000.000	4,10	36.000.000	4,10	37.000.000	4,10	38.000.000	4,10	146.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					**2.048.000.000**		**2.053.000.000**		**2.058.000.000**		**2.063.000.000**		**8.222.000.000**	
3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil	Persen	4,40	4,21	1.035.000.000	4,34	1.036.000.000	4,38	1.037.000.000	4,47	1.038.000.000	4,53	4.146.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
3 30 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Laju Indeks Implisit PDRB	Persen	2,98	2,95	583.000.000	2,8	585.000.000	2,85	587.000.000	2,75	589.000.000	2,75	2.344.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
3 30 05	Program Pengembangan Ekspor	1. Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	Persen	5,00	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000	5,00	350.000.000	5,00	1.400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
3 30 06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1. Persentase Masyarakat/Penduduk yang Terlindungi dari Dampak Negatif Pemakaian Barang dan Jasa	Persen	95,00	95,15	30.000.000	95,25	31.000.000	95,35	32.000.000	95,50	33.000.000	95,50	126.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
3 30 07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1. Penggunaan dan Kontribusi Produk Dalam Negeri dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional	Persen	94,00	94,00	50.000.000	94,00	51.000.000	94,00	52.000.000	94,00	53.000.000	94,00	206.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**1.060.000.000**		**1.062.000.000**		**1.064.000.000**		**1.066.000.000**		**4.252.000.000**	
3 31 02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,37	4,38	1.060.000.000	4,39	1.062.000.000	4,51	1.064.000.000	4,63	1.066.000.000	4,63	4.252.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**56.981.396.802**		**57.108.528.257**		**57.696.209.567**		**57.822.508.283**		**229.608.642.910**	
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**35.223.234.453**		**35.314.575.352**		**35.859.712.897**		**35.964.115.630**		**142.361.638.333**	
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	32.818.257.178	4	32.886.575.352	4	33.405.712.897	4	33.487.115.630	4	132.597.661.058	Sekretariat Daerah Kota Langsa
4 01 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pemenuhan Kebutuhan Publik dan Sosial Masyarakat	Persen	100	100	1.674.963.875	100	1.684.000.000	100	1.696.000.000	100	1.705.000.000	100	6.759.963.875	Sekretariat Daerah Kota Langsa
4 01 03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Terkendalinya Aktivitas Perekonomian Daerah	Persen	90,00	91,00	730.013.400	92,00	744.000.000	94,00	758.000.000	96,00	772.000.000	96,00	3.004.013.400	Sekretariat Daerah Kota Langsa
4 02	**SEKRETARIAT DPRD**					**21.758.162.349**		**21.793.952.905**		**21.836.496.670**		**21.858.392.653**		**87.247.004.578**	
4 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	20.394.690.349	4	20.413.952.905	4	20.437.496.670	4	20.440.392.653	4	81.686.532.578	Sekretariat DPR Kota Langsa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	100	1.363.472.000	100	1.380.000.000	100	1.399.000.000	100	1.418.000.000	100	5.560.472.000	Sekretariat DPR Kota Langsa
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**150.252.612.394**		**152.090.144.191**		**154.466.339.436**		**157.908.941.308**		**614.718.037.330**	
5 01	**PERENCANAAN**					**6.847.059.318**		**6.847.151.858**		**6.951.904.860**		**6.997.718.627**		**27.643.834.663**	
5 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	5	5	5.482.759.318	5	5.468.151.858	5	5.559.904.860	5	5.588.718.627	5	22.099.534.663	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan	Persen	100	100	1.060.300.000	100	1.068.000.000	100	1.078.000.000	100	1.088.000.000	100	4.294.300.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
5 01 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Implementasi Program Prioritas Pembangunan	Persen	100	100	304.000.000	100	311.000.000	100	314.000.000	100	321.000.000	100	1.250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
5 02	**KEUANGAN**					**129.097.351.645**		**130.746.900.756**		**132.898.216.403**		**136.067.190.278**		**528.809.659.082**	
5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	24.627.631.555	4	24.715.020.756	5	24.801.766.403	5	24.888.870.278	5	99.033.288.992	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Daya Serap APBD	Persen	99,00	99,00	102.834.420.090	99,00	104.376.880.000	99,00	106.418.450.000	99,00	109.478.320.000	99,00	423.108.070.090	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Tingkat Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persen	95,00	95,00	689.600.000	95,00	698.000.000	95,00	708.000.000	95,00	718.000.000	95,00	2.813.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persen	4,00	5,00	945.700.000	5,00	957.000.000	5,00	970.000.000	5,00	982.000.000	5,00	3.854.700.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
5 03	**KEPEGAWAIAN**					**13.074.901.431**		**13.156.091.577**		**13.168.218.174**		**13.288.032.403**		**52.687.243.585**	
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	11.714.401.431	4	11.769.591.577	5	11.825.718.174	5	11.882.082.403	5	47.191.793.585	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan ASN Daerah	Nilai Indeks	75	85	1.360.500.000	90	1.386.500.000	95	1.342.500.000	98	1.405.950.000	98	5.495.450.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**912.000.000**		**1.014.000.000**		**1.116.000.000**		**1.218.000.000**		**4.260.000.000**	
5 04 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	50,00	50,00	912.000.000	60,00	1.014.000.000	70,00	1.116.000.000	80,00	1.218.000.000	80,00	4.260.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**321.300.000**		**326.000.000**		**332.000.000**		**338.000.000**		**1.317.300.000**	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 05 02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan	Persen	74,00	78,00	321.300.000	81,00	326.000.000	83,00	332.000.000	85,00	338.000.000	85,00	1.317.300.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					**6.661.926.170**		**6.697.774.346**		**6.737.502.763**		**6.776.311.823**		**26.873.515.102**	
6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**					**6.661.926.170**		**6.697.774.346**		**6.737.502.763**		**6.776.311.823**		**26.873.515.102**	
6 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	5.881.926.170	4	5.904.774.346	5	5.931.502.763	5	5.958.311.823	5	23.676.515.102	Inspektorat Kota Langsa
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Capaian Program Pengawasan	Persen	100	100	660.000.000	100	669.000.000	100	678.000.000	100	687.000.000	100	2.694.000.000	Inspektorat Kota Langsa
6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Fasilitasi Desain Kebijakan, Pendampinan dan Asistensi Pengawasan	Persen	100	100	120.000.000	100	124.000.000	100	128.000.000	100	131.000.000	100	503.000.000	Inspektorat Kota Langsa
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**17.905.956.529**		**18.025.075.647**		**18.139.244.361**		**18.253.163.918**		**72.323.440.455**	
7 01	**KECAMATAN**					**17.905.956.529**		**18.025.075.647**		**18.139.244.361**		**18.253.163.918**		**72.323.440.455**	
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.485.003.644	4	3.501.633.065	4	3.520.714.632	4	3.540.348.607	4	14.047.699.948	Kecamatan Langsa Kota
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.272.612.811	4	3.296.306.694	4	3.315.453.047	4	3.334.652.131	4	13.219.024.684	Kecamatan Langsa Barat
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	2.925.850.522	4	2.940.507.739	4	2.957.908.743	4	2.975.353.752	4	11.799.620.756	Kecamatan Langsa Timur
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.527.704.674	4	3.550.729.006	4	3.571.008.960	4	3.591.344.814	4	14.240.787.455	Kecamatan Langsa Lama
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	2.975.284.877	4	2.996.899.142	4	3.015.158.979	4	3.033.464.614	4	12.020.807.612	Kecamatan Langsa Baro
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	253.500.000	100	255.000.000	100	257.000.000	100	258.000.000	100	1.023.500.000	Kecamatan Langsa Kota
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	259.000.000	100	261.000.000	100	263.000.000	100	265.000.000	100	1.048.000.000	Kecamatan Langsa Barat
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	231.000.000	100	233.000.000	100	235.000.000	100	237.000.000	100	936.000.000	Kecamatan Langsa Timur

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	220.000.000	100	222.000.000	100	224.000.000	100	226.000.000	100	892.000.000	Kecamatan Langsa Lama
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Integrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	256.000.000	100	258.000.000	100	260.000.000	100	262.000.000	100	1.036.000.000	Kecamatan Langsa Baro
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Kecamatan Langsa Kota
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Kecamatan Langsa Barat
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Kecamatan Langsa Timur
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Kecamatan Langsa Lama
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman Diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.000.000	100	106.000.000	100	412.000.000	Kecamatan Langsa Baro
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					**6.103.297.128**		**15.144.829.304**		**5.187.004.141**		**5.233.721.852**		**31.668.852.426**	
8 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**6.103.297.128**		**15.144.829.304**		**5.187.004.141**		**5.233.721.852**		**31.668.852.426**	
8 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	3.136.797.128	4	3.154.829.304	4	3.172.004.141	4	3.188.721.852	4	12.652.352.426	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Pengamalan Pancasila dalam Masyarakat	Gampong	66	66	250.000.000	66	255.000.000	66	260.000.000	66	270.000.000	66	1.035.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU/PEMILUKADA	Persen	80,00	80,00	1.775.500.000	80,00	10.780.000.000	80,00	785.000.000	80,00	790.000.000	80,00	14.130.500.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
8 01 04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	Persen	50,00	50,00	250.000.000	55,00	255.000.000	60,00	260.000.000	65,00	265.000.000	65,00	1.030.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1. Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah	Persen	70,00	85,00	250.000.000	85,00	255.000.000	85,00	260.000.000	85,00	265.000.000	85,00	1.030.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	Persen	100	100	441.000.000	100	445.000.000	100	450.000.000	100	455.000.000	100	1.791.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR		
					TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	TARGET	(Rp).	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	**UNSUR KEKHUSUSAN**					**18.917.616.427**		**19.315.258.884**		**19.614.885.053**		**20.072.095.353**		**77.919.855.717**	
9 01	**KEKHUSUSAN ACEH**					**18.917.616.427**		**19.315.258.884**		**19.614.885.053**		**20.072.095.353**		**77.919.855.717**	
9 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	1.995.125.844	4	2.013.938.425	4	2.025.767.069	4	2.038.111.857	4	8.072.943.196	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa
9 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	1.470.104.246	4	1.482.766.408	4	1.494.242.881	4	1.505.733.736	4	5.952.847.272	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa
9 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP OPD	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	4	4	4.159.886.336	4	4.189.554.050	4	4.208.875.102	4	4.227.249.760	4	16.785.565.249	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa
9 01 02	Program Syariat Islam Aceh	1. Persentase pelanggaran Qanun Syariat Islam yang diselesaikan	Persen	100	100	6.920.000.000	100	6.923.000.000	100	6.926.000.000	100	6.929.000.000	100	27.698.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa
9 01 03	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	1. Eksistensi Peran Ulama Dalam Pembangunan Daerah	Gampong	66	66	247.500.000	66	256.000.000	66	261.000.000	66	266.000.000	66	1.030.500.000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa
9 01 04	Program Baitul Mal	1. Tingkat Capaian Penyaluran Zakat	Persen	100	100	4.125.000.000	100	4.450.000.000	100	4.699.000.000	100	5.106.000.000	100	18.380.000.000	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa
JUMLAH						**821.757.427.058**		**844.218.486.498**		**847.007.686.498**		**861.118.886.498**		**3.374.102.486.552**	

Tabel 7.8.
Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Terhadap Rencana Program Prioritas Menurut Urusan, Bidang dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2026

NO	URUSAN/BIDANG/SKPD	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**462.866.722.346**	**56,33**	**473.222.513.144**	**56,05**	**482.192.601.365**	**56,93**	**491.667.508.378**	**57,10**	**1.909.949.345.233**	**56,61**
	1. 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	**175.478.549.078**	**21,35**	**179.902.284.380**	**21,31**	**184.404.553.629**	**21,77**	**190.221.923.226**	**22,09**	**730.007.310.313**	**21,64**
	1. 1. 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	171.937.158.672	20,92	176.329.219.725	20,89	180.816.382.273	21,35	186.616.032.883	21,67	715.698.793.554	21,21
	1. 1. 2. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa	1.291.390.406	0,16	1.323.064.654	0,16	1.338.171.356	0,16	1.355.890.342	0,16	5.308.516.759	0,16
	1. 1. 3. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	2.250.000.000	0,27	2.250.000.000	0,27	2.250.000.000	0,27	2.250.000.000	0,26	9.000.000.000	0,27
	1. 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	**209.260.513.144**	**25,46**	**211.657.463.060**	**25,07**	**215.019.440.714**	**25,39**	**218.578.175.007**	**25,38**	**854.515.591.925**	**25,33**
	1. 2. 1. Dinas Kesehatan Kota Langsa	209.260.513.144	25,46	211.657.463.060	25,07	215.019.440.714	25,39	218.578.175.007	25,38	854.515.591.925	25,33
	1. 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**43.218.485.320**	**5,26**	**46.529.883.030**	**5,51**	**47.539.565.065**	**5,61**	**47.542.036.860**	**5,52**	**184.829.970.276**	**5,48**
	1. 3. 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Langsa	43.218.485.320	5,26	46.529.883.030	5,51	47.539.565.065	5,61	47.542.036.860	5,52	184.829.970.276	5,48
	1. 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	**5.910.000.000**	**0,72**	**6.045.000.000**	**0,72**	**6.045.000.000**	**0,71**	**6.045.000.000**	**0,70**	**24.045.000.000**	**0,71**
	1. 4. 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Langsa	5.910.000.000	0,72	6.045.000.000	0,72	6.045.000.000	0,71	6.045.000.000	0,70	24.045.000.000	0,71
	1. 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	**22.164.598.167**	**2,70**	**22.220.524.377**	**2,63**	**22.279.046.845**	**2,63**	**22.337.694.425**	**2,59**	**89.001.863.815**	**2,64**
	1. 5. 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa	13.295.881.014	1,62	13.323.855.076	1,58	13.349.667.935	1,58	13.375.563.609	1,55	53.344.967.633	1,58
	1. 5. 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	8.868.717.154	1,08	8.896.669.302	1,05	8.929.378.910	1,05	8.962.130.817	1,04	35.656.896.182	1,06
	1. 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	**6.834.576.637**	**0,83**	**6.867.358.296**	**0,81**	**6.904.995.111**	**0,82**	**6.942.678.859**	**0,81**	**27.549.608.903**	**0,82**
	1. 6. 1. Dinas Sosial Kota Langsa	6.834.576.637	0,83	6.867.358.296	0,81	6.904.995.111	0,82	6.942.678.859	0,81	27.549.608.903	0,82

NO	URUSAN/BIDANG/SKPD	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**93.206.451.262**	**11,34**	**93.735.362.725**	**11,10**	**94.076.899.811**	**11,11**	**94.474.635.582**	**10,97**	**375.493.349.380**	**11,13**
	2. 7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	**1.035.120.174**	**0,13**	**1.053.810.404**	**0,12**	**1.059.008.585**	**0,13**	**1.064.714.757**	**0,12**	**4.212.653.921**	**0,12**
	2. 7. 1. Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa	1.035.120.174	0,13	1.053.810.404	0,12	1.059.008.585	0,13	1.064.714.757	0,12	4.212.653.921	0,12
	2. 8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**4.473.266.213**	**0,54**	**4.501.221.549**	**0,53**	**4.537.307.465**	**0,54**	**4.573.443.310**	**0,53**	**18.085.238.537**	**0,54**
	2. 8. 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	4.473.266.213	0,54	4.501.221.549	0,53	4.537.307.465	0,54	4.573.443.310	0,53	18.085.238.537	0,54
	2. 9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	**10.706.168.797**	**1,30**	**10.748.764.955**	**1,27**	**10.793.279.586**	**1,27**	**10.837.936.791**	**1,26**	**43.086.150.129**	**1,28**
	2. 9. 1. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	10.706.168.797	1,30	10.748.764.955	1,27	10.793.279.586	1,27	10.837.936.791	1,26	43.086.150.129	1,28
	2. 10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	**1.079.420.174**	**0,13**	**1.085.610.404**	**0,13**	**1.091.808.585**	**0,13**	**1.098.014.757**	**0,13**	**4.354.853.921**	**0,13**
	2. 10. 1. Dinas Pertanahan Kota Langsa	1.079.420.174	0,13	1.085.610.404	0,13	1.091.808.585	0,13	1.098.014.757	0,13	4.354.853.921	0,13
	2. 11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	**24.961.681.402**	**3,04**	**25.006.119.845**	**2,96**	**25.048.758.404**	**2,96**	**25.091.532.155**	**2,91**	**100.108.091.806**	**2,97**
	2. 11. 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	24.961.681.402	3,04	25.006.119.845	2,96	25.048.758.404	2,96	25.091.532.155	2,91	100.108.091.806	2,97
	2. 12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**3.711.119.912**	**0,45**	**3.888.293.161**	**0,46**	**3.910.504.941**	**0,46**	**3.932.759.779**	**0,46**	**15.442.677.792**	**0,46**
	2. 12. 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	3.711.119.912	0,45	3.888.293.161	0,46	3.910.504.941	0,46	3.932.759.779	0,46	15.442.677.792	0,46
	2. 13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**4.044.786.559**	**0,49**	**4.075.031.700**	**0,48**	**4.103.468.378**	**0,48**	**4.131.439.240**	**0,48**	**16.354.725.877**	**0,48**
	2. 13. 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	4.044.786.559	0,49	4.075.031.700	0,48	4.103.468.378	0,48	4.131.439.240	0,48	16.354.725.877	0,48
	2. 14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**3.315.890.500**	**0,40**	**3.326.000.000**	**0,39**	**3.339.000.000**	**0,39**	**3.352.000.000**	**0,39**	**13.332.890.500**	**0,40**
	2. 14. 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	3.315.890.500	0,40	3.326.000.000	0,39	3.339.000.000	0,39	3.352.000.000	0,39	13.332.890.500	0,40

NO	URUSAN/BIDANG/SKPD	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	**4.662.901.544**	**0,57**	**4.676.053.013**	**0,55**	**4.692.198.664**	**0,55**	**4.748.872.043**	**0,55**	**18.780.025.264**	**0,56**
	2. 15. 1. Dinas Perhubungan Kota Langsa	4.662.901.544	0,57	4.676.053.013	0,55	4.692.198.664	0,55	4.748.872.043	0,55	18.780.025.264	0,56
	2. 16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	**4.009.489.276**	**0,49**	**4.025.631.514**	**0,48**	**4.047.218.564**	**0,48**	**4.068.840.549**	**0,47**	**16.151.179.903**	**0,48**
	2. 16. 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	4.009.489.276	0,49	4.025.631.514	0,48	4.047.218.564	0,48	4.068.840.549	0,47	16.151.179.903	0,48
	2. 17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	**9.460.181.360**	**1,15**	**9.481.938.162**	**1,12**	**9.501.848.232**	**1,12**	**9.521.814.853**	**1,11**	**37.965.782.607**	**1,13**
	2. 17. 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	9.460.181.360	1,15	9.481.938.162	1,12	9.501.848.232	1,12	9.521.814.853	1,11	37.965.782.607	1,13
	2. 18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	**4.176.558.260**	**0,51**	**4.225.303.721**	**0,50**	**4.243.323.495**	**0,50**	**4.277.392.867**	**0,50**	**16.922.578.343**	**0,50**
	2. 18. 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	4.176.558.260	0,51	4.225.303.721	0,50	4.243.323.495	0,50	4.277.392.867	0,50	16.922.578.343	0,50
	2. 19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	**10.721.114.296**	**1,30**	**10.744.155.170**	**1,27**	**10.768.584.948**	**1,27**	**10.793.063.875**	**1,25**	**43.026.918.289**	**1,28**
	2. 19. 1. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	10.721.114.296	1,30	10.744.155.170	1,27	10.768.584.948	1,27	10.793.063.875	1,25	43.026.918.289	1,28
	2. 20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	**50.000.000**	**0,01**	**51.000.000**	**0,01**	**52.000.000**	**0,01**	**53.000.000**	**0,01**	**206.000.000**	**0,01**
	2. 20. 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	50.000.000	0,01	51.000.000	0,01	52.000.000	0,01	53.000.000	0,01	206.000.000	0,01
	2. 21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	**75.000.000**	**0,01**	**76.000.000**	**0,01**	**77.000.000**	**0,01**	**78.000.000**	**0,01**	**306.000.000**	**0,01**
	2. 21. 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	75.000.000	0,01	76.000.000	0,01	77.000.000	0,01	78.000.000	0,01	306.000.000	0,01
	2. 22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	**2.629.658.379**	**0,32**	**2.652.835.936**	**0,31**	**2.667.624.381**	**0,31**	**2.681.423.769**	**0,31**	**10.631.542.465**	**0,32**
	2. 22. 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	1.215.000.000	0,15	1.225.000.000	0,15	1.228.000.000	0,14	1.230.000.000	0,14	4.898.000.000	0,15
	2. 22. 2. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Langsa	1.414.658.379	0,17	1.427.835.936	0,17	1.439.624.381	0,17	1.451.423.769	0,17	5.733.542.465	0,17
	2. 23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	**3.914.094.417**	**0,48**	**3.935.593.190**	**0,47**	**3.959.965.583**	**0,47**	**3.984.386.837**	**0,46**	**15.794.040.027**	**0,47**
	2. 23. 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	3.914.094.417	0,48	3.935.593.190	0,47	3.959.965.583	0,47	3.984.386.837	0,46	15.794.040.027	0,47

NO	URUSAN/BIDANG/SKPD	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	**180.000.000**	**0,02**	**182.000.000**	**0,02**	**184.000.000**	**0,02**	**186.000.000**	**0,02**	**732.000.000**	**0,02**
	2. 24. 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	180.000.000	0,02	182.000.000	0,02	184.000.000	0,02	186.000.000	0,02	732.000.000	0,02
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**8.861.448.000**	**1,08**	**8.879.000.000**	**1,05**	**8.897.000.000**	**1,05**	**8.910.000.000**	**1,03**	**35.547.448.000**	**1,05**
	3. 25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	**1.745.000.000**	**0,21**	**1.749.000.000**	**0,21**	**1.753.000.000**	**0,21**	**1.755.000.000**	**0,20**	**7.002.000.000**	**0,21**
	3. 25. 1. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	1.745.000.000	0,21	1.749.000.000	0,21	1.753.000.000	0,21	1.755.000.000	0,20	7.002.000.000	0,21
	3. 26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	**2.250.000.000**	**0,27**	**2.253.000.000**	**0,27**	**2.256.000.000**	**0,27**	**2.256.000.000**	**0,26**	**9.015.000.000**	**0,27**
	3. 26. 1. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	2.250.000.000	0,27	2.253.000.000	0,27	2.256.000.000	0,27	2.256.000.000	0,26	9.015.000.000	0,27
	3. 27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	**1.758.448.000**	**0,21**	**1.762.000.000**	**0,21**	**1.766.000.000**	**0,21**	**1.770.000.000**	**0,21**	**7.056.448.000**	**0,21**
	3. 27. 1. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	1.758.448.000	0,21	1.762.000.000	0,21	1.766.000.000	0,21	1.770.000.000	0,21	7.056.448.000	0,21
	3. 30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	**2.048.000.000**	**0,25**	**2.053.000.000**	**0,24**	**2.058.000.000**	**0,24**	**2.063.000.000**	**0,24**	**8.222.000.000**	**0,24**
	3. 30. 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	2.048.000.000	0,25	2.053.000.000	0,24	2.058.000.000	0,24	2.063.000.000	0,24	8.222.000.000	0,24
	3. 31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	**1.060.000.000**	**0,13**	**1.062.000.000**	**0,13**	**1.064.000.000**	**0,13**	**1.066.000.000**	**0,12**	**4.252.000.000**	**0,13**
	3. 31. 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	1.060.000.000	0,13	1.062.000.000	0,13	1.064.000.000	0,13	1.066.000.000	0,12	4.252.000.000	0,13
4.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**56.981.396.802**	**6,93**	**57.108.528.257**	**6,76**	**57.696.209.567**	**6,81**	**57.822.508.283**	**6,71**	**229.608.642.910**	**6,81**
	4. 1. Sekretariat Daerah	**35.223.234.453**	**4,29**	**35.314.575.352**	**4,18**	**35.859.712.897**	**4,23**	**35.964.115.630**	**4,18**	**142.361.638.333**	**4,22**
	4. 1. 1. Sekretariat Daerah Kota Langsa	35.223.234.453	4,29	35.314.575.352	4,18	35.859.712.897	4,23	35.964.115.630	4,18	142.361.638.333	4,22
	4. 2. Sekretariat DPRD	**21.758.162.349**	**2,65**	**21.793.952.905**	**2,58**	**21.836.496.670**	**2,58**	**21.858.392.653**	**2,54**	**87.247.004.578**	**2,59**
	4. 2. 1. Sekretariat DPRD Kota Langsa	21.758.162.349	2,65	21.793.952.905	2,58	21.836.496.670	2,58	21.858.392.653	2,54	87.247.004.578	2,59
5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**150.252.612.394**	**18,28**	**152.090.144.191**	**18,02**	**154.466.339.436**	**18,24**	**157.908.941.308**	**18,34**	**614.718.037.330**	**18,22**
	5. 1. Perencanaan	**6.847.059.318**	**0,83**	**6.847.151.858**	**0,81**	**6.951.904.860**	**0,82**	**6.997.718.627**	**0,81**	**27.643.834.663**	**0,82**
	5. 1. 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	6.847.059.318	0,83	6.847.151.858	0,81	6.951.904.860	0,82	6.997.718.627	0,81	27.643.834.663	0,82

NO	URUSAN/BIDANG/SKPD	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5. 2. Keuangan	**129.097.351.645**	**15,71**	**130.746.900.756**	**15,49**	**132.898.216.403**	**15,69**	**136.067.190.278**	**15,80**	**528.809.659.082**	**15,67**
	5. 2. 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	129.097.351.645	15,71	130.746.900.756	15,49	132.898.216.403	15,69	136.067.190.278	15,80	528.809.659.082	15,67
	5. 3. Kepegawaian	**13.074.901.431**	**1,59**	**13.156.091.577**	**1,56**	**13.168.218.174**	**1,55**	**13.288.032.403**	**1,54**	**52.687.243.585**	**1,56**
	5. 3. 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	13.074.901.431	1,59	13.156.091.577	1,56	13.168.218.174	1,55	13.288.032.403	1,54	52.687.243.585	1,56
	5. 4. Pendidikan Dan Pelatihan	**912.000.000**	**0,11**	**1.014.000.000**	**0,12**	**1.116.000.000**	**0,13**	**1.218.000.000**	**0,14**	**4.260.000.000**	**0,13**
	5. 4. 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	912.000.000	0,11	1.014.000.000	0,12	1.116.000.000	0,13	1.218.000.000	0,14	4.260.000.000	0,13
	5. 5. Penelitian Dan Pengembangan	**321.300.000**	**0,04**	**326.000.000**	**0,04**	**332.000.000**	**0,04**	**338.000.000**	**0,04**	**1.317.300.000**	**0,04**
	5. 5. 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	321.300.000	0,04	326.000.000	0,04	332.000.000	0,04	338.000.000	0,04	1.317.300.000	0,04
6.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**6.661.926.170**	**0,81**	**6.697.774.346**	**0,79**	**6.737.502.763**	**0,80**	**6.776.311.823**	**0,79**	**26.873.515.102**	**0,80**
	6. 1. Inspektorat Daerah	**6.661.926.170**	**0,81**	**6.697.774.346**	**0,79**	**6.737.502.763**	**0,80**	**6.776.311.823**	**0,79**	**26.873.515.102**	**0,80**
	6. 1. 1. Inspektorat Kota Langsa	6.661.926.170	0,81	6.697.774.346	0,79	6.737.502.763	0,80	6.776.311.823	0,79	26.873.515.102	0,80
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**17.905.956.529**	**2,18**	**18.025.075.647**	**2,14**	**18.139.244.361**	**2,14**	**18.253.163.918**	**2,12**	**72.323.440.455**	**2,14**
	7. 1. Kecamatan	**17.905.956.529**	**2,18**	**18.025.075.647**	**2,14**	**18.139.244.361**	**2,14**	**18.253.163.918**	**2,12**	**72.323.440.455**	**2,14**
	7. 1. 1. Kecamatan Langsa Kota	3.838.503.644	0,47	3.858.633.065	0,46	3.881.714.632	0,46	3.904.348.607	0,45	15.483.199.948	0,46
	7. 1. 2. Kecamatan Langsa Barat	3.631.612.811	0,44	3.659.306.694	0,43	3.682.453.047	0,43	3.705.652.131	0,43	14.679.024.684	0,44
	7. 1. 3. Kecamatan Langsa Timur	3.256.850.522	0,40	3.275.507.739	0,39	3.296.908.743	0,39	3.318.353.752	0,39	13.147.620.756	0,39
	7. 1. 4. Kecamatan Langsa Lama	3.847.704.674	0,47	3.874.729.006	0,46	3.899.008.960	0,46	3.923.344.814	0,46	15.544.787.455	0,46
	7. 1. 5. Kecamatan Langsa Baro	3.331.284.877	0,41	3.356.899.142	0,40	3.379.158.979	0,40	3.401.464.614	0,40	13.468.807.612	0,40
8.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**6.103.297.128**	**0,74**	**15.144.829.304**	**1,79**	**5.187.004.141**	**0,61**	**5.233.721.852**	**0,61**	**31.668.852.426**	**0,94**
	8. 1. Kesatuan Bangsa dan Politik	**6.103.297.128**	**0,74**	**15.144.829.304**	**1,79**	**5.187.004.141**	**0,61**	**5.233.721.852**	**0,61**	**31.668.852.426**	**0,94**
	8. 1. 1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	6.103.297.128	0,74	15.144.829.304	1,79	5.187.004.141	0,61	5.233.721.852	0,61	31.668.852.426	0,94

NO	URUSAN/BIDANG/SKPD	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	**UNSUR KEKHUSUSAN**	**18.917.616.427**	**2,30**	**19.315.258.884**	**2,29**	**19.614.885.053**	**2,32**	**20.072.095.353**	**2,33**	**77.919.855.717**	**2,31**
	9. 1. Kekhususan Aceh	**18.917.616.427**	**2,30**	**19.315.258.884**	**2,29**	**19.614.885.053**	**2,32**	**20.072.095.353**	**2,33**	**77.919.855.717**	**2,31**
	9. 1. 1. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	11.079.886.336	1,35	11.112.554.050	1,32	11.134.875.102	1,31	11.156.249.760	1,30	44.483.565.249	1,32
	9. 1. 2. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa	2.242.625.844	0,27	2.269.938.425	0,27	2.286.767.069	0,27	2.304.111.857	0,27	9.103.443.196	0,27
	9. 1. 3. Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	5.595.104.246	0,68	5.932.766.408	0,70	6.193.242.881	0,73	6.611.733.736	0,77	24.332.847.272	0,72
JUMLAH		**821.757.427.058**	**100,00**	**844.218.486.498**	**100,00**	**847.007.686.498**	**100,00**	**861.118.886.498**	**100,00**	**3.374.102.486.552**	**100,00**

Tabel 7.9.
Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Terhadap Rencana Program Prioritas Menurut Perangkat Daerah, Urusan dan Bidang Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2026

NO	SKPD/BIDANG/URUSAN/	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LANGSA**	**173.152.158.672**	**21,07**	**177.554.219.725**	**21,03**	**182.044.382.273**	**21,49**	**187.846.032.883**	**21,81**	**720.596.793.554**	**21,36**
	1. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**171.937.158.672**	**20,92**	**176.329.219.725**	**20,89**	**180.816.382.273**	**21,35**	**186.616.032.883**	**21,67**	**715.698.793.554**	**21,21**
	1. 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	171.937.158.672	20,92	176.329.219.725	20,89	180.816.382.273	21,35	186.616.032.883	21,67	715.698.793.554	21,21
	2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**1.215.000.000**	**0,15**	**1.225.000.000**	**0,15**	**1.228.000.000**	**0,14**	**1.230.000.000**	**0,14**	**4.898.000.000**	**0,15**
	2. 22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.215.000.000	0,15	1.225.000.000	0,15	1.228.000.000	0,14	1.230.000.000	0,14	4.898.000.000	0,15
2.	**SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KOTA LANGSA**	**1.291.390.406**	**0,16**	**1.323.064.654**	**0,16**	**1.338.171.356**	**0,16**	**1.355.890.342**	**0,16**	**5.308.516.759**	**0,16**
	1. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**1.291.390.406**	**0,16**	**1.323.064.654**	**0,16**	**1.338.171.356**	**0,16**	**1.355.890.342**	**0,16**	**5.308.516.759**	**0,16**
	1. 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.291.390.406	0,16	1.323.064.654	0,16	1.338.171.356	0,16	1.355.890.342	0,16	5.308.516.759	0,16
3.	**DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA**	**209.260.513.144**	**25,46**	**211.657.463.060**	**25,07**	**215.019.440.714**	**25,39**	**218.578.175.007**	**25,38**	**854.515.591.925**	**25,33**
	1. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**209.260.513.144**	**25,46**	**211.657.463.060**	**25,07**	**215.019.440.714**	**25,39**	**218.578.175.007**	**25,38**	**854.515.591.925**	**25,33**
	1. 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	209.260.513.144	25,46	211.657.463.060	25,07	215.019.440.714	25,39	218.578.175.007	25,38	854.515.591.925	25,33
4.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA LANGSA**	**49.128.485.320**	**5,98**	**52.574.883.030**	**6,23**	**53.584.565.065**	**6,33**	**53.587.036.860**	**6,22**	**208.874.970.276**	**6,19**
	1. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**49.128.485.320**	**5,98**	**52.574.883.030**	**6,23**	**53.584.565.065**	**6,33**	**53.587.036.860**	**6,22**	**208.874.970.276**	**6,19**
	1. 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.218.485.320	5,26	46.529.883.030	5,51	47.539.565.065	5,61	47.542.036.860	5,52	184.829.970.276	5,48
	1. 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.910.000.000	0,72	6.045.000.000	0,72	6.045.000.000	0,71	6.045.000.000	0,70	24.045.000.000	0,71
5.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA LANGSA**	**13.295.881.014**	**1,62**	**13.323.855.076**	**1,58**	**13.349.667.935**	**1,58**	**13.375.563.609**	**1,55**	**53.344.967.633**	**1,58**
	1. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**13.295.881.014**	**1,62**	**13.323.855.076**	**1,58**	**13.349.667.935**	**1,58**	**13.375.563.609**	**1,55**	**53.344.967.633**	**1,58**
	1. 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	13.295.881.014	1,62	13.323.855.076	1,58	13.349.667.935	1,58	13.375.563.609	1,55	53.344.967.633	1,58

NO	SKPD/BIDANG/URUSAN/	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LANGSA**	**8.868.717.154**	**1,08**	**8.896.669.302**	**1,05**	**8.929.378.910**	**1,05**	**8.962.130.817**	**1,04**	**35.656.896.182**	**1,06**
	1. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**8.868.717.154**	**1,08**	**8.896.669.302**	**1,05**	**8.929.378.910**	**1,05**	**8.962.130.817**	**1,04**	**35.656.896.182**	**1,06**
	1. 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	8.868.717.154	1,08	8.896.669.302	1,05	8.929.378.910	1,05	8.962.130.817	1,04	35.656.896.182	1,06
7.	**DINAS SOSIAL KOTA LANGSA**	**6.834.576.637**	**0,83**	**6.867.358.296**	**0,81**	**6.904.995.111**	**0,82**	**6.942.678.859**	**0,81**	**27.549.608.903**	**0,82**
	1. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**6.834.576.637**	**0,83**	**6.867.358.296**	**0,81**	**6.904.995.111**	**0,82**	**6.942.678.859**	**0,81**	**27.549.608.903**	**0,82**
	1. 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6.834.576.637	0,83	6.867.358.296	0,81	6.904.995.111	0,82	6.942.678.859	0,81	27.549.608.903	0,82
8.	**DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA LANGSA**	**1.035.120.174**	**0,13**	**1.053.810.404**	**0,12**	**1.059.008.585**	**0,13**	**1.064.714.757**	**0,12**	**4.212.653.921**	**0,12**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**1.035.120.174**	**0,13**	**1.053.810.404**	**0,12**	**1.059.008.585**	**0,13**	**1.064.714.757**	**0,12**	**4.212.653.921**	**0,12**
	2. 7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	1.035.120.174	0,13	1.053.810.404	0,12	1.059.008.585	0,13	1.064.714.757	0,12	4.212.653.921	0,12
9.	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA**	**4.176.558.260**	**0,51**	**4.225.303.721**	**0,50**	**4.243.323.495**	**0,50**	**4.277.392.867**	**0,50**	**16.922.578.343**	**0,50**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**4.176.558.260**	**0,51**	**4.225.303.721**	**0,50**	**4.243.323.495**	**0,50**	**4.277.392.867**	**0,50**	**16.922.578.343**	**0,50**
	2. 18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4.176.558.260	0,51	4.225.303.721	0,50	4.243.323.495	0,50	4.277.392.867	0,50	16.922.578.343	0,50
10.	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA**	**7.789.156.713**	**0,95**	**7.827.221.549**	**0,93**	**7.876.307.465**	**0,93**	**7.925.443.310**	**0,92**	**31.418.129.037**	**0,93**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**7.789.156.713**	**0,95**	**7.827.221.549**	0,93	**7.876.307.465**	**0,93**	**7.925.443.310**	**0,92**	**31.418.129.037**	**0,93**
	2. 8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.473.266.213	0,54	4.501.221.549	0,53	4.537.307.465	0,54	4.573.443.310	0,53	18.085.238.537	0,54
	2. 14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.315.890.500	0,40	3.326.000.000	0,39	3.339.000.000	0,39	3.352.000.000	0,39	13.332.890.500	0,40
11.	**DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA LANGSA**	**14.209.616.797**	**1,73**	**14.259.764.955**	**1,69**	**14.312.279.586**	**1,69**	**14.362.936.791**	**1,67**	**57.144.598.129**	**1,69**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**10.706.168.797**	**1,30**	**10.748.764.955**	**1,27**	**10.793.279.586**	**1,27**	**10.837.936.791**	**1,26**	**43.086.150.129**	**1,28**
	2. 9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	10.706.168.797	1,30	10.748.764.955	1,27	10.793.279.586	1,27	10.837.936.791	1,26	43.086.150.129	1,28
	3. Urusan Pemerintahan Pilihan	**3.503.448.000**	**0,43**	**3.511.000.000**	**0,42**	**3.519.000.000**	**0,42**	**3.525.000.000**	**0,41**	**14.058.448.000**	**0,42**
	3. 25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.745.000.000	0,21	1.749.000.000	0,21	1.753.000.000	0,21	1.755.000.000	0,20	7.002.000.000	0,21
	3. 27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	1.758.448.000	0,21	1.762.000.000	0,21	1.766.000.000	0,21	1.770.000.000	0,21	7.056.448.000	0,21

NO	SKPD/BIDANG/URUSAN/	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	**DINAS PERTANAHAN KOTA LANGSA**	**1.079.420.174**	**0,13**	**1.085.610.404**	**0,13**	**1.091.808.585**	**0,13**	**1.098.014.757**	**0,13**	**4.354.853.921**	**0,13**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**1.079.420.174**	**0,13**	**1.085.610.404**	**0,13**	**1.091.808.585**	**0,13**	**1.098.014.757**	**0,13**	**4.354.853.921**	**0,13**
	2. 10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1.079.420.174	0,13	1.085.610.404	0,13	1.091.808.585	0,13	1.098.014.757	0,13	4.354.853.921	0,13
13.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA**	**24.961.681.402**	**3,04**	**25.006.119.845**	**2,96**	**25.048.758.404**	**2,96**	**25.091.532.155**	**2,91**	**100.108.091.806**	**2,97**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**24.961.681.402**	**3,04**	**25.006.119.845**	**2,96**	**25.048.758.404**	**2,96**	**25.091.532.155**	**2,91**	**100.108.091.806**	**2,97**
	2. 11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	24.961.681.402	3,04	25.006.119.845	2,96	25.048.758.404	2,96	25.091.532.155	2,91	100.108.091.806	2,97
14.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LANGSA**	**3.711.119.912**	**0,45**	**3.888.293.161**	**0,46**	**3.910.504.941**	**0,46**	**3.932.759.779**	**0,46**	**15.442.677.792**	**0,46**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**3.711.119.912**	**0,45**	**3.888.293.161**	**0,46**	**3.910.504.941**	**0,46**	**3.932.759.779**	**0,46**	**15.442.677.792**	**0,46**
	2. 12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.711.119.912	0,45	3.888.293.161	0,46	3.910.504.941	0,46	3.932.759.779	0,46	15.442.677.792	0,46
15.	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KOTA LANGSA**	**4.044.786.559**	**0,49**	**4.075.031.700**	**0,48**	**4.103.468.378**	**0,48**	**4.131.439.240**	**0,48**	**16.354.725.877**	**0,48**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**4.044.786.559**	**0,49**	**4.075.031.700**	**0,48**	**4.103.468.378**	**0,48**	**4.131.439.240**	**0,48**	**16.354.725.877**	**0,48**
	2. 13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.044.786.559	0,49	4.075.031.700	0,48	4.103.468.378	0,48	4.131.439.240	0,48	16.354.725.877	0,48
16.	**DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA**	**4.662.901.544**	**0,57**	**4.676.053.013**	**0,55**	**4.692.198.664**	**0,55**	**4.748.872.043**	**0,55**	**18.780.025.264**	**0,56**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**4.662.901.544**	**0,57**	**4.676.053.013**	**0,55**	**4.692.198.664**	**0,55**	**4.748.872.043**	**0,55**	**18.780.025.264**	**0,56**
	2. 15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	4.662.901.544	0,57	4.676.053.013	0,55	4.692.198.664	0,55	4.748.872.043	0,55	18.780.025.264	0,56
17.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA LANGSA**	**4.134.489.276**	**0,50**	**4.152.631.514**	**0,49**	**4.176.218.564**	**0,49**	**4.199.840.549**	**0,49**	**16.663.179.903**	**0,49**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**4.134.489.276**	**0,50**	**4.152.631.514**	**0,49**	**4.176.218.564**	**0,49**	**4.199.840.549**	**0,49**	**16.663.179.903**	**0,49**
	2. 16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	4.009.489.276	0,49	4.025.631.514	0,48	4.047.218.564	0,48	4.068.840.549	0,47	16.151.179.903	0,48
	2. 20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	50.000.000	0,01	51.000.000	0,01	52.000.000	0,01	53.000.000	0,01	206.000.000	0,01
	2. 21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	75.000.000	0,01	76.000.000	0,01	77.000.000	0,01	78.000.000	0,01	306.000.000	0,01
18.	**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA**	**12.568.181.360**	**1,53**	**12.596.938.162**	**1,49**	**12.623.848.232**	**1,49**	**12.650.814.853**	**1,47**	**50.439.782.607**	**1,49**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**9.460.181.360**	**1,15**	**9.481.938.162**	**1,12**	**9.501.848.232**	**1,12**	**9.521.814.853**	**1,11**	**37.965.782.607**	**1,13**
	2. 17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	9.460.181.360	1,15	9.481.938.162	1,12	9.501.848.232	1,12	9.521.814.853	1,11	37.965.782.607	1,13

NO	SKPD/BIDANG/URUSAN/	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Urusan Pemerintahan Pilihan	**3.108.000.000**	**0,38**	**3.115.000.000**	**0,37**	**3.122.000.000**	**0,37**	**3.129.000.000**	**0,36**	**12.474.000.000**	**0,37**
	3. 30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	2.048.000.000	0,25	2.053.000.000	0,24	2.058.000.000	0,24	2.063.000.000	0,24	8.222.000.000	0,24
	3. 31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1.060.000.000	0,13	1.062.000.000	0,13	1.064.000.000	0,13	1.066.000.000	0,12	4.252.000.000	0,13
19.	**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LANGSA**	**12.971.114.296**	**1,58**	**12.997.155.170**	**1,54**	**13.024.584.948**	**1,54**	**13.049.063.875**	**1,52**	**52.041.918.289**	**1,54**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**10.721.114.296**	**1,30**	**10.744.155.170**	**1,27**	**10.768.584.948**	**1,27**	**10.793.063.875**	**1,25**	**43.026.918.289**	**1,28**
	2. 19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.721.114.296	1,30	10.744.155.170	1,27	10.768.584.948	1,27	10.793.063.875	1,25	43.026.918.289	1,28
	3. Urusan Pemerintahan Pilihan	**2.250.000.000**	**0,27**	**2.253.000.000**	**0,27**	**2.256.000.000**	**0,27**	**2.256.000.000**	**0,26**	**9.015.000.000**	**0,27**
	3. 26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	2.250.000.000	0,27	2.253.000.000	0,27	2.256.000.000	0,27	2.256.000.000	0,26	9.015.000.000	0,27
20.	**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KOTA LANGSA**	**1.414.658.379**	**0,17**	**1.427.835.936**	**0,17**	**1.439.624.381**	**0,17**	**1.451.423.769**	**0,17**	**5.733.542.465**	**0,17**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**1.414.658.379**	**0,17**	**1.427.835.936**	**0,17**	**1.439.624.381**	**0,17**	**1.451.423.769**	**0,17**	**5.733.542.465**	**0,17**
	2. 22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.414.658.379	0,17	1.427.835.936	0,17	1.439.624.381	0,17	1.451.423.769	0,17	5.733.542.465	0,17
21.	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA LANGSA**	**4.094.094.417**	**0,50**	**4.117.593.190**	**0,49**	**4.143.965.583**	**0,49**	**4.170.386.837**	**0,48**	**16.526.040.027**	**0,49**
	2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**4.094.094.417**	**0,50**	**4.117.593.190**	**0,49**	**4.143.965.583**	**0,49**	**4.170.386.837**	**0,48**	**16.526.040.027**	**0,49**
	2. 23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3.914.094.417	0,48	3.935.593.190	0,47	3.959.965.583	0,47	3.984.386.837	0,46	15.794.040.027	0,47
	2. 24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	180.000.000	0,02	182.000.000	0,02	184.000.000	0,02	186.000.000	0,02	732.000.000	0,02
22.	**SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA**	**35.223.234.453**	**4,29**	**35.314.575.352**	**4,18**	**35.859.712.897**	**4,23**	**35.964.115.630**	**4,18**	**142.361.638.333**	**4,22**
	4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	**35.223.234.453**	**4,29**	**35.314.575.352**	**4,18**	**35.859.712.897**	**4,23**	**35.964.115.630**	**4,18**	**142.361.638.333**	**4,22**
	4. 1. Sekretariat Daerah	35.223.234.453	4,29	35.314.575.352	4,18	35.859.712.897	4,23	35.964.115.630	4,18	142.361.638.333	4,22
23.	**SEKRETARIAT DPR KOTA LANGSA**	**21.758.162.349**	**2,65**	**21.793.952.905**	**2,58**	**21.836.496.670**	**2,58**	**21.858.392.653**	**2,54**	**87.247.004.578**	**2,59**
	4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	**21.758.162.349**	**2,65**	**21.793.952.905**	**2,58**	**21.836.496.670**	**2,58**	**21.858.392.653**	**2,54**	**87.247.004.578**	**2,59**
	4. 2. Sekretariat DPRD	21.758.162.349	2,65	21.793.952.905	2,58	21.836.496.670	2,58	21.858.392.653	2,54	87.247.004.578	2,59
24.	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA**	**7.168.359.318**	**0,87**	**7.173.151.858**	**0,85**	**7.283.904.860**	**0,86**	**7.335.718.627**	**0,85**	**28.961.134.663**	**0,86**
	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	**7.168.359.318**	**0,87**	**7.173.151.858**	**0,85**	**7.283.904.860**	**0,86**	**7.335.718.627**	**0,85**	**28.961.134.663**	**0,86**
	5. 1. Perencanaan	6.847.059.318	0,83	6.847.151.858	0,81	6.951.904.860	0,82	6.997.718.627	0,81	27.643.834.663	0,82
	5. 5. Penelitian dan Pengembangan	321.300.000	0,04	326.000.000	0,04	332.000.000	0,04	338.000.000	0,04	1.317.300.000	0,04
25.	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA**	**129.097.351.645**	**15,71**	**130.746.900.756**	**15,49**	**132.898.216.403**	**15,69**	**136.067.190.278**	**15,80**	**528.809.659.082**	**15,67**
	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	**129.097.351.645**	**15,71**	**130.746.900.756**	**15,49**	**132.898.216.403**	**15,69**	**136.067.190.278**	**15,80**	**528.809.659.082**	**15,67**
	5. 2. Keuangan	129.097.351.645	15,71	130.746.900.756	15,49	132.898.216.403	15,69	136.067.190.278	15,80	528.809.659.082	15,67

NO	SKPD/BIDANG/URUSAN/	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LANGSA**	**13.986.901.431**	**1,70**	**14.170.091.577**	**1,68**	**14.284.218.174**	**1,69**	**14.506.032.403**	**1,68**	**56.947.243.585**	**1,69**
	5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	**13.986.901.431**	**1,70**	**14.170.091.577**	**1,68**	**14.284.218.174**	**1,69**	**14.506.032.403**	**1,68**	**56.947.243.585**	**1,69**
	5. 3. Kepegawaian	13.074.901.431	1,59	13.156.091.577	1,56	13.168.218.174	1,55	13.288.032.403	1,54	52.687.243.585	1,56
	5. 4. Pendidikan Dan Pelatihan	912.000.000	0,11	1.014.000.000	0,12	1.116.000.000	0,13	1.218.000.000	0,14	4.260.000.000	0,13
27.	**INSPEKTORAT KOTA LANGSA**	**6.661.926.170**	**0,81**	**6.697.774.346**	**0,79**	**6.737.502.763**	**0,80**	**6.776.311.823**	**0,79**	**26.873.515.102**	**0,80**
	6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	**6.661.926.170**	**0,81**	**6.697.774.346**	**0,79**	**6.737.502.763**	**0,80**	**6.776.311.823**	**0,79**	**26.873.515.102**	**0,80**
	6. 1. Inspektorat Daerah	6.661.926.170	0,81	6.697.774.346	0,79	6.737.502.763	0,80	6.776.311.823	0,79	26.873.515.102	0,80
28.	**KECAMATAN LANGSA KOTA**	**3.838.503.644**	**0,47**	**3.858.633.065**	**0,46**	**3.881.714.632**	**0,46**	**3.904.348.607**	**0,45**	**15.483.199.948**	**0,46**
	7. Unsur Kewilayahan	**3.838.503.644**	**0,47**	**3.858.633.065**	**0,46**	**3.881.714.632**	**0,46**	**3.904.348.607**	**0,45**	**15.483.199.948**	**0,46**
	7. 1. Kecamatan	3.838.503.644	0,47	3.858.633.065	0,46	3.881.714.632	0,46	3.904.348.607	0,45	15.483.199.948	0,46
29.	**KECAMATAN LANGSA BARAT**	**3.631.612.811**	**0,44**	**3.659.306.694**	**0,43**	**3.682.453.047**	**0,43**	**3.705.652.131**	**0,43**	**14.679.024.684**	**0,44**
	7. Unsur Kewilayahan	**3.631.612.811**	**0,44**	**3.659.306.694**	**0,43**	**3.682.453.047**	**0,43**	**3.705.652.131**	**0,43**	**14.679.024.684**	**0,44**
	7. 1. Kecamatan	3.631.612.811	0,44	3.659.306.694	0,43	3.682.453.047	0,43	3.705.652.131	0,43	14.679.024.684	0,44
30.	**KECAMATAN LANGSA TIMUR**	**3.256.850.522**	**0,40**	**3.275.507.739**	**0,39**	**3.296.908.743**	**0,39**	**3.318.353.752**	**0,39**	**13.147.620.756**	**0,39**
	7. Unsur Kewilayahan	**3.256.850.522**	**0,40**	**3.275.507.739**	**0,39**	**3.296.908.743**	**0,39**	**3.318.353.752**	**0,39**	**13.147.620.756**	**0,39**
	7. 1. Kecamatan	3.256.850.522	0,40	3.275.507.739	0,39	3.296.908.743	0,39	3.318.353.752	0,39	13.147.620.756	0,39
31.	**KECAMATAN LANGSA LAMA**	**3.847.704.674**	**0,47**	**3.874.729.006**	**0,46**	**3.899.008.960**	**0,46**	**3.923.344.814**	**0,46**	**15.544.787.455**	**0,46**
	7. Unsur Kewilayahan	**3.847.704.674**	**0,47**	**3.874.729.006**	**0,46**	**3.899.008.960**	**0,46**	**3.923.344.814**	**0,46**	**15.544.787.455**	**0,46**
	7. 1. Kecamatan	3.847.704.674	0,47	3.874.729.006	0,46	3.899.008.960	0,46	3.923.344.814	0,46	15.544.787.455	0,46
32.	**KECAMATAN LANGSA BARO**	**3.331.284.877**	**0,41**	**3.356.899.142**	**0,40**	**3.379.158.979**	**0,40**	**3.401.464.614**	**0,40**	**13.468.807.612**	**0,40**
	7. Unsur Kewilayahan	**3.331.284.877**	**0,41**	**3.356.899.142**	**0,40**	**3.379.158.979**	**0,40**	**3.401.464.614**	**0,40**	**13.468.807.612**	**0,40**
	7. 1. Kecamatan	3.331.284.877	0,41	3.356.899.142	0,40	3.379.158.979	0,40	3.401.464.614	0,40	13.468.807.612	0,40
33.	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LANGSA**	**6.103.297.128**	**0,74**	**15.144.829.304**	**1,79**	**5.187.004.141**	**0,61**	**5.233.721.852**	**0,61**	**31.668.852.426**	**0,94**
	8. Unsur Pemerintahan Umum	**6.103.297.128**	**0,74**	**15.144.829.304**	**1,79**	**5.187.004.141**	**0,61**	**5.233.721.852**	**0,61**	**31.668.852.426**	**0,94**
	8. 1. Kesatuan Bangsa dan Politik	6.103.297.128	0,74	15.144.829.304	1,79	5.187.004.141	0,61	5.233.721.852	0,61	31.668.852.426	0,94
34.	**DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LANGSA**	**13.329.886.336**	**1,62**	**13.362.554.050**	**1,58**	**13.384.875.102**	**1,58**	**13.406.249.760**	**1,56**	**53.483.565.249**	**1,59**
	1. Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**2.250.000.000**	**0,27**	**2.250.000.000**	**0,27**	**2.250.000.000**	**0,27**	**2.250.000.000**	**0,26**	**9.000.000.000**	**0,27**
	1. 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2.250.000.000	0,27	2.250.000.000	0,27	2.250.000.000	0,27	2.250.000.000	0,26	9.000.000.000	0,27
	9. Unsur Kekhususan	**11.079.886.336**	**1,35**	**11.112.554.050**	**1,32**	**11.134.875.102**	**1,31**	**11.156.249.760**	**1,30**	**44.483.565.249**	**1,32**
	9. 1. Kekhususan Aceh	11.079.886.336	1,35	11.112.554.050	1,32	11.134.875.102	1,31	11.156.249.760	1,30	44.483.565.249	1,32

NO	SKPD/BIDANG/URUSAN/	RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR	
		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	**SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KOTA LANGSA**	**2.242.625.844**	**0,27**	**2.269.938.425**	**0,27**	**2.286.767.069**	**0,27**	**2.304.111.857**	**0,27**	**9.103.443.196**	**0,27**
	9. Unsur Kekhususan	**2.242.625.844**	**0,27**	**2.269.938.425**	**0,27**	**2.286.767.069**	**0,27**	**2.304.111.857**	**0,27**	**9.103.443.196**	**0,27**
	9. 1. Kekhususan Aceh	2.242.625.844	0,27	2.269.938.425	0,27	2.286.767.069	0,27	2.304.111.857	0,27	9.103.443.196	0,27
36.	**SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA LANGSA**	**5.595.104.246**	**0,68**	**5.932.766.408**	**0,70**	**6.193.242.881**	**0,73**	**6.611.733.736**	**0,77**	**24.332.847.272**	**0,72**
	9. Unsur Kekhususan	**5.595.104.246**	**0,68**	**5.932.766.408**	**0,70**	**6.193.242.881**	**0,73**	**6.611.733.736**	**0,77**	**24.332.847.272**	**0,72**
	9. 1. Kekhususan Aceh	5.595.104.246	0,68	5.932.766.408	0,70	6.193.242.881	0,73	6.611.733.736	0,77	24.332.847.272	0,72
JUMLAH		**821.757.427.058**	**100,00**	**844.218.486.498**	**100,00**	**847.007.686.498**	**100,00**	**861.118.886.498**	**100,00**	**3.374.102.486.552**	**100,00**

VII.3. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan Pemerintah Kota Langsa terbagi kedalam 6 (enam) bidang urusan wajib pelayanan dasar dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan, terdiri dari :
    1.1. Pendidikan Anak Usia Dini
    1.2. Pendidikan Dasar
    1.3. Pendidikan Kesetaraan

2. Bidang Kesehatan, terdiri dari :
    2.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
    2.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
    2.3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
    2.4. Pelayanan Kesehatan Balita
    2.5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
    2.6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
    2.7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
    2.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
    2.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
    2.10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
    2.11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
    2.12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

3. Bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari :
    3.1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
    3.2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :
   4.1. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
   4.2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, terdiri dari :
   5.1. Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
   5.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
   5.3. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   5.4. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
   55. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

6. Bidang Sosial, terdiri dari :
   6.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti
   6.2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti
   6.3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti
   6.4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti
   6.5. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana

Untuk lebih jelasnya rencana penyelenggaraan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 7.10.
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023-2026

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
1.	**BIDANG PENDIDIKAN**					
	1. 1. Pendidikan Anak Usia Dini					
	1. 1. 1. Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun / Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD X 100%	- 8.714 Orang / 8.714 Orang	- 9.031 Orang / 9.031 Orang	- 9.348 Orang / 9.348 Orang	- 9.665 Orang / 9.665 Orang	- 9.982 Orang / 9.982 Orang
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LANGSA					
	- Program Pengelolaan Pendidikan					
	- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Rp 6.116.215.332	Rp 6.126.000.000	Rp 6.129.000.000	Rp 6.131.000.000
	JUMLAH ALOKASI (1.1)		**Rp 6.116.215.332**	**Rp 6.126.000.000**	**Rp 6.129.000.000**	**Rp 6.131.000.000**
	1. 2. Pendidikan Dasar					
	1. 2. 1. Jumlah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun / Jumlah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) X 100%	- 28.924 Orang / 28.924 Orang	- 29.638 Orang / 29.638 Orang	- 30.370 Orang / 30.370 Orang	- 31.121 Orang / 31.121 Orang	- 31.889 Orang / 31.889 Orang
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LANGSA					
	- Program Pengelolaan Pendidikan					
	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp 24.273.932.000	Rp 26.015.800.000	Rp 28.818.500.000	Rp 30.856.000.000
	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rp 20.517.490.000	Rp 22.765.155.000	Rp 24.048.455.000	Rp 27.409.505.000
	JUMLAH ALOKASI (1.2)		**Rp 44.791.422.000**	**Rp 48.780.955.000**	**Rp 52.866.955.000**	**Rp 58.265.505.000**
	1. 3. Pendidikan Kesetaraan					
	1. 3. 1. Jumlah Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang memerlukan Pendidikan Kesetaraan / Jumlah Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan X 100%	- 6.641 Orang / 6.641 Orang	- 6.651 Orang / 6.651 Orang	- 7.566 Orang / 7.566 Orang	- 7.577 Orang / 7.577 Orang	- 7.588 Orang / 7.588 Orang

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	- OPD TERKAIT **- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LANGSA** **- Program Pengelolaan Pendidikan** - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Rp 2.637.600.000	Rp 2.640.500.000	Rp 2.643.500.000	Rp 2.645.500.000
	JUMLAH ALOKASI (1.3)		**Rp 2.637.600.000**	**Rp 2.640.500.000**	**Rp 2.643.500.000**	**Rp 2.645.500.000**
	JUMLAH ALOKASI SPM BIDANG PENDIDIKAN (1)		**Rp 53.545.237.332**	**Rp 57.547.455.000**	**Rp 61.639.455.000**	**Rp 67.042.005.000**
2.	**BIDANG KESEHATAN**					
	2. 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil					
	2. 1. 1. Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Ibu Hamil / Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan X 100%	- 3.426 Orang / 3.426 Orang	- 3.817 Orang / 3.817 Orang	- 3.893 Orang / 3.893 Orang	- 3.970 Orang / 3.970 Orang	- 4.049 Orang / 4.049 Orang
	- OPD TERKAIT **- DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA** - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 65.560.100	Rp 66.000.000	Rp 67.000.000	Rp 68.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.1)		**Rp 65.560.100**	**Rp 66.000.000**	**Rp 67.000.000**	**Rp 68.000.000**
	2. 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin					
	2. 2. 1. Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Ibu Bersalin / Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan X 100%	- 3.551 Orang / 3.551 Orang	- 3.701 Orang / 3.701 Orang	- 3.851 Orang / 3.851 Orang	- 4.001 Orang / 4.001 Orang	- 4.151 Orang / 4.151 Orang
	- OPD TERKAIT **- DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA** - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Rp 35.639.000	Rp 37.000.000	Rp 40.000.000	Rp 43.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.2)		**Rp 35.639.000**	**Rp 37.000.000**	**Rp 40.000.000**	**Rp 43.000.000**

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	2. 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
	2. 3. 1. Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Bayi Baru Lahir / Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan X 100%	- 3.523 Orang / 3.523 Orang	- 3.675 Orang / 3.675 Orang	- 3.829 Orang / 3.829 Orang	- 3.981 Orang / 3.981 Orang	- 4.134 Orang / 4.134 Orang
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA					
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Rp 50.000.000	Rp 51.000.000	Rp 52.000.000	Rp 53.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.3)		**Rp 50.000.000**	**Rp 51.000.000**	**Rp 52.000.000**	**Rp 53.000.000**
	2. 4. Pelayanan kesehatan balita					
	2. 4. 1. Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Balita / Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan X 100%	- 13.796 Orang / 13.796 Orang	- 13.987 Orang / 13.987 Orang	- 14.177 Orang / 14.177 Orang	- 14.368 Orang / 14.368 Orang	- 14.558 Orang / 14.558 Orang
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA					
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Rp 75.000.000	Rp 76.000.000	Rp 77.000.000	Rp 78.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.4)		**Rp 75.000.000**	**Rp 76.000.000**	**Rp 77.000.000**	**Rp 78.000.000**
	2. 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					
	2. 5. 1. Jumlah Penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk usia pendidikan dasar / Jumlah Penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan X 100%	- 28.924 Orang / 28.924 Orang	- 29.638 Orang / 29.638 Orang	- 30.370 Orang / 30.370 Orang	- 31.121 Orang / 31.121 Orang	- 31.889 Orang / 31.889 Orang

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	- **OPD TERKAIT** - **DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA** - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 50.000.000	Rp 51.000.000	Rp 52.000.000	Rp 53.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.5)		**Rp 50.000.000**	**Rp 51.000.000**	**Rp 52.000.000**	**Rp 53.000.000**
	2. 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif					
	2. 6. 1. Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk usia produktif / Jumlah Penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan X 100%	- 134.503 Orang / 134.503 Orang	- 136.386 Orang / 136.386 Orang	- 138.295 Orang / 138.295 Orang	- 140.232 Orang / 140.232 Orang	- 142.195 Orang / 142.195 Orang
	- **OPD TERKAIT** - **DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA** - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Rp 75.000.000	Rp 76.000.000	Rp 77.000.000	Rp 78.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.6)		**Rp 75.000.000**	**Rp 76.000.000**	**Rp 77.000.000**	**Rp 78.000.000**
	2. 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut					
	2. 7. 1. Jumlah Penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk usia lanjut / Jumlah Penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan X 100%	- 9.687 Orang / 9.687 Orang	- 9.784 Orang / 9.784 Orang	- 9.882 Orang / 9.882 Orang	- 9.980 Orang / 9.980 Orang	- 10.080 Orang / 10.080 Orang
	- **OPD TERKAIT** - **DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA** - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Rp 100.000.000	Rp 110.000.000	Rp 111.000.000	Rp 112.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.7)		**Rp 100.000.000**	**Rp 110.000.000**	**Rp 111.000.000**	**Rp 112.000.000**

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	2. 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi					
	2. 8. 1. Jumlah Penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk penderita hipertensi / Jumlah Penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan X 100%	- 17.685 Orang / 17.685 Orang	- 20.161 Orang / 20.161 Orang	- 22.983 Orang / 22.983 Orang	- 26.201 Orang / 26.201 Orang	- 29.869 Orang / 29.869 Orang
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA					
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Rp 50.000.000	Rp 51.000.000	Rp 52.000.000	Rp 53.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.8)		**Rp 50.000.000**	**Rp 51.000.000**	**Rp 52.000.000**	**Rp 53.000.000**
	2. 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus					
	2. 9. 1. Jumlah Penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk penderita diabetes mellitus / Jumlah Penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan X 100%	- 29.010 Orang / 29.010 Orang	- 31.360 Orang / 31.360 Orang	- 33.900 Orang / 33.900 Orang	- 36.646 Orang / 36.646 Orang	- 39.614 Orang / 39.614 Orang
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA					
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Rp 50.000.000	Rp 51.000.000	Rp 52.000.000	Rp 53.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.9)		**Rp 50.000.000**	**Rp 51.000.000**	**Rp 52.000.000**	**Rp 53.000.000**

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	2. 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					
	2. 10. 1. Jumlah Penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk dengan gangguan jiwa berat / Jumlah Penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan X 100%	- 357 Orang / 357 Orang	- 361 Orang / 361 Orang	- 364 Orang / 364 Orang	- 368 Orang / 368 Orang	- 371 Orang / 371 Orang
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA					
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		Rp 30.000.000	Rp 31.000.000	Rp 32.000.000	Rp 33.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.10)		**Rp 30.000.000**	**Rp 31.000.000**	**Rp 32.000.000**	**Rp 33.000.000**
	2. 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis					
	2. 11. 1. Jumlah Penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk terduga tuberculosis / Jumlah Penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan X 100%	- 1.051 Orang / 1.051 Orang	- 1.156 Orang / 1.156 Orang	- 1.271 Orang / 1.271 Orang	- 1.398 Orang / 1.398 Orang	- 1.537 Orang / 1.537 Orang
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA					
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp 85.000.000	Rp 86.000.000	Rp 87.000.000	Rp 88.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.11)		**Rp 85.000.000**	**Rp 86.000.000**	**Rp 87.000.000**	**Rp 88.000.000**
	2. 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	2. 12. 1. Jumlah Penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	- 4.230 Orang	- 4.763 Orang	- 5.001 Orang	- 5.251 Orang	- 5.514 Orang
	- Jumlah Penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan	- 4.230 Orang	- 4.763 Orang	- 5.001 Orang	- 5.251 Orang	- 5.514 Orang
	X 100%					
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA					
	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		Rp 50.000.000	Rp 51.000.000	Rp 51.000.000	Rp 52.000.000
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Rp 150.000.000	Rp 151.000.000	Rp 152.000.000	Rp 153.000.000
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000
	JUMLAH ALOKASI (2.12)		**Rp 2.200.000.000**	**Rp 2.202.000.000**	**Rp 2.203.000.000**	**Rp 2.205.000.000**
	JUMLAH ALOKASI SPM BIDANG KESEHATAN (2)		**Rp 2.866.199.100**	**Rp 2.888.000.000**	**Rp 2.902.000.000**	**Rp 2.917.000.000**
3.	**BIDANG PEKERJAAN UMUM**					
	3. 1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
	3. 1. 1. Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Rumah Tangga	- 42.967 RT	- 43.943 RT	- 44.919 RT	- 45.895 RT	- 46.871 RT
	- Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	- 42.967 RT	- 43.943 RT	- 44.919 RT	- 45.895 RT	- 46.871 RT
	X 100%					

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA LANGSA					
	- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					
	- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Rp 1.500.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 2.722.302.685
	JUMLAH ALOKASI (3.1)		**Rp 1.500.000.000**	**Rp 2.000.000.000**	**Rp 2.500.000.000**	**Rp 2.722.302.685**
	3. 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik					
	3. 2. 1. Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Rumah Tangga / Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik X 100%	- 42.967 RT / 42.967 RT	- 43.943 RT / 43.943 RT	- 44.919 RT / 44.919 RT	- 45.895 RT / 45.895 RT	- 46.871 RT / 46.871 RT
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA LANGSA					
	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
	- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000
	JUMLAH ALOKASI (3.2)		**Rp 2.000.000.000**	**Rp 2.000.000.000**	**Rp 2.000.000.000**	**Rp 2.000.000.000**
	JUMLAH ALOKASI SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM (3)		**Rp 3.500.000.000**	**Rp 4.000.000.000**	**Rp 4.500.000.000**	**Rp 4.722.302.685**
4.	**BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**					
	4. 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana					
	4. 1. 1. Jumlah Rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	- Jumlah Rumah korban bencana / Jumlah Rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni X 100%	- 50 Rumah / - 50 Rumah	- 50 Rumah / - 50 Rumah	- 50 Rumah / - 50 Rumah	- 50 Rumah / - 50 Rumah	- 50 Rumah / - 50 Rumah
	- OPD TERKAIT **- DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA LANGSA** - Program Pengembangan Perumahan - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
	JUMLAH ALOKASI (4.1)		**Rp 500.000.000**	**Rp 500.000.000**	**Rp 500.000.000**	**Rp 500.000.000**
	4. 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah					
	4. 2. 1. Jumlah Rumah yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Rumah yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah / - Jumlah Rumah yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni X 100%	- 197 Rumah / - 197 Rumah	- 100 Rumah / - 100 Rumah	- 100 Rumah / - 100 Rumah	- 100 Rumah / - 100 Rumah	- 100 Rumah / - 100 Rumah
	- OPD TERKAIT **- DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA LANGSA** - Program Pengembangan Perumahan - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	- Program Pengembangan Perumahan - Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000	Rp 2.000.000.000
	JUMLAH ALOKASI (4.2)		**Rp 2.500.000.000**	**Rp 2.500.000.000**	**Rp 2.500.000.000**	**Rp 2.500.000.000**
	JUMLAH ALOKASI SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT (4)		**Rp 3.000.000.000**	**Rp 3.000.000.000**	**Rp 3.000.000.000**	**Rp 3.000.000.000**
5.	**BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
	5. 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;					
	5. 1. 1. Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk yang terdampak penegakkan hukum perda dan perkada	- 400 Orang	- 100 Orang	- 150 Orang	- 200 Orang	- 250 Orang
	- Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	- 400 Orang	- 100 Orang	- 150 Orang	- 200 Orang	- 250 Orang
	X 100%					
	- OPD TERKAIT **- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA LANGSA** - Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada		Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
	JUMLAH ALOKASI (5.1)		**Rp 50.000.000**	**Rp 50.000.000**	**Rp 50.000.000**	**Rp 50.000.000**
	5. 2. Pelayanan informasi rawan bencana					
	5. 2. 1. Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk	- 192.259 Orang	- 195.700 Orang	- 199.203 Orang	- 202.789 Orang	- 206.439 Orang
	- Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	- 192.259 Orang	- 195.700 Orang	- 199.203 Orang	- 202.789 Orang	- 206.439 Orang
	X 100%					

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	- OPD TERKAIT **- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LANGSA** - Program Penanggulangan Bencana - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Rp 50.000.000	Rp 51.000.000	Rp 52.000.000	Rp 53.000.000
	JUMLAH ALOKASI (5.2)		**Rp 50.000.000**	**Rp 51.000.000**	**Rp 52.000.000**	**Rp 53.000.000**
	5. 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
	5. 3. 1. Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk dikawasan rawan bencana / Jumlah Penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana X 100%	- 29.717 Orang / - 29.717 Orang	- 29.017 Orang / - 29.017 Orang	- 25.696 Orang / - 25.696 Orang	- 22.822 Orang / - 22.822 Orang	- 22.000 Orang / - 22.000 Orang
	- OPD TERKAIT **- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LANGSA** - Program Penanggulangan Bencana - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Rp 650.000.000	Rp 651.000.000	Rp 652.000.000	Rp 653.000.000
	JUMLAH ALOKASI (5.3)		**Rp 650.000.000**	**Rp 651.000.000**	**Rp 652.000.000**	**Rp 653.000.000**
	5. 4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
	5. 4. 1. Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk yang terkena musibah bencana / Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana X 100%	- 20.904 Orang / - 20.904 Orang	- 20.404 Orang / - 20.404 Orang	- 19.904 Orang / - 19.904 Orang	- 19.404 Orang / - 19.404 Orang	- 18.904 Orang / - 18.904 Orang

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	- OPD TERKAIT **- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LANGSA** - Program Penanggulangan Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Rp 150.000.000	Rp 155.000.000	Rp 160.000.000	Rp 165.000.000
	JUMLAH ALOKASI (5.4)		**Rp 150.000.000**	**Rp 155.000.000**	**Rp 160.000.000**	**Rp 165.000.000**
	5. 5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
	5. 5. 1. Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk yang terkena musibah kebakaran	- 90 Orang	- 90 Orang	- 90 Orang	- 90 Orang	- 90 Orang
	X 100%					
	- Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	- 90 Orang	- 90 Orang	- 90 Orang	- 90 Orang	- 90 Orang
	- OPD TERKAIT **- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LANGSA** - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp 684.402.223	Rp 685.000.000	Rp 685.000.000	Rp 685.000.000
	JUMLAH ALOKASI (5.5)		**Rp 684.402.223**	**Rp 685.000.000**	**Rp 685.000.000**	**Rp 685.000.000**
JUMLAH ALOKASI SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (5)			**Rp 1.584.402.223**	**Rp 1.592.000.000**	**Rp 1.599.000.000**	**Rp 1.606.000.000**
6.	**BIDANG SOSIAL**					
	6. 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti					
	6. 1. 1. Jumlah Penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk penyandang disabilitas	- 505 Orang	- 505 Orang	- 400 Orang	- 350 Orang	- 300 Orang
	X 100%					
	- Jumlah Penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	- 505 Orang	- 505 Orang	- 400 Orang	- 350 Orang	- 300 Orang

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	- OPD TERKAIT **- DINAS SOSIAL KOTA LANGSA** - Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Penyediaan Alat Bantu		Rp 75.000.000	Rp 76.000.000	Rp 77.000.000	Rp 78.000.000
	JUMLAH ALOKASI (6.1)		**Rp 75.000.000**	**Rp 76.000.000**	**Rp 77.000.000**	**Rp 78.000.000**
	6. 2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti **6. 2. 1. Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti** - Jumlah anak telantar / Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti X 100% **- OPD TERKAIT** **- DINAS SOSIAL KOTA LANGSA** - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	- 100,00% - 15 Orang / 15 Orang	- 100,00% - 15 Orang / 15 Orang Rp 30.000.000	- 100,00% - 15 Orang / 15 Orang Rp 31.000.000	- 100,00% - 15 Orang / 15 Orang Rp 32.000.000	- 100,00% - 15 Orang / 15 Orang Rp 33.000.000
	JUMLAH ALOKASI (6.2)		**Rp 30.000.000**	**Rp 31.000.000**	**Rp 32.000.000**	**Rp 33.000.000**
	6. 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti **6. 3. 1. Jumlah Penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti** - Jumlah Penduduk lanjut usia terlantar / Jumlah Penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti X 100% **- OPD TERKAIT** **- DINAS SOSIAL KOTA LANGSA** - Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang	- 100,00% - 551 Orang / 551 Orang	- 100,00% - 551 Orang / 551 Orang Rp 25.000.000 Rp 50.000.000	- 100,00% - 450 Orang / 450 Orang Rp 26.000.000 Rp 51.000.000	- 100,00% - 400 Orang / 400 Orang Rp 27.000.000 Rp 52.000.000	- 100,00% - 350 Orang / 350 Orang Rp 28.000.000 Rp 53.000.000
	JUMLAH ALOKASI (6.3)		**Rp 75.000.000**	**Rp 77.000.000**	**Rp 79.000.000**	**Rp 81.000.000**

NO	BIDANG/SPM/VARIABEL/OPD TERKAIT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF				
		TAHUN DASAR 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	3	4	5	6
	6. 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
	6. 4. 1. Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah gelandangan dan pengemis / Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti X 100%	- 97 Orang / - 97 Orang	- 97 Orang / - 97 Orang	- 90 Orang / - 90 Orang	- 80 Orang / - 80 Orang	- 70 Orang / - 70 Orang
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS SOSIAL KOTA LANGSA					
	- Program Rehabilitasi Sosial					
	- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rp 35.000.000	Rp 36.000.000	Rp 37.000.000	Rp 38.000.000
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Rp 35.000.000	Rp 36.000.000	Rp 37.000.000	Rp 38.000.000
	JUMLAH ALOKASI (6.4)		**Rp 70.000.000**	**Rp 72.000.000**	**Rp 74.000.000**	**Rp 76.000.000**
	6. 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana					
	6. 5. 1. Jumlah Penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%	- 100,00%
	- Jumlah Penduduk korban bencana / Jumlah Penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial X 100%	- 20.904 Orang / - 20.904 Orang	- 20.404 Orang / - 20.404 Orang	- 19.904 Orang / - 19.904 Orang	- 19.404 Orang / - 19.404 Orang	- 18.904 Orang / - 18.904 Orang
	- OPD TERKAIT					
	- DINAS SOSIAL KOTA LANGSA					
	- Program Penanganan Bencana					
	- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
	- Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		Rp 25.000.000	Rp 26.000.000	Rp 27.000.000	Rp 28.000.000
	JUMLAH ALOKASI (6.5)		**Rp 25.000.000**	**Rp 26.000.000**	**Rp 27.000.000**	**Rp 28.000.000**
	JUMLAH ALOKASI SPM BIDANG SOSIAL (6)		**Rp 275.000.000**	**Rp 282.000.000**	**Rp 289.000.000**	**Rp 296.000.000**
	JUMLAH TOTAL ALOKASI SPM		**Rp 64.770.838.655**	**Rp 69.309.455.000**	**Rp 73.929.455.000**	**Rp 79.583.307.685**

BAB VIII
KINERJA PEYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Indikator Kinerja Utama

Ukuran target keberhasilan pencapaian pembangunan Kota Langsa yang tertuang dalam RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi IKU (Indikator Kinerja Utama) Kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Kota Langsa

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1.	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	60	60	67	69	71	71
2.	Tingkat Kelestarian Budaya	Persen	60	60	70	80	90	90
3.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	3	3	3	3	3	3
4.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit/Objek	1	1	1	1	1	1
5.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit/Objek	1	1	1	1	1	1
6.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	1	1	1	1	1	1
7.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,68	15,73	15,78	15,83	15,88	15,88
8.	Angka Kelulusan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	100
9.	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,52	69,62	69,71	69,8	69,89	69,89
10.	Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan	Per 100.000 Kelahiran Hidup	250	200	175	150	125	125
11.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8	7	6	5	4	4

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
12.	Persentase Balita Gizi Buruk yang Ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
13.	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,21	4,34	4,38	4,47	4,53	4,53
14.	Tingkat Kemiskinan	Persen	10	9,5	9	8,5	8,5	8,5
15.	Indeks Gini	Indeks	0,338	0,335	0,334	0,333	0,332	0,332
16.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Rasio	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84	0,84
17.	Persentase Prasarana Transportasi Dalam Kondisi Baik	Persen	58	60	65	70	75	75
18.	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	74	79	84	89	94	94
19.	Persentase Infrastuktur Bangunan Gedung Pelayanan Publik Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	80	85	90	90
20.	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	95	96	97	98	99	99
21.	Persentase Pelayanan Akses Air Bersih	Persen	55	55	60	65	70	70
22.	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	60	60	61	62	63	63
23.	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	50	50	53	55	57	57
24.	Persentase Titik Rawan Banjir	Persen	45	45	40	35	30	30
25.	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	7,99	7,49	7,02	6,58	6,18	6,18
26.	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	4,2	7,84	7,18	5,13	8,05	8,05

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
27.	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Holtikulura	Persen	25	29	32	36	37	37
28.	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Palawija	Persen	30	32	35	38	41	41
29.	Persentase Pertumbuhan Produksi Padi	Persen	2,65	1,75	1,73	1,7	1,66	1,66
30.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	95	95	95	95	95	95
31.	Kontribusi Katagori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	Persen	2,87	3,02	3,2	3,38	3,58	3,58
32.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,5	1,47	1,44	1,38	1,35	1,35
33.	Nilai Investasi Daerah	Rp. Milyar	265	270	280	290	300	300
34.	Persentase Konflik Keamanan/Ketertiban yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100
35.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Persen	100	100	100	100	100	100
36.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100
37.	Persentase Penegakan Qanun	Persen	100	100	100	100	100	100
38.	Partisipasi Masyarakat Dalam Berdemokrasi, Berbangsa dan Bernegara	Gampong	66	66	66	66	66	66
39.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
40.	Persentase Korban Bencana yang di Evakuasi	Persen	100	100	100	100	100	100
41.	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100
42.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	77	77,8	77,9	78	78,1	78,1
43.	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Persen	50	50	55	60	65	65
44.	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	75	77,5	80	85	90	90
45.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67	68	68,5	69	69,5	69,5
46.	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	3	3	4	5	6	6
47.	Persentase Sampah yang Tertangani	Persen	80	81	82	83	84	84
48.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95	95,7	95,8	95,9	96	96
49.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	67	68	69	70	71	71
50.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
51.	Rasio Akseptor KB	Rasio	0,679	0,654	0,672	0,695	0,725	0,725
52.	Nilai LPPD	Nilai (1 = Rendah, 2 = Sedang, 3 = Tinggi)	2	2	2	2	2	2
53.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai (1=D, 2=C, 3=CC, 4=B, 5=BB, 6=A, 7=AA)	3	4	4	4	4	4
54.	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3
55.	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
56.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK (1=WTP, 2=WDP, 3=Tidak Wajar, 4=Menolak)	1	1	1	1	1	1
57.	Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa Mandiri	5	7	9	11	15	15

8.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi IKD (Indikator Kinerja Daerah) pada akhir periode, target capaian hingga tahun ke empat agenda perencanaan pembangunan Kota Langsa yang merupakan kondisi kinerja pada akhir periode RPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2023-2026 Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,21	4,34	4,38	4,47	4,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,50	77,60	77,72	77,84	77,90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
3	Laju Indeks Implisit PDRB	Persen	2,98	2,95	2,80	2,85	2,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
4	PDRB per Kapita ADHK	Juta Rupiah	21,54	22,08	22,65	23,24	23,86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
5	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Persen	10	9,5	9	8,5	8,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
6	Angka Melek Huruf	Persen	99,66	99,68	99,69	99,71	99,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
7	Angka Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	11,22	11,32	11,42	11,52	11,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
8	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,52	69,62	69,71	69,80	69,89	Dinas Kesehatan Kota Langsa
9	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Kesehatan Kota Langsa
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,59	68,14	68,69	69,24	69,79	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa/Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa, dan Badan Pusat Statistik
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,7	7,17	7,10	6,92	6,83	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa/Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa, dan Badan Pusat Statistik
12	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	Persen	17	16,9	16,4	16,1	15,6	Dinas Sosial Kota Langsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan,

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
								Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa, Badan Pusat Statistik
13	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	16,87	17,61	16,62	17,13	17,06	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa
14	Opini BPK	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa
15	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	80	85	90	95	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
16	Peranan Kategori Pertanian, Peternakan, Pemburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	Persen	8,36	8,34	8,32	8,29	8,26	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
17	Produksi Padi	Ton	9.268,20	9.430,80	9.593,40	9.756,00	9.918,60	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
18	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen	28,64	28,66	28,67	28,66	28,64	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Langsadan Badan Pusat Statistik
19	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	8,05	8,05	8,05	8,06	8,06	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Langsadan Badan Pusat Statistik

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
20	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	2,87	3,02	3,20	3,38	3,58	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
	Aspek Pelayanan Umum Pelayanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Pendidikan							
1	Persentase Anak Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	63,13	68,72	73,93	78,80	83,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
	Pendidikan Dasar							
2	Angka Partisipasi Kasar	Persen	106,5	106,2	106	105,8	105,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	Persen	96,19	96,5	96,6	96,7	96,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
4	Angka Partisipasi Murni	Persen	100	100	100,00	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
5	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	99,79	99,81	99,83	99,85	99,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
6	Angka Putus Sekolah	Persen	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
7	Angka Kelulusan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
8	Angka Melanjutkan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
	Fasilitas Pendidikan							
9	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	/10.000 murid	34	33	32	31	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
10	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar	/10.000 murid	10,27	10,50	11	12	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
11	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Pendidikan Dasar	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
	Pendidikan Menengah							
12	Angka Partisipasi Kasar	Persen	90,55	90,57	90,58	90,59	90,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
13	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
14	Angka Partisipasi Murni	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
15	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	99,71	99,75	99,78	99,78	99,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
16	Angka Putus Sekolah	Persen	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
17	Angka Kelulusan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
18	Angka Melanjutkan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
19	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	/10.000 murid	34	33	32	31	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
20	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	/10.000 murid	9,50	10	11	12	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
21	Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Menengah	Rasio	2,27	2,26	2,25	2,24	2,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
22	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Pendidikan Menengah	Persen	90,4	90,5	90,6	90,7	90,8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
23	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki	Persen	95,6	95,6	95,7	95,8	95,9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
24	Penduduk yanng Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	Persen	75	76,00	77,00	78,00	79,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
25	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
	Kesehatan							
26	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	AKB	8	7	6	5	4	Dinas Kesehatan Kota Langsa
27	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	AKN	8	8	7	7	7	Dinas Kesehatan Kota Langsa
28	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	AKI	295	236	206	177	147	Dinas Kesehatan Kota Langsa
29	Rasio Posyandu per Satuan Balita	/1.000 Balita	9	9	9	9	9	Dinas Kesehatan Kota Langsa
30	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	/1.000 Penduduk	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	Dinas Kesehatan Kota Langsa
31	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	/1.000 Penduduk	0,02	0,02	0,022	0,024	0,03	Dinas Kesehatan Kota Langsa
32	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	/1.000 Penduduk	0,99	0,86	0,95	0,96	1,06	Dinas Kesehatan Kota Langsa
33	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
34	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
35	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
36	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
37	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	Persen	95	95	95	95	95	Dinas Kesehatan Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
38	Non Polio FP Rate per 100.000 Penduduk	Persen	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan Kota Langsa
39	Cakupan Balita Pneumonia yanng ditangani	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
40	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC TBA	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
41	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
42	Angka Kejadian Malaria (per 100.000 Penduduk)	/100.000	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan Kota Langsa
43	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	Persen	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	Dinas Kesehatan Kota Langsa
44	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
45	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	89.2	91.2	93	95	97	Dinas Kesehatan Kota Langsa
46	Cakupan Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
47	Cakupan Pembantu Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
48	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	95.3	98.9	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
49	Cakupan Pelayanan Nifas	Persen	92	94	96	98	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
50	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
51	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
52	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan Kota Langsa
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Pekerjaan Umum							
53	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Rasio	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
54	Rasio Panjang Jalan per Satuan Penduduk	Km/1.000 Penduduk	3,44	3,39	3,34	3,29	3,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
55	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)	Persen	79,73	80,69	81,50	82,61	83,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
56	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Darinase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	Persen	1,89	1,98	2,08	2,19	2,30	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
57	Persentase Sepadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kakilima dan Bangunan Rumah Liar	Persen	3,51	3,30	3,10	2,80	2,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
58	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	66,97	71,97	76,97	81,97	86,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
59	Persentase Sepadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	Persen	18	16	15	12	10	Dinas Peperan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
60	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	80	82	83	84	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
61	Rasio Jaringan Irigasi per Luas Lahan Budidaya Pertanian	Rasio	0,9	0,91	0,91	0,92	0,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
62	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
	Penataan Ruang							
63	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	0,73	0,75	0,77	0,79	0,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
64	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	75	76	78	79	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
65	Rumah Layak Huni	Persen	85,01	85,30	85,50	85,80	86,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
66	Rasio Pemukiman Layak Huni	Rasio	0,78	0,83	0,88	0,93	0,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
67	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	11,64	9,64	7,64	5,64	3,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
68	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Persen	0	10	9	8,8	8,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
69	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa
70	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenraman, Keindahan)	Skala	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
71	Cakupan Pelayanan Bencana	Persen	86	86	86	88	88	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
72	Tingkat Waktu Tanggap (Responsive Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	68,2	63,6	63,6	45,5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
73	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa
	Sosial							
74	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	20	40	50	70	80	Dinas Sosial Kota Langsa
75	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Kota Langsa
76	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	10	30	40	45	50	Dinas Sosial Kota Langsa
77	Persentase Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	25	100	100	100	100	Dinas Sosial Kota Langsa
78	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Kota Langsa
	Ketenagakerjaan							
79	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	3,83	5,18	7,77	9,33	10,36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa/Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa, dan Badan Pusat Statistik
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
80	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	Persen	55	55	56	56	56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
81	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	Persen	20	20	20	30	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
82	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	45	45	44	44	44	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
83	Rasio KDRT per Rumah Tangga	Persen	0,01	0,05	0,047	0,041	0,039	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
84	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
85	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
86	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
87	Cakupan Penegakan Hukum dari tingkat Penyidik sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persen	80	80	80	80	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
88	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
89	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persen	50	50	50	50	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
90	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
91	Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	Rasio	95,6	95,6	95,7	95,8	95,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
	Pertanahan							
92	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	69	72	75	77	78	Dinas Pertanahan Kota Langsa
	Lingkungan Hidup							
93	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
94	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
95	Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
96	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	55	63,2	63,3	63,4	63,5	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
97	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Pelatihan	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
98	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
99	Timbunan Sampah yang Ditangani	Persen	80	81	82	83	84	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
100	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	Persen	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
101	Persentase Cakupan area Pelayanan	Persen	45	50	55	60	65	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
102	Operasionalisasi TPS/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	Nilai	80	81	82	83	84	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
103	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Langsa
104	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Daerah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Langsa
105	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Langsa
106	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Langsa
107	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Langsa
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
108	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	Persen	93,94	95,45	97,97	98,48	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
109	Rata-rata Junlah Kelompok Binaan PKK	Persen	30,56	60	65	70	75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
110	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
111	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
112	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
113	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	62,5	70	72	75	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
114	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,39	1,40	1,40	1,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
115	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	5,12	5,12	5,13	5,14	5,15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
116	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	Persen	42,22	42,50	42,50	43,00	45,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
117	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	30,43	30,45	32,50	33,00	34,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
118	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Lembaga	23	24	27	27	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
119	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	Anak	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
120	Ratio Akseptor KB	Rasio	0,679	0,654	0,672	0,695	0,725	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
121	Anka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	AKR	2,3	2,2	2,1	2	1,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
122	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun	Persen	12,4	12,3	12,2	12,1	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
123	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB tidak Terpenuhi (unmet need)	Persen	4,47	0,32	0,4	2,1	2,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
124	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	19,48	14,3	15	16	18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
125	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Persen	6,77	8,7	9,2	10,5	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
126	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	6,8	11,8	16,8	21,8	26,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
127	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	48,44	51,44	53,44	57,44	61,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
128	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	71,32	73,32	75,32	78,32	82,32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
129	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
130	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	5	10	15	20	25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
131	Cakupan PKB/PKLB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
132	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	Persen	20	22	25	28	31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
133	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
134	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Persen	3,31	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
135	Persentase Faskes Jejaringnya (diseluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standarisasi Pelayanan	Persen	100	60	65	70	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
136	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anka	Persen	3,29	8,29	13,29	18,29	23,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
137	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	Persen	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
	Perhubungan							
138	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	1200	1200	1200	1200	1200	Dinas Perhubungan Kota Langsa
139	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan Kota Langsa
140	Pemasangan Rambu-Rambu	Persen	90	92	94	96	98	Dinas Perhubungan Kota Langsa
141	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang/Barang Per Kendaraan Umum	20	20	20	20	20	Dinas Perhubungan Kota Langsa
	Komunikasi dan Informatika							
142	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan	Persen	50	70	75	80	90	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Langsa
143	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Langsa
144	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon	Persen	78	80	82	85	90	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Langsa
145	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	68	78	80	82	85	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Langsa
146	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	Persen	40	42	46	48	50	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Langsa
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
147	Persentase Koperasi Aktif	Persen	45	46	47	48	49	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Langsa
148	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	85	85,2	85,5	85,75	90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Langsa
	Kepemudaan dan Olah Raga							
149	Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	46,8	46,8	47	47,7	48	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
150	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	75	77,5	80	85	90	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
151	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	Persen	24	25	25	26	26	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
	Statistik							
152	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
153	Buku "Kota Dalam Angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
154	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
	Persandian							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
155	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Berkomunikasi Perangkat Daerah	Persen	65	65	65	65	65	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
	Kebudayaan							
156	Penyelenggaraan Festival Seni dan Kebudayaan	Event	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
	Perpustakaan							
157	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	10.000	11.500	13.000	14.500	16.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
158	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
159	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	/1.000 penduduk	0,012	0,013	0,015	0,015	0,015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
160	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul Buku	11.700	11.800	11.800	12.000	12.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
161	Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat	Persen	72,72	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
	Kearsipan							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
162	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	20	25	27	30	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
	Pelayanan Urusan Pilihan Pariwisata							
163	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2	2	3	3	3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kota Langsa
	Pertanian							

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
164	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	90	90	90	90	90	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
	Perdagangan							
165	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	80	81	82	83	84	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Langsa
	Perindustrian							
166	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	72	72,25	72,45	72,65	72,85	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kota Langsa
	Kelautan dan Perikanan							
167	Produksi Perikanan	Ton	85.496	91.896	98.351	104.827	111.310	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
168	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	109,12	108,11	111,9	110,21	110,23	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
	Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan							
169	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJP yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
170	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
171	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
172	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
173	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
174	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
	Keuangan							
175	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa
176	Persentase SILPA terhadap Pendapatan Daerah	Persen	3,77	2,54	2,25	2,97	3,11	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa
177	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah	Persen	3,63	2,31	1,75	2,52	2,53	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa
178	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	21,95	24,22	25,01	26,80	27,77	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa
179	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	25,05	25,13	24,77	28,37	26,13	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa
	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung							
180	Belanja Tidak Langsung	Persen	56,98	61,40	60,38	67,38	68,86	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa
181	Belanja Langsung	Persen	43,02	38,60	39,62	32,62	31,14	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
182	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Persen	0,26	0,34	0,32	0,36	0,38	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa
183	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa
	Kepagawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
184	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari	85	85	85	85	85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
185	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	50	50	60	70	80	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
186	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Peltihan	Persen	20	30	35	40	45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
187	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	32	32	32	32	32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
188	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	135	135	135	135	135	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
189	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	1.850	1.865	1.870	1.875	1.880	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
	Penelitian dan Pengembangan							
190	Persentase Implimentasi Rencana Kelitbangan	Persen	90	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
191	Persentase Pemenfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	90	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
192	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
193	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
	Pengawasan							
194	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	90	80	80	83	85	Inspektorat Kota Langsa
195	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	0,09	0,1	0,12	0,11	0,09	Inspektorat Kota Langsa
196	Jumlah Temuan BPK	Persen	15	14	13	12	11	Inspektorat Kota Langsa
	Sekretariat Dewan							
197	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPR Kota Langsa
198	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPR Kota Langsa

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET					INSTANSI
			2022	2023	2024	2025	2026	
199	Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA, dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPR Kota Langsa
	Aspek Daya Saing Daerah Kemampuan Ekonomi							
200	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	Juta	1,8	1,9	2	2,1	2,2	Bag. Ekonomi Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
201	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	Persen	60	62	64	66	68	Bag. Ekonomi Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik
202	Nilai Tukar Petani	Indeks	101,23	101,30	101,33	101,35	101,40	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
203	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	Persen	3,03	3,03	4,54	4,54	6,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
204	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Rasio per 10.000	14	15	15	14	14	Badan Pusat Statistik dan Polres Kota Langsa
205	Rasio Ketergantungan	Rasio	30	30	29	29	28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa Badan Pusat Statistik

BAB IX
PENUTUP

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Langsa Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun mendatang yang harus didukung dan menjadi rujukan oleh semua pemangku kepentingan khususnya penyelenggara Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Kecamatan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Langsa Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, untuk menjadi rujukan utama bagi Pejabat (Pj) Kepala Daerah yang mengisi kekosongan jabatan Walikota Langsa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Seluruh program prioritas yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Langsa Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah bersifat indikatif yang merupakan penjabaran dari RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026.

RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 ini juga merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang disusun setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota Langsa dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Langsa.

Disamping itu, RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 juga menguraikan Indikator Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Daerah yang merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen Laporan EPPD, LKIP dan LPPD Kota Langsa.

Selanjutnya Bappeda Kota Langsa sebagai perencana pembangunan daerah memiliki tanggungjawab mengkoordinasikan pencapaian kinerja beserta target dengan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, RPD Kota Langsa Tahun 2023-2026 merupakan pedoman transisi sebagai acuan sampai tersedianya Perda RPJMD hasil Pilkada serentak tahun 2024, maka jika terjadi kekosongan dokumen perencanaan dengan belum ditetapkannya RPJMD hasil pilkada serentak, dokumen ini masih dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 dan RKPD tahun 2026, sambil menunggu penetapan Perda RPJMD Kota Langsa Tahun 2025-2029.